



LAPORAN KINERJA

2022



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Padang, 28 Maret 2023


INSPEKTUR,
DELLIYARTI, SM, SE.Ak, CA, CFrA
Pembina Utama Madya
NIP. 196412311993032001

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Daftar Tabel	xiii
Daftar Grafik	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Dasar hukum	2
1.4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3
1.5. Isu Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	6
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	16
2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja	33
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	34
3.3. Capaian Kinerja Tahun 2022	38
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengalaman, Terampil dan Berdaya Saing	38
Misi 2 Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah	75
Misi 3 Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	120
Misi 4 Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital	159
Misi 5 Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata	208
Misi 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	223
Misi 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas	305
3.4. Realisasi Anggaran	355
BAB IV PENUTUP	359
LAMPIRAN	
1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Alhamdulillah robbil'alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 secara tepat waktu. Penyusunan LKjIP merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

LKjIP tahun 2022 memberikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yang tergambar dari pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran (46 indikator sasaran) sebagaimana sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKjIP tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 merupakan hasil kerja keras dari semua pihak terkait termasuk dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta. Pencapaian kinerja kedepannya akan diupayakan lebih optimal sehingga dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Semoga LKjIP ini, dapat memberikan informasi pencapaian kinerja tahun 2022 yang bermanfaat bagi *stakeholder*. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan LKjIP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Ikhtisar Eksekutif

LKjIP tahun 2022 memberikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yang tergambar dari pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran (46 indikator sasaran) sebagaimana sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran tersebut pada tahun 2022, diperoleh rata-rata capaian sebesar 112,82% termasuk berhasil dengan kategori “memuaskan”, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 3 tujuan dan 16 sasaran (57,58%) tercapai dengan kategori “memuaskan” dengan capaian (>100%);
- b. 3 tujuan dan 6 sasaran tercapai dengan kategori sangat baik (> 85-100%);
- c. 2 sasaran tercapai dengan kategori “baik” (>75 -85%);
- d. 1 sasaran tercapai dengan kategori cukup dan
- e. 1 tujuan dan 1 sasaran tercapai dengan kategori “kurang baik” yaitu sasaran “meningkatnya pertumbuhan investasi” menjadi sasaran dengan capaian terendah yaitu sebesar 13,17%.

Pencapaian 7 tujuan dan 26 Sasaran dimaksudkan untuk mencapai 7 Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Berikut ini akan diuraikan pencapaian masing-masing misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing

Pencapaian misi “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing” dilihat dari pencapaian 1

tujuan dengan 4 sasaran yang diukur melalui 6 indikator kinerja (1 indikator kinerja tujuan dan 5 indikator kinerja sasaran). Pencapaian misi 1 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,74	73,26	100,71
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1.1.1 Angka harapan hidup	69,8	69,9	100,14
1.2	Menurunnya Prevalensi Stunting	1.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	18,44	25,2	63,34
1.3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah	9,18	9,18	100,00
		1.3.2 Harapan lama sekolah	14,05	14,1	100,36
1.4	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke atas	49,7	50,23	101,07
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Misi 1					93,09

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja adalah 93,09% termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Misi 2 Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah

Pencapaian misi “Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dilihat dari pencapaian 1 tujuan dengan 3 sasaran yang diukur melalui 7 indikator kinerja (1 indikator kinerja tujuan dan 6 indikator kinerja sasaran). Pencapaian misi 2 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,1	52,71	89,19
1.1	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,8	58,13	92,56
1.2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	14,14	108,77
1.3	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga	59,30	56,12	94,64
		1.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,11	94,34	100,24
		1.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,12	65,12	110,15
		1.3.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,85	61,98	94,12
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Misi 2					97,58

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 2 yang diukur melalui pencapaian 7 indikator kinerja adalah 97,58% termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Misi 3 Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Pencapaian misi “Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan” dilihat dari pencapaian 1 tujuan dengan 3 sasaran yang diukur melalui 9 indikator kinerja (1 indikator kinerja tujuan dan 8 indikator kinerja sasaran). Pencapaian misi 3 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	5	6,53	130,60
1.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	100,99	110,37	109,29
		1.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	103,47	108,85	105,20
		1.1.3 Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	47,175	50,465580	106,98
		1.1.4 Pendapatan Nelayan	40,795	41,661646	102,12
		1.1.5 Pendapan Peternak	47,872	49,678125	103,77
		1.1.6 Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	5,00	9,94	198,80
1.2	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	79,13	79,45	100,40
1.3	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5,00	11,16	223,20
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Misi 3					143,81

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 3 yang diukur melalui pencapaian 9 indikator kinerja adalah 143,81% termasuk kategori keberhasilan **memuaskan**.

Misi 4 Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital

Pencapaian misi “Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital” dilihat dari pencapaian 1 tujuan dengan 6 sasaran yang diukur melalui 9 indikator kinerja (2 indikator kinerja tujuan dan 7 indikator kinerja sasaran). Pencapaian misi 4 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,25	16,5	101,54
		1.2 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,75	8,54	97,60
1.1	Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1,1	5,6	509,09
1.2	Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	368	289	78,53
1.3	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera	1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,14	5,04	235,51
		1.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	2,40	1,60	66,67
1.4	Terciptanya 100.000 Entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	112.594	115.149	102,27
1.5	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase peningkatan Investasi di Provinsi	6,00	0,79	13,17
1.6	Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	6,54	6,68	102,14
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Misi 4					150,84

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 yang diukur melalui pencapaian 9 indikator kinerja adalah 150,84% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Misi 5 Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata

Pencapaian misi “Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata” dilihat dari pencapaian 1 tujuan dengan 2 sasaran yang diukur melalui 3 indikator kinerja (1 indikator kinerja tujuan dan 2 indikator kinerja sasaran). Pencapaian misi 5 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12,62	4,31	34,11
1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,24	1,35	108,87
1.2	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	6,02	7,26	120,60
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Misi 5					87,86

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja adalah 87,86% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Misi 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Pencapaian misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” dilihat dari pencapaian 1 tujuan dengan 5 sasaran yang diukur melalui 12 indikator kinerja (1 indikator kinerja tujuan dan 11 indikator kinerja sasaran). Pencapaian misi 6 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,702	0,654	93,16
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1.1.1 Rasio Konektifitas	0,668	0,662	99,10
		1.1.2 Kemantapan Jalan	75,00	71,40	95,20
1.2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0,64	103,23
1.3	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,43	74,98	96,84

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.4	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	1.1.1 Akses Air Minum	82,00	85,23	103,94
		1.1.2 Akses Sanitasi Layak	82,00	69,27	84,48
		1.1.3 Persentase Bangunan Strategis Terbangun	40,22	6	15
		1.1.4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi	70,36	71,06	100,99
		1.1.5 Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	53,78	58,73	109,20
		1.1.6 Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari Daya Rusak Air	66,51	66,9	100,59
1.5	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	86,00	86,00	100,00
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Misi 6					96,01

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 6 yang diukur melalui pencapaian 12 indikator kinerja adalah 96,01% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Misi 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

Pencapaian misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas” dilihat dari pencapaian 1 tujuan dengan 3 sasaran yang diukur melalui 8 indikator kinerja (1 indikator kinerja tujuan dan 7 indikator kinerja sasaran). Pencapaian misi 7 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	69	69,78	101,87
1.1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	78	77,77	99,71
		1.1.2 Nilai EPPD	3,0010	3,0155	100,48
		1.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00
		1.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	37,84	46,50	122,89
1.2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1.1.1 Indeks SPBE	3,20	3,18	99,38
		1.1.2 Indeks Profesionalitas ASN	74,00	49,31	66,64
1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	85,00	90,02	105,91
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Misi 7					99,14

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 7 yang diukur melalui pencapaian 8 indikator kinerja adalah 99,14% termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2. 2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	20
Tabel 3. 1	Hasil Pengukuran Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	34
Tabel 3. 2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1.1	39
Tabel 3. 3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.1	45
Tabel 3. 4	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.1.....	50
Tabel 3. 5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.2	51
Tabel 3. 6	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.2.....	57
Tabel 3. 7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.3	58
Tabel 3. 8	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.3.....	69
Tabel 3. 9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.4	70
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.4.....	73
Tabel 3. 11	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1	76
Tabel 3. 12	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Dimensi Pembentuk IPK Tahun 2018-2021.....	77
Tabel 3. 13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.1	81
Tabel 3. 14	Rincian capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2021	82
Tabel 3. 15	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.1.....	88
Tabel 3. 16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.2	90
Tabel 3. 17	IPLM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	91
Tabel 3. 18	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.2.....	96
Tabel 3. 19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.3	97
Tabel 3. 20	iBangga Provinsi Sumatera Barat dan dimensi pembangunannya Tahun 2021 dan 2022	99
Tabel 3. 21	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung indikator Indeks Pembangunan Keluarga.....	103
Tabel 3. 22	Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sumatera Barat	104
Tabel 3. 23	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021.....	105
Tabel 3. 24	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021.....	109
Tabel 3. 25	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	114

Tabel 3. 26	Klaster Pembangun Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2020 dan 2021	116
Tabel 3. 27	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Indeks Perlindungan Anak.....	119
Tabel 3. 28	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1	121
Tabel 3. 29	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1	123
Tabel 3. 30	Rincian Pendapatan Pembudidaya Ikan Tahun 2022.....	132
Tabel 3. 31	Bantuan Sarana Peningkatan Pendapatan Nelayan Tahun 2022	138
Tabel 3. 32	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.1.....	146
Tabel 3. 33	Capaian Sasaran 3.1.2	148
Tabel 3. 34	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota Tahun 2022	149
Tabel 3. 35	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.2.....	153
Tabel 3. 36	Capaian Sasaran 3.1.3	154
Tabel 3. 37	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.3.....	157
Tabel 3. 38	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4.1	160
Tabel 3. 39	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.1	171
Tabel 3. 40	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.1.....	175
Tabel 3. 41	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.2	177
Tabel 3. 42	Rincian 289 Sentra Industri Kecil dan Menengah.....	177
Tabel 3. 43	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.2.....	181
Tabel 3. 44	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.3	182
Tabel 3. 45	Rincian Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil 19 Kabupaten/Kota tahun 2021-2022	186
Tabel 3. 46	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.3.....	189
Tabel 3. 47	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.4	191
Tabel 3. 48	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.4.....	195
Tabel 3. 49	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.5	196
Tabel 3. 50	Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2022 berdasarkan sektor usaha	197
Tabel 3. 51	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.5.....	203
Tabel 3. 52	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.6	205
Tabel 3. 53	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5.1	209
Tabel 3. 54	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.1.1	212
Tabel 3. 55	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.1.....	216
Tabel 3. 56	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.1.2	218
Tabel 3. 57	Rincian Perhitungan Kontribusi Ekraf pada PDRB	219
Tabel 3. 58	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.2.....	222
Tabel 3. 59	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6.1	224

Tabel 3. 60	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.1	227
Tabel 3. 61	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Peningkatan konektifitas wilayah	232
Tabel 3. 62	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Per Ruas Tahun 2022	235
Tabel 3. 63	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Kemantapan Jalan	243
Tabel 3. 64	Indikator untuk Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah	244
Tabel 3. 65	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.2	249
Tabel 3. 66	Tabel Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah	250
Tabel 3. 67	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.2.....	253
Tabel 3. 68	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.3.	256
Tabel 3. 69	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	256
Tabel 3. 70	Kategori dan Angka Rentang IPA	257
Tabel 3. 71	Kategori Indeks Kualitas Air	257
Tabel 3. 72	Jumlah Titik, Nilai Indeks per Mutu dan IKA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	258
Tabel 3. 73	Sumber Data Pemantauan Kualitas Udara Ambien untuk Perhitungan IKU Tahun 2022.....	259
Tabel 3. 74	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lahan pada Aplikasi IKLH	262
Tabel 3. 75	Daftar parameter kunci untuk perhitungan IKAL	263
Tabel 3. 76	Besaran bobot tiap parameter (Wi)	263
Tabel 3. 77	Kategori Indeks Kualitas Air Laut	264
Tabel 3. 78	Sumber Data Pemantauan Kualitas Air untuk Perhitungan IKAL Tahun 2022.....	264
Tabel 3. 79	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.3.....	270
Tabel 3. 80	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.4	272
Tabel 3. 81	Rincian Rehabilitasi Dan Perbaikan Terhadap Saluran Irigasi	288
Tabel 3. 82	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.4.....	297
Tabel 3. 83	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.5	299
Tabel 3. 84	Program RPJMD yang sesuai dengan RTRW	300
Tabel 3. 85	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.5.....	304
Tabel 3. 86	Kategori tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	306
Tabel 3. 87	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7.1	306
Tabel 3. 88	Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	307
Tabel 3. 89	Rincian Hasil Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	308
Tabel 3. 90	Capaian Indikator Sasaran 7.1.1	313
Tabel 3. 91	Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2022	315
Tabel 3. 92	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2022	316

Tabel 3. 93	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.1.....	335
Tabel 3. 94	Capaian Indikator Sasaran 7.1.2	336
Tabel 3. 95	Rincian Penilaian Indeks SPBE	338
Tabel 3. 96	Rincian Indeks SPBE Kabupaten/Kota tahun 2022	339
Tabel 3. 97	Perhitungan IP ASN tahun 2021	344
Tabel 3. 98	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.2.....	347
Tabel 3. 99	Capaian Indikator Sasaran 7.1.3	349
Tabel 3. 100	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah	350
Tabel 3. 101	Predikat survei kepuasan Masyarakat	350
Tabel 3. 102	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.3.....	354
Tabel 3. 103	Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 26 sasaran tahun 2022	355

Daftar Grafik

Grafik 1	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	5
Grafik 2	Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026	18
Grafik 3	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator IPM 2021-2022	40
Grafik 4	Perkembangan IPM dari tahun 2018-2022	41
Grafik 5	Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	43
Grafik 6	Angka Harapan Hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2022	46
Grafik 7	Perbandingan capaian dan realisasi angka harapan hidup tahun 2021-2022	46
Grafik 8	Perkembangan Angka Harapan Hidup dari tahun 2018-2022	47
Grafik 9	Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	49
Grafik 10	Prevalensi Stunting 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2022	52
Grafik 11	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Prevalensi Stunting 2021-2022	53
Grafik 12	Perkembangan Prevalensi Stunting Sumatera Barat dari tahun 2018-2022	54
Grafik 13	Perbandingan Prevalensi Stunting Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022	56
Grafik 14	Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	60
Grafik 15	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator RLS 2021-2022	61
Grafik 16	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Sumatera Barat dari tahun 2018-2022	61
Grafik 17	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	62
Grafik 18	Harapan Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	64
Grafik 19	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator HLS 2021-2022	64
Grafik 20	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2018-2022	65
Grafik 21	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	66
Grafik 22	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 2021-2022	71
Grafik 23	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator IPK 2021-2022	77
Grafik 24	Perkembangan IPK Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2018-2021	78
Grafik 25	Perbandingan IPK Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	79
Grafik 26	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya 2021-2022	83
Grafik 27	Indeks Ketahanan Sosial Budaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021	84
Grafik 28	Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	86

Grafik 29	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator IPLM 2021-2022	92
Grafik 30	Perbandingan Nilai IPLM Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2022	94
Grafik 31	Perbandingan Nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	95
Grafik 32	Perbandingan iBangga Provinsi di Pulau Sumatera dengan Nasional	101
Grafik 33	Perkembangan IPG Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2017-2021	106
Grafik 34	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi di Indonesia	106
Grafik 35	Indeks Pembangunan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.....	112
Grafik 36	Indeks Pembangunan Gender (IDG) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021	112
Grafik 37	Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2021	117
Grafik 38	Perkembangan NTP tahun 2022	125
Grafik 39	Rincian NTP Berdasarkan Subsektor	126
Grafik 40	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator NTP Tahun 2021-2022	127
Grafik 41	Perkembangan NTP tahun 2020-2022	127
Grafik 42	NTUP berdasarkan Subsektor Komoditi Tahun 2022.....	129
Grafik 43	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator NTUP Tahun 2021-2022	130
Grafik 44	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator pendapatan pembudidaya ikan Tahun 2021-2022	133
Grafik 45	Perkembangan pendapatan pembudidaya ikan tahun 2018-2022	133
Grafik 46	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator pendapatan nelayan Tahun 2021-2022	137
Grafik 47	Perkembangan pendapatan nelayan tahun 2018-2022	137
Grafik 48	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator pendapatan peternak Tahun 2021-2022	141
Grafik 49	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura Tahun 2021-2022.....	143
Grafik 50	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator IKP Tahun 2021-2022	150
Grafik 51	Perkembangan IKP dari tahun 2019-2022	150
Grafik 52	Indeks Ketahanan Pangan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022.....	152
Grafik 53	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator kontribusi sektor perdagangan 2021-2022	162
Grafik 54	kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2018-2022	162
Grafik 55	Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	164
Grafik 56	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2021-2022.....	167
Grafik 57	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2018-2022	167

Grafik 58	Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	169
Grafik 59	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan 2021-2022	172
Grafik 60	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan tahun 2018-2022	172
Grafik 61	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	174
Grafik 62	Perbandingan Capaian dan Realisasi jumlah sentra industri kecil dan menengah 2021-2022	178
Grafik 63	Perkembangan jumlah sentra industri kecil dan menengah	179
Grafik 64	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi 2021-2022.....	183
Grafik 65	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Jumlah <i>entrepreneur</i> baru tercipta 2021-2022.....	192
Grafik 66	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator persentase peningkatan investasi di Provinsi 2021-2022.....	199
Grafik 67	Pertumbuhan Investasi Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	199
Grafik 68	Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Regional Sumatera Tahun 2022	200
Grafik 69	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator kontribusi ekonomi digital 2021-2022	206
Grafik 70	Perkembangan Kontribusi Ekonomi Digital	206
Grafik 71	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB 2021-2022.....	213
Grafik 72	Perkembangan Kontribusi Pariwisata pada PDRB	214
Grafik 73	Perbandingan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	215
Grafik 74	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Persentase kontribusi ekraf pada PDRB 2021-2022.....	220
Grafik 75	Perkembangan Kontribusi Pariwisata pada PDRB	220
Grafik 76	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Rasio Konektifitas 2021-2022.....	229
Grafik 77	Perbandingan rasio konektifitas Sumatera Barat dengan Nasional	231
Grafik 78	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Kemantapan Jalan 2021-2022	239
Grafik 79	Perkembangan Kemantapan Jalan tahun 2018-2022.....	239
Grafik 80	Perbandingan kemantapan jalan Provinsi dengan Nasional	242
Grafik 81	Perbandingan IKLH Provinsi dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	266
Grafik 82	Akses terhadap air minum layak menurut Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022..	274
Grafik 83	Perbandingan Capaian dan Realisasi Akses Air Minum 2021-2022.....	274
Grafik 84	Akses Air Minum tahun 2018-202.....	275
Grafik 85	Perbandingan Akses Air Minum Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	276
Grafik 86	Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	279

Grafik 87	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator akses sanitasi layak 2021-2022	279
Grafik 88	Akses Sanitasi Layak tahun 2018-2022	280
Grafik 89	Perbandingan Akses Sanitasi Layak Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	281
Grafik 90	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi 2021-2022	286
Grafik 91	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air 2021-2022.....	293
Grafik 92	Perkembangan kapasitas tampungan sumber air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022.....	293
Grafik 93	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air 2021-2022.....	295
Grafik 94	Perkembangan luas kawasan yang teramankan dari daya rusak air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022	296
Grafik 95	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi 2021-2022.....	302
Grafik 96	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi 2021-2022	309
Grafik 97	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 ...	310
Grafik 98	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2021-2022	317
Grafik 99	Perkembangan nilai evaluasi SAKIP tahun 2018-2022.....	317
Grafik 100	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Tahun 2021-2022.....	332
Grafik 101	Perkembangan Kontribusi PAD tahun 2018-2022	333
Grafik 102	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks SPBE Tahun 2021-2022	339
Grafik 103	Indeks SPBE Sumatera Barat tahun 2018-2022	340
Grafik 104	IP ASN Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021	345
Grafik 105	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks persepsi kualitas pelayanan publik tahun 2021-2022	351
Grafik 106	Perkembangan rata-rata SKM dan OPD yang melaksanakan survei tahun 2017-2022	352



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Laporan ini merupakan laporan tahun pertama RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Laporan ini menginformasikan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menggunakan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dimaksudkan untuk mendukung implementasi SAKIP secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* terkait pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat disertai dengan evaluasi dan analisa upaya yang telah dilakukan, hambatan/kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja tersebut yang akan dijadikan dasar perbaikan di masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang.
- b. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Provinsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Undang-undang ini merupakan landasan legal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah yang untuk Provinsi disebut Gubernur dan perangkat daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat 2, Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

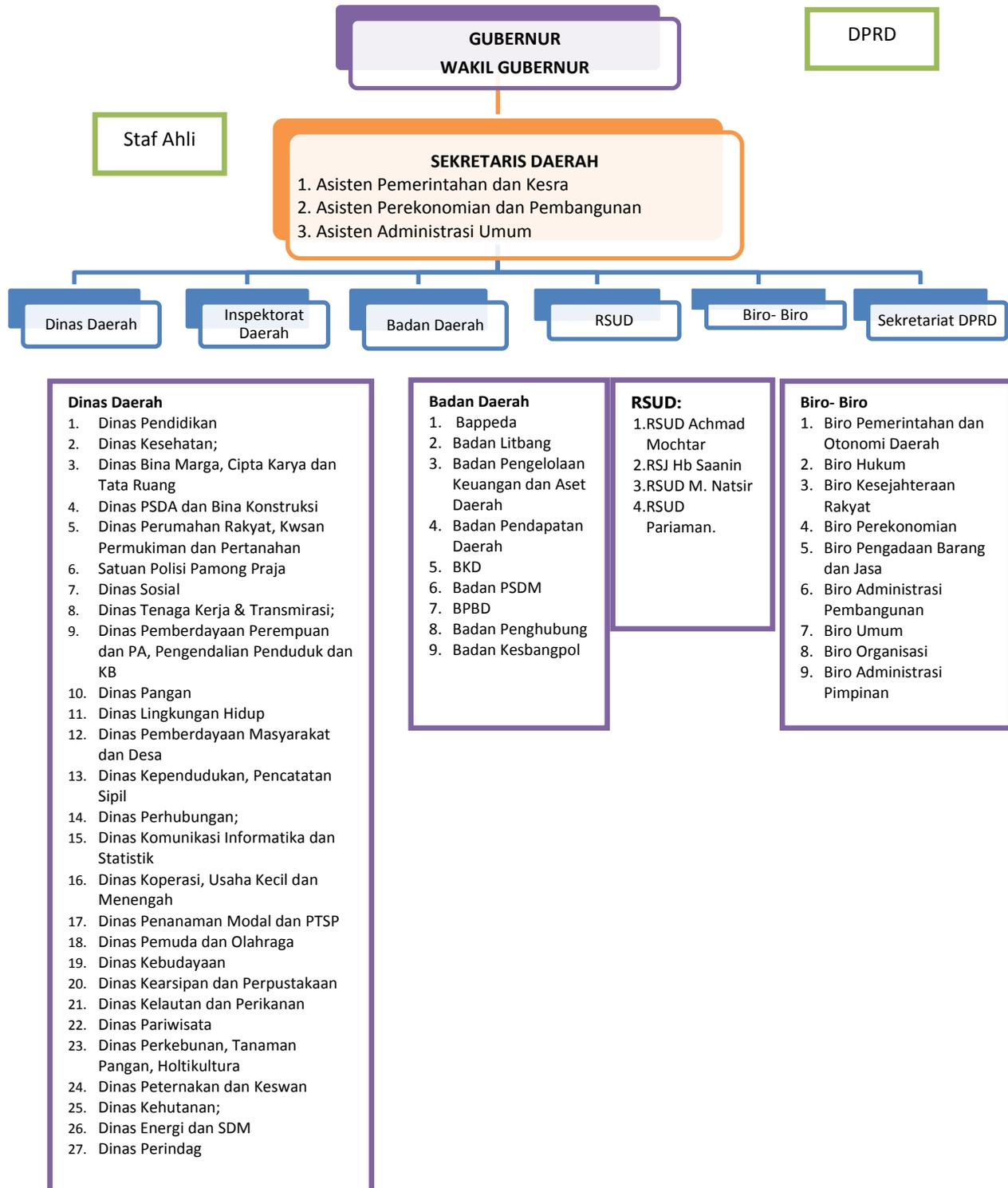
- 
- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.
 - c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBDP, perubahan APBDP, pertanggungjawaban pelaksanaan APBDP, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu dalam pasal 91 ayat 3 diuraikan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membatalkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota.
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
- d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini:

Grafik 1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.5. Isu Strategis Provinsi Sumatera Barat

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat meliputi:

1. Pembangunan Manusia

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pembangunan manusia, sejumlah isu-isu strategis pada bidang kesehatan dan pendidikan yaitu:

- a. Pandemi *COVID-19* yang belum mereda mengancam kondisi kesehatan dan risiko kematian bagi penduduk menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi Sumatera Barat dalam melakukan *test, tracing dan treatment* (pengujian, pelacakan, dan penyembuhan).
- b. Relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Barat memperlihatkan perlunya peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak, remaja, pemuda dan lanjut usia, perlindungan dan penanganan wabah penyakit menular atau tidak menular, penerapan pola hidup bersih dan sehat dan kesehatan lingkungan.
- c. Permasalahan gizi yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan stroke.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru), peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.

2. Pembangunan Kebudayaan

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpola dengan sebuah filosofi sosial yaitu *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Sebuah tatanan masyarakat yang mampu memadukan antara adat budaya dengan nilai-nilai agama. Dalam sektor kepemimpinan, nilai ABS SBK tercermin dalam satu ungkapan *Tungku Tigo Sajarangan*, model kepemimpinan ini terdiri dari penghulu (*niniak mamak*), alim ulama, dan *cadiak pandai*. Nilai-nilai ABS SBK dalam tatanan kehidupan sehari-hari terlihat dari perilaku dan tutur sapa ketika berinteraksi secara individu maupun secara sosial. Cepatnya perubahan dalam bidang teknologi informasi menyebabkan nilai-nilai di atas dari waktu-ke waktu tergerus oleh budaya asing sehingga generasi muda Sumatera Barat kurang mengetahui dan memahami nilai-nilai adat ABS SBK. Ada beberapa isu dalam pengimplementasian ABS SBK yaitu:

- a. Perlunya peta jalan *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS SBK), peta jalan ini penting untuk dirumuskan agar pelaksanaan ABS SBK secara bertahap bisa diimplementasikan serta adanya keberlanjutan program antar satu pemimpin dengan pemimpin berikutnya.
- b. Pengimplementasian ABS SBK sebagai pelajaran Muatan Kearifan Lokal yang sinergis antara Dikdas dan Dikmen. Pewarisan budaya pada usia dini penting dilakukan agar generasi Minangkabau mengetahui akar historis dan identitas kebudayaannya.
- c. Penguatan limbago adat berupa pelatihan terhadap pemangku adat sebagai sebuah upaya agar mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif tentang ABS SBK.
- d. Integrasi falsafah ABS SBK dalam proses pendidikan formal sehingga generasi muda milenial minang kurang memahami falsafah ABS SBK sehingga belum menggambarkan nilai ABS SBK.
- e. Perlunya penguatan pembangunan keluarga terutama dalam menghadapi perubahan paradigma dalam membangun ketahanan keluarga terutama

pada Generasi milenial dan generasi Z serta semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan ekonomi.

3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis.

- a. Gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai tukar petani.
- b. Pembangunan sektor pertanian Sumatera Barat berhadapan pula dengan alih fungsi lahan menjadi non pertanian, baik untuk perumahan maupun komersial.
- c. Masih banyaknya irigasi yang rusak sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perbaikan, termasuk pula anggaran untuk perawatan dan operasional sehingga dapat berfungsi optimal.
- d. Sentra-sentra produksi pertanian belum dikelola dengan optimal dan secara jumlah masih belum mencukupi.
- e. Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama.
- f. Isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yaitu: (1) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (2) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian berupa buah-buahan, sayuran, tanaman obat serta perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (3) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan.

- g. Sektor kelautan dan perikanan dihadapkan pada terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap terutama pada pelabuhan perikanan. Pengolahan hasil perikanan yang telah ada masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai bentuk produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
- h. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor kelautan dan perikanan diantaranya: antisipasi terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu, pencegahan terhadap kerusakan kawasan pesisir dan laut, pencemaran perairan umum seperti pada Danau Maninjau, perkembangan usaha tambak udang vaname yang cukup cepat tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah dan sempadan pantai.
- i. Ancaman alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertambangan dan galian, bahkan penebangan ilegal. Pada saat bersamaan, masyarakat miskin yang bermukim di sekitar hutan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan penghidupan harus diarahkan dengan mengembangkan perhutanan sosial.
- j. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu ditingkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pangan lokal yang beragam untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pendapatan kelompok pengolahan pangan lokal dan tuntutan masyarakat terhadap pangan segar yang sehat dan aman untuk dikonsumsi cukup tinggi.

4. Berkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Sumatera Barat berhadapan dengan tren tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan elektronik melalui berbagai aplikasi belanja *daring* dengan berbagai strategi

promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Sumatera Barat. Pada saat bersamaan juga dapat menjadi peluang bila dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk lokal.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan milenial merupakan isu penting untuk menumbuhkan dan mencetak memfasilitasi *startup*, wirausahawan milenial, *women entrepreneur* dalam berbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Untuk itu, kebijakan untuk memfasilitasi kepada akses pengetahuan bersamaan, akses permodalan, serta pengembangan kolaborasi dapat menjadikan wirausahawan milenial ini menjadi pilar perekonomian di masa-masa mendatang.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kemitraan strategis di tingkat regional, perlu dilakukan kerjasama untuk mendorong ekonomi wilayah melalui kerjasama regional. Kerjasama diarahkan untuk hilirisasi industri agrikultur, pariwisata dan perikanan untuk menciptakan produk agrikultur dan industri proses yang bernilai tambah. Salah satu kerjasama regional yang mempunyai nilai strategis adalah Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang meliputi kerjasama negara Indonesia (Provinsi di Pulau Sumatera), Malaysia dan Thailand.

5. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan bagi pembangunan daerah, beberapa isu strategis yang perlu ditindak lanjuti seperti:

- a. Konsistensi penjabaran dan implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 - 2025
- b. Sinergi antara Pusat - Provinsi - Kabupaten dan *stakeholder* terkait dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. Pengembangan pariwisata berkualitas dan tematik sesuai dengan dinamika kepariwisataan *new normal*.

- d. Efektifitas promosi dengan dukungan SDM dan produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

6. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas

Pengembangan infrastruktur dan pengembangan konektivitas Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan berhadapan dengan sejumlah isu strategis yaitu:

- a. Penuntasan jalan tol dalam membangun koneksi Sumatera Barat ke jaringan tol Trans Sumatera.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan, akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan agar dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik dan meningkatkan produktivitas serta daya saing hasil pertanian.
- c. Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus menggerakkan sektor perekonomian.
- d. Penuntasan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi seperti Gedung Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan serta penuntasan bangunan evakuasi sementara (shelter) pada daerah kabupaten /kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, antara lain; Shelter Maligi (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter Sasak Ranah Pasisia (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter MTSs Darul Hikmah Sikilang (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter SDN No. 12 Ulakan Tapakis (Kabupaten Padang Pariaman).
- e. Konektivitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi.
- f. Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas.
- g. Penambahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan khususnya pengembangan pembangunan TPA regional serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat dikarenakan peningkatan produksi timbulan sampah.

- h. Penyediaan tenaga listrik untuk daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan serta kelompok masyarakat tidak mampu.
- i. Pengembangan/pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (SPAM Regional dan IPLT Regional).
- j. Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis.

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi sektor publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Permasalahan yang harus menjadi perhatian terkait dengan implementasi reformasi birokrasi antara lain proses deregulasi kebijakan yang belum berjalan efektif, penyederhanaan birokrasi, penyusunan peta proses bisnis menyeluruh dan efektif, belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, belum optimalnya implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan fungsi pengawasan yang masih belum optimal.

Terkait dengan aparatur, permasalahan utama yang harus dituntaskan penyelesaiannya dalam rangka optimalisasi penerapan manajemen ASN adalah dalam hal tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai. Selain itu dengan pola pemberian TPP yang berlaku saat ini, dimana dilakukan penyeragaman penerimaan sesuai dengan tingkatan struktural, mengakibatkan munculkan jurang ketimpangan antara ASN yang memiliki beban kerja yang

tinggi dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang rumit dengan ASN yang memiliki beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang cenderung biasa saja.

Dalam hal pelayanan publik, harapan masyarakat adalah memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang bermutu dan berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat yang dapat diperbaiki secara terus menerus, dan pelayanan publik serta birokrasi akan menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat khususnya dalam tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik serta belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan dan investasi. Tata kelola pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam perkembangan akan berkonsekuensi untuk memenuhi kebutuhan dalam transformasi digitalisasi dan otomatisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi yang lebih baik.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan:

- a. Metodologi Pengukuran Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud.

d. **Realisasi Anggaran**

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

Bab IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

Lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. *Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran*

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional.

Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi, Menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi.

Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat.

Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Untuk mencapai visi “**Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**”, telah ditetapkan 7 Misi. Uraian visi dan misi sebagaimana digambarkan pada grafik 2 berikut ini:

Grafik 2 Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026



Sumber data: RPJMD Sumbar 2021-2026

Untuk mencapai 7 Misi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 tujuan dengan 26 sasaran. Untuk keselarasan, perumusan tujuan dan sasaran sudah menggunakan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang tergambar pada pohon kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan					
No	MISI		TUJUAN		SASARAN
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	1.1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				1.1.2	Menurunnya prevalensi stunting
				1.1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan
				1.1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adaik	2.1	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	2.1.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
				2.1.2	Meningkatnya Budaya Literasi

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
	Basandi Syara', syara' basandi kitabullah		2.1.3 Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3.1 Meningkatkan kesejahteraan petani	3.1.1 Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan) 3.1.2 Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan 3.1.3 Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	4.1 Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	4.1.1 Sumatera barat sebagai pusat perdagangan 4.1.2 Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah 4.1.3 Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera 4.1.4 Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor 4.1.5 Meningkatnya pertumbuhan investasi 4.1.6 Meningkatnya peran ekonomi digital
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	5.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	5.1.1 Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat 5.1.2 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	6.1 Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	6.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi 6.1.2 Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 6.1.3 Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas 6.1.4 Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian 6.1.5 Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	7.1 Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	7.1.1 Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel 7.1.2 Meningkatnya kapabilitas birokrasi 7.1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada bulan April 2022. Pada dokumen tersebut, Gubernur Sumatera Barat memperjanjikan pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja tujuan dan 46 indikator kinerja sasaran. APBDP awal yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.6.204.281.123.951,-. Sementara itu, sepanjang tahun 2022, terjadi perubahan anggaran pada APBDP P menjadi 6.639.308.547.776,-. Berikut ini diuraikan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
MISI 1				
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, BERPENGETAHUAN, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING				
1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	72,74	Lintas PD
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69,8	D. Kesehatan RSUD
1.2	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting	18,44	D. Kesehatan RSUD
1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah	9,18	D. Pendidikan
		1.3.2 Harapan Lama Sekolah	14,05	D. Pendidikan
1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	49,7	D. Pendidikan D. Nakertrans

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
MISI 2				
MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAIK BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH				
2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,1	Lintas PD
2.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,8	B. Kesbangpol Satpol PP
2.2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	D. Kearsipan & Perpustakaan
2.3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga	59,30	D. P3AP2KB
		2.3.2 Indeks Pembangunan Gender	94,11	
		2.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender	59,12	
		2.3.4 Indeks Perlindungan Anak	65,85	

MISI 3				
MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN				
3	Meningkatkan kesejahteraan petani	Persentase peningkatan pendapatan petani	5	Lintas PD Lingkup Pertanian
3.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	3.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	100,99	Lintas PD Lingkup Pertanian
		3.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani	103,47	
		3.1.3 Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	47,175	D. Kelautan Perikanan
		3.1.4 Pendapatan Nelayan	40,795	
		3.1.5 Pendapatan Peternak	47,872	D. Peternakan dan Keswan
		3.1.6 Persentase peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura	5	D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	79,13	D. Pangan
3.3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5	D. Kehutanan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
----	--------------------------	-------------------	--------	------------------

MISI 4

MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL

4	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,25	D. Perindustrian dan Perdagangan
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,75	
4.1	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1,1	D. Perindustrian dan Perdagangan
4.2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	368	
4.3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	4.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,14	D. Koperasi dan UKM
		4.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	2,4	
4.4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	112.594	Lintas PD
4.5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan investasi di Provinsi	6	D. Penanaman Modal PTSP
4.6	Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	6,54	Lintas PD

MISI 5

MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN

5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif	12,62	D. Pariwisata
5.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,24	D. Pariwisata
5.2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	6,02	D. Pariwisata

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
MISI 6				
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN				
6	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,702	Lintas OPD
6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	6.1.1 Rasio Konektifitas	0,668	D. Perhubungan
		6.1.2 Kemantapan Jalan	75	D. Bina Marga CKTR
6.2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,62	BPBD
6.3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,43	D. Lingkungan Hidup
6.4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	6.4.1 Akses Air Minum	82	D. Bina Marga CKTR
		6.4.2 Akses Sanitasi Layak	82	
		6.4.3 Persentase bangunan strategis terbangun	40,22	
		6.4.4 Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,36	D. Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		6.4.5 Persentase volume tampungan sumber-sumber air	53,78	
		6.4.6 Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	66,51	
6.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	86	D. Bina Marga CKTR

MISI 7**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS**

7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	69	Biro Organisasi
7.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	7.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	Biro Organisasi
		7.1.2 Nilai EPPD	3,0010	Biro Pemerintahan
		7.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	B. Pengelolaan Keuangan
		7.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	37,84	B. Pendapatan Daerah
7.2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	7.2.1 Indeks SPBE	3,2	D. Kominfotik
		7.2.2 Indeks Profesionalitas ASN	74	B. Kepegawaian Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
7.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	85,00	Biro Organisasi

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	296.370.559.091	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	228.906.745.690	D. Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.161.202.550	
3	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	89.283.850	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.343.135.933	
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	34.634.507.880	D. Pemuda dan Olahraga
6	Program Rehabilitasi Sosial	27.235.683.188	D. Sosial
B	Menurunnya Prevalensi Stunting	149.200.136.562	
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	139.681.995.113	D. Perkimtan
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	9.518.141.449	D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	683.393.351.406	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	680.595.978.296	D. Pendidikan
2	Program Pengembangan Kurikulum	331.702.960	
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	915.670.150	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.550.000.000	D. Pemuda dan Olahraga
D	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	16.955.585.876	
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	8.333.156.061	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	232.276.490	
3	Program Hubungan Industrial	416.843.300	
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	722.691.600	
5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	137.394.000	
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	174.162.175	
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	150.288.900	
8	Program Penataan Desa	24.482.000	D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.222.528.753	
10	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.541.762.597	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
E	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	82.543.358.825	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	977.000.000	B. Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.534.139.200	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	540.000.000	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	905.000.000	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.225.749.900	
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.130.066.627	Satpol PP
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	125.000.000	
8	Program Pengembangan Kebudayaan	9.177.650.475	D. Kebudayaan
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.685.868.656	
10	Program Pembinaan Sejarah	444.595.770	
11	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	135.000.000	
12	Program Pengelolaan Permuseuman	2.135.093.390	
13	Program Kesejahteraan Rakyat	33.228.717.798	Sekretariat Daerah
14	Program Pemberdayaan Sosial	7.880.310.059	D. Sosial
15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.300.886.500	
16	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	118.280.450	
F	Meningkatnya Budaya Literasi	1.019.023.350	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	940.373.650	D. Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	78.649.700	
G	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.057.966.986	
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3.283.412.611	D. Pemberdayaan Perempuan

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
2	Program Perlindungan Perempuan	322.573.850	dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	273.460.000	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	128.899.300	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	281.141.150	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	2.190.753.425	
7	Program Pengendalian Penduduk	143.638.000	
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	143.318.650	
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	290.770.000	
H	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	293.981.711.347	
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	150.455.613.899	D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, D. Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	56.813.585.563	
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.276.676.300	
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	638.515.100	
5	Program Penyuluhan Pertanian	12.422.688.953	
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.927.066.241	D. Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.018.151.350	D. Kelautan dan Perikanan
8	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	42.206.525.926	
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.581.201.055	
10	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.427.218.450	
11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	6.214.468.510	
I	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	22.757.232.046	
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9.868.172.636	D. Pangan
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.000.172.715	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	8.888.886.695	
J	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	37.137.573.430	
1	Program Pengelolaan Hutan	23.252.624.460	D. Kehutanan

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	225.402.500	
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	13.109.546.470	
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	550.000.000	
K	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan	6.798.774.907	
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	105.931.450	D. Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	310.762.000	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	340.941.850	
4	Program Pengembangan Ekspor	754.508.500	
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2.930.005.516	
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.356.625.591	
L	Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	11.428.804.825	
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	11.204.907.229	D. Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	147.246.346	
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	76.651.250	
M	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera	16.635.918.200	
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	41.057.800	D. Koperasi dan UMKM
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	280.634.950	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	46.365.000	
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	5.891.964.000	
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	4.154.065.450	
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.276.838.500	
7	Program Pengembangan UMKM	3.944.992.500	
N	Terciptanya 100.000 Entrepreneur Dari Berbagai Sektor	6.457.499.965	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.457.499.965	D. Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
O	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	3.975.157.931	
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	728.317.000	D. Penanaman Modal dan PTSP
2	Program Promosi Penanaman Modal	729.123.550	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.467.706.650	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	996.522.731	
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	53.488.000	
P	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat	16.015.829.641	
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.772.604.600	D. Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	9.243.225.041	
Q	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat	18.402.716.100	
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3.272.229.500	D. Pariwisata
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15.130.486.600	
R	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	276.491.394.575	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	272.058.925.993	D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.718.357.794	D. Perhubungan
3	Program Pengelolaan Pelayaran	623.939.538	
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	90.171.250	
S	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	9.484.787.843	
1	Program Penanggulangan Bencana	8.339.881.537	B. Penanggulangan Bencana Daerah
2	Program Penanganan Bencana	1.144.906.306	D. Sosial
T	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	13.261.908.285	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	160.900.300	D. Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.665.376.800	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	421.872.000	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.263.876.600	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	129.597.900	
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh	40.005.000	
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.921.532.000	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	88.666.000	
9	Program Pengelolaan Persampahan	6.087.721.685	
10	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	145.000.000	D. Energi Sumber Daya Mineral
11	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	337.360.000	
U	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	197.906.282.735	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.660.337.809	D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	718.855.760	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	357.743.700	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.447.874.640	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	46.996.074.573	
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.604.917.554	
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	122.722.788.846	D. Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.351.198.000	
10	Program Pengembangan Perumahan	1.330.066.900	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11	Program Kawasan Permukiman	10.976.139.390	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
12	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	5.740.285.559	D. Energi SDM
V	Meningkatkan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan Penyelenggaraan	3.838.907.276	
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	150.000.000	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	213.000.000	
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	92.000.000	
4	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	65.000.000	
5	Program Penetapan Tanah Ulayat	50.000.000	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.268.907.276	
W	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	4.319.935.519.715	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.230.603.146.189	B. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.692.880.050	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.553.898.286	B. Pendapatan Daerah
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.623.043.609	Inspektorat Daerah
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.173.377.372	
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.836.496.583	B. Pembangunan Daerah
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.049.235.444	
8	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.123.976.265	Sekretariat Daerah
9	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	2.203.583.000	
10	Program Penataan Organisasi	2.860.439.918	
11	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.957.072.758	
12	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	3.057.258.370.241	
X	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	59.784.710.037	
1	Program Kepegawaian Daerah	15.949.026.156	B. Kepegawaian Daerah

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.268.259.991	B. Pengembangan SDM
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	13.212.081.038	D. Komunikasi, Informatika dan Statistika
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.949.577.192	
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	686.800.027	
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	691.880.000	
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.044.495.332	Sekretariat Daerah
8	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.102.020.404	D. Perpustakaan dan Kearsipan
9	Program Pengelolaan Arsip	497.036.778	
10	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	58.194.000	
11	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.325.339.119	B. Penelitian dan Pembangunan
Y	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	88.473.836.826	
1	Program Pelayanan Penghubung	4.273.558.498	Badan Penghubung
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	82.417.761.172	Sekretariat DPRD
3	Program Pendaftaran Penduduk	708.695.201	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4	Program Pencatatan Sipil	399.116.928	
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	548.070.787	
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	126.634.240	
	TOTAL	6.639.308.547.776	



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria berikut ini:

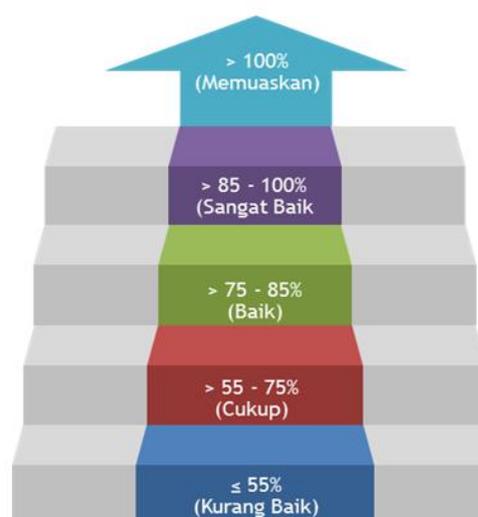
1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan sebagai berikut:



3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya tergambar dari pencapaian tujuan dan sasaran yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Mengacu pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperjanjikan pencapaian 7 Tujuan dengan 26 Sasaran yang diukur dengan 8 Indikator Kinerja tujuan dan 46 Indikator Kinerja Sasaran. Hasil pengukuran pencapaian 7 Tujuan dengan 26 Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Hasil Pengukuran Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
<i>Misi 1</i>					
<i>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya saing</i>					
1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	72,74	73,26	100,71
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69,8	69,9	100,14
1.2	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting	18,44	25,2	63,34
1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah	9,18	9,18	100
		1.3.2 Harapan Lama Sekolah	14,05	14,1	100,36
1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	49,7	50,23	101,07
<i>Misi 2</i>					
<i>Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i>					
2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,1	52,71	89,19
2.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,8	58,13	92,56
2.2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	14,14	108,77
2.3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan	2.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga	59,30	56,12	94,64

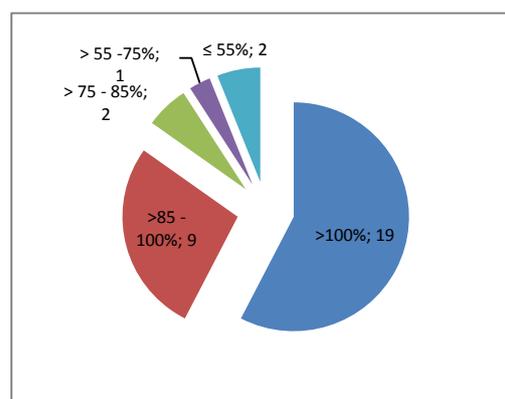
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.3.2 Indeks Pembangunan Gender	94,11	94,34	100,24
		2.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender	59,12	65,12	110,15
		2.3.4 Indeks Perlindungan Anak	65,85	61,98	94,12
<i>Misi 3</i>					
<i>Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</i>					
3	Meningkatkan kesejahteraan petani	Persentase peningkatan pendapatan petani	5	6,53	130,60
3.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	3.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	100,99	110,37	109,29
		3.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani	103,47	108,85	105,20
		3.1.3 Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	47,175	50,465580	106,98
		3.1.4 Pendapatan Nelayan	40,795	41,661646	102,12
		3.1.5 Pendapatan Peternak	47,872	49,678125	103,77
		3.1.6 Persentase peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura	5	9,94	198,80
3.2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	79,13	79,45	100,40
3.3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5	11,16	223,20
<i>Misi 4</i>					
<i>Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital</i>					
4	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,25	16,5	101,54
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,75	8,54	97,60
4.1	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1,1	5,6	509,09
4.2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	368	289	78,53
4.3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	4.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,14	5,04	235,51
		4.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	2,4	1,6	66,67

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
4.4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	112.594	115.149	102,27
4.5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan investasi di Provinsi	6	0,79	13,17
4.6	Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	6,54	6,68	102,14
<i>Misi 5</i>					
<i>Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata</i>					
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif	12,62	4,31	34,11
5.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,24	1,35	108,87
5.2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	6,02	7,26	120,60
<i>Misi 6</i>					
<i>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan</i>					
6	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,702	0,654	93,16
6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	6.1.1 Rasio Konektifitas 6.1.2 Kemantapan Jalan	0,668 75	0,662 71,40	99,10 95,20
6.2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0,64	103,23
6.3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,43	74,98	96,84
6.4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	6.4.1 Akses Air Minum 6.4.2 Akses Sanitasi Layak 6.4.3 Persentase bangunan strategis terbangun 6.4.4 Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi 6.4.5 Persentase volume tampungan sumber-sumber air	82 82 40,22 70,36 53,78	85,23 69,27 6 71,06 58,73	103,94 84,48 15 100,99 109,20

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	
		6.4.6	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	66,51	66,9	100,59
6.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	86	86	100	
<i>Misi 7</i>						
<i>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas</i>						
7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	69	69,78	101,87	
7.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	7.1.1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	77,77	99,71
		7.1.2	Nilai EPPD	3,0010	3,0155	100,48
		7.1.3	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		7.1.4	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	37,84	46,50	122,89
7.2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	7.2.1	Indeks SPBE	3,2	3,18	99,38
		7.2.2	Indeks Profesionalitas ASN	74	49,31	66,64
7.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	85,00	90,02	105,91	
Rata-rata Capaian					112,82	

Rata-rata capaian 7 tujuan dan 26 sasaran yang diukur pada tahun 2022 adalah 112,82% termasuk berhasil dengan kategori “memuaskan”. Sebanyak 3 tujuan dan 16 sasaran (57,58%) tercapai dengan kategori “memuaskan” dengan capaian (>100%), 3 tujuan dan 6 sasaran tercapai dengan kategori sangat baik (>

>85-100%), 2 sasaran tercapai dengan kategori “baik” (>75 -85%), 1 sasaran tercapai dengan kategori cukup dan 1 tujuan dan 1 sasaran tercapai dengan kategori “kurang baik”. Sasaran “meningkatnya pertumbuhan investasi” menjadi sasaran dengan capaian terendah yaitu sebesar 13,17%.



3.3. Capaian Kinerja Tahun 2022

Misi 1

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing

Tujuan 1.1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing

Masyarakat Sumatera Barat harus memiliki keunggulan agar mampu mengelola sumber daya pembangunan dan mampu berkompetitif/bersaing baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul selalu menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Begitupun pada RPJMD periode 2021-2026, peningkatan kualitas SDM tertuang pada Misi 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”.

Untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan bermutu dan kualitas hidup yang sehat. Kualitas pendidikan ini juga harus berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral yang diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreaitivitas, berinovasi dan berdaya saing.

Dalam hal mengetahui bagaimana sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berkarakter, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$) dan rendah ($IPM < 60$).

Pengukuran indikator indeks pembangunan manusia pada tahun n didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mencapai angka 72,74. Target IPM ini meningkat sebesar 0,19 dibandingkan IPM tahun 2021. Pencapaian tujuan “mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, unggul dan berdaya saing” tergambar pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1.1



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat tahun 2022 ditargetkan 72,74, terealisasi 73,26 dengan tingkat capaian 100,71% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Data realisasi IPM tahun 2022 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 71/12/13/Th.XXV tanggal 1 Desember 2022 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022. Merujuk pada pengelompokan nilai IPM, capaian pembangunan manusia Sumatera Barat tahun 2022 termasuk kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$).

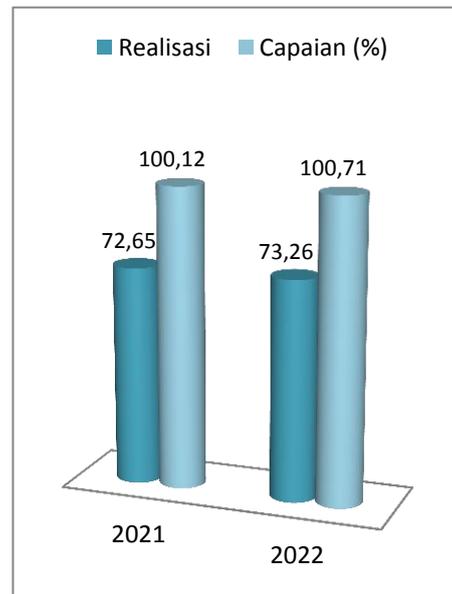


IPM Sumatera Barat yang tergolong tinggi bersamaan kondisinya dengan IPM 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Pada tahun 2022 nilai IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada kategori sangat tinggi ($IPM \geq$

80), tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Capaian pembangunan manusia kategori sedang berada di 5 Kabupaten, kategori tinggi di 12 Kabupaten/Kota dan kategori sangat tinggi berada di 2 Kota. Kabupaten yang capaian IPM kategori sedang yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan. Capaian pembangunan manusia kategori tinggi berada di Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Nilai IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat merupakan refleksi dari keberhasilan pembangunan manusia di Sumatera Barat.

Perhitungan capaian indikator IPM menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator IPM sebesar 100,71% menunjukkan realisasi indikator IPM tercapai di atas target yang ditetapkan. Kondisi yang sama juga terjadi di tahun 2021 yang capaian indikator IPM >100%. Nilai IPM di tahun 2022 yang naik 0,61 poin, menunjukkan pembangunan manusia di Sumatera Barat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021). Perbandingan capaian dan realisasi indikator IPM tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 3.

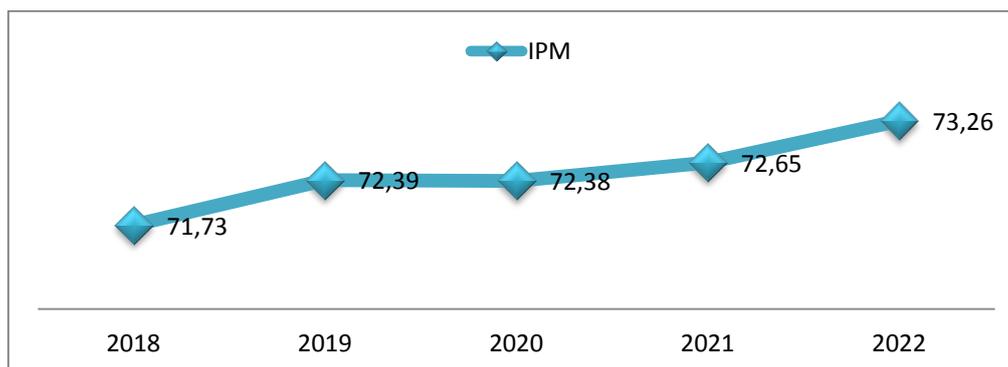
Grafik 3 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator IPM 2021-2022



Sumber data: Data diolah

IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022 cenderung mengalami kenaikan dengan peningkatan yang belfluktuatif terkecuali pada tahun 2020 yang sedikit mengalami penurunan. Peningkatan tertinggi yaitu 0,45 poin terjadi di tahun 2022. Dalam kurun 5 tahun terakhir (2018-2022), IPM telah meningkat sebesar 1,53 atau rata-rata meningkat 0,53 per tahun. Dengan rentang nilai 71,73 - 73,26 maka status pembangunan manusia Sumatera Barat tergolong kategori “tinggi”. Perkembangan IPM dari tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik 4.

Grafik 4 Perkembangan IPM dari tahun 2018-2022



Sumber Data: Berita Resmi Statistik Nomor 71/12/13/Th.XXV tanggal 1 Desember 2022

Peningkatan nilai IPM, tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait kesehatan, pendidikan dan daya saing masyarakat. Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2022 antara lain:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat.
 - b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan tenaga kesehatan.
 - d. Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat dan menjamin asupan gizi bagi ibu hamil, remaja putri dan keluarga yang memiliki anak usia 0 - 5 tahun.
 - e. Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Stunting yang menjalankan fungsi konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan penguatan satu data stunting.
 - f. Peningkatan akses sanitasi layak pada masyarakat. Akses sanitasi layak menargetkan agar rumah tangga memiliki akses sanitasi layak, yang dalam hal ini dilihat dari akses jamban yang sehat.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui:
 1. Meningkatkan akses sekolah melalui penambahan Unit Sekolah Baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab ruang kelas.

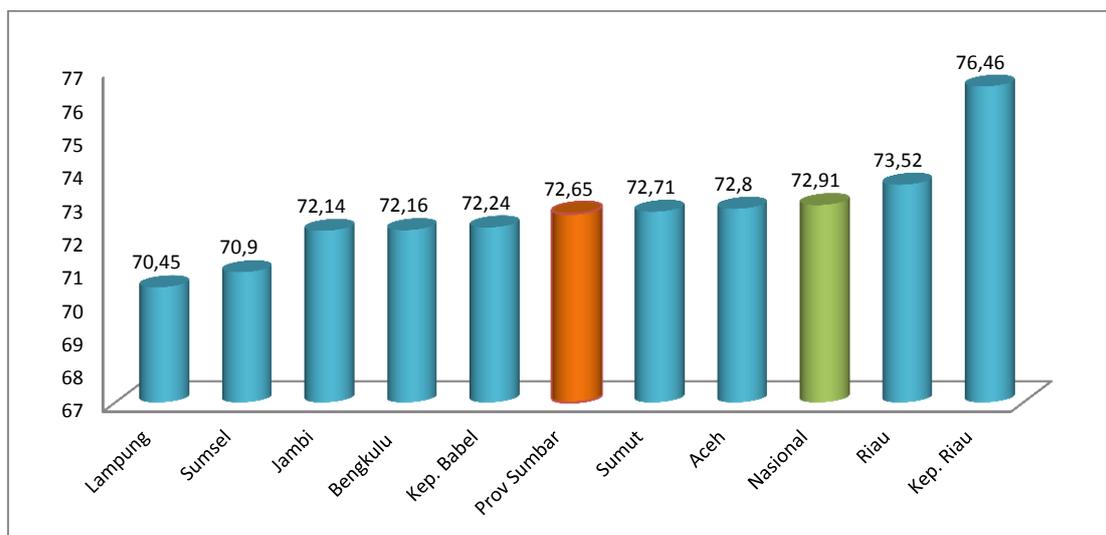
2. Peningkatan kompetensi guru melalui Bimtek/Sosialisasi. Selama tahun 2022 ada 13 jenis kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh 2140 orang tenaga pendidikan.
3. Meningkatkan daya saing masyarakat melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan melakukan program *link and match* dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

Di samping upaya di atas, masih ditemukan kendala dalam mewujudkan SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing. Hambatan dan kendala tersebut antara lain:

1. Pada beberapa daerah, akses ke lokasi pelayanan kesehatan masih terbatas.
2. Belum maksimalnya kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan serta pemerataan tenaga kesehatan dan pendidikan yang belum optimal.
3. Pola asuh masyarakat dan praktek PHBS yang masih rendah. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan tentang pola asuh dan praktek PHBS.
4. Pelaksanaan pelatihan kerja yang belum berdasarkan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
5. Belum semua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta melalui akreditasi LPK.

Untuk tahun 2022, IPM Sumatera Barat 0,26 lebih rendah dari IPM secara Nasional. Secara nasional, Sumatera Barat termasuk 24 Provinsi yang status pembangunan manusianya berkategori “tinggi”. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati urutan 5 tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Perbandingan IPM Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Barat digambarkan pada grafik 5.

Grafik 5 Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data: BRS tentang IPM dari masing-masing Provinsi

IPM Sumatera Barat pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 ditargetkan dapat mencapai angka 74,60. Realisasi IPM di tahun 2022 yaitu 73,26 menunjukkan pencapaian 98,20% dari target tahun terakhir RPJMD 2021-2026. Melihat kondisi ini, Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai IPM 74,60 di tahun 2026.

Untuk kedepannya, dalam mewujudkan SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing akan diupayakan hal-hal berikut:

1. Secara konsisten mengiatkan dan mengedukasi masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kesehatan lingkungan.
4. Fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru), peningkatan kuantitas, peningkatan kualitas

pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.

6. Melaksanakan pelatihan dengan *upskilling* dan *reskilling* dan pemagangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
7. Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta.

Tujuan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, unggul dan berdaya saing dapat tercapai melalui pencapaian 4 sasaran yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya daya saing masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang harus dipenuhi agar SDM yang dihasilkan unggul dan berdaya saing sesuai dengan slogan “SDM unggul berawal dari SDM yang sehat. Untuk menciptakan SDM yang sehat perlu kontribusi dari segala pihak termasuk peran dari Pemerintah

dalam peningkatan layanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu cara untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing. SDM yang sehat ini dapat diukur dengan indikator angka harapan hidup. Indikator angka harapan hidup tahun n diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan angka harapan hidup dapat mencapai angka 69,8. Target angka harapan hidup tahun 2022 naik 0,21 dibandingkan

dengan angka harapan hidup tahun 2021. Pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tergambar pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.1

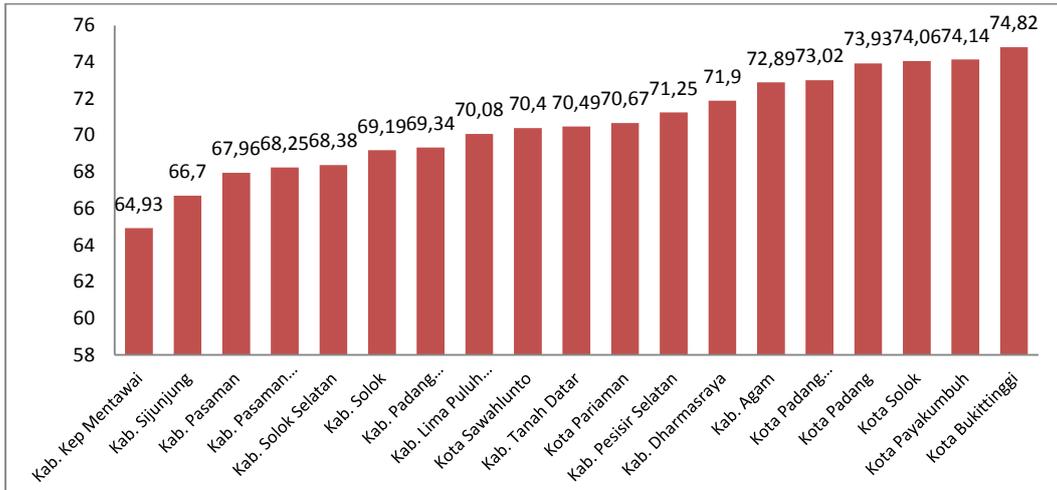


Angka Harapan Hidup di Sumatera Barat Tahun 2022 target 69,8, terealisasi 69,9 dengan tingkat capaian 100,14% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Data realisasi angka harapan hidup tahun 2022 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 71/12/13/Th.XXV tanggal 1 Desember 2022 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022. Angka harapan hidup tercapai pada 69,9 tahun berarti bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 69,90 tahun lebih lama 0,31 tahun dari bayi yang lahir tahun sebelumnya.

Pencapaian angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat sangat terkait dengan pencapaian angka harapan hidup pada 19 Kabupaten/Kota. Sebaran angka harapan hidup pada 19 Kabupaten/Kota berada di *range* 64,93 - 74,82. Secara umum angka harapan hidup tahun 2022 pada 19 Kabupaten/Kota relatif naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, terdapat 7 Kabupaten yang angka harapannya berada di bawah angka harapan hidup Provinsi. Sisanya 12 Kabupaten/Kota melebihi angka harapan hidup Provinsi. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Bukittinggi dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gambaran angka harapan hidup 19 Kabupaten/Kota tahun 2022 disajikan pada grafik 6.

Grafik 6 Angka Harapan Hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2022

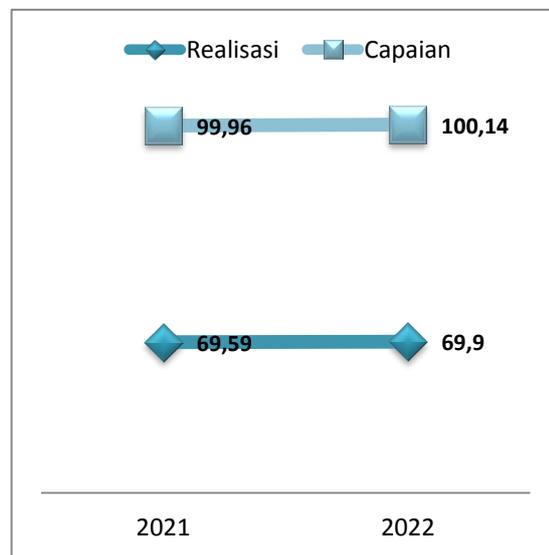


Sumber data: BPS Sumatera Barat

Perhitungan capaian indikator angka harapan hidup menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian indikator angka harapan hidup 100,14% menunjukkan realisasi angka harapan hidup tercapai melebihi target yang ditetapkan. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (2021), dimana realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan nilai angka harapan hidup 69,90 tahun berarti bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 69,90 tahun, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan angka harapan hidup tahun sebelumnya (69,59 tahun).

Perbandingan capaian dan realisasi angka harapan hidup tahun 2021-2022 digambarkan pada grafik 7.

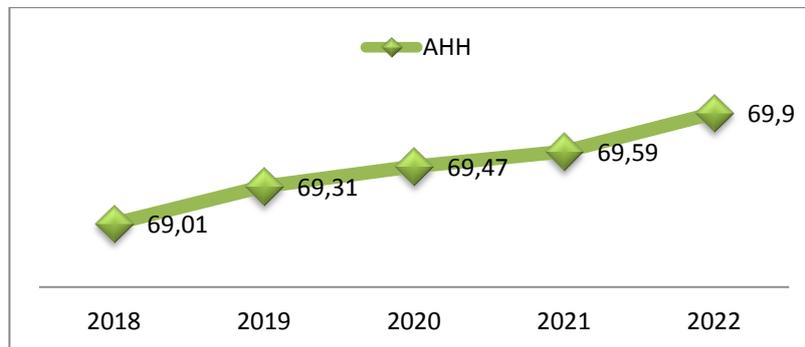
Grafik 7 Perbandingan capaian dan realisasi angka harapan hidup tahun 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Angka harapan hidup Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) mengalami kenaikan 0,89 tahun dengan rata-rata kenaikan pertahun 0,32 tahun. Pada tahun 2022 ini, angka harapan hidup Sumatera Barat naik sebesar 0,31 dibandingkan tahun sebelumnya (2021). Kenaikan 0,31 merupakan kenaikan tertinggi yang terjadi dalam 5 tahun terakhir (2018-2022). Perkembangan Angka harapan hidup dari tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik 8.

Grafik 8 Perkembangan Angka Harapan Hidup dari tahun 2018-2022



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pencapaiannya tidak hanya terkait dengan sektor kesehatan saja tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, kecukupan gizi, dan terkait kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pencapaian peningkatan derajat kesehatan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait termasuk masyarakat itu sendiri. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ini diharapkan dapat dicapai melalui akreditasi Rumah sakit rujukan dan puskesmas. Sampai dengan tahun 2022, seluruh Rumah Sakit rujukan Provinsi Sumatera Barat sudah terakreditasi. Untuk puskesmas baru terakreditasi 97,8% dari total puskesmas 279 unit.

2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui:
 - a. Mengiatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya untuk mendukung implementasi Pola hidup Bersih dan Sehat di masyarakat.
 - b. Peningkatan akses jamban sehat bagi masyarakat.
 - c. Pemberian imunisasi dasar lengkap kepada anak usia 12-23 bulan dengan capaian 86,22%.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan tenaga kesehatan
4. Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat. Sampai dengan tahun 2022 sebanyak 82,32% masyarakat telah memiliki jaminan kesehatan.
5. Memberikan pelayanan khusus kepada Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Ibu dan Anak, Pasien TB MDR, ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), Pasien Lanjut Usia (Poli Geriatri) dan melaksanakan program Keswamas (Kesehatan Jiwa Masyarakat) serta Layanan IGD Terpadu.

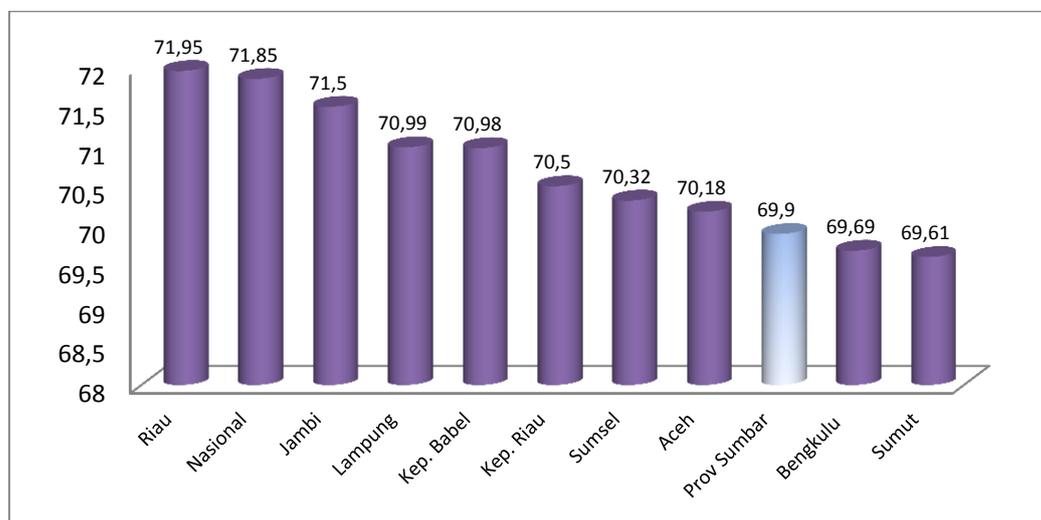
Di samping upaya di atas, masih ditemukan kendala untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

1. Pada beberapa daerah, akses ke lokasi pelayanan kesehatan masih terbatas.
2. Belum maksimalnya kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan yang belum optimal.
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan kegiatan yang berdampak pada hasil yang diharapkan.
4. Belum semua masyarakat menyadari pentingnya menjalankan pola hidup bersih dan sehat.

Jika dibandingkan dengan Nasional, angka harapan hidup Sumatera Barat masih berada di bawah Nasional dengan selisih kurang 1,95. Terhadap 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 7 atau posisi ke 3 terendah setelah Sumatera Utara dan Bengkulu. Provinsi Riau menjadi Provinsi yang angka harapan hidupnya tertinggi di Pulau Sumatera dan berada di atas angka harapan hidup rata-rata nasional.

Perbandingan angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 9.

Grafik 9 Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data: BRS tentang IPM dari masing-masing Provinsi

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), angka harapan hidup ditargetkan dapat tercapai 70,53 tahun. Angka harapan hidup tahun 2022 yang tercapai 69,9 tahun menunjukkan pencapaian 99,11% dari target tahun terakhir RPJMD 2021-2026. Dengan mempertimbangan peningkatan di tahun 2022 dan upaya yang optimal, target tahun 2026 tersebut optimis dapat dicapai.

Upaya kedepannya, dalam hal mendukung derajat kesehatan masyarakat antara lain:

1. Secara konsisten mengiatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Mengedukasi masyarakat terkait sublementasi gizi, pendidikan gizi dan *surveillance* gizi.
4. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kesehatan lingkungan.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program dengan 26 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. **296.370.559.091,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1.1.1 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	26	296.370.559.091	272.339.019.121
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	12	228.906.745.690	209.387.981.705
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	2.161.202.550	1.481.631.942
3	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1	89.283.850	69.612.215
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3	3.343.135.933	2.907.195.535
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	4	34.634.507.880	31.613.326.735
6	Program Rehabilitasi Sosial	4	27.235.683.188	26.879.270.989

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 296.370.559.091,-** terealisasi sebesar **Rp. 272.339.019.121,-** atau **91,89%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp. 24.031.539.970,- (8,11%)**. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (100,71%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (91,89%) dengan **tingkat efesiensi 8,82%**.

Sasaran 1.1.2

Menurunnya Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak

seusianya yang akan berdampak pada penurunan daya pikir dan tingkat intelektual pada anak yang nantinya akan sangat mempengaruhi kualitas SDM pada suatu daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan penurunan prevalensi *stunting* sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan program prioritas Bapak Ir. Joko Widodo (Presiden RI) yaitu program percepatan penurunan *stunting*. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran menurunnya prevalensi *stunting* adalah prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita. Pengukuran indikator ini pada tahun n didasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita dapat mencapai angka 18,44%. Target tahun 2022 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan prevalensi *stunting* tahun sebelumnya yaitu 23,3%. Pencapaian sasaran menurunnya prevalensi *stunting* tergambar pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.2

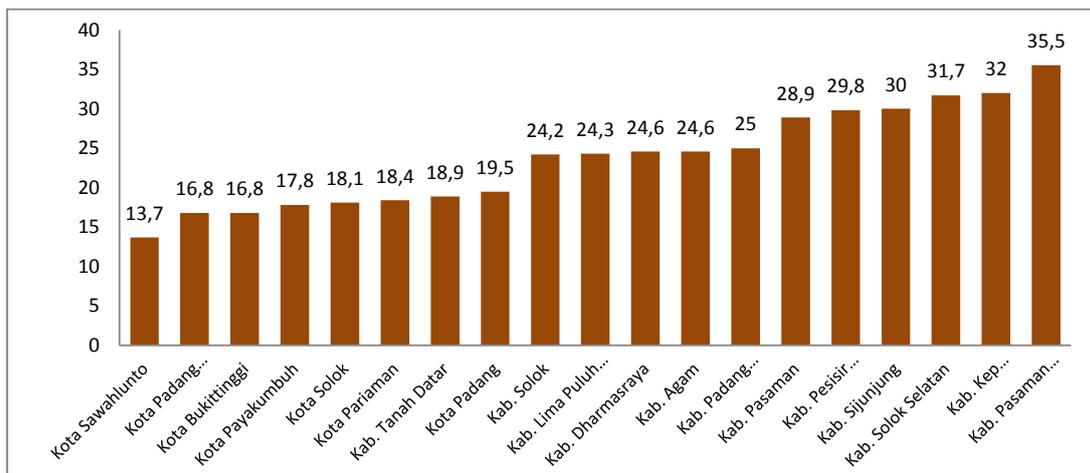


Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita pada tahun 2022 ditargetkan 18,44% terealisasi 25,2% dengan tingkat capaian 63,34% termasuk kategori keberhasilan “cukup”.

Realisasi prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita tahun 2022 diperoleh berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2022. Realisasi prevalensi *stunting* tahun 2022 lebih tinggi 1,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berarti prevalensi *stunting* di Sumatera Barat mengalami kenaikan di tahun 2022.

Pada tahun 2022, 13 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tercatat berhasil menurunkan angka *stunting*. Bahkan, Kota Sawahlunto berhasil menurunkan *stunting* menjadi 13,7% lebih rendah dibandingkan prevalensi *stunting* Nasional (21,6%). Dari 19 Kabupaten/Kota tersebut, sebanyak 13 Kabupaten/Kota tercatat memiliki angka *stunting* lebih rendah dari angka *stunting* di tingkat Provinsi (25,2%) dan sisanya 6 Kabupaten/Kota tercatat memiliki angka *stunting* lebih tinggi. Rincian *prevalensi stunting* Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2022 digambarkan pada grafik 10.

Grafik 10 Prevalensi Stunting 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2022

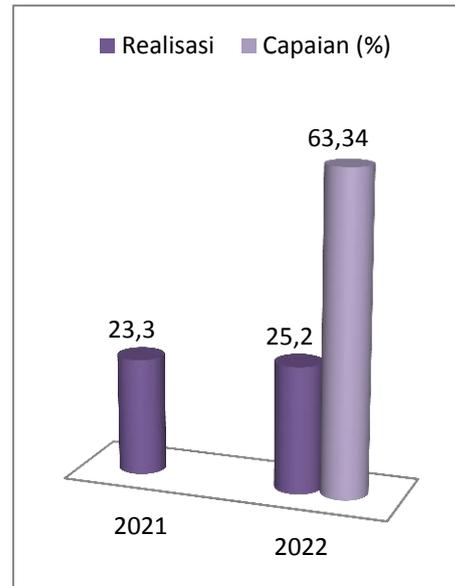


Sumber data: Hasil SSGI 2022

Perhitungan capaian indikator prevalensi *stunting* menggunakan metode pengukuran kriteria kedua. Capaian indikator prevalensi *stunting* 63,34% menunjukkan realisasi indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Dikarenakan indikator prevalensi *stunting* baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022 maka capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, berdasarkan data yang tersedia prevalensi *stunting* mengalami kenaikan sebesar 1,9% di tahun 2022. Kenaikan prevalensi *stunting* menunjukkan semakin tingginya kasus *stunting* yang terjadi di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian dan realisasi indikator prevalensi *stunting* tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 11.

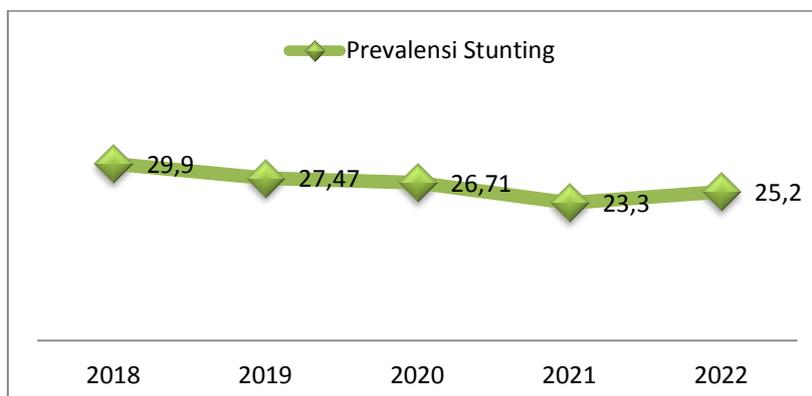
Grafik 11 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Prevalensi Stunting 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Prevalensi *stunting* di Sumatera Barat tercatat menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, mengalami penurunan dari tahun 2018-2021 dan mengalami kenaikan di tahun 2022. Kondisi prevalensi *stunting* yang meningkat di tahun 2022 menunjukkan jumlah balita pendek dan sangat pendek mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya (2021). Perkembangan prevalensi *stunting* dalam kurun waktu lima tahun terakhir digambarkan pada grafik 12.

Grafik 12 Perkembangan Prevalensi Stunting Sumatera Barat dari tahun 2018-2022



Sumber data: Hasil SSGI

Untuk menangani *stunting*, Pemerintah Sumatera Barat berusaha mensinergikan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal-hal yang dilakukan untuk menangani *stunting* di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Menjamin asupan gizi bagi ibu hamil, remaja putri dan keluarga yang memiliki anak usia 0-5 tahun. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) rutin untuk penanggulangan anemia pada remaja putri dan ibu hamil. Persentase rematri yang mendapatkan tablet tambah darah tahun 2022 sebesar 45,8%, rematri yang meminum tablet tambah darah sebesar 41,1%. Sedangkan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah tahun 2022 sebesar 82,5%.
 - b. Pemberian makanan tambahan baik pabrikan maupun lokal untuk pencegahan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis). Persentase Ibu hamil KEK tahun 2022 sebesar 9,3%, Ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan 97,6%.
 - c. Pemberian bantuan bahan pangan (telur, beras, susu) kepada ibu hamil KEK, balita *stunting* dan keluarga miskin pada 12 Kabupaten/Kota yang diintervensi.

- 
- d. Pengembangan ternak unggas di Provinsi Sumatera Barat.
 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas kader dan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dalam rangka deteksi dini masalah gizi dan masalah perkembangan anak.
 - b. Pemantauan dan Edukasi/Sosialisasi oleh Bidan Desa dan Petugas Gizi terkait makanan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dan pemberian ASI eksklusif kepada bayi.
 3. Dibentuknya Tim Pendamping Keluarga (3300 tim atau 9900 orang) yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB.
 4. Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Stunting yang menjalankan fungsi konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan penguatan satu data stunting.
 5. Peningkatan akses sanitasi layak pada masyarakat. Akses sanitasi layak menargetkan agar rumah tangga memiliki akses sanitasi layak, yang dalam hal ini dilihat dari akses jamban yang sehat. Pada tahun 2022, rumah yang telah memperoleh akses sanitasi layak meningkat 3.275 rumah dibandingkan tahun sebelumnya.

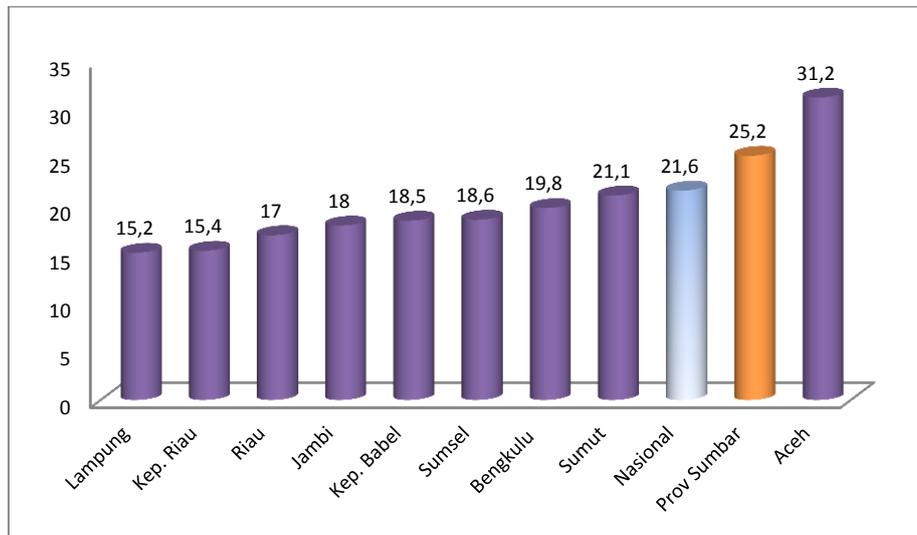
Terlepas dari upaya yang dilakukan di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih terkendala beberapa kondisi berikut ini:

1. Belum semua Tim Percepatan Penanganan *Stunting* (TPPS) yang telah dibentuk di tingkat kota kabupaten berperan aktif.
2. Pola asuh masyarakat dan praktek PHBS yang masih rendah. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan tentang pola asuh dan praktek PHBS.
3. Belum optimalnya pemberian MP ASI.
4. Belum efektif pengalokasian sumber daya dalam pelaksanaan program pencegahan *stunting*.
5. Belum optimalnya peran OPD yang terlibat dalam penurunan *stunting*.

Prevalensi *stunting* Sumatera Barat tahun 2022 tercatat lebih tinggi 3,4% dibandingkan dengan prevalensi *stunting* secara Nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain yang berada di Pulau Sumatera, Pemerintah Provinsi

Sumatera barat berada di urutan tertinggi kedua sesudah Provinsi Aceh. Prevalensi *stunting* terendah tercatat berada di Provinsi Lampung yaitu sebesar 15,2%. Tingginya prevalensi *stunting* menjadi PR besar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Barat 2022 digambarkan pada grafik 13.

Grafik 13 Perbandingan Prevalensi Stunting Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022



Sumber data: Hasil SSGI 2022

Prevalensi *stunting* tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 ditetapkan dapat tercapai 10,60. Realisasi 2022 dengan angka prevalensi *stunting* 25,2% memberikan sinyal kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan upaya untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* sebesar 14,6 selama 4 tahun (rata-rata 3,65% pertahun) agar target tahun 2026 dapat tercapai. Dikarenakan prevalensi *stunting* merupakan prioritas nasional maka upaya yang optimal untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* akan konsisten dilaksanakan.

Upaya di masa yang akan datang untuk menurunkan angka prevalensi stunting antara lain:

1. Perlu dilakukan audit kasus *stunting* untuk mengidentifikasi risiko, penyebab risiko, menganalisis faktor risiko dan memberikan rekomendasi serta saran perbaikan.
2. Secara konsisten memperbaiki asupan gizi masyarakat khususnya ibu hamil, remaja putri dan balita.
3. Edukasi kepada masyarakat terkait pola asuh dan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
4. Menyusun rencana aksi penurunan *stunting* secara komprehensif agar OPD terkait memahami peran dan fungsinya masing-masing untuk penurunan *stunting*.

Untuk mencapai sasaran menurunnya prevalensi stunting, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 2 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. 149.200.136.562,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran menurunnya prevalensi stunting. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1.1.2. dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Menurunnya Prevalensi Stunting	2	149.200.136.562	143.998.981.119
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	139.681.995.113	134.628.984.361
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	9.518.141.449	9.369.996.758

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 149.200.136.562,- terealisasi sebesar Rp. 143.998.981.119,- atau 96,51%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.201.155.443,- (3,49%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran tidak terjadi efisiensi karena capaian indikator kinerja sasaran **menurunnya prevalensi stunting** (63,34%) lebih rendah 33,17% dari realisasi anggaran (96,51%).



Selain kesehatan, pendidikan juga memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. SDM yang unggul bisa menjadi modal dasar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat menyadari pentingnya

peran pendidikan dalam menciptakan SDM yang unggul. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai sasaran yang harus dicapai agar dapat menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Sasaran tersebut diukur oleh dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pengukuran indikator ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan tergambar pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Rata-rata lama sekolah	9,18	9,18	100
Harapan Lama Sekolah	14,05	14,1	100,36
Rata-rata Capaian			100,18

Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan yang diukur dengan menggunakan 2 indikator di atas tercapai dengan rata-rata capaian 100,18%, termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya kualitas pendidikan adalah sebagai berikut

1. Rata-Rata Lama Sekolah



Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut. RLS diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, rata-rata lama sekolah tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai 9,18 tahun. RLS Sumatera Barat diharapkan selalu mengalami peningkatan. Untuk tahun 2022 ini, RLS ditetapkan lebih tinggi 0,11 dari RLS tahun 2021.

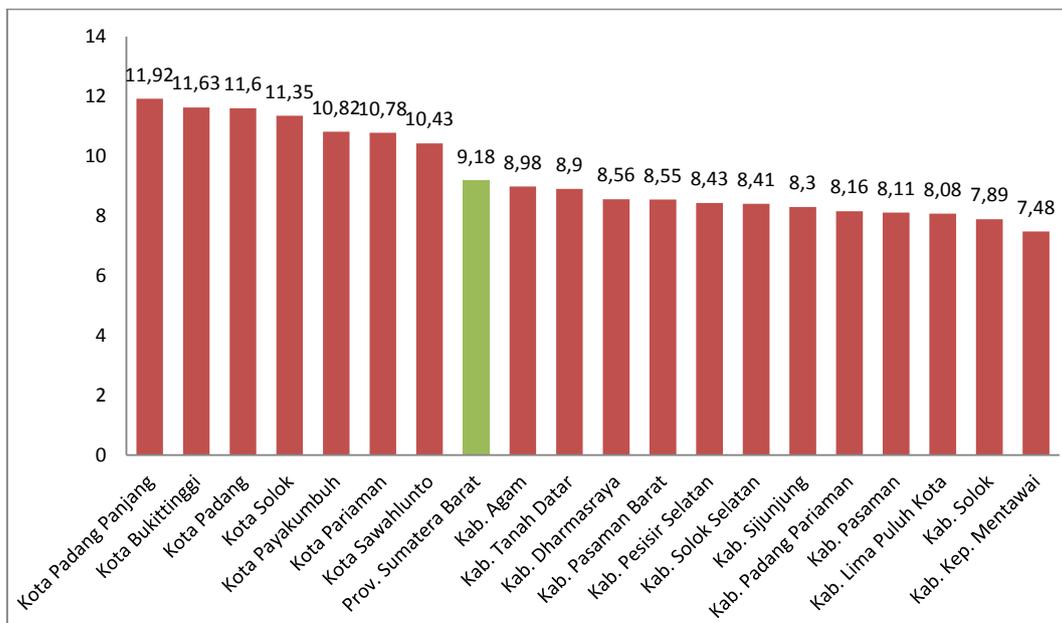
RLS tahun 2022 ditargetkan 9,18 tahun, terealisasi 9,18 tahun dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”.

Data realisasi RLS tahun 2022 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 71/12/13/Th.XXV tanggal 1 Desember 2022 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022. Angka RLS Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 9,18 tahun menunjukkan bahwa penduduk Sumatera Barat usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan

selama 9,18 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III).

RLS Sumatera Barat menjadi gambaran dari RLS 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Secara umum, nilai RLS 19 Kabupaten/Kota meningkat dari kondisi sebelumnya. Tahun 2022, RLS 19 Kabupaten/Kota berada dalam range 7,48-11,92. Dari 19 Kabupaten/Kota, 7 Kota mencapai RLS di atas RLS Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota RLSnya tercapai di bawah RLS Provinsi. RLS tertinggi 11,92 tahun (hampir menamatkan kelas XII) berada di Kota Padang Panjang dan RLS terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai (7,48 tahun). Gambaran RLS Kabupaten/Kota tahun 2022 disajikan pada grafik 14.

Grafik 14 Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

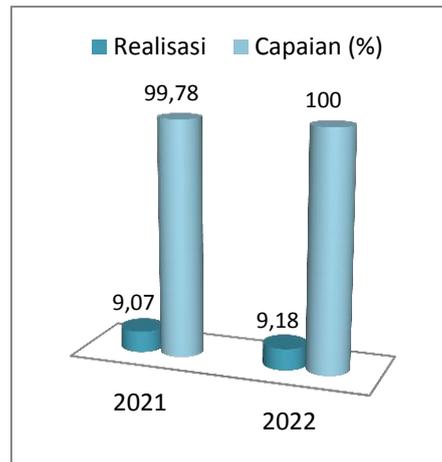


Sumber data: BPS Sumbar

Perhitungan capaian indikator rata-rata lama sekolah menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian indikator RLS di tahun 2022 100% artinya realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian 2021 yang belum mencapai target, capaian 2022 ini tentunya lebih baik. Nilai RLS di tahun 2022 ini menunjukkan rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) dengan kenaikan 0,11 poin di tahun 2022.

Perbandingan capaian dan realisasi indikator RLS tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 15.

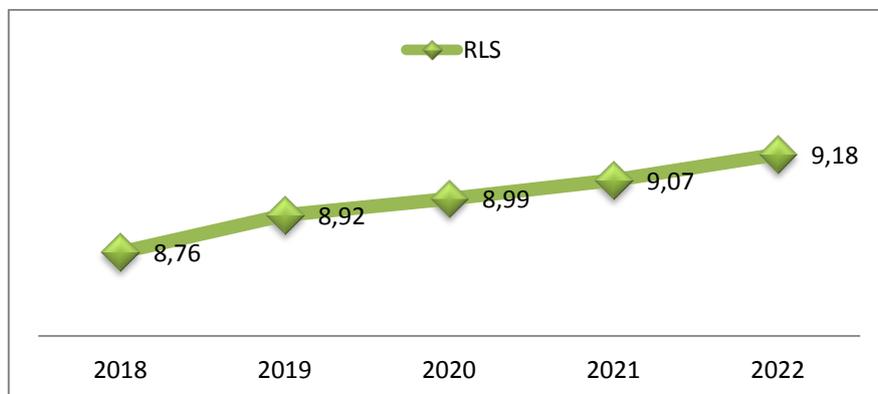
Grafik 15 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator RLS 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Rata-rata lama sekolah dari tahun 2018-2022 terus menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif dan relatif kecil. Dari tahun 2018-2022, RLS meningkat 0,42 dengan rata-rata meningkat pertahun 1,18. Dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2022), peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 1,83. Perkembangan RLS Sumatera Barat dari tahun 2018-2022 disajikan pada grafik 16.

Grafik 16 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Sumatera Barat dari tahun 2018-2022

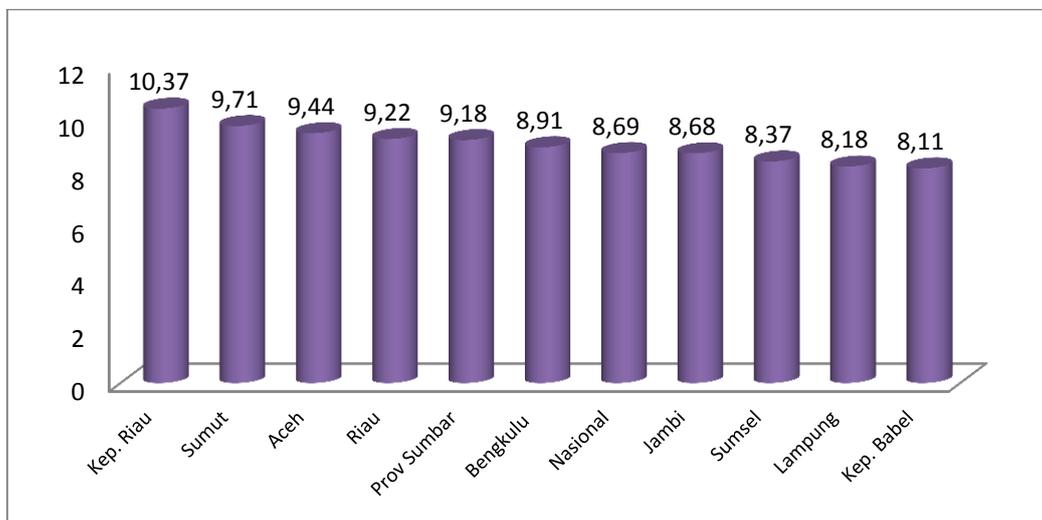


Sumber data: BPS Sumbar

RLS tahun 2022 yang tercapai 9,18 menunjukkan pencapaian 95,92% dari target tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Untuk mencapai target tahun 2026 diperlukan peningkatan sebesar 0,39 atau 0,0975 pertahun. Mempertimbangkan perkembangan RLS beberapa tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya optimal untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan tersebut.

RLS Sumatera Barat tahun 2022 tercapai lebih tinggi dibandingkan RLS rata-rata Nasional dengan selisih lebih 0,49. Dengan RLS Nasional 8,69 tahun berarti secara nasional penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan sampai 8,69 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera, Sumatera Barat berada pada posisi ke 5 tertinggi untuk nilai RLS. RLS tertinggi berada di Kepulauan Riau dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung. Perbandingan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 17.

Grafik 17 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data: BRS terkait IPM masing-masing Provinsi

2. Harapan Lama Sekolah



Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan metode perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, HLS ditargetkan dapat mencapai angka 14,05 tahun. Jika dibandingkan dengan HLS tahun 2021, target tahun 2022 ini ternyata lebih rendah 0,04 tahun.

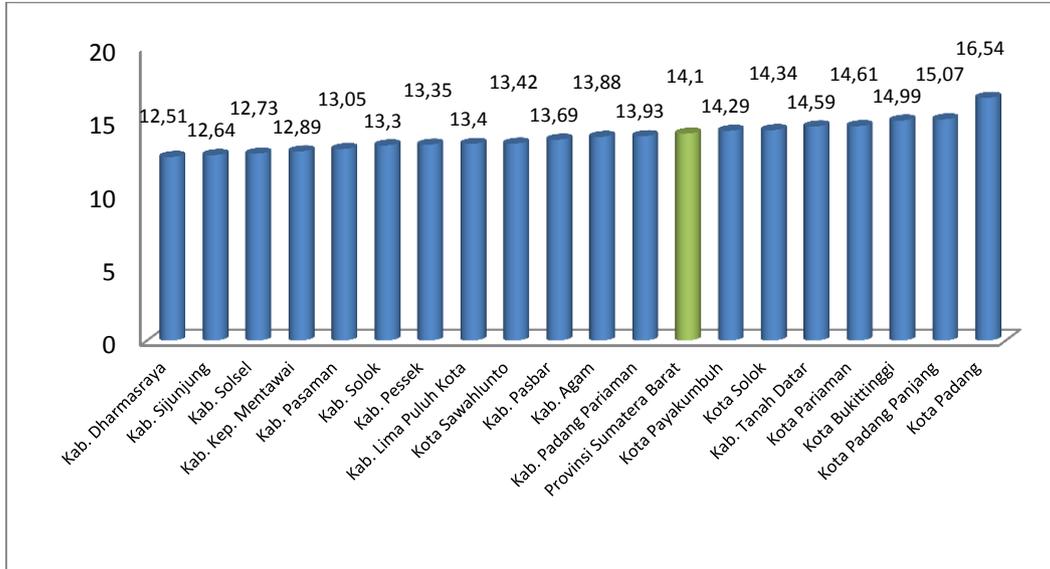
HLS tahun 2022 ditargetkan 14,05 tahun, terealisasi 14,10 dengan tingkat capaian 100,36% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Data realisasi HLS tahun 2022 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 71/12/13/Th.XXV tanggal 1 Desember 2022 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022. Angka HLS Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 14,10 tahun menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun di tahun 2022 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan sampai D II.

HLS Sumatera Barat yang tercapai 14,10 merefleksikan HLS 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota, 12 Kabupaten mencapai HLS di bawah rata-rata Provinsi dan sisanya 7 Kabupaten/Kota mencapai HLS di atas rata-rata Provinsi. HLS tertinggi berada di Kota Padang (16,54 tahun) dan terendah berada di Kabupaten Dharmasraya (12,51 tahun).

Gambaran HLS 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 18.

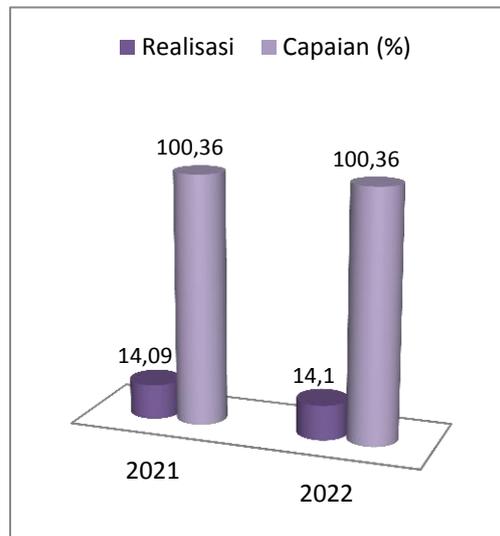
Grafik 18 Harapan Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Perhitungan capaian indikator HLS menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Dari segi capaian, baik tahun 2022 maupun tahun sebelumnya tercapai >100%. Artinya, pencapaian HLS ini telah melebihi target yang ditetapkan. Realisasi HLS tahun 2022 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan peningkatan 0,01. Perbandingan realisasi dan capaian HLS tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 19.

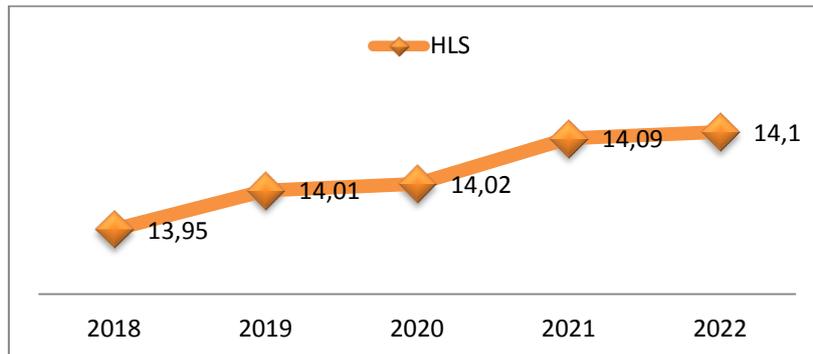
Grafik 19 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator HLS 2021-2022



Sumber data: Data diolah

HLS Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dengan peningkatan dari tahun 2018-2022 sebesar 0,15. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rata-rata meningkat pertahun adalah sebesar 0,27. Peningkatan tertinggi sebesar 0,07 terjadi di tahun 2021. Perkembangan HLS dari tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik 20.

Grafik 20 Perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2018-2022

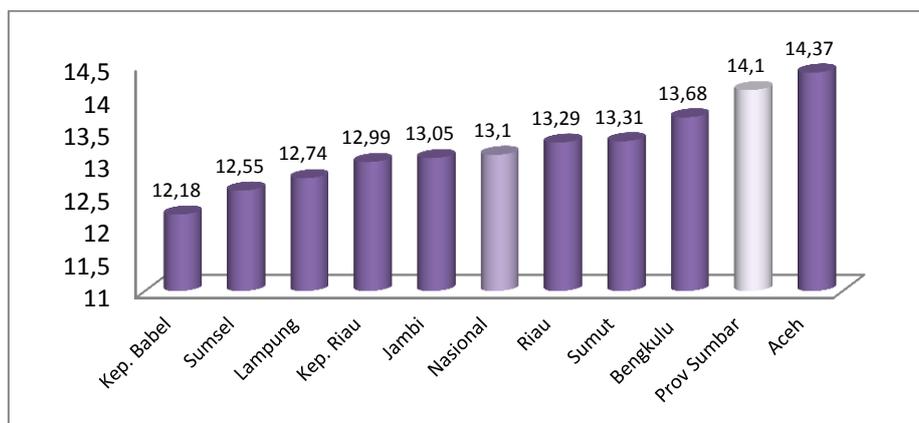


Sumber data: BPS Sumbar

HLS tahun 2022 yang tercapai 14,1 menunjukkan pencapaian 100% dari target tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Artinya, target tahun terakhir RPJMD (2026) sudah bisa dicapai di tahun 2022. Untuk target kedepannya akan dihitung kembali dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022.

Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati posisi ke 2 tertinggi setelah Provinsi NAD. Provinsi dengan HLS tertinggi ditempati oleh Provinsi NAD dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dibandingkan dengan HLS Nasional, HLS Sumatera Barat lebih tinggi 1 angka untuk tahun 2022. Perbandingan HLS Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik 21.

Grafik 21 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data: BRS terkait IPM masing-masing Provinsi

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya yang maksimal sesuai kewenangannya. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan akses sekolah melalui penambahan Unit Sekolah Baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab ruang kelas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyusunan DED untuk pembangunan 15 Sekolah (5 SMA, 5 SMK dan 5 SLB).
 - b. Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) dengan rincian 17 RKB SMA, 13 RKB SMK dan 5 RKB SLB.

No	Nama Sekolah
17 RKB SMA	
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Basa Ampek Balai, Kab. Pesisir Selatan
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Kubung, Kab. Solok
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Lunang, Kab. Pesisir Selatan
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Pariaman, Kota Pariaman
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Sikabau, Kab. Sijunjung
6	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Sungai Geringging, Kab. Padang Pariaman
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Sutera, Kab. Pesisir Selatan
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 2 Basa Ampek Balai, Kab. Pesisir Selatan
9	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 2 Lembang Jaya, Kab. Solok

No	Nama Sekolah
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 2 Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat
11	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 2 Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri 2 Kec. Kapur IX, Kab. Solok
13	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 12 Padang, Kota Padang
14	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 16 Padang, Kota Padang
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 5 Padang, Kota Padang
16	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 6 Padang, Kota Padang
17	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 9 Padang, Kota Padang
13 RKB SMK	
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 1 Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 1 Kinali Kab. Pasaman Barat
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 1 Lintau Buo Kab. Tanah Datar
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 1 Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 1 Pasaman Kab. Pasaman Barat
6	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 1 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 1 Sutera Kab. Pesisir Selatan
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 2 Bukittinggi Kota Bukittinggi
9	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 3 Kep. Mentawai Kab. Kepulauan Mentawai
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 3 Sijunjung Kab. Sijunjung
11	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 1 Baso Kab. Agam
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK N 2 Lubuk Basung Kab. Agam
13	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK PP Negeri Padang Mengatas Kab. Lima Puluh Kota
5 RKB SLB	
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru SLB Aisyiyah Sijunjung, Kab. Sijunjung
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru SLB Athallah Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru SLBN 1 Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SLBN 1 Pariaman, Kota Pariaman
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru SLBN 1 Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya

- c. Rehab Ruang Kelas tahun 2022 untuk 7 ruang kelas SMA, 11 ruang kelas SMK dan 4 ruang kelas SLB.
2. Pengangkatan guru honor menjadi P3K secara bertahap.
3. Peningkatan kompetensi guru melalui Bimtek/Sosialisasi. Selama tahun 2022 ada 13 jenis kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh 2140 orang tenaga pendidikan.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, masih ditemukan hambatan/kendala berikut ini:

1. Masih adanya SDM tenaga Pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar.
2. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
3. Masih adanya kondisi di masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah yang rendah serta perhatian orang tua yang kurang.
4. Rasio kebutuhan guru belum seimbang.

Untuk kedepannya, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan beberapa upaya akan dilakukan yaitu:

1. Arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan mengacu konsep merdeka belajar yang menghadirkan pendidikan bermutu tinggi yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.
2. Fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pematapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru), peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang

mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.

4. Meningkatkan akses sekolah melalui pembangunan 5 sekolah (2 SMA, 2 SMK, 1 SLB) di tahun 2023.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 4 Program dengan 6 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. **683.393.351.406,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pendidikan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1.1.3 dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	6	683.393.351.406	675.797.474.679
1	Program Pengelolaan Pendidikan	3	680.595.978.296	673.096.082.779
2	Program Pengembangan Kurikulum	1	331.702.960	313.736.750
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	915.670.150	847.898.150
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1	1.550.000.000	1.539.757.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **683.393.351.406,-** terealisasi sebesar Rp. **675.797.474.679,-** atau 98,89%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **7.595.876.727,-** (1,11%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan (100,18%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,89%) dengan tingkat efesiensi 1,29%.



Sasaran 1.1.4

Meningkatnya Daya Saing Masyarakat

Untuk dapat berkompetisi di tingkat regional, nasional bahkan internasional masyarakat Sumatera Barat harus memiliki daya saing. Kemampuan berkompetisi ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan. Berkaitan dengan hal tersebut,

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya daya saing masyarakat sebagai sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan SDM yang unggul.

Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas. Artinya pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengharapkan angkatan kerjanya minimal berpendidikan menengah ke atas. Pengukuran indikator ini pada tahun n didasarkan pada data persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas yang dikeluarkan oleh BPS tahun n. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran yang mempunyai tingkat pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) ke atas.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas dapat mencapai angka 49,7%. Pencapaian sasaran meningkatnya daya saing masyarakat tergambar pada tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.4



Indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas target 49,7%, terealisasi 50,23% dengan tingkat capaian 101,07% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Realisasi indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas diukur berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik kondisi Agustus 2022 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas} = \frac{1.440.828}{2.868.270} \times 100 = 50,23\%$$

Keterangan:

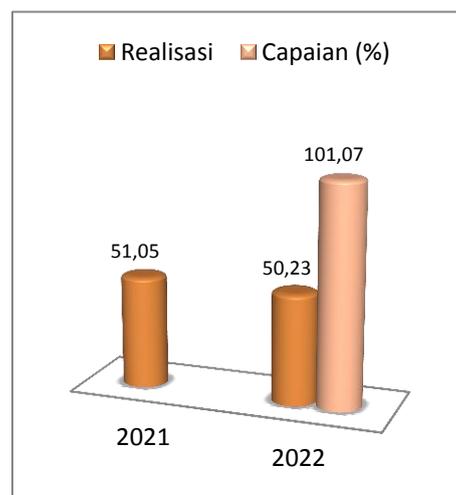
Jumlah angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas = 1.440.828 orang

Jumlah angkatan kerja = 2.868.270 orang

Perhitungan capaian indikator dari tahun 2021. Perbandingan persentase angkatan kerja capaian dan realisasi indikator berpendidikan menengah ke atas persentase angkatan kerja menggunakan *metode pengukuran* berpendidikan menengah ke atas *kriteria pertama*. Capaian indikator ini tahun 2021-2022 disajikan pada grafik di tahun 2022 sebesar 101,07% 22.

menunjukkan realisasi indikator tercapai di atas target yang ditetapkan. Dikarenakan indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022 maka capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang tersedia, terjadi penurunan angkatan kerja yang berpendidikan menengah ke atas di tahun 2022 sebesar 0,82%

Grafik 22 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 2021-2022



Sumber data: data diolah

Peningkatan daya saing masyarakat Sumatera Barat terkait dengan peningkatan pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat termasuk dan tenaga kerjanya. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat di tahun 2022 antara lain:

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui:
 - a. Melakukan pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi kepada 5363 orang tenaga kerja, pelatihan peningkatan produktivitas (P3), Pelatihan Kewirausahaan mandiri/tenaga kerja mandiri yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja se Sumatera Barat dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Peningkatan jejaring kerjasama pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi sesuai dengan aturan Permendagri baik dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta maupun Lembaga Pemerintahan.
2. Melakukan program *link and match* dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Misalnya kerjasama sekolah pariwisata dengan perhotelan.
3. Program revitalisasi SMK sesuai topografi wilayahnya.
4. Program BLUD di SMK sehingga menghasilkan produk sendiri yang bisa dijual.

Selain upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat tersebut, masih ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelatihan kerja yang belum berdasarkan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
2. Belum semua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta melalui akreditasi LPK.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dapat tercapai 49,90%. Jika melihat realisasi tahun 2022 yang tercapai 50,23 berarti realisasi tahun 2022 sudah melebihi target tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target 49,90% di tahun 2026.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan beberapa tahun yang akan data, akan dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing masyarakat antara lain

1. Fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru), peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.
3. Melaksanakan pelatihan dengan *upskilling* dan *reskilling* dan pemagangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
4. Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya daya saing masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 10 Program dengan 18 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. **16.955.585.876,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya daya saing masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1.1.4 dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.4

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	18	16.955.585.876	16.675.377.133
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4	8.333.156.061	8.207.346.230
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	4	232.276.490	230.742.870
3	Program Hubungan Industrial	3	416.843.300	410.929.233
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	722.691.600	720.545.100

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1	137.394.000	136.326.045
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	174.162.175	173.931.150
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	150.288.900	149.716.800
8	Program Penataan Desa	1	24.482.000	24.073.580
9	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	1.222.528.753	1.213.207.682
10	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	5.541.762.597	5.408.558.443

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp 16.955.585.876,-** terealisasi sebesar **Rp. 16.675.377.133,-** atau 98,35%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp. 280.208.743,-** (1,65%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya daya saing masyarakat (101,07%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (99,35%) dengan tingkat efisiensi 2,72%.

MISI 2**Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah****Tujuan 2.1  Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat**

Falsafah budaya Minangkabau '*Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*' merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal-vertikal maupun horizontal-horizontal. *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pengumpulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah Dasar dan Menengah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan sebagai tujuan kedua yang harus dicapai untuk mewujudkan Misi 2. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja

pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. IPK memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan, yang pengukurannya dilakukan berdasarkan 31 indikator yang dikelompokkan dalam 7 dimensi IPK. Pencapaian indikator indeks pembangunan kebudayaan tahun n diukur berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dapat mencapai angka 59,1 atau lebih tinggi 6,39 dari IPK tahun 2021. Pencapaian tujuan “Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat” tergambar pada tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1



Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tahun 2022 ditargetkan 59,1, terealisasi 52,71 dengan tingkat capaian 89,19% termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”.

Data realisasi IPK tahun 2022 diperoleh berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan. Dikarenakan informasi IPK tahun 2022 belum dikeluarkan oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan realisasi IPK kondisi tahun sebelumnya (2021). Rincian IPK 52,71 diuraikan pada tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Dimensi Pembentuk IPK Tahun 2018-2021

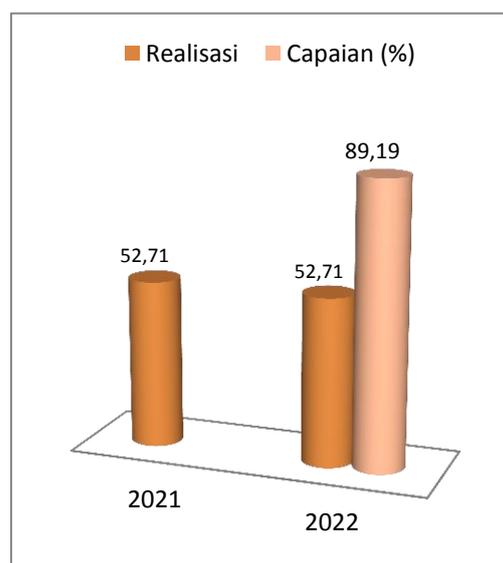
NO	DIMENSI	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Ekonomi	33,82	33,24	25,07	18,97
2	Pendidikan	72,97	75,75	73,94	72,70
3	Ketahanan Sosial Budaya	62,78	63,43	63,71	58,13
4	Warisan Budaya	43,30	46,57	48,25	52,31
5	Ekspresi Budaya	31,37	32,22	31,94	24,50
6	Budaya Literasi	57,40	60,76	62,97	61,17
7	Kesetaraan Gender	59,90	57,72	60,27	60,10
	IPK Provinsi Sumbar	52,33	54,99	54,60	52,71

Sumber data: www.ipk.kemdikbud.go.id

Perhitungan capaian indikator IPK menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian 89,19% menunjukkan realisasi IPK tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator IPK tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator IPK baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Sama halnya dengan capaian, realisasi IPK tahun 2022 juga belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan data IPK yang terakhir dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah IPK tahun 2021.

Perbandingan realisasi dan capaian IPK tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 23.

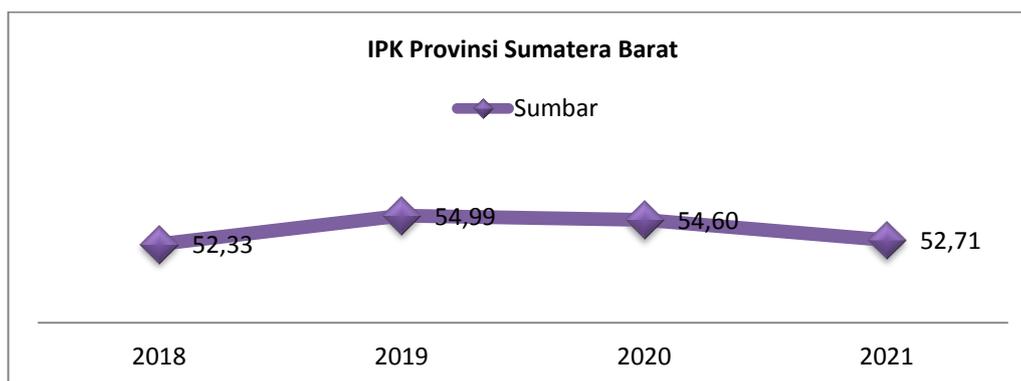
Grafik 23 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator IPK 2021-2022



Sumber data: Data diolah

IPK Sumatera Barat tahun 2018-2021 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Meningkat di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020-2021. Nilai IPK tahun 2021 jika dibandingkan dengan IPK tahun 2020 mengalami penurunan 1,89, yakni dari 54,60 tahun 2020 menjadi 52,71 pada tahun 2021. Perkembangan IPK tahun 2018-2021 digambarkan pada grafik 24.

Grafik 24 Perkembangan IPK Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2018-2021

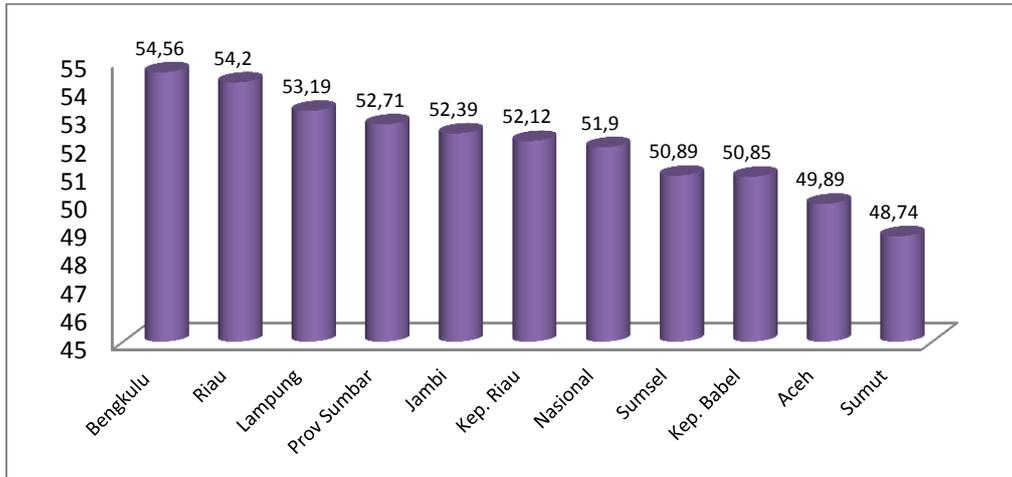


Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id

Upaya dan hambatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat di tahun 2022 akan diuraikan berdasarkan sasaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai indikator IPK.

IPK Sumatera Barat di tahun 2021, berada di atas IPK Nasional, dimana IPK Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah 52,71, dan IPK Nasional adalah 51,90. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di Peringkat 4 tertinggi setelah Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau dan Provinsi Lampung. Perbandingan IPK Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 25.

Grafik 25 Perbandingan IPK Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



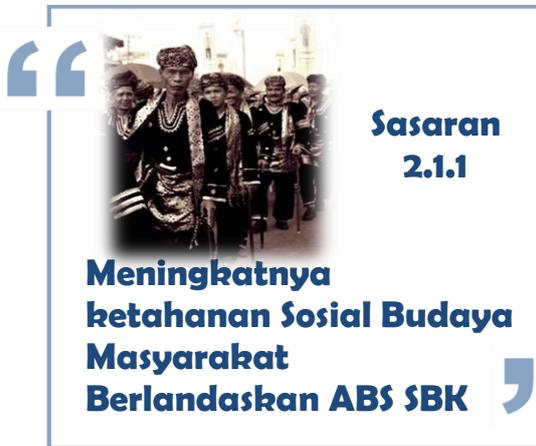
Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id

Indeks Pembangunan Kebudayaan Sumatera Barat tahun 2022 yang mencapai 52,71 menunjukkan pencapaian 81,72% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kenaikan 11,79 atau 2,95 pertahun agar target 64,50 di tahun 2026 dapat tercapai. Mempertimbangkan IPK yang cenderung menurun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya lebih optimal untuk mencapai target tersebut.

Untuk menyikapi nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat agar meningkat setiap tahunnya, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kedepannya berupaya lebih mendorong dengan dukungan program kegiatan dan peningkatan koordinasi dan fasilitasi agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Sumatera Barat yang lebih sesuai dengan karakter dan nilai ABS-SBK masyarakat di Sumatera Barat, dan mendukung capaian berbagai dimensi pendukung IPK ini.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) indikator yakni Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, Meningkatnya Budaya Literasi, dan Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:



Ketahanan Sosial Budaya dalam konteks pembangunan kebudayaan memperlihatkan bagaimana kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat menetapkan Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang berlandaskan ABS SBK sebagai sasaran yang harus dicapai untuk Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat, yang diukur menggunakan indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS). Penetapan indeks ketahanan sosial budaya ini diukur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan 8 (delapan) indikator yakni:

1. Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal,
2. Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
3. Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama.
4. Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.
5. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir
6. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong
7. Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir.

8. Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan Indeks Ketahanan Sosial Budaya dapat mencapai 62,8 atau lebih tinggi 4,67 dibandingkan dengan kondisi 2021 untuk indikator yang sama. Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK tergambar pada tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.1



Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2022 ditargetkan sebesar 62,80, terealisasi 58,13 dengan tingkat capaian sebesar 92,56% termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Data realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2022 diperoleh berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan sub komponen Indeks Ketahanan Sosial Budaya. Dikarenakan informasi IPK tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan angka Indeks Ketahanan Sosial Budaya kondisi tahun sebelumnya (2021). Realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya Sumatera Barat berada di Peringkat ke-32 dari 34 Provinsi dengan capaian 58,13 dibawah rata-rata nasional sebesar 66,83.

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan beberapa indikator dari Indeks Ketahanan Sosial Budaya ini tidak terlalu relevan dalam konteks masyarakat Sumatera Barat dan masih membutuhkan penyesuaian dengan karakter lokal di masyarakat, dimana struktur masyarakat Sumatera Barat yang masih cenderung homogen. Terdapat beberapa indikator yang diukur untuk Indeks Ketahanan Sosial Budaya ini yang cukup rendah seperti terkait

bagaimana masyarakat setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan suku yang berbeda melakukan kegiatan di sekitar tempat tinggal, dan bagaimana jika salah satu anggota rumah tangga masyarakat bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku dan agama. Apabila ini dikaitkan dengan fakta bahwa kondisi masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas sangat homogen, maka dapat difahami mengapa capaian nilai ini masih rendah. Sedangkan indikator lain terkait aktivitas sosial seperti penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan, atau yang mengikuti gotong royong, capaian Provinsi Sumatera Barat mendekati dan di atas rata-rata nasional. Rincian capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 digambarkan pada tabel berikut ini :

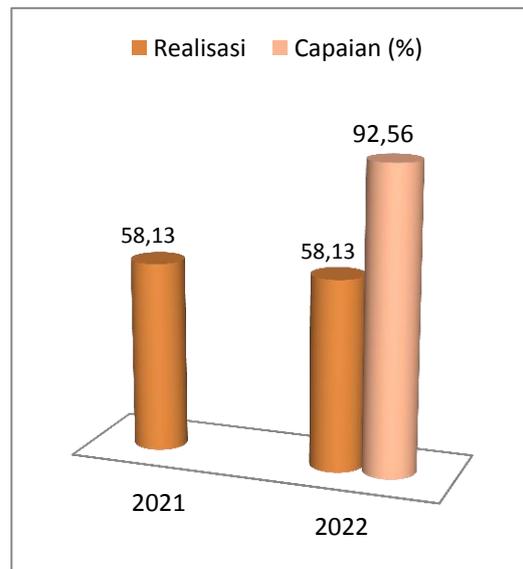
Tabel 3. 14 Rincian capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2021

No	Indikator	Sumbar
1	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	28,44
2	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	58,00
3	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama.	60,47
4	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.	84,01
5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir.	77,04
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.	33,16
7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir.	22,12
8	Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal.	68,15

Perhitungan capaian indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2022 92,56% menunjukkan realisasi tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator ini tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator indeks Ketahanan Sosial Budaya baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Sama halnya dengan capaian, realisasi tahun 2022 juga belum bisa dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan data terakhir dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2021.

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 26.

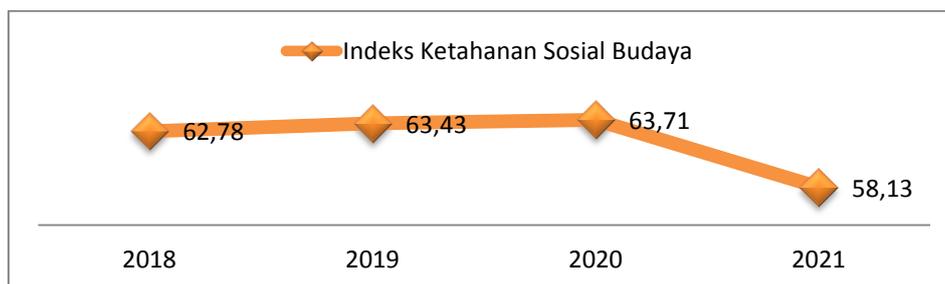
Grafik 26 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya 2021-2022



Sumber data: data diolah

Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021 menunjukkan kondisi yang berfluktuatif, meningkat dari tahun 2018-2020 dan menurun di tahun 2021. Penurunan di tahun 2021 cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menurun 5,58 poin. Perkembangan Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2018-2021 digambarkan pada grafik 27.

Grafik 27 Indeks Ketahanan Sosial Budaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021



Sumber data : www.ipk.kemdikbud.go.id

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2022 untuk mendorong peningkatan indeks ketahanan sosial budaya antara lain:

1. Memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah untuk menjaring informasi dan serta menyelesaikan permasalahan keagamaan. Peran dan dukungan dari FKUB untuk menyelesaikan permasalahan keagamaan yang ada di daerah-daerah sangat penting.
2. Memfasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Provinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi penguatan pembauran kebangsaan guna menghindari terjadinya konflik vertikal dan horizontal sehingga dapat meningkatkan komunikasi antar kelompok etnis dalam menciptakan kehidupan rukun dan damai.
3. Memfasilitasi dan mendorong FORKOPIMDA berperan aktif dalam pengambilan kebijakan yang mendukung ketahanan sosial budaya di Sumatera Barat.
4. Mendorong kolaborasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah mitra pemerintah dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berkembang dalam rangka kewaspadaan dini di daerah. Adanya fungsi dan deteksi cegah dini FKDM ini dapat mencegah terjadinya konflik di daerah

5. Memfasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat.
6. Meningkatkan patroli dan pengawasan dalam pemeliharaan trantibum di daerah.
7. Memfasilitasi dan mendorong P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
8. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan penegak hukum dan kabupaten/kota, termasuk pelaksanaan patroli dan pengawasan di sekolah bekerjasama dengan kepolisian untuk mencegah potensi terjadinya kenakalan remaja.
9. Melaksanakan fasilitasi kelembagaan Bina Spiritual.
10. Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait masalah sosial seperti razia PSK.
11. Melaksanakan kegiatan yang mendorong pembangunan dan pelestarian kebudayaan daerah.

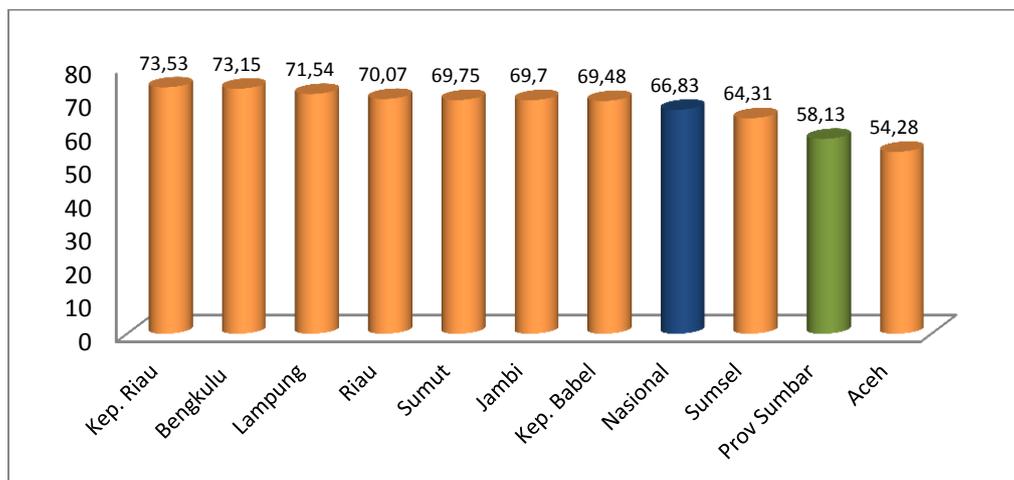
Adapun hal-hal yang yang menjadi penghambat capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Struktur masyarakat Sumatera Barat yang masih mayoritas homogen, dengan kultur budaya yang sangat kuat didukung dengan falsafah ABS-SBK, sehingga beberapa indikator indeks masih relatif kurang relevan, misalnya terkait bagaimana masyarakat setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan suku yang berbeda melakukan kegiatan di sekitar tempat tinggal, dan bagaimana jika salah satu anggota rumah tangga masyarakat bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku dan agama. Hal ini menyebabkan capaiannya masih di bawah rata-rata nasional.
2. Masih belum semua kabupaten/kota membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
3. Masih terbatasnya jumlah intelijen untuk mendeteksi semua persoalan yang ada di daerah.
4. Terdapatnya gangguan trantinbum yang membutuhkan waktu untuk penyelesaian

5. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan identitas daerah atau dalam upaya pelestarian kebudayaan.
6. Masih belum optimalnya sinergitas antar *stakeholder* kebudayaan.
7. Tindak lanjut dengan kabupaten/kota terhadap penanganan masalah sosial pasca Razia PSK tidak dapat dilakukan sehubungan dengan identitas yang telah dibina tidak ditemui/disamarkan.

Indeks Ketahanan Sosial Budaya Sumatera Barat di tahun 2021 masih berada di bawah rata-rata Nasional dengan selisih lebih tinggi 8,7 poin. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di Peringkat 9 atau Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 2 terendah setelah Provinsi Aceh. Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 28.

Grafik 28 Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data : www.ipk.kemdikbud.go.id

Indeks Pembangunan Kebudayaan Sumatera Barat tahun 2022 yang mencapai 58,13 menunjukkan pencapaian 92,42% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kenaikan 4,77 atau 1,19 pertahun agar target 64,50 di tahun 2026 dapat tercapai. Mempertimbangkan perkembangan indeks ketahanan Sosial Budaya

dari tahun 2018-2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target 64,50 di tahun 2026.

Untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan fasilitasi berbagai forum-forum strategis yang mempengaruhi capaian indeks ketahanan sosial budaya, dengan terpeliharanya kerukunan antar umat dan masyarakat yang beragam, serta penanganan berbagai permasalahan atau gangguan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan bentrokan dan kekerasan.
- b. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan sosial dan kerjasama kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan interaksi dan bauran sosial masyarakat Sumatera Barat.
- c. Meningkatkan peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menjaga toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat dan lebih memaparkan masyarakat dengan keberagaman dalam interaksi sosial keseharian.
- d. Meningkatkan koordinasi lintas *stakeholders* dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat baik dalam rangka mencegah konflik, menghentikan konflik dan memulihkan kondisi pasca konflik.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 16 Program dengan 25 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. 82.543.358.825,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 2.1.1. dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3. 15 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	25	82.543.358.825	78.198.545.760
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	977.000.000	946.715.985
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	6.534.139.200	6.413.184.503
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	540.000.000	515.579.200
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1	905.000.000	877.603.536
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	1.225.749.900	1.082.637.323
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	4.130.066.627	4.108.177.098
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2	125.000.000	124.454.300
8	Program Pengembangan Kebudayaan	3	9.177.650.475	8.933.145.895
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	2.685.868.656	2.511.376.007
10	Program Pembinaan Sejarah	1	444.595.770	440.722.484
11	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	2	135.000.000	90.272.000
12	Program Pengelolaan Permuseuman	1	2.135.093.390	2.108.382.459
13	Program Kesejahteraan Rakyat	3	33.228.717.798	30.433.909.611
14	Program Pemberdayaan Sosial	1	7.880.310.059	7.493.227.159
15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	12.300.886.500	12.000.880.200
16	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	118.280.450	118.278.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **82.543.358.825,-** terealisasi sebesar Rp. **78.198.545.760,-** atau 94,74%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **4.344.813.065,-** (5,26%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui tidak terjadi efisiensi karena capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK (92,56%) lebih rendah 2,18% dari realisasi anggaran (94,74%).



Literasi umumnya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Budaya literasi di dalam masyarakat berkaitan dengan aktivitas literasi, yang mana sangat berhubungan dengan peningkatan pendidikan

berkarakter. Budaya literasi sangat berperan penting dalam peningkatan pendidikan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Karakter merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tiap-tiap orang yang menyangkut hal kepribadian, sikap, dan tingkah laku terhadap lingkungan di sekitarnya. Eratnya hubungan antara pembentukan karakter dan budaya literasi, sehingga meningkatkan budaya literasi sangat penting dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang berbasis ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya budaya literasi yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

IPLM adalah data tingkat pembangunan masyarakat yang diperoleh dari unsur unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan Aspek Masyarakat (AM) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan

literasi masyarakat. Indikator pengukuran pada Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM) ditentukan oleh Perpunas Republik Indonesia.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat mencapai angka 13. Target tahun 2022 ini ditetapkan lebih rendah 1,17 dibandingkan dengan IPLM tahun 2021 (14,17). Pencapaian sasaran “meningkatnya budaya literasi” diuraikan pada tabel 3.16.

Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.2



Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2022 ditargetkan sebesar 13, terealisasi 14,14 (setelah 67,33 dikonversi) dengan tingkat capaian sebesar 108,77% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Realisasi nilai IPLM tahun 2022 diukur berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebelum dikonversi dengan angka 4,76 (mempedomani tabel usulan konversi skor Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target Renstra yang dikeluarkan oleh Perpunas RI), nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar **67,33** termasuk “**Kategori Sedang**” artinya secara nasional nilai IPLM tahun 2022 sudah memenuhi standar.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari akumulasi IPLM pada sembilan belas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota, Kota Bukittinggi tercatat mencapai IPLM tertinggi (93,84 atau 19,71) dan Kabupaten Solok terendah (37,76 atau 7,93). Lima Kab/Kota yang pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Padang panjang, Kab. Pasaman, dan Kab. Pesisir

Selatan. Sedangkan, lima Kab/kota yang terendah yaitu Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Solok. Terdapat 6 Kabupaten/Kota mencapai IPLM lebih rendah dari rata-rata IPLM tingkat Provinsi. Rincian IPLM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat digambarkan pada tabel 3.17.

Tabel 3. 17 IPLM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Nama Kabupaten/Kota	IPLM	IPLM (Konversi)
1	Kabupaten Agam	65,04	13,66
2	Kabupaten Dharmasraya	68,97	14,49
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	63,62	13,36
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	56,74	11,92
5	Kabupaten Padang Pariaman	55,34	11,62
6	Kabupaten Pasaman	78,19	16,43
7	Kabupaten Pasaman Barat	47,14	9,90
8	Kabupaten Pesisir Selatan	75,54	15,87
9	Kabupaten Sijunjung	61,46	12,91
10	Kabupaten Solok	37,76	7,93
11	Kabupaten Solok Selatan	49,39	10,38
12	Kabupaten Tanah Datar	56,30	11,83
13	Kota Bukittinggi	93,84	19,71
14	Kota Padang	74,45	15,64
15	Kota Padang Panjang	86,54	18,18
16	Kota Pariaman	89,64	18,83
17	Kota Payakumbuh	70,17	14,74
18	Kota Sawahlunto	74,14	15,58
19	Kota Solok	75,02	15,76

Sumber data: Perpunas RI

Perhitungan capaian indikator IPLM menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator IPLM tahun 2022 dengan capaian 108,77% menunjukkan realisasi tahun 2022 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator ini tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator IPLM baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Berdasarkan data yang tersedia, IPLM tahun 2022 lebih rendah 0,03 point dibandingkan dengan IPLM tahun 2021 (14,17). Perbandingan realisasi dan capaian IPLM tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 29.

Grafik 29 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator IPLM 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Peningkatan budaya literasi didukung oleh berbagai upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2022, upaya tersebut antara lain:

1. Mendorong peningkatan kunjungan perpustakaan, dengan berbagai kegiatan seperti melaksanakan lomba-lomba seperti lomba pidato dan penulisan naskah Bung Hatta yang diikuti oleh peserta dari SMA/SMK se Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kebangsaan dan literasi pada siswa SMA dan SMK di Sumatera Barat, dan kegiatan sosialisasi perpustakaan yang dilakukan secara *onsite* maupun secara online tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan yang ditujukan untuk pemerataan layanan perpustakaan dengan puskel (Perpustakaan keliling).
2. Meningkatkan ketersediaan koleksi perpustakaan. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan *launching I-Sumbar Mambaco* yang menyediakan koleksi buku online yang dapat di akses secara bebas oleh masyarakat. Dilaksanakan peningkatan ketercukupan koleksi perpustakaan dengan menyediakan bahan perpustakaan berdasarkan kebutuhan.
3. Meningkatkan promosi dan edukasi terkait literasi, diantaranya selain adanya Duta Baca Sumatera Barat, juga telah dikukuhkan Bunda Literasi sebagai *role model* pembudayaan kegemaran membaca di Sumatera Barat yang berperan aktif menumbuhkembangkan kegemaran membaca masyarakat Sumatera Barat. Bunda Literasi akan mendorong tim

penggerak PKK di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan untuk aktif melaksanakan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca di lingkungannya.

4. Melaksanakan kerjasama dengan instansi, sekolah, akademika, komunitas terkait dengan aktifitas berkegiatan di perpustakaan, juga dalam pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pemanfaatan aplikasi di perpustakaan
5. Memberikan pembinaan ke perpustakaan sehingga sesuai standar nasional perpustakaan secara intensif dan berkala
6. Meningkatkan kecukupan tenaga perpustakaan dan fasilitas layanan perpustakaan

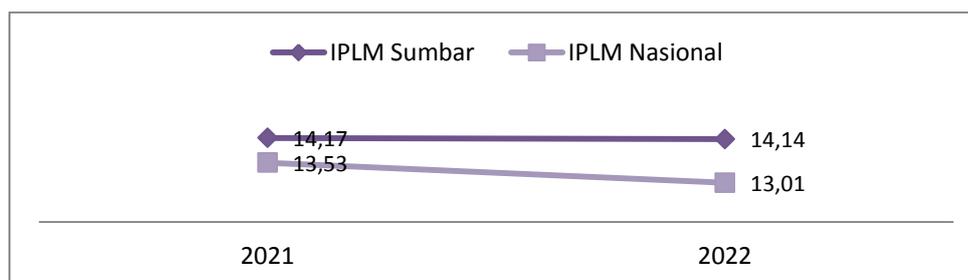
Meskipun capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada Tahun 2022 tercapai dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih banyak hambatan yang dihadapi untuk peningkatan dan pembangunan literasi masyarakat Sumatera Barat. Hambatan tersebut berasal dari internal dan eksternal yaitu:

1. Masih belum meratanya layanan perpustakaan, terutama di tingkat daerah kabupaten/kota karena setiap jenis perpustakaan yang ada baik di sekolah/nagari/kecamatan di kab/kota sebagian besar masih terbatas infrastruktur, sarana prasarana dan SDM untuk memberikan layanan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pemberian layanan. Selain itu waktu kunjungan ke perpustakaan daerah pada hari minggu sudah ditiadakan.
2. Masih terbatasnya kecukupan koleksi perpustakaan terutama pada perpustakaan desa, nagari dan perpustakaan sekolah karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan baru dan juga terbatasnya pengadaan melalui swakelola antara lain dari swadaya masyarakat serta dukungan komitmen daerah dalam pengembangan perpustakaan yang masih minim.
3. Masih terbatasnya perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) baik perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus

4. Masih terbatasnya kecukupan tenaga SDM perpustakaan (minimal 1 orang petugas perpustakaan melayani 2.500 orang pengunjung berdasarkan standar nasional).
5. Kurang fokusnya perpustakaan sekolah/desa/nagari/kelurahan karena komitmen kepala sekolah yang belum optimal, terbatasnya SDM pustakawan dengan latar belakang pendidikan perpustakaan.
6. Masih rendahnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan serta kurangnya minat masyarakat yang terlibat pada kegiatan sosialisasi perpustakaan yang dilakukan secara *onsite* maupun secara *online*.
7. Masih kurangnya komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan urusan perpustakaan daerah dan pengembangan literasi masyarakat.
8. Masih kurangnya minat masyarakat yang terlibat pada kegiatan sosialisasi perpustakaan, dan memerlukan pola kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.

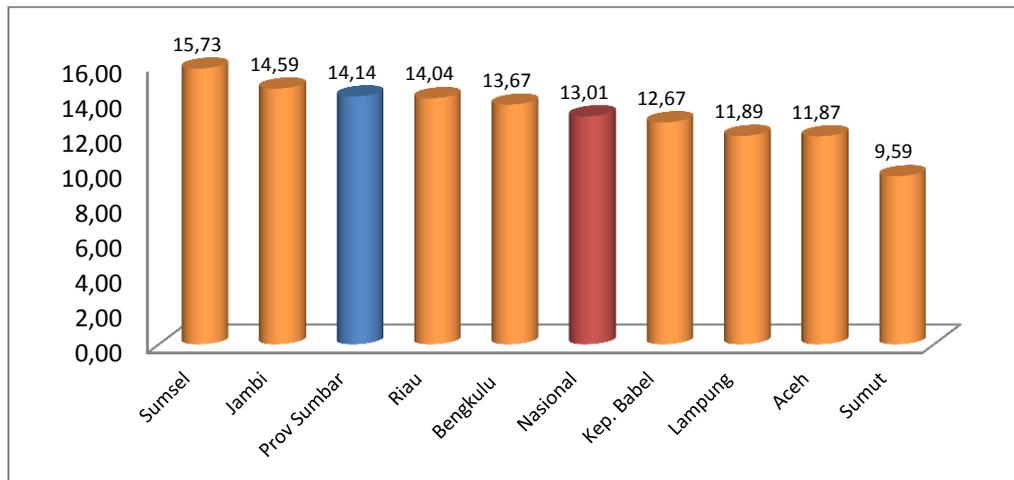
Secara Nasional pada tahun 2022, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi 14 dari 34 Provinsi di Indonesia. Pada tahun 2021-2022, IPML Sumatera Barat tercapai di atas IPLM rata-rata Nasional. Nilai IPLM Nasional tahun 2022 adalah sebesar 61,93 atau **13,01** (setelah dikonversi dengan angka **4,76**). Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, IPLM Sumatera Barat berada di posisi ke dua tertinggi setelah Provinsi Sumatera Selatan (15,73) dan Provinsi Jambi (14,59). Perbandingan nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2021-2022 digambarkan pada grafik 30 dan 31.

Grafik 30 Perbandingan Nilai IPLM Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2022



Sumber data: Perpustakaan Nasional

Grafik 31 Perbandingan Nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data: Perpustakaan Nasional

IPLM Sumatera Barat tahun 2022 yang mencapai 14,14 menunjukkan pencapaian 83,18% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kenaikan 2,86 atau 0,72 pertahun agar target 17 di tahun 2026 dapat tercapai. Mempertimbangkan perkembangan IPLM tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai IPLM 17 di tahun 2026.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya berikut ini untuk mendukung peningkatan budaya literasi:

1. Melakukan pemerataan layanan perpustakaan melalui berbagai kegiatan baik melalui pustaka keliling, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan nagari, perpustakaan di sekolah-sekolah, perpustakaan khusus di OPD/instansi.
2. Meningkatkan ketercukupan koleksi perpustakaan (buku tercetak dan buku digital).
3. Meningkatkan ketercukupan tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi dalam meningkatkan budaya literasi.
4. Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan setiap hari melalui berbagai program yang kreatif, inovatif dan berbasis masyarakat.

5. Meningkatkan jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan, dalam hal ini adalah standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.
6. Mendorong Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan sosialisasi perpustakaan yang dilakukan secara *onsite* maupun secara *online*.
7. Meningkatkan jumlah anggota perpustakaan melalui sosialisasi yang lebih massif dan kreatif.
8. Mendorong berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan minat baca dan budaya literasi dalam masyarakat, dengan berkolaborasi bersama *stakeholder* lain termasuk komunitas-komunitas berbasis masyarakat.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya budaya literasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 6 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. 1.019.023.350,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya budaya literasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 2.1.2. dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Budaya Literasi	6	1.019.023.350	998.911.770
1	Program Pembinaan Perpustakaan	2	940.373.650	920.911.770
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4	78.649.700	78.000.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 1.019.023.350,- terealisasi sebesar Rp. 998.911.770,- atau 98,03%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.111.580,- (1,97%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya budaya

literasi (108,77%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,03%) dengan tingkat efisiensi 10,74%.



Sasaran Strategis ke tiga pada Misi ke dua RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 mengukur tiga aspek kinerja. Pertama, mengukur kinerja Pembangunan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik

pada masyarakat Sumatera Barat. Kedua, mengukur kinerja pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk mendukung para perempuan agar semakin berdaya dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan serta merasakan manfaat pembangunan yang setara. Ketiga, mengukur kinerja Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memastikan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja sasaran Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tersebut, ditetapkan 4 Indikator Kinerja yang capaiannya terlihat pada tabel 3.19.

Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Keluarga	59,30	56,12	94,64
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,11	94,34*	100,24
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,12	65,12*	110,15
Indeks Perlindungan Anak	65,85	61,98	94,12
Rata-rata Capaian			99,79

Rata-rata capaian Sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tercapai 99,79% dengan kategori keberhasilan “sangat baik”. Penjelasan masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Keluarga



Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan.

Keberhasilan pembangunan kualitas keluarga diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang diperoleh dari pengukuran dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. iBangga menggambarkan potret peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah Indonesia.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 di targetkan pada RPJMD 2021-2026 sebesar 59,30, terealisasi sebesar 56,12 dengan tingkat capaian sebesar 94,64% termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”.

Realisasi Data iBangga disajikan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BKKBN (Analisis dari Pendataan Keluarga tahun 2022). Adapun penghitungan iBangga dari setiap dimensi dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\text{iBangga} = \frac{(58,63 + 53,18 + 56,56)}{3} = 56,12$$

Keterangan:

Indeks ketentraman Sumbar 2022 = 58,63

Indeks kemandirian Sumbar 2022 = 53,18

Indeks kebahagiaan Sumbar 2022 = 56,56

Dari realisasi iBangga Provinsi Sumatera Barat sebesar 56,12, dapat diartikan bahwa Pembangunan Keluarga Sumatera Barat berada pada posisi “Berkembang” (40-70). Dari ke tiga dimensi pembangun iBangga, dimensi ketentraman memiliki kontribusi tertinggi.

Capaian indikator iBangga tahun 2022 diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian tahun 2021 dan 2022 tidak dapat dibandingkan karena iBangga merupakan indikator yang baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Dari segi realisasi, iBangga Sumatera Barat tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,58 poin, dari 53,54 menjadi 56,12. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan dari ketiga dimensi pembangunnya. Perbandingan iBangga tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3. 20 iBangga Provinsi Sumatera Barat dan dimensi pembangunnya Tahun 2021 dan 2022

Keterangan	2021	2022
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53,54	56,12
Indeks ketentraman	55,67	58,63
Indeks kemandirian	51,18	53,18
Indeks kebahagiaan	53,78	56,56

Faktor Keberhasilan dalam upaya pencapaian target iBangga pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan advokasi dan KIE melalui kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pengelolaan program ketahanan keluarga dengan meningkatkan kapasitas mitra atau organisasi kemasyarakatan.

2. Melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan melalui ASN Model program KKBPK sebagai Duta ASIK (ASN Informan KKBPK).
3. Melakukan integrasi program KKBPK pada perangkat daerah di Provinsi melalui sosialisasi dan promosi tentang program KKBPK dan Gerakan Bersama Cegah *Stunting*.
4. Melakukan Sosialisasi Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sumatera Barat 2019-2039 serta melakukan advokasi dan sosialisasi GDPK ke Kabupaten/Kota agar segera melakukan penyusunan dan pemanfaatan GDPK di daerah masing-masing.
5. Mendukung Nota Kesepakatan yang digagas oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
6. Melakukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah Provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk melalui penyerasian kebijakan pembangunan daerah Provinsi terhadap program KKBPK serta melakukan pemanfaatan GDPK Provinsi Tahun 2019 - 2039.
7. Melakukan koordinasi, penyediaan dan pengolahan data kependudukan berbasis Keluarga.
8. Melakukan pengembangan dan penyediaan materi dan sarana promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK sesuai kearifan local.
9. Melakukan pengembangan dan penguatan jejaring kemitraan dalam program KKBPK.
10. Melakukan koordinasi dan pembinaan dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB.
11. Melaksanakan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK.

Faktor penghambat/permasalahan yang dihadapi dalam capaian iBangga adalah:

1. Indeks Pembangunan Keluarga sebagai alat ukur pembangunan keluarga merupakan hal yang baru sehingga belum banyak *stakeholders* baik pusat,

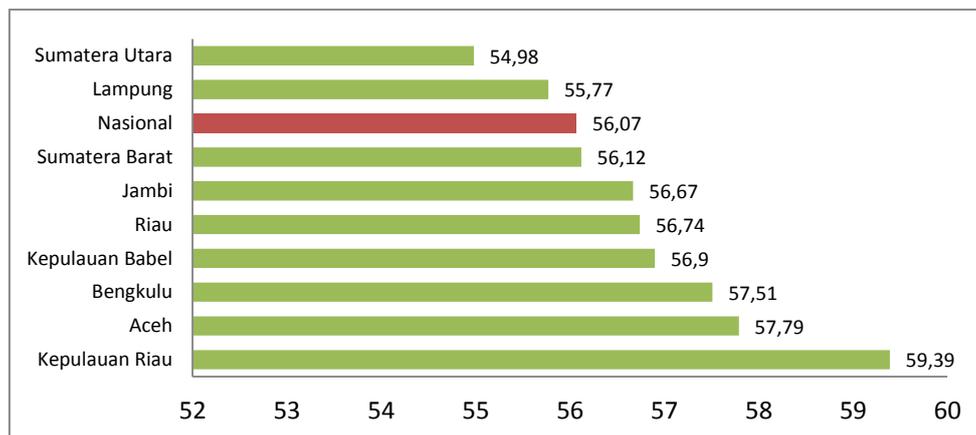
Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang memahami konsep iBangga, sehingga keberhasilan nilai iBangga sangat tergantung pada pelaksanaan dan komitmen lintas sektor yang terkait.

2. Masih terbatasnya bahan advokasi dan KIE terkait iBangga, baik untuk melakukan advokasi kepada *stakeholders* terkait maupun KIE kepada masyarakat.

Dari 34 Provinsi di Indonesia, pencapaian iBangga Sumatera Barat berada pada urutan ke 17. iBangga tertinggi dicapai oleh Provinsi DI. Yogyakarta (59,42) yang kemudian diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau (59,39), Provinsi Bali (58,97), Jawa Tengah (58,16) dan Provinsi Jawa Barat (57,87). iBangga terendah adalah 46,32 yang berada di Provinsi Papua.

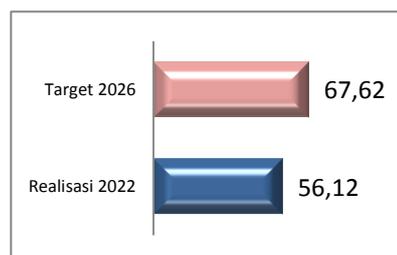
Jika dibandingkan dengan rata-rata iBangga secara Nasional, pencapaian iBangga Sumatera Barat 0,05 lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional (56,07). Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, iBangga Sumatera Barat berada pada posisi ke 8. Perbandingan iBangga Provinsi di Pulau Sumatera dengan Nasional digambarkan pada grafik 32.

Grafik 32 Perbandingan iBangga Provinsi di Pulau Sumatera dengan Nasional



Sumber data: BKKBN (Analisis dari Pendataan Keluarga tahun 2022)

Sesuai RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, target iBangga di tahun 2026 ditetapkan 67,62. iBangga tahun 2022 yang terealisasi 56,12 menunjukkan pencapaian 82,99% dari target tahun 2026. Untuk



merealisasikan target tahun 2026 dibutuhkan kenaikan 11,5 poin. Melihat tren realisasi iBangga dalam 3 tahun ini yang selalu mengalami peningkatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target 2026 tersebut.

Agar tercapainya target jangka menengah pada Indikator Kinerja iBangga, maka upaya yang perlu dilaksanakan dan dimaksimalkan pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mendorong ditetapkannya kebijakan implementasi iBangga pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Mendorong kebijakan yang mampu merangkul seluruh lintas sektor agar bisa berkontribusi untuk pencapaian iBangga.
3. Menyusun bahan advokasi dan KIE yang komprehensif sesuai konsep iBangga.
4. Melaksanakan advokasi kepada *stakeholders* di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan pembangunan keluarga sesuai dengan komponen-komponen pendukung iBangga.

Untuk mendukung pencapaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 4 Program dengan 7 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. **851.186.650,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai indikator Indeks Pembangunan Keluarga. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung indikator Indeks Pembangunan Keluarga dapat dilihat pada tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung indikator Indeks Pembangunan Keluarga

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Indeks Pembangunan Keluarga	7	851.186.650	848.323.109
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	273.460.000	273.276.783
2	Program Pengendalian Penduduk	2	143.638.000	142.936.900
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2	143.318.650	142.526.500
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2	290.770.000	289.582.926

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 851.186.650,-** terealisasi sebesar **Rp. 848.323.109** atau 99,66%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp. 2.863.541,-** (0,34%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga dengan realisasi anggaran diketahui tidak terdapat efisiensi, hal ini dikarenakan capaian indikator kinerja (94,64%) lebih rendah 5,02% dari realisasi anggaran (99,66%).

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk menggambarkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan dengan menggunakan dimensi yang sama dengan Pembangunan Manusia yaitu dimensi kesehatan (Angka Harapan Hidup), dimensi pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan dimensi ekonomi (Pengeluaran per Kapita). Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial sehingga perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2022 di targetkan pada RPJMD 2021-2026 sebesar 94,11, terealisasi sebesar 94,34 dengan tingkat capaian sebesar 100,24 % termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi IPG dihitung berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Tahun 2022 update tanggal 7 Maret 2022 (analisis data tahun 2021). Rincian perhitungan IPG adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pembangunan Gender (IPG)} = \frac{71,72}{76,02} \times 100 = 94,34$$

Keterangan :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan 2021 = 71,72

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki 2021 = 76,02

Uraian data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.22.

Tabel 3. 22 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sumatera Barat

INDIKATOR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Angka Harapan Hidup	67,70	71,57
Harapan Lama Sekolah	13,70	14,61
Rata-rata Lama Sekolah	9,18	8,96
Pengeluaran per Kapita*	15031*	9707*
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,02	71,72

*analisis data tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.22 diperoleh informasi sebagai berikut:

1. IPM laki-laki masih lebih tinggi 4,3 poin dibandingkan IPM Perempuan di Sumatera Barat
2. Dari 4 indikator pembangun IPM, 2 indikator yaitu angka harapan hidup dan harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Untuk indikator rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita laki-laki selalu lebih tinggi dibanding perempuan.

Berdasarkan data IPG 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 12 Kabupaten/Kota tercatat memiliki IPG lebih tinggi dari rata-rata IPG di tingkat Provinsi. Kota Bukittinggi memiliki Nilai IPG tertinggi, dengan nilai indeks 98,99 kemudian diikuti Kota Pariaman dan Kota Payakumbuh dengan nilai indeks 98,62 dan 98,60. Sebaliknya, Kabupaten Dharmasraya memiliki nilai IPG terendah sebesar 88,32 dan diikuti oleh Kepulauan Mentawai sebesar 89,81. Artinya ketimpangan antara IPM Laki-laki dan Perempuan pada dua daerah ini cukup tinggi. Daftar Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021 disajikan pada tabel 3.23.

Tabel 3. 23 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021

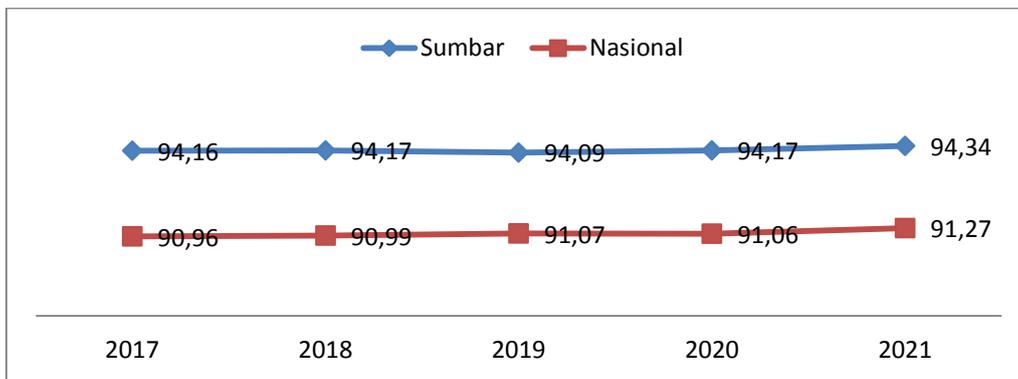
NO	KABUPATEN/KOTA	IPG
1	Kota Bukittinggi	98.99
2	Kota Pariaman	98.62
3	Kota Payakumbuh	98.60
4	Kota Padang Panjang	97.78
5	Kab. Tanah Datar	97.58
6	Kota Solok	97.05
7	Kab. Agam	96.95
8	Kab. Solok	96.19
9	Kota Sawahlunto	95.73
10	Kab. Pesisir Selatan	95.41
11	Kab. Solok Selatan	95.14
12	Kab. Lima Puluh Kota	94.91
13	Provinsi Sumatera Barat	94.34
14	Kota Padang	93.81
15	Kab. Sijunjung	93.40
16	Kab. Padang Pariaman	92.78
17	Kab. Pasaman	92.47
18	Kab. Pasaman Barat	90.14
19	Kab. Kepulauan Mentawai	89.81
20	Kab. Dharmasraya	88.32

Sumber data: BPS

Perhitungan capaian indikator IPG menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator IDG merupakan indikator yang baru muncul pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan tahun 2022 ini adalah tahun pertama dalam penetapan targetnya. Sehingga untuk capaian kinerja IDG tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun berdasarkan data yang tersedia dapat diketahui IDG Sumatera Barat tahun 2021 naik 0,17 dibandingkan tahun sebelumnya.

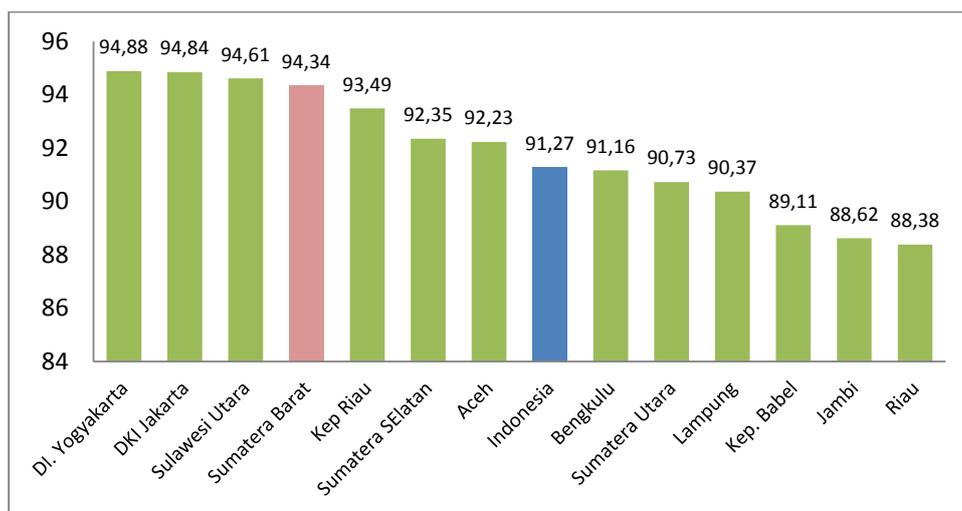
Pembangunan Gender (IPG) di Sumatera Barat mengalami peningkatan dalam 5 Tahun terakhir, kecuali di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan capaian IPM Sumatera Barat yang terus meningkat setiap tahunnya baik laki-laki maupun perempuan. Secara Nasional IPG Sumatera Barat selalu berada di atas Nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain, IPG Sumatera Barat berada pada peringkat pertama se Sumatera dan Peringkat keempat se Indonesia setelah D.I Yogyakarta (94,88), DKI Jakarta (94,84), dan Sulawesi Utara (94,61). Peningkatan IPG Sumatera Barat dan Nasional selama 5 Tahun terakhir dan perbandingan IPG dengan Provinsi lain di Indonesia terlihat pada grafik 33 dan 34.

Grafik 33 Perkembangan IPG Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2017-2021



Sumber data: BPS

Grafik 34 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi di Indonesia



Sumber data: BPS

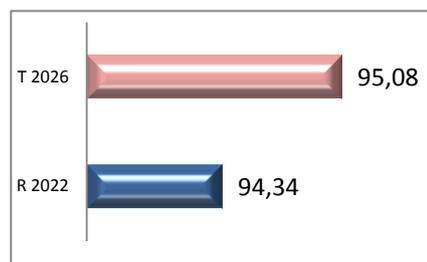
Beberapa upaya yang dilakukan di tahun 2022 dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) diantaranya adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi, Roadshow Pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten/Kota.
- b. Mengadakan pelatihan manajemen Kasus Kekerasan.
- c. Melakukan pembinaan dan penguatan terhadap lembaga layanan perlindungan perempuan.
- d. Melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- e. Melaksanakan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik tentang keberadaan UPTD PPA sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender adalah :

- a. Belum adanya Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus.
- b. Belum adanya Rumah Perlindungan sehingga layanan penampungan sementara belum dapat diberikan.
- c. Rendahnya pendidikan dan pemahaman perempuan mengenai hak-haknya serta paradigma masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing sehingga apabila terjadi kekerasan, banyak dari masyarakat yang enggan memberikan pertolongan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2026 ditargetkan sebesar 95,08. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kenaikan sebanyak 0,74 dari realisasi tahun 2022 (94,34). IPG tahun 2022 ini merupakan pencapaian 99,25%



dari target tahun 2026. Mempertimbangan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis bisa mencapai target 95,08 di tahun 2026.

Untuk kedepannya, perlu dilakukan upaya-upaya dan strategi untuk percepatan pencapaian IPG yaitu:

- a. Kesenjangan gender yang masih terlihat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, harus direspon melalui langkah dan tindakan kongkrit dalam bentuk kebijakan, Regulasi, program, dan kegiatan.
- b. Reformasi di bidang hukum, sistem dan budaya di masyarakat dilakukan secara simultan agar berbagai diskriminasi gender dapat dihentikan, terutama pada perempuan.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur dalam tiga dimensi yaitu (1) keterwakilan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen, (2) dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, dan (3) dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 di targetkan pada RPJMD 2021-2026 sebesar 59,12, terealisasi sebesar 65,12 dengan tingkat capaian sebesar 110,15% termasuk kategori keberhasilan “**memuaskan**”.

Realisasi IDG tahun 2022 dihitung berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS tahun 2022 *update* tanggal 13 April 2022 (analisis data tahun 2021). Nilai Ketiga dimensi/komponen pendukung IDG adalah:

1. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 10,77%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (4,62%), porsi keterlibatan perempuan di parlemen meningkat cukup signifikan sebesar 6,15%.
2. Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan/tenaga profesional sebesar 59,09%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (58,97%), porsi keterlibatan perempuan di parlemen meningkat sebesar 0,12%.
3. Persentase sumbangan pendapatan perempuan sebesar 37,43%. Terjadi penurunan sebesar 0,14% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh memiliki Nilai IDG tertinggi, dengan nilai indeks 71,58 kemudian diikuti Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto dengan nilai indeks 66,62 dan 65,48. Hal ini menunjukkan proporsi perempuan di parlemen, sebagai tenaga profesional dan dalam sumbangan pendapatan lebih tinggi dibanding daerah lain pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sebaliknya, daerah dengan nilai IDG terendah yaitu Kabupaten Padang Pariaman sebesar 46,64 dan diikuti oleh Kepulauan Mentawai sebesar 47,36. Daftar IPG Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021 digambarkan pada table 3.24.

Tabel 3. 24 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	IDG
1	Kota Payakumbuh	71.58
2	Kota Padang Panjang	66.62
3	Kota Sawahlunto	65.48
4	Kota Padang	65.33
5	Provinsi Sumatera Barat	65.12
6	Kota Solok	63.09
7	Kab. Agam	63.07
8	Kab. Pasaman	62.74
9	Kab. Solok	61.57
10	Kab. Sijunjung	60.46
11	Kab. Pasaman Barat	60.38
12	Kota Bukittinggi	60.19
13	Kab. Tanah Datar	59.70
14	Kota Pariaman	53.42

No	Kabupaten/Kota	IDG
15	Kab. Pesisir Selatan	53.39
16	Kab. Dharmasraya	50.66
17	Kab. Lima Puluh Kota	50.59
18	Kab. Solok Selatan	47.86
19	Kab. Kepulauan Mentawai	47.36
20	Kab. Padang Pariaman	46.64

Sumber data: BPS

Perhitungan capaian indikator IDG menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Sama halnya dengan indikator IPG, Indikator IDG juga merupakan indikator yang baru muncul pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan tahun 2022 ini adalah tahun pertama dalam penetapan targetnya. Sehingga untuk capaian kinerja IPG tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun berdasarkan data yang tersedia dapat diketahui IPG Sumatera Barat tahun 2021 naik 6,84 dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian IDG Provinsi Sumatera Barat jika dilihat selama 5 tahun terakhir menunjukkan *tren* yang berfluktuatif. Sempat mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2019 dibanding tahun 2018, dengan penurunan sebanyak 6,61 poin menjadi 59,09, namun di tahun 2021 melesat secara signifikan menjadi 65,12. Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan proporsi keterlibatan perempuan di parlemen, dari 4,62% tahun 2020 menjadi 10,77% di tahun 2021.

Pencapaian target Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di dukung oleh faktor-faktor yaitu:

1. Pemerintah daerah mendukung konsep kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai keterwakilan perempuan 30% mengikuti pemilihan umum.

Beberapa upaya telah dilakukan dalam pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

1. Mengadakan peningkatan ekonomi perempuan melalui bimbingan teknis untuk peningkatan SDM dan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan Keterampilan bagi perempuan marginal yang terdiri dari perempuan Kepala Keluarga, perempuan Penyandang cacat, perempuan pemula usaha, perempuan pelaku industri rumahan, perempuan korban kekerasan agar dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan maupun Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
2. Melakukan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dengan mendorong lembaga kaukus perempuan politik, organisasi perempuan dan serta filantropi terkait.
3. Pendampingan dan advokasi serta sosialisasi peningkatan pemberdayaan perempuan.

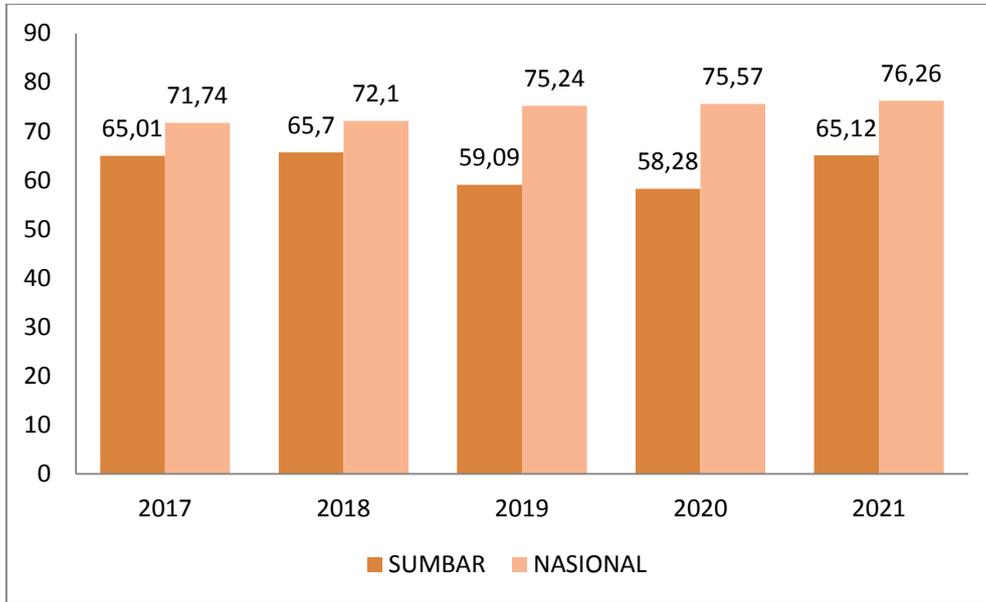
Sedangkan hambatan yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Faktor budaya dimana pola pikir masyarakat Sumatera Barat yang mengacu pada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah mempengaruhi cara mereka dalam menetapkan hak pilihnya.
2. Masih lemahnya pengetahuan dan keterampilan perempuan pekerja secara umum, kecenderungan perempuan untuk memprioritaskan keluarga dibandingkan karir, serta paradigma terhadap keberadaan perempuan sebagai pengambil kebijakan.
3. Faktor budaya dimana banyak dari perempuan bekerja yang berhenti bekerja setelah memiliki Keluarga.
4. Belum teradvokasi dan tersosialisasinya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan secara optimal.

Jika dibandingkan dengan IDG Nasional, selama 5 tahun terakhir IDG Sumatera Barat selalu berada di bawah IDG Nasional. Tahun 2021 berada di bawah angka nasional sebesar 11,14 poin. Jika dibandingkan dengan 10 Provinsi di

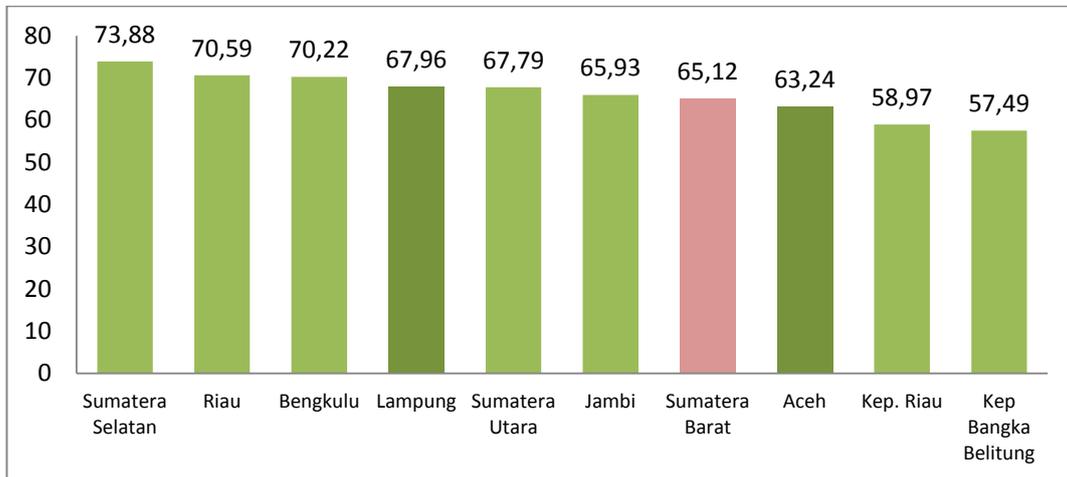
Pulau Sumatera, IDG Sumatera Barat tahun 2021 berada pada peringkat ke 7. Perbandingan IDG Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 35 dan grafik 36.

Grafik 35 Indeks Pembangunan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



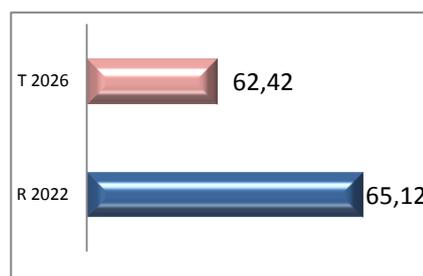
Sumber data: BPS

Grafik 36 Indeks Pembangunan Gender (IDG) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021



Sumber data: BPS

Jika melihat target jangka menengah pada indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 62,42 (2026), dibandingkan dengan realisasi tahun pertama sebesar 65,12 (2022), realisasi tahun pertama sudah melebihi target akhir tahun RPJMD, sehingga perlu dilakukan pengukuran kembali untuk menetapkan target pada tahun berikutnya.



Untuk kedepannya tersebut perlu dilakukan upaya-upaya dan strategi untuk percepatan pencapaiannya, diantaranya:

1. Penyediaan anggaran yang optimal untuk Program dan Kegiatan Pemberdayaan perempuan
2. Peningkatan SDM melalui ToF dan ToT bagi fasilitator pemberdayaan perempuan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Mendorong pihak swasta/lembaga non pemerintah serta lembaga layanan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan melalui program dan kegiatan seperti CSR dan budaya politik perempuan.

Untuk mendukung pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 7 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. 3.734.885.761,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai indikator Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.25.

Tabel 3. 25 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	7	3.734.885.761	3.648.877.012
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3	3.283.412.611	3.266.241.712
2	Program Perlindungan Perempuan	3	322.573.850	254.115.200
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	128.899.300	128.520.100

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.734.885.761,- terealisasi sebesar Rp. 3.648.877.012,- atau 97,70%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 86.008.749,- (2,30%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui tidak terjadi efisiensi, hal ini dikarenakan rata-rata capaian 2 indikator kinerja tersebut (79,73%) lebih rendah 17,97% dari realisasi anggaran (97.70%).

4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)



Anak merupakan sumberdaya pembangunan jangka panjang yang harus diperhitungkan kualitasnya, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya melalui berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bebas dari kemiskinan, sehat, terdidik, aman dan bahagia adalah landasan bagi upaya penciptaan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat berkontribusi secara produktif bagi kemajuan bangsa. Investasi pada upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak merupakan investasi strategis bagi pembangunan berkelanjutan bagi

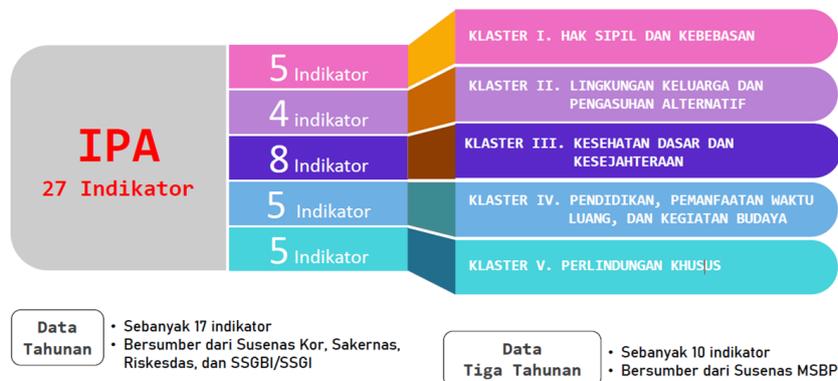
Indonesia. Kegagalan penjaminan proses tumbuh kembang anak akan memiliki dampak negatif jangka panjang bagi negara.

Upaya keberhasilan pembangunan perlindungan anak diukur dengan dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA), dimana hasilnya dapat menjadi barometer rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA merupakan ukuran keberhasilan pemenuhan hak anak dari sisi Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus.



Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2022 di targetkan pada RPJMD 2021-2026 sebesar 65,85, terealisasi sebesar 61,98 dengan tingkat capaian sebesar 94,12% termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Realisasi IPA dihitung berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS dari hasil pengukuran Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) yang terdiri dari 4 klaster dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang terdiri dari 1 klaster. Data IPA yang terakhir dipublikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah analisa data tahun 2021.



Berdasarkan penilaian terhadap indikator masing-masing klaster pembentuk IPA tersebut, maka diperoleh nilai IPA sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Klaster Pembangun Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2020 dan 2021

KETERANGAN	2020	2021
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67,21	61,98
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	66,15	59,64
Hak Sipil & kebebasan	52,96	47,72
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	83,38	85,02
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	72,34	73,17
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	53,9	28,67
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	72,62	72,86
Perlindungan Khusus	70,7	70,01

Berdasarkan tabel 3.26 klaster pembangun IPA Sumatera Barat tahun 2021 yang berkontribusi paling tinggi adalah klaster dari IPHA yaitu lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 85,02, kemudian diikuti oleh klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebesar 73,17. Kedua klaster ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Sedangkan klaster Hak sipil dan kebebasan dan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada tahun 2021 berkontribusi lebih kecil dalam pembentukan nilai IPHA karena mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Sedangkan dari klaster pembentuk IPKA yaitu perlindungan khusus, juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam membentuk nilai IPA Tahun 2021, walaupun mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar 0,69 poin. Penurunan perlindungan khusus tahun 2021 terjadi akibat menurunnya rasio anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang sedang bersekolah dari 82,46 menjadi 77,58, kemudian meningkatnya persentase anak yang hidup di bawah garis kemiskinan dari 8,36% tahun 2020 menjadi 9,24% tahun 2021 dan meningkatnya persentase anak usia 0-17 tahun yang terlantar dari 0,63% menjadi 1,65%.

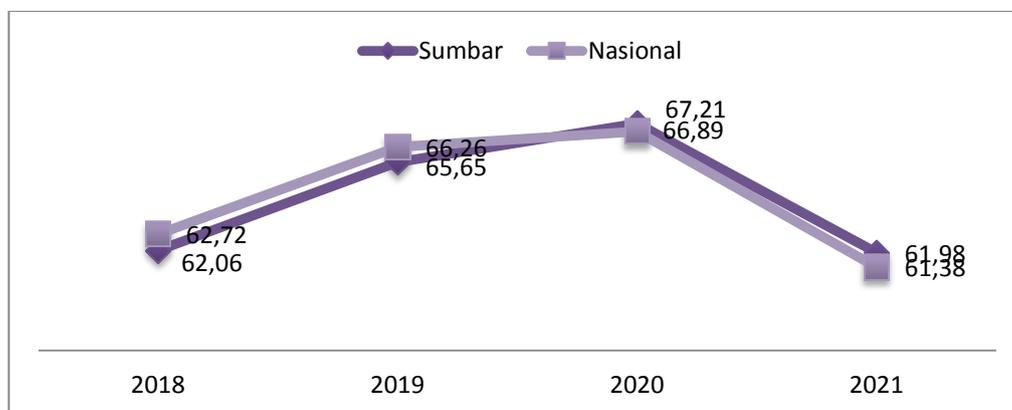
Perhitungan capaian indikator IPA menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022

Sehingga untuk capaian kinerja IPA tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan data yang tersedia dapat diketahui IPA Sumatera Barat tahun 2021 turun 5,23 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam empat tahun terakhir, capaian IPA Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2020 sebesar 5,15 poin dari 62,06 pada tahun 2018 menjadi 67,21 pada tahun 2020. Namun, terjadi penurunan ditahun 2021 sebesar 5,23 poin menjadi 61,98.

Jika dibandingkan dengan IPA Nasional, IPA Sumatera Barat Tahun 2021 sama-sama mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun IPA Sumatera Barat masih berada sedikit di atas angka nasional sebesar 0,6 poin. Berbeda dengan Tahun 2020 berada 0,32 poin di atas IPA Nasional. Peningkatan kinerja ini dianggap sangat baik, melihat dua tahun sebelumnya (2018-2019) IPA Sumatera Barat masih di bawah Nasional. Perkembangan IPA Sumatera Barat dan Nasional 2018-2021 dapat dilihat pada grafik 37.

Grafik 37 Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2021



Perlindungan anak di Sumatera Barat telah diimplementasikan melalui upaya:

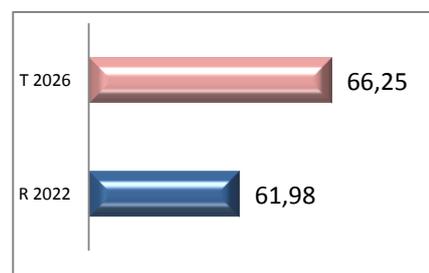
- a. Penetapan kebijakan tentang perlindungan anak dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- b. Penguatan koordinasi dengan pemerintah Pusat/Kementerian PPPA, Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan *stakeholder* terkait Percepatan pemenuhan hak sipil anak, khususnya bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- c. Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka percepatan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan.
- d. Melakukan Pembinaan ke Kabupaten/Kota melalui sosialisasi, bimbingan teknis terkait pencegahan Kejahatan Seksual Anak.
- e. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ABH di Kabupaten/ Kota.
- f. Melakukan Pembinaan ABH di Lembaga LPKA tanjung Pati.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan anak:

1. Faktor Ekonomi Orang Tua Korban/Pelaku.
2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
3. Kurangnya kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan seksual terhadap anak dan pergaulan anak.
4. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya.
5. Dengan adanya pandemi Covid 19 ini, dimana kegiatan pembelajaran dilakukan secara online menyebabkan interaksi anak dengan Gadget (*handphone*) semakin tidak bisa dipisahkan.

Pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026, IPA ditargetkan dapat mencapai angka 66,25. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 61,98, berarti pencapaian tahun 2022 baru mencapai 93,22% dari target tahun 2026.



Dibutuhkan kenaikan 4,27 poin untuk mencapai target tahun 2026. Mempertimbangkan kenaikan IPA beberapa tahun terakhir dan upaya optimal yang akan dilakukan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Upaya yang akan dilakukan kedepannya untuk meningkatkan perlindungan anak antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi terkait Layanan UPTD DPPA dan perda terkait perlindungan perempuan dan anak.
2. Lebih optimal untuk melakukan Sosialisasi dan Advokasi terkait Perlindungan Anak.

Untuk mendukung pencapaian indikator Indeks Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 3 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. **3.734.885.761,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai indikator Indeks Perlindungan Anak. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung indikator Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 3.27.

Tabel 3. 27 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Indeks Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Indeks Perlindungan Anak	3	2.471.894.575	2.314.044.644
1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2	281.141.150	277.515.488
2	Program Perlindungan Khusus Anak	1	2.190.753.425	2.036.529.156

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **2.471.894.575,-** terealisasi sebesar Rp. **2.314.044.644,-** atau 93,61%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **157.849.931,-** (6,39%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (94,12%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (93,61%) dengan tingkat efisiensi 0,51%.



Misi 3

Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tujuan 3.1 Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Sektor pertanian merupakan sub sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan pertanian merupakan salah satu bagian yang pada akhirnya harus dilaksanakan secara keseluruhan dan berkelanjutan karena menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi, ekologi, lingkungan pengembangan wilayah dan banyaknya tenaga kerja yang terlibat serta menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian sehingga berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Barat tahun 2018-2022 yang selalu menjadi paling besar. Oleh karena itu sektor pertanian menjadi salah satu yang menjadi fokus pembangunan Sumatera Barat. Selain itu kesejahteraan petani juga menjadi perhatian. Petani yang lebih sejahtera, lebih memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Dipandang demikian, maka kesejahteraan memiliki nilai intrinsik dan nilai instrumental sehingga sudah semestinya dijadikan sebagai prioritas utama tujuan pembangunan pertanian. Oleh karena fungsi sentralnya sebagai tujuan dan instrumen pembangunan pertanian, maka sudah semestinya pula kesejahteraan petani dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan teratur sebagai bahan manajemen operasional maupun evaluasi kinerja pembangunan pertanian. Kesejahteraan petani adalah konsep yang subyektif, abstrak dan kompleks. Kesejahteraan biasanya diukur dengan indikator tertentu.

Untuk mengukur tujuan meningkatnya kesejahteraan petani, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan petani. Pengukuran indikator ini berdasarkan pada rata-rata pencapaian 5 indikator yaitu pendapatan pembudidaya ikan, pendapatan nelayan, pendapatan peternak, pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dan pendapatan petani hutan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan pendapatan petani meningkat 5% di tahun 2022 dibandingkan dengan pendapatan petani tahun 2021. Persentase peningkatan pendapatan petani tahun 2022 ditetapkan lebih rendah 1,7 dibandingkan dengan peningkatan pendapatan petani yang sudah tercapai di tahun 2021. Pencapaian tujuan “meningkatnya kesejahteraan petani” tergambar pada tabel 3.28.

Tabel 3. 28 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1



Pada tahun 2022, indikator persentase peningkatan pendapatan petani ditargetkan 5%, terealisasi 6,53% dengan tingkat capaian 130,60% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Persentase peningkatan pendapatan petani yang tercapai 6,53% diukur berdasarkan rata-rata peningkatan dari pendapatan petani yang terdiri dari pembudidaya ikan, nelayan, peternak, petani tanaman pangan dan hortikultura dan petani hutan. Perhitungan peningkatan pendapatan petani dirinci sebagai berikut:

Keterangan	Pendapatan		% Peningkatan Pendapatan
	2021	2022	
Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Juta)	49,922320	50,465580	1,09
Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	40,452555	41,661646	2,99
Pendapatan peternak (Rp. Juta)	46,225388	49,678125	7,47
Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	9,74	9,94	9,94
Pendapatan petani hutan (%)	21,35652	23,740404	11,16
Rata-rata peningkatan pendapatan petani			6,53

Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan pendapatan petani menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator persentase peningkatan pendapatan petani dengan capaian 130,6% menunjukkan ketercapaian di atas target yang ditetapkan. Dari segi capaian dan realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan menjadi indikator kinerja utama Kepala Daerah mulai tahun 2022 dan beberapa data pendukung perhitungan juga belum tersedia.

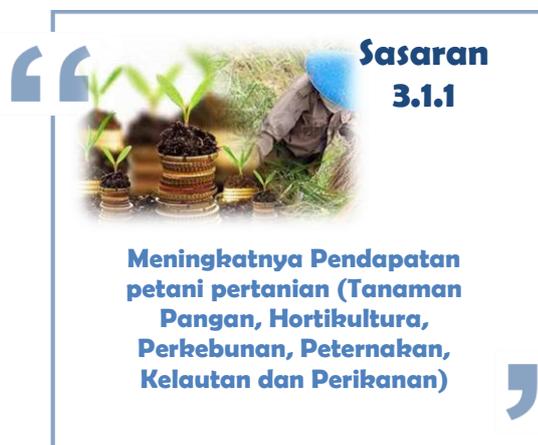
Peningkatan pendapatan petani dapat ditingkatkan menjadi 6,53% didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian sebesar 10 % dari APBDP.
2. Meningkatnya harga beberapa komoditi pertanian sehingga meningkatkan pendapatan kepada petani, terutama pada 12 komoditi unggulan yaitu kakao, karet, kopi, kelapa sawit, kelapa, gambir, padi, jagung, cabe, bawang merah, manggis, dan jeruk.

Hambatan, upaya yang dilakukan dan program pendukung untuk peningkatan pendapatan petani secara lebih rinci diuraikan pada penjelasan masing-masing indikator sasaran yang mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

Tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai melalui pencapaian 3 sasaran yaitu meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan), meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan, serta meningkatnya

pendapatan Petani Hutan. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan meningkatkan pendapatan petani. Untuk mengukur meningkatnya pendapatan petani pertanian telah ditetapkan 6 indikator yang pencapaiannya diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi

Sumatera Barat. Pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian tergambar pada tabel 3.29.

Tabel 3. 29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai tukar Petani (NTP)	100,99	110,37	109,29
Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	103,47	108,85	105,20
Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	47.175	50,465580	106,98
Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	40.795	41,661646	102,12
Pendapatan Peternak (Rp. Juta)	47.872	49,678125	103,77
Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	5	9,94	198,8
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja			121,03

Rata-rata capaian 6 indikator kinerja yang mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian adalah 121,03% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”. Evaluasi dan analisis indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Tukar Petani (NTP)



Kondisi ekonomi petani selama ini diukur melalui perkembangan nilai NTP dari waktu ke waktu yang dihitung oleh BPS. Nilai Tukar Petani adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang diterima petani (It) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

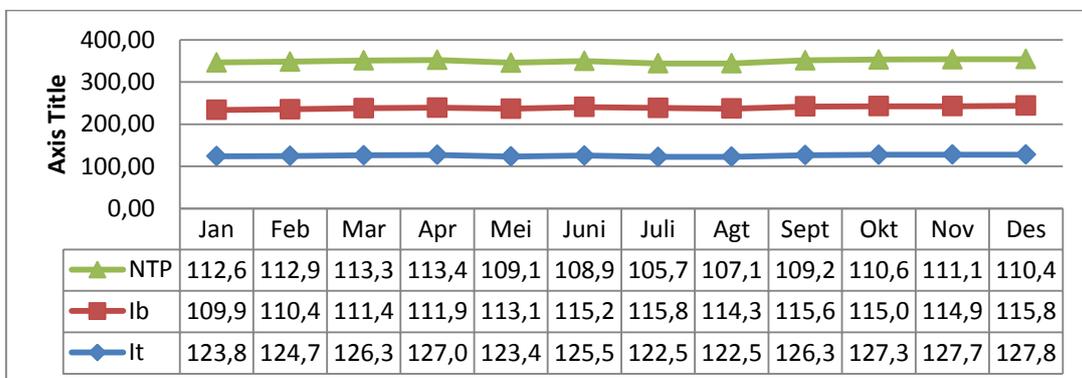
Interpretasi nilai NTP pada dasarnya sangat sederhana. Jika nilai NTP lebih besar dari 100, ini dapat diartikan bahwa petani mengalami *surplus* atau dengan kata lain pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani saat ini lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Jika nilai NTP sama dengan 100, ini berarti petani mengalami *impas/ break even* atau dengan kata lain tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. Sementara itu, jika nilai NTP lebih kecil dari 100, itu berarti petani mengalami defisit atau dengan kata lain tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Indikator NTP tahun 2022, ditargetkan dapat tercapai 100,99. Target ini berpedoman pada target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jika dibandingkan NTP tahun 2021, target NTP tahun 2022 ditetapkan lebih rendah 10,27. Walaupun demikian, baik tahun 2021 dan 2022, kondisi yang diharapkan sama-sama >100 (surplus).

Indikator NTP tahun 2022 ditargetkan 100,99%, terealisasi 110,37% dengan tingkat capaian 109,29% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”. Realisasi indikator NTP tahun 2022 diukur berdasarkan data yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistika melalui Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023. NTP 110,37% merupakan nilai rata-rata NTP dari Januari - Desember 2022.

NTP Sumatera Barat selama tahun 2022 berada di atas 100, hal ini disebabkan perkembangan nilai It selalu lebih besar dibandingkan nilai Ib. Sepanjang tahun 2022, nilai NTP tertinggi terjadi pada bulan April tercatat sebesar 113,46 dengan nilai indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 127,00 dan nilai indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 111,94. NTP Sumatera Barat pada bulan April mengalami kenaikan sebesar 0,12% dibanding bulan Maret(113,32). Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani (0,55%), lebih besar dari pada peningkatan indeks harga yang dibayar petani (0,43%). NTP terendah selama 2022 terjadi pada bulan Juli sebesar 105,76 dengan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 122,51 dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 115,84. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, NTP Juli 2022 mengalami penurunan sebesar 2,89%, Hal ini disebabkan oleh penurunan indeks yang diterima petani (It) sebesar 2,38%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami peningkatan sebesar 0,52%. Perkembangan NTP selama tahun 2022 digambarkan pada grafik 38.

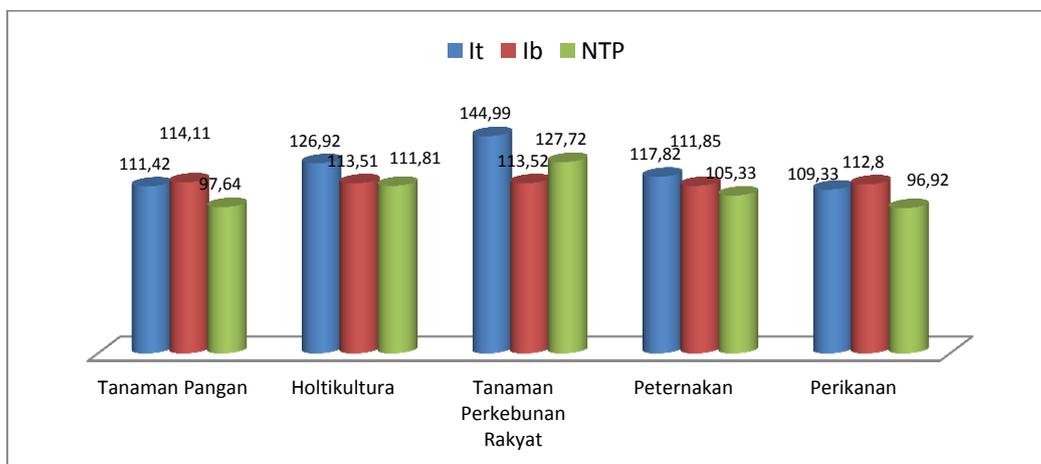
Grafik 38 Perkembangan NTP tahun 2022



Sumber data: BPS sumbar

Subsektor yang mempunyai nilai rata-rata NTP terbesar tahun 2022 adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat, yaitu sebesar 127,72 yang berasal dari rata-rata indeks yang diterima petani (It) sebesar 144,99 dan rata-rata indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 113,52. Rata-rata NTP subsektor hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan yang berada di atas 100. Hal ini mengindikasikan bahwa kehidupan petani yang berusaha pada subsektor tersebut relatif mempunyai daya beli yang kuat dibanding petani yang berusaha pada subsektor lainnya karena harga barang-barang produksinya lebih tinggi nilainya dibandingkan harga barang untuk konsumsi dan produksi. Ditinjau dari sisi penerimaan, petani yang berusaha di subsektor hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan masih dapat mengimbangi kebutuhan petani untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan modal pertanian. Subsektor yang mempunyai nilai rata-rata NTP terkecil adalah subsektor perikanan, yaitu hanya sebesar 96,92. Hal ini disebabkan rata-rata indeks harga yang diterima petani (It) tercatat hanya sebesar 109,33, sedangkan rata-rata indeks harga yang dibayar petani sebesar 112,80. Dilihat dari sisi pendapatan petani yang berusaha pada subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan pendapatan dari usaha pada subsektor tersebut belum bisa mengimbangi kebutuhan petani untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan modal pertanian. Rincian NTP berdasarkan subsektor digambarkan pada grafik 39.

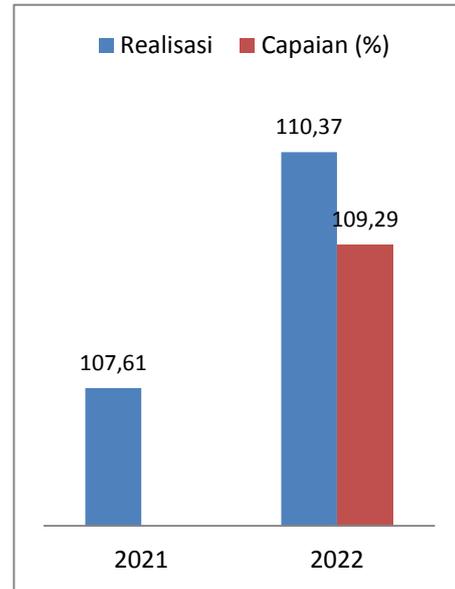
Grafik 39 Rincian NTP Berdasarkan Subsektor



Sumber data: BPS Sumbar

Perhitungan capaian indikator NTP menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Indikator NTP dengan capaian 109,33% menunjukkan ketercapaian di atas target yang ditetapkan. Dari segi capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Secara absolut, NTP tahun 2022 lebih tinggi 2,76 dibandingkan dengan NTP tahun 2021. Perbandingan capaian dan realisasi indikator NTP tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 40.

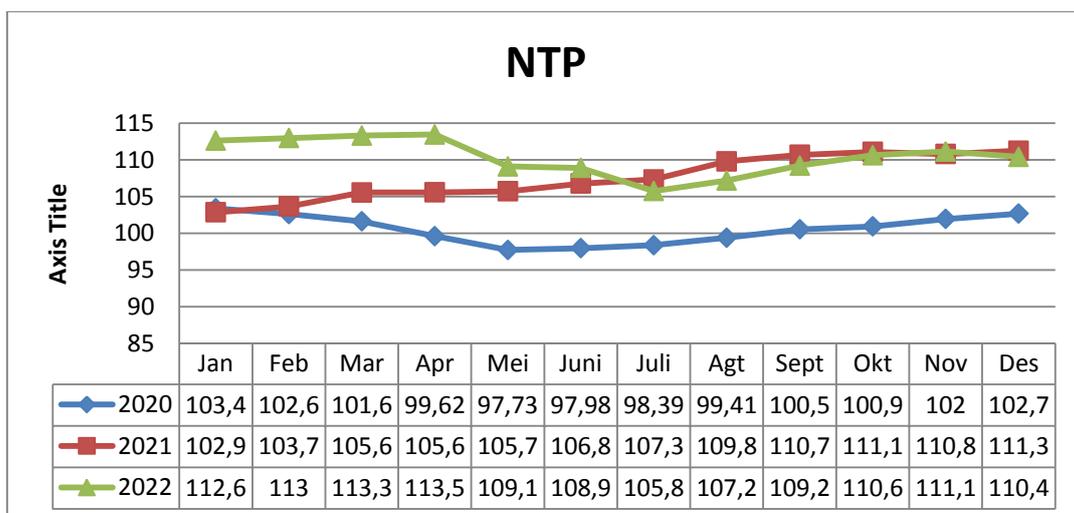
Grafik 40 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator NTP Tahun 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Jika dilihat perkembangan NTP Provinsi Sumatera Barat, NTP dari tahun 2020-2022 cenderung mengalami peningkatan, namun percepatan peningkatan NTP terbesar terjadi pada tahun 2021. Perkembangan NTP tahun 2020-2022 per bulan digambarkan pada grafik 41.

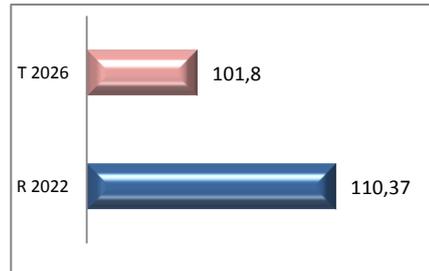
Grafik 41 Perkembangan NTP tahun 2020-2022



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Indikator NTP merupakan indikator dampak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pendapatan petani pertanian. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan NTP secara lebih terinci diuraikan pada analisa masing-masing indikator terkait pendapatan petani pertanian.

Pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026, NTP ditargetkan dapat mencapai angka 101,80. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 110,37, berarti pencapaian tahun 2022 telah tercapai melebihi target tahun 2026 (101,80). Mempertimbangkan kondisi NTP beberapa tahun terakhir dan upaya optimal yang akan dilakukan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target 101,80 di tahun 2026.



2. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)



NTUP adalah indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian, yang dihitung sebagai rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga masukan usaha tani. NTUP diperoleh dari rasio Indeks Harga yang diterima petani dari usaha pertaniannya dengan Indeks Harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha taninya. NTUP dapat mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dan biaya produksinya. NTUP digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha pertanian berdasarkan pendapatan yang diterima dari kenaikan/penurunan harga produksi pertanian yang dihasilkan dibandingkan dengan kenaikan/penurunan harga barang/jasa untuk proses produksi yang dibeli. Jika NTUP lebih besar dari 100 maka hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan usaha pertanian pada periode

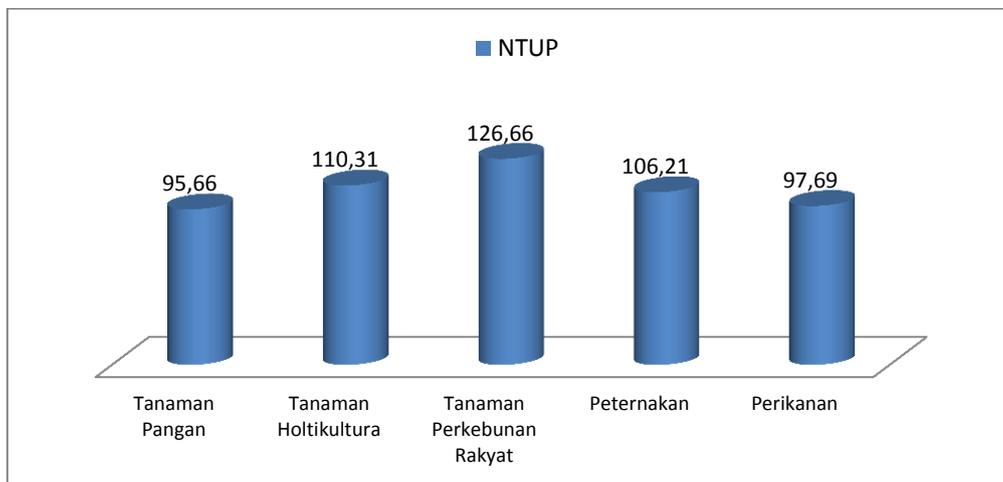
tersebut lebih baik dibandingkan periode tahun dasar. Sebaliknya, jika NTUP lebih kecil dari 100 maka tingkat keberhasilan usaha pertanian pada periode tersebut menurun dibandingkan tahun dasar.

Jika dilihat dari target RPJMD, pada tahun 2022 NTUP ditargetkan dapat tercapai 103,47. Target tahun 2022 ini ditetapkan lebih tinggi 1,03 dari NTUP tahun 2021 (102,44).

NTUP tahun 2022 ditargetkan 103,47, terealisasi 108,85 dengan tingkat capaian 105,20% termasuk kategori keberhasilan “**memuaskan**”.

Realisasi NTUP 108,85 didasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023. NTUP 108,85% merupakan nilai rata-rata NTUP dari Januari - Desember 2022. NTUP 108,85% menunjukkan tingkat keberhasilan usaha pertanian yang lebih baik. Rincian NTUP berdasarkan subsektor komoditinya digambarkan pada grafik 42.

Grafik 42 NTUP berdasarkan Subsektor Komoditi Tahun 2022

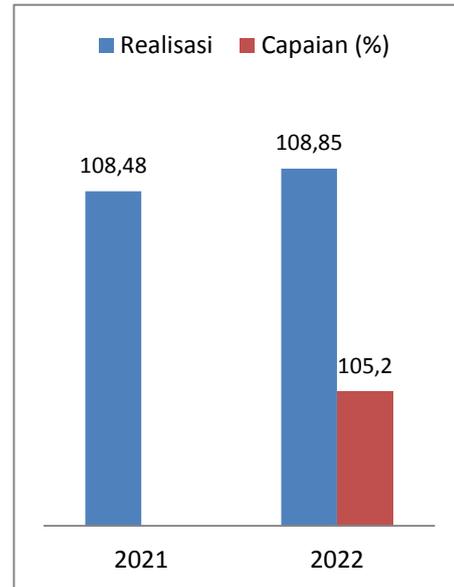


Sumber data: BPS Sumatera Barat

Jika dicermati dari perkembangan NTUP Tahun 2022 per komoditi tanaman di sektor pertanian, ternyata kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor perkebunan. Hal ini disebabkan karena harga jual komoditi tanaman perkebunan lebih besar dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani perkebunan.

Perhitungan capaian indikator NTUP menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator NTUP dengan capaian 105,2% menunjukkan ketercapaian di atas target yang ditetapkan. Dari segi capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Secara absolut, NTUP tahun 2022 lebih tinggi 0,37 dibandingkan dengan NTUP tahun 2021. Perbandingan capaian dan realisasi indikator NTUP tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 43.

Grafik 43 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator NTUP Tahun 2021-2022

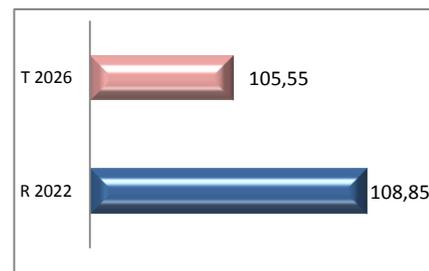


Sumber data: Data diolah

Sama halnya dengan indikator NTP, NTUP merupakan indikator dampak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pendapatan petani pertanian. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan NTUP secara lebih terinci diuraikan pada analisa masing-masing indikator terkait pendapatan petani pertanian.

Pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026, NTUP ditargetkan dapat mencapai angka 105,55. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 108,85, berarti pencapaian tahun 2022 telah tercapai melebihi target tahun 2026

(105,55). Sama halnya dengan NTP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga optimis dapat mencapai target tahun 2026.



3. Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)



Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kab/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau di atas dan Danau di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan, sudah dimanfaatkan untuk usaha budidaya tambak udang vaname.

Pendapatan pembudidaya ikan adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidayaan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan membudidayakan ikan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi pembudidaya.

Potensi perikanan budidaya di Sumatera Barat yaitu potensi budidaya laut 323.524 Ha, potensi lahan budidaya di kolam 24.300 Ha, potensi budidaya ikan di sawah seluas 55.140 Ha, potensi lahan budidaya tambak 7.700 Ha, potensi jaring apung 27.500 Ha dan potensi kolam air deras 3.000 ha. Komoditi unggulan untuk Budidaya Air Tawar adalah nila, mas, lele, gurami dan Budidaya Laut adalah kerapu.

Pendapatan pembudidaya ikan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, pada tahun 2022 ditargetkan Rp. 47,175 Juta, terealisasi 50,465580 Juta dengan tingkat capaian 106,98% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Pendapatan pembudidaya ikan Rp. 50,465580 Juta diperoleh berdasarkan data dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

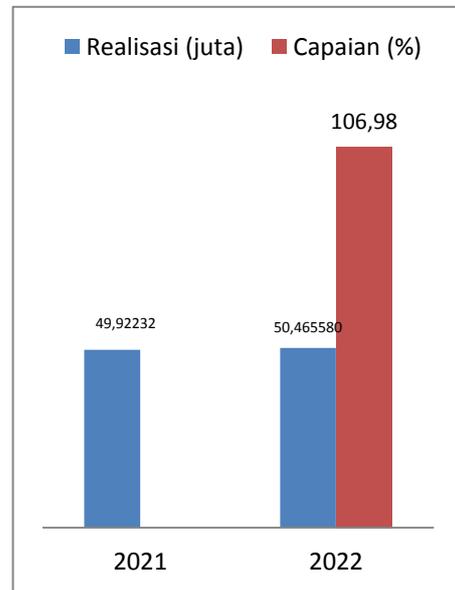
Tabel 3. 30 Rincian Pendapatan Pembudidaya Ikan Tahun 2022

No	Jenis Usaha	Produksi menurut jenis usaha (Ton)	Nilai produksi (Rp.000)	Jlh pmbddy (org)	biaya prod (Rp.000)	pendapatan (Rp.000)	Pendapatan /org (Rp.000)
1	Kolam air Tenang	145.618,22	3.640.455.600	71.892	2.912.364.480	728.091.120	10.127,57
2	Kolam Air Deras	94.342,32	2.358.558.075	6.574	1.886.846.460	471.711.615	71.754,12
3	Jaring Apung Tawar	24.622,82	566.324.860	1.975	453.059.888	113.264.972	57.349,35
4	Tambak	6.068,98	376.276.760	523	301.021.408	75.255.352	143.891,69
5	Keramba	3.547,57	88.689.200	556	70.951.360	17.737.840	31.902,59
6	Sawah	2.453,63	56.433.490	2,698	45.146.792	11.286.698	4.183,36
7	Budidaya laut	1.046,97	136.106.100	395	108.884.880	27.221.220	68.914,48
8	Jaring Tancap Tawar	780,08	19.501.875	250	15.601.500	3.900.375	15.601,50
Jumlah		78.480,59	7.242.345.960	84.863	5.793.876.768	1.448.469.192	403.724,66
Pendapatan per jenis usaha tahun 2022							50.465,58
Pendapatan per org/bln tahun 2022							4.205,47

Data pendapatan pembudidaya ikan dan produksi budidaya tahun 2022 masih berupa angka sementara yang akan secara bertahap akan divalidasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas yang membidangi sektor perikanan Kab/Kota.

Perhitungan capaian indikator pendapatan pembudidaya ikan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Indikator pendapatan pembudidaya ikan dengan capaian 106,98% menunjukkan ketercapaian di atas target yang ditetapkan. Dari segi capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Secara absolut, pendapatan pembudidaya ikan tahun 2022 lebih tinggi Rp. 543.260,- (1,09%) dibandingkan dengan tahun 2021. Perbandingan capaian dan realisasi indikator pendapatan pembudidaya ikan tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 44.

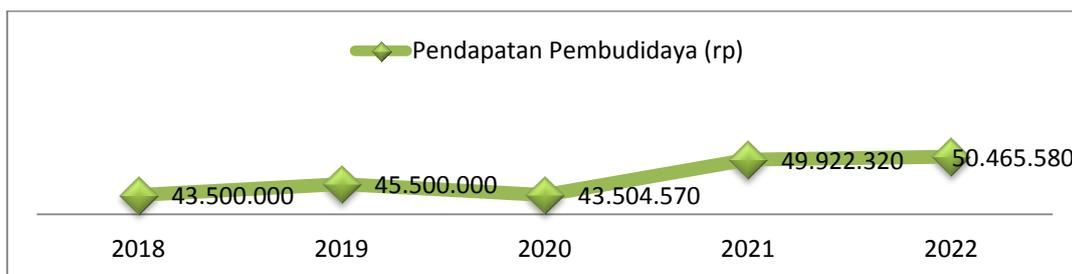
Grafik 44 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator pendapatan pembudidaya ikan Tahun 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Pendapatan pembudidaya ikan dalam rentang waktu 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Menunjukkan peningkatan di tahun 2019, turun di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021 dan 2022. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu 14,75% dengan rata-rata pertumbuhan pertahun dalam kurun waktu 2018-2022 adalah 4,01%. Perkembangan pendapatan pembudidaya ikan tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik 45.

Grafik 45 Perkembangan pendapatan pembudidaya ikan tahun 2018-2022



Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan

Pencapaian pendapatan pembudidaya ikan merupakan dampak dari pencapaian jumlah produksi budidaya dan luas lahan budidaya diantaranya melalui program pengelolaan budidaya perikanan. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pendapatan pembudidaya ikan yaitu:

1. Pemberian bantuan benih kerapu dan pakan ikan.
2. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di UPTD BPBALP (Balai Pengembangan Budidaya Air Laut dan Payau dan UPTD KPSDKP).
3. Memperbaiki kualitas induk sehingga mutu benih yang dihasilkan berkualitas sehingga produksi bisa meningkat, pendapatan pembudidaya juga meningkat.
4. Mendorong pembudidaya menggunakan pakan alternatif dengan program gerpari (Gerakan Pakan Mandiri). Pakan alternatif yang dibuat oleh pembudidaya ikan dapat menekan biaya produksi.
5. Mendorong pembudidaya menerapkan Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan IKan yang Baik (CPIB).
6. Membantu pemasaran hasil budidaya dengan informasi pasar yang luas.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan pembudidaya ikan yaitu:

1. Masih kurangnya pemahaman pembudidaya dalam melakukan CBIB dan CPIB serta teknologi dalam budidaya.
2. Terbatasnya modal usaha, sehingga sarana prasarana menjadi terbatas.
3. Pemasaran yang sifatnya masih lokal dan regional membuat pembudidaya kurang berkembang.
4. Keterbatasan SDM Pembudidaya Ikan dan SDM masyarakat nelayan.
5. Harga pakan yang tinggi tidak sesuai dengan biaya produksi.
6. Harga jual yang rendah ditingkat pembudidaya.
7. Faktor cuaca dan iklim dan tingginya harga BBM.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah pendapatan pembudidaya secara Nasional Rp. 52.404.216,-. Nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pendapatan pembudidaya di Sumatera Barat dengan selisih kurang Rp. 1.938.636,-.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan ditargetkan mencapai Rp. 53,096 juta pada tahun 2026. Dengan mempertimbangkan kenaikan di tahun sebelumnya Rp. 543.260,-, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengotimalkan upaya agar dapat mencapai target Rp. 53,096 juta di tahun 2026.

Untuk mencapai target di tahun yang akan datang, akan dilaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Memaksimalkan pemanfaatan lahan budidaya seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar (kolam air deras dan kolam mina padi dan budidaya secara intensif).
2. Mendorong peningkatan jumlah pemudidaya ikan.
3. Peningkatan alokasi anggaran untuk pemberian bantuan sarpras untuk pembudidaya ikan seperti calon induk ikan, benih ikan dan pakan ikan dalam rangka peningkatan produksi.
4. Melakukan pendampingan, melalui pembinaan dan monitoring dan evaluasi secara berkala.

4. *Pendapatan Nelayan*



Pendapatan Nelayan (Rp/org/th) dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan pada tahun yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga jual perjenis ikan sehingga didapatkan nilai produksi. Nilai produksi dikurangi

dengan biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, penerimaan ini dibagi antara pemilik dengan nelayan. Persentase pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan ini berkisar 60% pemilik : 40% nelayan. Hal ini terjadi pada alat tangkap dengan kapal berukuran > 5GT seperti Bagan, Purse Seine, Tonda, Payang yang umumnya nelayan adalah sebagai anak buah kapal. Namun untuk perahu motor berukuran < 5GT umumnya nelayan adalah pemilik yang langsung turun ke laut menangkap ikan.

Pendapatan nelayan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, pada tahun 2022 ditargetkan Rp. 40,795 Juta, terealisasi 41,661646 Juta dengan tingkat capaian 102,12% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

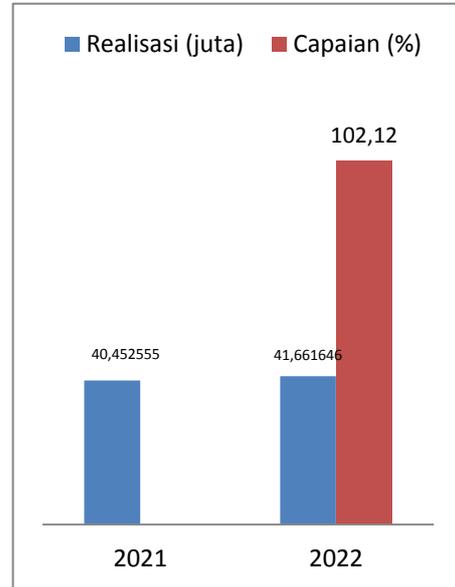
Realisasi pendapatan nelayan 41,661646 juta diperoleh berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tw	Produksi (Ton)	Harga Rata-rata per KG	Nilai Produksi (Ribu)	Biaya Produksi (Ribu)	Penerimaan (Ribu)	Pendapatan Pemilik Kapal (Ribu)	Pendapatan Nelayan (Ribu)	Jumlah Nelayan
I	50.937,29	27.630	1.407.397.419	422.219.226	982.178.194	541.848.006	443.330.187	43.555
II	51.726,65	29.450	1.523.349.887	457.004.966	1.066.344.921	586.489.706	479.855.214	43.555
III	52.349,29	30.193	1.580.582.068	474.174.620	1.106.407.447	663.844.468	442.562.979	43.555
IV	52.946,16	30.275	1.602.945.009	480.883.503	1.122.061.506	673.236.904	448.824.603	43.555
Jumlah				1.834.282.315	4.279.992.068	2.465.419.085	1.814.572.983	
Pendapatan Nelayan Pertahun (Rp.000)							1.814.572.983	41.661.646
Pendapatan Nelayan Perbulan (Rp.000)							151.214.415	3.471.804
Pendapatan Pemilik Kapal Pertahun (Rp.000)							2.465.419.085	

Data pendapatan nelayan dan produksi nelayan tahun 2022 masih berupa angka sementara yang akan secara bertahap akan divalidasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas yang membidangi sektor perikanan Kab/Kota.

Perhitungan capaian indikator pendapatan nelayan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Indikator pendapatan nelayan dengan capaian 102,12% menunjukkan ketercapaian di atas target yang ditetapkan. Dari segi capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Secara absolut, pendapatan nelayan tahun 2022 lebih tinggi Rp. 1.209.091,- (2,99%) dibandingkan dengan tahun 2021. Perbandingan capaian dan realisasi indikator pendapatan nelayan tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 46.

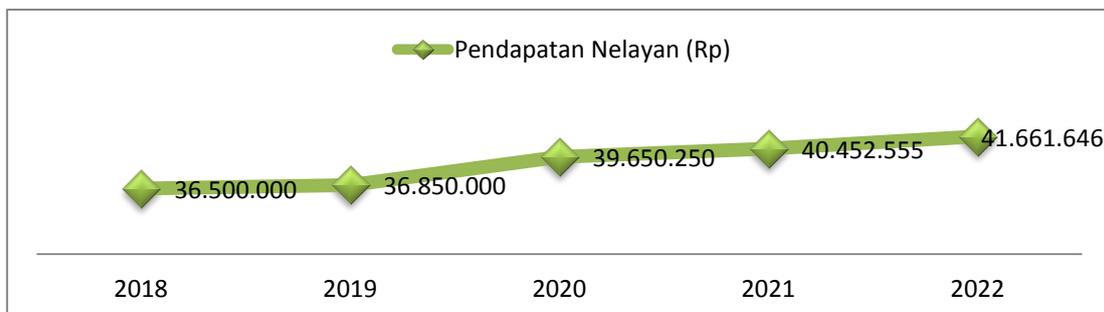
Grafik 46 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator pendapatan nelayan Tahun 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Pendapatan nelayan dalam rentang waktu 2018-2022 menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif. Pertumbuhan 7,60 di tahun 2020 menjadi pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 3,39%. Perkembangan pendapatan nelayan tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik 47.

Grafik 47 Perkembangan pendapatan nelayan tahun 2018-2022



Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan

Capaian indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan dampak dari produksi perikanan laut, perairan umum dan peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan. Dengan produksi perairan laut sebesar 207.959,39 ton dan perairan umum sebesar 10.792,26 ton dengan total jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 218.688,66 ton pada tahun 2022 dan jumlah nelayan tahun 2022 sebesar 43.555 orang. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan nelayan ini dikarenakan harga jual ikan pada umumnya mengalami kenaikan dibanding pada tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan yaitu:

1. Penebaran benih ikan di perairan umum (danau dan sungai).
2. Meningkatkan akses permodalan bagi nelayan
3. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota yang membidangi perikanan
4. Memberikan bantuan sarana penangkapan (mesin, jaring dan fish box) yang diberikan oleh pemerintah ikut memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Bantuan sarana peningkatan yang diberikan selama tahun 2022 disajikan pada tabel 3.31.

Tabel 3. 31 Bantuan Sarana Peningkatan Pendapatan Nelayan Tahun 2022

Bantuan	Pesisir Selatan	Agam	Padang Pariaman	Pasaman Barat	Kota Pariaman	Kota Padang	Tanah Datar	Solok	Mentawai	Total
Mesin Tempel 15 PK	58	41	104	5	21	52			35	316
Mesin Tempel 40 PK	10	7	12		3	12				44
Mesin Tempel 4 PK	2	5		2						9
Mesin Tempel 20 PK						3			9	12
Longtail 8.3 PK	36		15	11	5					67
Long Tail 13 HP					30					30
Mesin Tempel 40 PK APBDPP			1		1					2
Trammelnet	33	13		18						64
Fishbox	180	245	54	315	331					1125
Gillnet Laut	19	14	42	10	13	6				104
Gillnet Maninjau		60								60
Gillnet Singkarak							50	50		100
Longtail 8,3 PK		115								115
Mesin Tempel 2.5 PK							25	20		45
Perahu Fiber		33								33
Total Keseluruhan	338	533	228	361	404	73	75	70	44	2126

Hambatan yang masih ditemui dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan adalah:

1. Keterbatasan modal usaha sehingga sarana prasarana penangkapan ikan juga terbatas.
2. Faktor cuaca ekstrim.
3. Kenaikan harga BBM berdampak pada peningkatan biaya operasional nelayan.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah pendapatan nelayan secara Nasional Rp. 52.236.660,- (angka sementara). Angka tersebut lebih tinggi Rp. 10.575.014,- atau 25,4% dibandingkan dengan pendapatan nelayan di Sumatera Barat.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja pendapatan nelayan ditargetkan mencapai Rp. 44,158 juta pada tahun 2026. Dengan mempertimbangkan kenaikan di tahun sebelumnya maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Upaya yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemampuan SDM Masyarakat Nelayan.
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk bantuan sarana dan prasarana penangkapan seperti alat tangkap, mesin tempel, fish box dan perahu.
3. Melakukan pendampingan, melalui pembinaan dan monitoring dan evaluasi secara berkala.
4. Secara konsisten melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait masalah perikanan.

5. Pendapatan Peternak

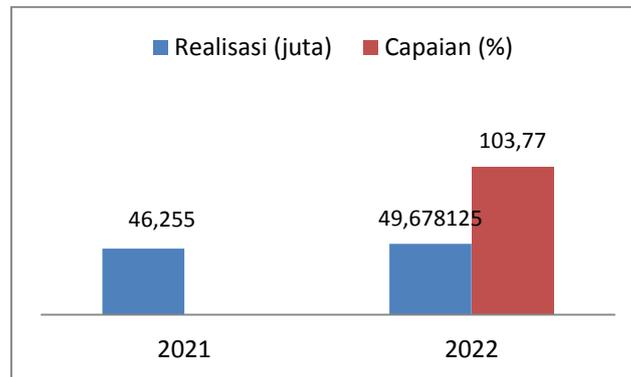


Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian secara umum dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, sebagai sumber penghasilan petani, penyerapan tenaga kerja, penghasil protein hewani dan pupuk organik, yang secara keseluruhan mendorong meningkatnya permintaan dan konsumsi komoditas peternakan. Pendapatan peternak menjadi salah satu indikator yang ditetapkan untuk mengukur tingkat pendapatan petani dari sektor peternakan.

Mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, pendapatan peternak pada tahun 2022 ditargetkan Rp. 47,872 juta, terealisasi Rp. 49,678,125 dengan tingkat capaian 103,77% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”. Pendapatan peternak Rp. 49,678,125 diperoleh berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

Perhitungan capaian indikator pendapatan peternak menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator pendapatan peternak dengan capaian 103,77% menunjukkan ketercapaian di atas target yang ditetapkan. Dari segi capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan menjadi indikator kinerja utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Secara absolut, pendapatan peternak tahun 2022 lebih tinggi Rp. 3.423.125,- (7,4%) dibandingkan dengan tahun 2021. Perbandingan capaian dan realisasi indikator pendapatan peternak tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 48.

Grafik 48 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator pendapatan peternak Tahun 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Dalam meningkatkan pendapatan peternak, upaya yang dilakukan di tahun 2022 antara lain:

1. Memberikan bantuan ternak kepada masyarakat.
2. Penyediaan bibit dan pakan berkualitas.
3. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan serta penanganan kesehatan hewan kepada peternak.
4. Penerapan teknologi peternakan ke peternak.

Di samping upaya tersebut, masih ditemukan hambatan/kendala untuk meningkatkan pendapatan peternak, antara lain:

1. Sebahagian besar usaha peternakan merupakan usaha sampingan sebagai penambah pendapatan.
2. Masih rendahnya tingkat pengetahuan merawat hewan ternak, tingkat keterampilan dan sikap peternak dalam mengelola usaha ternaknya.
3. Kurangnya dukungan atas modal dan sarana produksi usaha ternak.
4. Masih kurangnya pelatihan-pelatihan pada peternak

Dikarenakan terbatasnya informasi mengenai pendapatan peternak, maka sebagai pembanding dapat dilihat berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 terlihat bahwa pendapatan peternak secara nasional diperoleh sebesar Rp 24.416.2409,- dan pendapatan peternak di Sumatera Barat sebesar Rp.

30.858.940,-. Hal ini terlihat bahwa pendapatan peternak di Sumatera Barat pada tahun tersebut lebih tinggi rata-rata pendapatan peternak secara nasional.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja pendapatan peternak ditargetkan mencapai Rp. 58,199 juta pada tahun 2026. Dengan mempertimbangkan kenaikan di tahun sebelumnya maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2026.

Untuk peningkatan pendapatan peternak di masa yang akan datang, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan populasi, produksi, dan produktifitas ternak. Diharapkan para peternak dapat meningkatkan jumlah kepemilikan ternaknya dan memperbaiki sistem pemeliharaannya untuk lebih berfokus pada usaha ternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
2. Peternak lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas kebutuhan pakan yang sesuai dan memperhatikan kesehatan hewan ternaknya untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan untuk pengembangan usaha peternakan.
3. Dukungan dari Pemerintah melalui pemberian bantuan ternak dan juga melalui pihak Perbankan berupa peminjaman modal kepada peternak untuk dapat mengembangkan skala usahanya.

6. *Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura*



Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh rumah tangga petani pada sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura pada periode waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan pendapatan yang diterima oleh

petani tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Dalam mengukur indikator ini di proxikan dari Indeks harga yang diterima oleh petani.

Mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2022 ditargetkan 5%, terealisasi 9,94% dengan tingkat capaian 198,8% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura 9,94% diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik melalui Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura} = \frac{6,07\% + 17,49\% + 6,28\%}{3} = 9,94\%$$

Keterangan:

Peningkatan pendapatan petani tanaman perkebunan rakyat= 6,07%

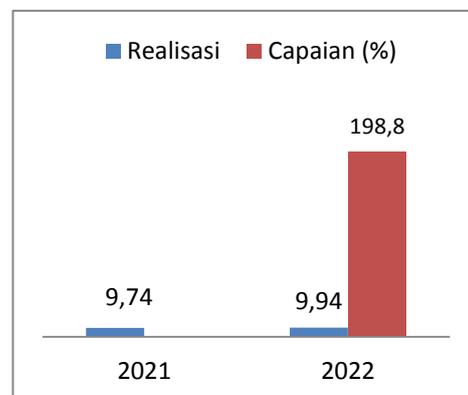
Peningkatan pendapatan petani tanaman hortikultura= 17,49%

Peningkatan pendapatan petani tanaman pangan= 6,28%

Perhitungan capaian indikator Perbandingan capaian dan pendapatan petani tanaman pangan dan realisasi indikator pendapatan hortikultura menggunakan metode petani tanaman pangan dan pengukuran kriteria pertama. Indikator hortikultura tahun 2021-2022 pendapatan petani tanaman pangan dan disajikan pada grafik 49.

Indikator hortikultura dengan capaian 198,8% menunjukkan ketercapaian di atas target yang ditetapkan. Dari segi capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Namun, berdasarkan data yang tersedia, pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura tahun 2022 meningkat 0,2% dibandingkan tahun 2021.

Grafik 49 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura Tahun 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2022 antara lain:

1. Penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan antara lain:
 - a. Bantuan benih Kakao jenis sambung pucuk sebanyak 14.368 batang dan pupuk kompos 14.800 kg di Kabupaten Pasaman.
 - b. Bantuan benih Karet 5.300 batang kepada 9 Kelompok Tani dan Pupuk NPK 515 kg kepada 12 kelompok tani.
 - c. Bantuan Benih karet kepada 3 kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat (3.800 batang).
 - d. Bantuan benih kelapa sawit bersertifikat di Kabupaten Dharmasraya (8.000 biji kecambah) dan Kabupaten Pasaman 13.340 batang.
 - e. Bantuan benih karet 54.000 batang benih karet dan 5.919 kg pupuk NPK pada Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - f. Perluasan tanaman kopi melalui bantuan Saprodi berupa 67.863 batang benih kopi dan 46.537 kg pupuk kompos pada 4 kabupaten (Kab Agam, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar dan Kab Solok Selatan).
 - g. Revitalisasi lahan kebun rakyat pada 3 Kabupaten Kota yaitu Kab Solok, Kab Agam dan Kab Pesel
 - h. Perluasan tanaman kakao hibrida untuk meningkatkan luas tanam kakao hibrida
2. Meningkatkan kemandirian petani/kelompok tani dalam melaksanakan usaha tani melalui pendampingan, sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh/petugas pertanian.
3. Memberikan bantuan alat dan mesin pertanian. Pada tahun 2022 sudah diserahkan bantuan alsintan sebanyak 2.638 buah (traktor, cultivator, pompa air, handsprayer, alat pengolahan pupuk organik, mesin potong rumput, hidrotiller, alat tebar benih jagung dan padi)

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura antara lain:

1. Masih rendahnya penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produksi komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.
2. Terbatasnya prasarana dan sarana produksi pertanian.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan kapasitas kelembagaan tani.
4. Rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi untuk hilirisasi pertanian.
5. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.
6. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil dalam proses produksi, panen dan pasca panen.
7. Keterbatasan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana prasarana pendukung dan SDM pertanian.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura ditargetkan 5% pada tahun 2026. Dengan mempertimbangkan kondisi di tahun sebelumnya dan pertanian menjadi salah satu program unggulan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target 5% di tahun 2026.

Untuk peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura di masa yang akan datang, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Penyaluran benih sertifikat dan membekali petani dengan informasi tentang sumber/penyedia benih bersertifikat.
2. Penyaluran sarana produksi seperti pupuk dan pestisida.
3. Melengkapi ketersediaan infrastruktur dan prasarana lahan dengan memberikan bantuan perbaikan jaringan irigasi, embung, pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi.
4. Upaya intensifikasi (penerapan GAP/*Good Agricultural Practices*).
5. Memberikan edukasi kepada petani melalui pelatihan, sekolah lapangan, penyuluhan dan fasilitasi permodalan kepada petani.
6. Membantu petani meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.

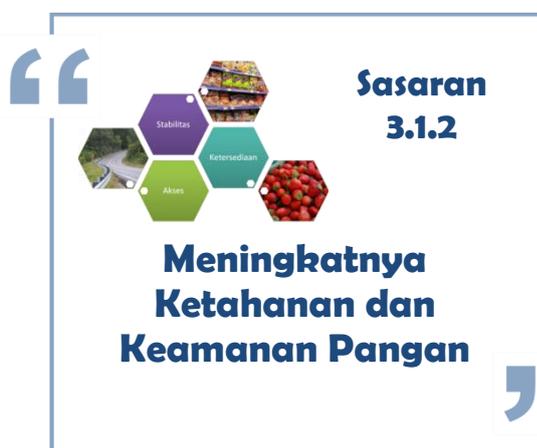
Untuk mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 11 Program dengan 35 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. **293.981.711.347,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan). Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 3.1.1. dapat dilihat pada tabel 3.32.

Tabel 3. 32 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	35	293.981.711.347	258.964.731.860
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7	150.455.613.899	129.378.644.493
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3	56.813.585.563	54.578.301.510
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	3.276.676.300	3.020.536.440
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	4	638.515.100	453.656.285
5	Program Penyuluhan Pertanian	4	12.422.688.953	11.164.486.267
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5	4.927.066.241	4.527.500.048
7	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	4.018.151.350	3.395.947.066
8	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4	42.206.525.926	36.151.033.298
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2	9.581.201.055	7.482.504.286
10	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2	3.427.218.450	3.128.512.627

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	6.214.468.510	5.683.609.540

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 293.981.711.347,- terealisasi sebesar Rp. 258.964.731.860,- atau 88,09%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 35.016.979.487,- (11,91%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan) (121,03%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (88,09%) dengan tingkat efisiensi 32,94%.



Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Untuk itu

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berkomitmen untuk memperkuat

ketahanan pangan sebagai upaya untuk menyediakan pangan masyarakat, sehingga menjadi sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SGDs*) yaitu menghilangkan kelaparan (*zero hunger*) pada tahun 2030. Terbitnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dapat menggambarkan peringkat ketahanan pangan wilayah Provinsi dan kabupaten/kota beserta faktor-faktor pendukungnya, dapat menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemangku kepentingan dalam melakukan sinergi program peningkatan ketahanan pangan wilayah.

Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi. Pengukuran IKP berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pangan Nasional.

Pengelompokan wilayah berdasarkan nilai IKP-nya dibagi dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP yaitu :

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1 Sangat rentan	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2 Rentan	>41,52-51,42	>28,84-41,44	>37,61-48,27
3 Agak rentan	>51,42-59,58	>41,44-51,29	>48,27-57,11
4 Agak tahan	>59,58-67,75	>51,29-61,13	>57,11-65,96
5 Tahan	>67,75-75,68	>61,13-70,64	>65,96-74,40
6 Sangat tahan	>75,68	>70,64	>74,40

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator IKP pada tahun 2022 ditargetkan dapat tercapai 79,13 atau termasuk kelompok IKP “sangat tahan”. Jika dibandingkan dengan IKP tahun sebelumnya (2021), target IKP tahun 2022 ditetapkan lebih 0,42. Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan digambarkan pada tabel 3.33.

Tabel 3. 33 Capaian Sasaran 3.1.2



Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2022 di targetkan 79,13, terealisasi sebesar 79,45 dengan tingkat capaian sebesar 110,40% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”. Berdasarkan pengelompokannya, Provinsi Sumatera Barat berada pada kelompok yang **sangat tahan**. Realisasi IKP Tahun

2022 diukur berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pangan Nasional.

Data IKP pada 19 Kabupaten/Kota sebagaimana disajikan pada tabel 3.34 menunjukkan:

1. Dari 7 Kota di Sumatera Barat, 6 Kota berada pada kelompok sangat tahan pangan (IKP >70,64), dan 1 kota pada kelompok tahan pangan (IKP >61,13-70,64) yaitu Kota Pariaman.
2. Dari 12 Kabupaten di Sumatera Barat, 11 Kabupaten berada pada kelompok sangat tahan pangan dengan nilai tertinggi yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Sedangkan 1 Kabupaten masih berada pada posisi agak rentan rawan pangan (IKP >51,42-59,58) yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai

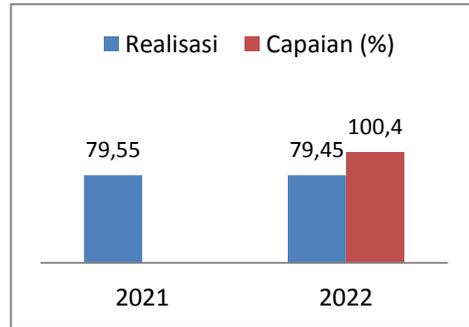
Tabel 3. 34 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	IKP
1	Kab. Tanah Datar	85,92
2	Kab. Agam	85,34
3	Kota Bukittinggi	84,66
4	Kota Solok	84,44
5	Kota Padang	84,14
6	Kab. Pesisir Selatan	83,53
7	Kab. Solok Selatan	83,2
8	Kota Payakumbuh	81,73
9	Kab. Dharmasraya	81,15
10	Kab. Padang Pariaman	81,14
11	Kab. Pasaman	80,93
12	Kab. Pasaman Barat	80,82
13	Kab. Lima Puluh Kota	80,32
14	Kota Padang Panjang	79,82
15	Provinsi Sumatera Barat	79,45
16	Kab. Solok	78,29
17	Kab. Sijunjung	77,88
18	Kota Sawahlunto	73,85
19	Kota Pariaman	69,93
20	Kab. Kepulauan Mentawai	52,48

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional

Perhitungan capaian indikator IKP Perbandingan capaian dan menggunakan metode pengukuran realisasi indikator IKP tahun kriteria pertama. Indikator IKP dengan 2021-2022 disajikan pada grafik capaian 100,4% menunjukkan 50. ketercapaian di atas target yang ditetapkan. Capaian indikator IKP tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Secara absolut, IKP tahun 2022 lebih rendah 0,10 dibandingkan dengan IKP tahun 2021.

Grafik 50 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator IKP Tahun 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Perkembangan IKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2022, rata-rata menunjukkan peningkatan kecuali tahun 2022 yang mengalami penurunan. Peningkatan 3,21 di tahun 2020 merupakan peningkatan tertinggi dalam kurun waktu 2019-2022. Perkembangan IKP dari tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik 51.

Grafik 51 Perkembangan IKP dari tahun 2019-2022



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022 untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan diantaranya adalah :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022 telah membentuk 110 Nagari Mandiri Pangan sesuai dengan SK Gubernur Nomor 521-531-2022 tentang Penetapan Lokasi Nagari/Kelurahan/Desa Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dengan tugasnya sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dengan stakeholder terkait tentang pelaksanaan kegiatan di lokus NMP (Nagari Mandiri Pangan)
 - b. Pelatihan dan Bimtek untuk Kelompok Tani dan penyuluh pendamping NMP
 - c. Pembinaan dan pendampingan kegiatan NMP di Kelompok Tani
 - d. Telah diterbitkannya MoU dan PKS dengan OJK, PUJK dan *Offtaker* terkait Alokasi Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kelompok NMP.
 - e. Pendampingan dan pemberdayaan oleh Perguruan Tinggi dan LSM
 - f. Fasilitasi, monitoring dan evaluasi program bantuan NMP
 - g. Bantuan Bibit sesuai dengan spesifikasi daerah mandiri pangan
2. Fokus peningkatan IKP diprioritaskan pada beberapa daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terutama sekali pada Kabupaten Kepulauan Mentawai karena berada di kepulauan yang menghadapi akses fisik terhadap sumber pangan.

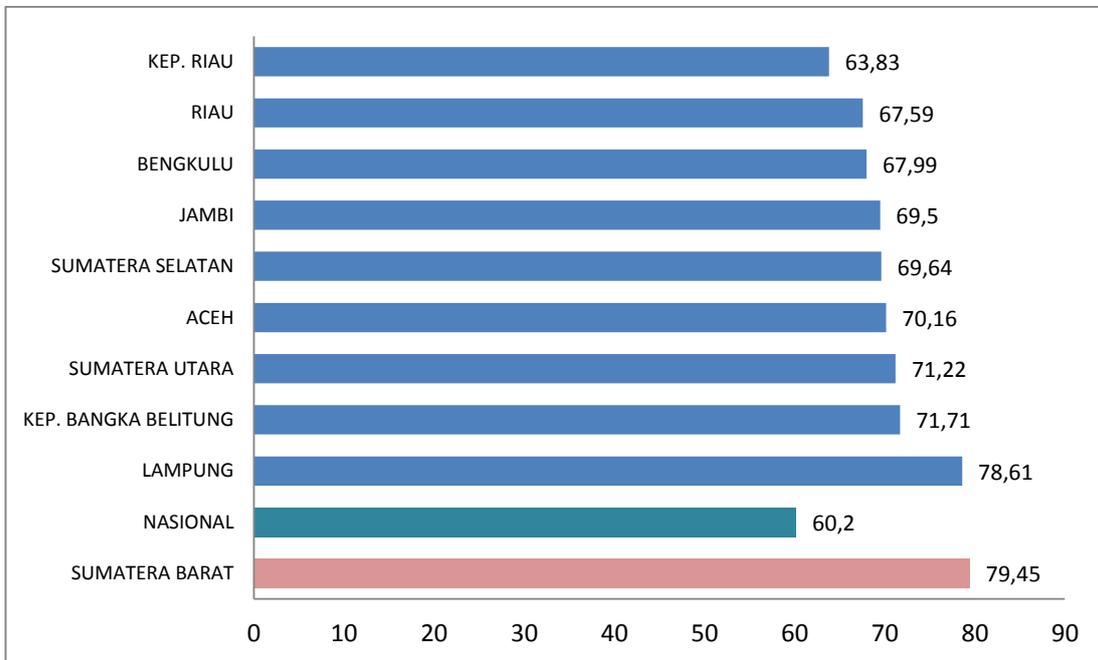
Dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di Sumatera Barat, masih ditemukan hambatan-hambatan diantaranya :

1. Intervensi terhadap penetapan Nagari oleh eksekutif dan legislatif.
2. Keterbatasan SDM Pendamping Nagari Rawan Pangan.
3. Keterbatasan jumlah bantuan yang akan diberikan untuk Nagari Rawan Pangan.
4. Belum semua instansi terkait bersinergi dalam menangani daerah rawan pangan.

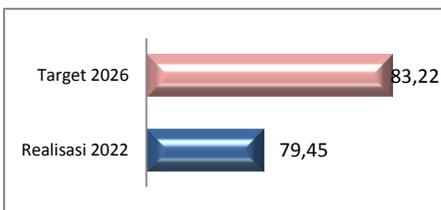
5. Belum dimanfaatkannya hasil pemetaan daerah rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerawanan pangan (FSVA) oleh *stakeholder* terkait.
6. Masih ditemukannya kandungan pestisida pada Bahan Pangan Segar.

Secara Nasional IKP Sumatera Barat tahun 2022 berada 19,25 poin di atas Nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera, IKP Sumatera Barat berada pada peringkat pertama se Sumatera dan Peringkat kedelapan se Indonesia. Informasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional dan Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 52.

Grafik 52 Indeks Ketahanan Pangan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional



IKP pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 ditargetkan tercapai 83,22%. IKP tahun 2022 yang tercapai 79,45 menunjukkan pencapaian 95,47% dari target tahun 2026.

Mempertimbangkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2026 dengan usaha yang maksimal untuk pencapaiannya serta koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan pihak terkait.

Oleh karena itu, di tahun yang akan datang akan dimaksimalkan upaya berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor terkait ketahanan dan keamanan pangan.
2. Mempedomani peta ketahanan dan kerawanan pangan (FSVA) dalam mengintervensi permasalahan rawan pangan.
3. Mengoptimalkan gerakan diversifikasi pangan “Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA).
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pangan.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 6 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. **22.757.232.046,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 3.1.2. dapat dilihat pada tabel 3.35.

Tabel 3. 35 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	6	22.757.232.046	21.352.626.990
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3	9.868.172.636	9.299.450.728
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	4.000.172.715	3.648.542.758
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	8.888.886.695	8.404.633.504

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **22.757.232.046,-** terealisasi sebesar Rp. **21.352.626.990,-** atau 93,83%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **1.404.605.056,-** (6,17%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran

meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan (100,40%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (93,83%) dengan tingkat efisiensi 6,57%.

Sasaran 3.1.3

Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan

Sasaran Strategis Meningkatnya pendapatan petani hutan ditetapkan guna mendukung Misi ke III RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sub sektor kehutanan

di Sumatera Barat memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi karena 54,43% dari luas wilayah Sumbar merupakan kawasan hutan. Peningkatan pendapatan petani hutan dilakukan dengan memperluas hak kelola hutan dalam bentuk Perhutanan Sosial kepada masyarakat sekitar hutan untuk membuka peluang usaha berbasis kehutanan. Untuk melihat capaian sasaran strategis tersebut ditetapkan indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan petani hutan. Pengukuran indikator ini didasarkan kepada data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Persentase peningkatan pendapatan petani hutan Tahun 2022 di targetkan pada RPJMD 2021-2026 sebesar 5%. Penetapan target 5% ini didasari pendekatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat sebelum pandemic covid-19 dengan rerata 5% pertahun. Pencapaian sasaran “meningkatnya pendapatan petani hutan” digambarkan pada tabel 3.36.

Tabel 3. 36 Capaian Sasaran 3.1.3



Tahun 2022, Peningkatan pendapatan petani hutan target 5%, terealisasi sebesar 11,16% dengan tingkat capaian sebesar 223,2 % termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

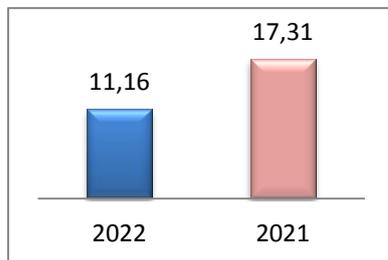
Realisasi persentase peningkatan pendapatan petani hutan diperoleh dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 melalui survei dan penghitungan mandiri. Pelaksanaan survei ini mendapat rekomendasi dari BPS Sumatera Barat Nomor V-22.1300.008 yang dikeluarkan melalui surat nomor B-109/13000/OT.130/11/2022 tanggal 9 November 2022 perihal rekomendasi kegiatan statistik. Penghitungan Persentase peningkatan pendapatan petani hutan 2022 dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan Pendapatan petani hutan} = \frac{\text{Rp. 23.740.404,00} - \text{Rp. 21.356.520,00}}{\text{Rp. 21.356.520,00}} \times 100 = 11,16\%$$

Keterangan:

Realisasi pend. Petani Hutan Tahun 2022 = Rp. 23.740.404,00,-

Realisasi pend. Petani Hutan Tahun 2021 = Rp. 21.356.520,00,-



Jika dibandingkan dengan peningkatan tahun 2021 terhadap tahun 2020 sebesar 17,31% atau Rp. 3.150.592,56, peningkatan di tahun 2022 sedikit di bawah kenaikan tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,16% atau Rp. 2.383.884,00.

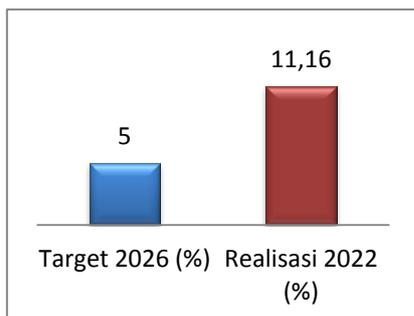
Pendapatan petani hutan pada Provinsi Sumatera Barat baru dilakukan pengukuran pada tahun 2021. Angka dasar yang digunakan untuk menghitung peningkatan pendapatan petani hutan (2020) adalah dari angka hasil survei statistik terkait proyeksi standar hidup minimal dengan menggunakan rumus rasio dan aritmatik, sehingga angka pendapatan petani hutan pada tahun 2020 diperoleh sebesar Rp.18.205.927,44. Berdasarkan angka tersebut, dapat diperoleh angka peningkatan pendapatan petani hutan pada tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pendapatan petani hutan di tahun 2022 ini adalah :

1. Sosialisasi yang berkaitan dengan sektor kehutanan terhadap anggota kelompok perhutanan sosial sebanyak 199 kelompok dan kelompok tani hutan sebanyak 451 kelompok.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan KPS dan KTH melalui pelatihan, workshop dan bimbingan teknis serta sekolah lapang dengan narasumber dari perguruan tinggi dan komunitas/asosiasi kelompok dan anggota kelompok tani yang sudah sukses mengembangkan produk tersebut.
3. Memberikan bantuan alat ekonomi produktif berupa alat pengolah gula semut, pengurangan kadar air madu, pengolah kompos, pengolah kopi, pengolah pinang, pengolah sereh wangi, stup lebah madu dan sarana prasarana ekowisata kepada anggota PS dan KTH. Pada tahun 2022 bantuan yang telah diserahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa stup lebah madu sebanyak 3.521 stup kepada 71 kelompok dan sarana ekowisata diberikan sebanyak 10 unit kepada 5 kelompok.
4. Pemberdayaan kelompok tani hutan yang sudah berhasil/ sukses untuk berbagi informasi dan pengetahuan kepada anggota KPS dan KTH lainnya.
5. Peningkatan promosi produk KPS dan kelompok tani hutan melalui pelatihan fotografi produk dan potensi perhutanan sosial.
6. Fasilitasi penjualan produk PS dan KTH melalui festival madu.
7. Gerakan minum madu melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.4/536/DISHUT-2022 Tanggal 14 Februari 2022.
8. Mengoptimalkan *milenial Entrepreneur* pada KPS dan KTH.

Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan petani hutan:

1. Kesulitan mendapatkan data peningkatan pendapatan dari masing-masing anggota PS dan KTH yang telah mendapatkan fasilitasi.
2. Kesulitan untuk *offtaker* produk yang dihasilkan oleh PS dan KTH.
3. Kesulitan dalam mengurus izin standar produk.
4. Masih belum optimalnya kerjasama/kolaborasi antar instansi dalam meningkatkan kualitas produk.



Sesuai Sesuai RPJMD tahun 2021-2026, target persentase peningkatan pendapatan petani hutan telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026 dengan kenaikan 5% setiap tahunnya. Jika capaian tahun 2022 dibandingkan dengan target pada tahun 2026, dan melihat tren kenaikan

selama 2 tahun 2021 dan 2022 yang realisasinya selalu di atas target (17,31% dan 11,16%) maka target tahun 2026 sangat optimis dapat dicapai.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan di masa yang akan datang akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Perlu dibuat kebijakan daerah untuk memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok PS dan KTH.
2. Meningkatkan kerjasama/kolaborasi antar instansi dalam meningkatkan kualitas dan promosi produk.
3. Optimalisasi anggaran untuk mendukung peningkatan pendapatan petani hutan agar dapat terealisasi.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 4 Program dengan 11 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp **37.137.573.430,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 3.1.3. dapat dilihat pada tabel 3.37.

Tabel 3. 37 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	11	37.137.573.430	32.862.627.876
1	Program Pengelolaan Hutan	8	23.252.624.460	19.951.366.169
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1	225.402.500	176.497.502

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1	13.109.546.470	12.223.583.597
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	550.000.000	511.180.608

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **37.137.573.430,-** terealisasi sebesar Rp **32.862.627.876,-** atau **88,49%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 4.274.945.554,- (11,51%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan (223,2%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (88,49%) dengan tingkat efisiensi >100%.

Misi 4**Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/
Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital****Tujuan 4.1****Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta
Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing**

Pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan dapat berfungsi menjadi mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Kemampuan sektor ini menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah bahan dasar dan produk yang dihasilkan berdampak pada pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk menggerakkan perekonomian, Pemerintah juga memberdayakan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Sektor perdagangan dan industri kecil menjadi mata pencaharian masyarakat di Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Begitupun dengan banyaknya IKM yang berkembang dan tumbuh di Sumatera Barat menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat dalam berbisnis.

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Sumatera Barat berhadapan dengan tren tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan elektronik dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Sumatera Barat sekaligus dapat menjadi peluang untuk memasarkan produk-produk lokal. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku usaha perdagangan termasuk UMKM dalam memasarkan produknya merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing.

Perhatian dan fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap perdagangan dan industri kecil/menengah terlihat dari tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu “**mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing**”. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan tersebut digunakan indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Pengukuran 2 indikator tersebut didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan tahun n. Pencapaian tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing tergambar pada tabel 3.38.

Tabel 3. 38 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	16,25	16,50	101,54
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	8,75	8.54	97,60
Rata-rata Capaian			99,57

Berdasarkan 2 indikator tersebut dapat dilihat bahwa tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing tercapai dengan capaian 99,57%, Evaluasi dan analisis indikator yang mengukur pencapaian tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing dijelaskan sebagai berikut:

1. *Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB*



Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan Sepeda Motor. Indikator kontribusi sektor

perdagangan terhadap PDRB diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD 2021-2026, pada tahun 2022 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditargetkan dapat mencapai angka 16,25%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target tahun 2022 ditetapkan lebih tinggi 0,48%.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022 ditargetkan 16,25%, terealisasi 16,50% dengan tingkat capaian 101,54% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Realisasi indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.15/02/13/ThXXVI tanggal 6 Februari 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2022 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB} = \frac{\text{Rp. 47,08 triliun}}{\text{Rp. 285,38 triliun}} \times 100\% = 16,50\%$$

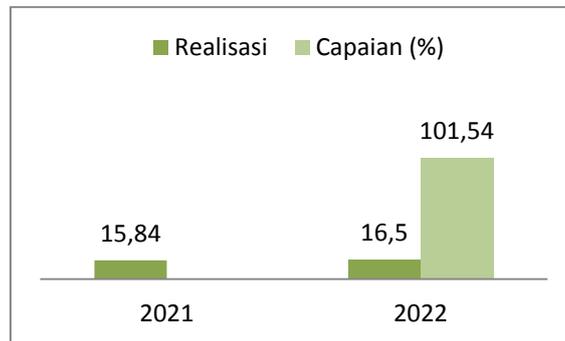
Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor perdagangan sebesar Rp. 47,08 triliun

Nilai PDRV Sumatera Barat atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 285,38 triliun.

Perhitungan capaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan capaian >100% menunjukkan ketercapaian di atas target yang ditetapkan. Capaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Kontribusi sektor perdagangan tahun 2022 menunjukkan peningkatan 0,66% dibandingkan dengan tahun 2021. Perbandingan realisasi dan capaian kontribusi sektor perdagangan tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 53.

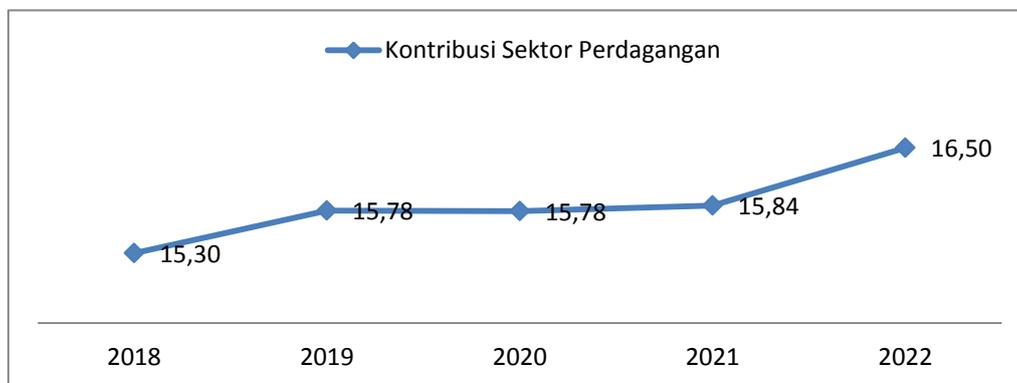
Grafik 53 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator kontribusi sektor perdagangan 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku dari tahun 2018-2022 rata-rata menunjukkan peningkatan kecuali tahun 2020 yang nilainya sama dengan tahun sebelumnya. Kenaikan 0,66% di tahun 2022 menjadi kenaikan tertinggi sepanjang tahun 2018-2022 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 1,92%. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2018-2022 ditampilkan pada grafik 54.

Grafik 54 kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2018-2022



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Dalam pengembangan sektor perdagangan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Upaya yang telah dilakukan di tahun 2022 antara lain:

1. Adanya sinergitas program dan kegiatan kab/kota dengan Provinsi dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar melalui pembinaan pengelolaan pasar di Sumatera Barat.

2. Menjaga stabilitasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar melalui:
 - a. Pemantauan pasokan dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dengan *stakeholder* terkait ke Kabupaten/Kota.
 - b. Operasi pasar murah pada 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi ke distributor dan pengecer pupuk di Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembinaan dan perkuatan akses pasar dalam negeri dengan melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatera Barat melalui bazar maupun pameran dan even-even nasional.
4. Melaksanakan promosi dan bazar produk IKM lokal.
5. Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial melalui pengujian mutu, peningkatan pengawasan mutu komoditi potensial ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian komoditi potensial ekspor.
6. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha ekspor tentang prosedur perdagangan luar negeri.
7. Meningkatkan tertib usaha di bidang perdagangan melalui peningkatan pengawasan barang beredar di pasaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku SNI Wajib. Pada tahun 2022, pengawasan dilakukan pada 15 produk dan barang beredar di 19 Kabupaten/Kota.
8. Adanya perjanjian kerjasama Indonesia dengan negara tujuan ekspor baru seperti Afrika.

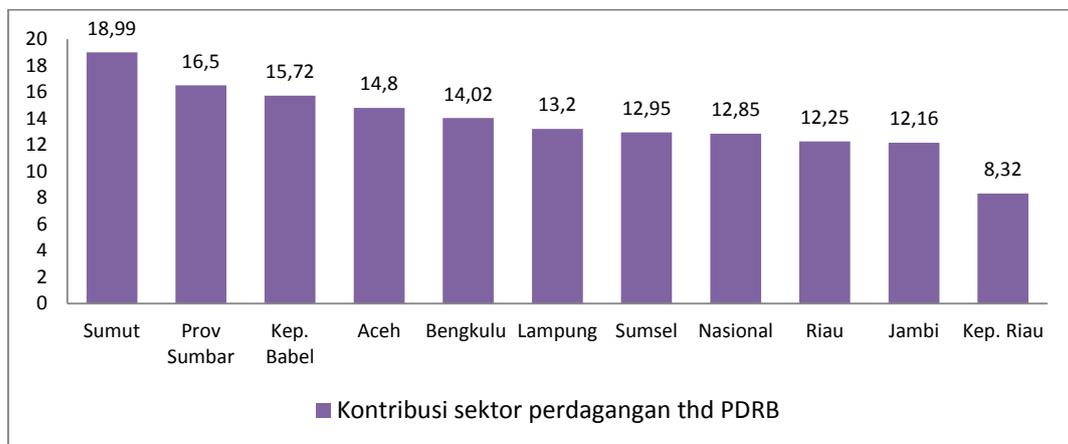
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perdagangan yaitu:

1. Penghentian sementara ekspor CPO yang diberlakukan pemerintah.

2. Kecenderungan pelaku usaha/petani yang mudah beralih ke sektor usaha lain/komoditas lain yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek/menengah.
3. Terjadinya kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.
4. Masih rendahnya keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat lebih tinggi 3,65% dibandingkan dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Nasional. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati urutan ke 2 tertinggi setelah Provinsi Sumatera Utara. Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 55.

Grafik 55 Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditargetkan mencapai 18,15% pada tahun 2026. Butuh kenaikan 1,65% dengan rata-rata kenaikan pertahun 0,413% untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Mempertimbangkan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya maksimal untuk dapat mencapai target 18,15% di tahun 2026.

Pengembangan sektor perdagangan akan menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Upaya yang akan dilakukan di masa yang akan datang antara lain:

1. Menjaga kualitas pasar melalui pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar serta pembinaan kepada aparat dan pengelola pasar.
2. Secara konsisten menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar melalui pemantauan dan pengawasan.
3. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembinaan dan perkuatan akses pasar dalam negeri dengan melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatera Barat baik melalui bazar, pameran nasional dan internasional dan berpartisipasi pada even-even nasional
4. Secara konsisten melakukan pengawasan terhadap barang beredar di pasaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SNI Wajib dan Uji Sampel Garam)
5. Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial.

2. *Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB*



Sektor industri yang dimaksud adalah industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai potensi di sektor industri, terutama industri hilir dari produk pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Hilirisasi produk sektor-sektor utama tersebut perlu dilakukan agar tidak selalu memasarkan bahan baku. Pembinaan dan pengembangan sektor industri di Sumatera Barat telah

disusun melalui Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat (RPIP) untuk kurun waktu 2018-2038 melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018. Indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD 2021-2026, pada tahun 2022 kontribusi sektor industri terhadap PDRB ditargetkan dapat mencapai angka 8,75%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target tahun 2022 ditetapkan lebih rendah 0,04%.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2022 ditargetkan 8,75%, terealisasi 8,54% dengan tingkat capaian 97,60% termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”.

Realisasi indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.15/02/13/ThXXVI tanggal 6 Februari 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2022 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi sektor industri terhadap PDRB} = \frac{\text{Rp. 24,36 triliun}}{\text{Rp. 285,38 triliun}} \times 100\% = 8,54\%$$

Keterangan:

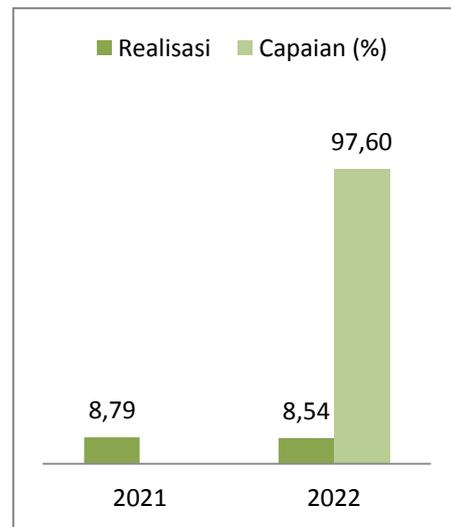
Nilai PDRB sub sektor industri sebesar Rp. 24,36 triliun

Nilai PDRV Sumatera Barat atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 285,38 triliun.

Perhitungan capaian indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian indikator ini <100%, yang berarti realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Sama halnya dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, Capaian indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB juga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Secara absolut, kontribusi sektor industri tahun 2022 mengalami penurunan 0,26% dibandingkan dengan tahun 2021.

Perbandingan realisasi dan capaian kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 56.

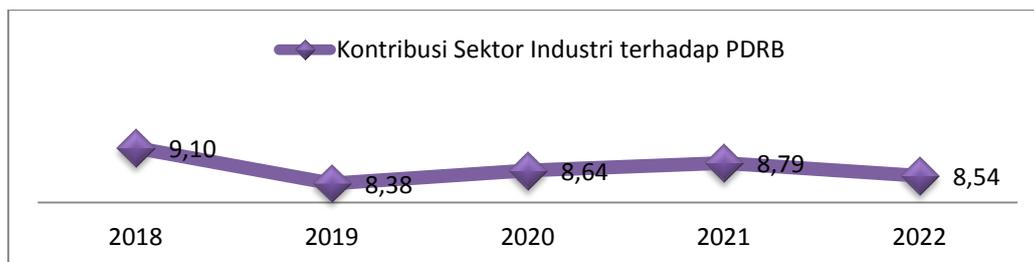
Grafik 56 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku dari tahun 2018-2022 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan kontribusi di tahun 2018, terjadi penurunan 0,56% di tahun 2022. Perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2018-2022 ditampilkan pada grafik 57.

Grafik 57 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2018-2022



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Dalam hal mendukung pengembangan sektor industri, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

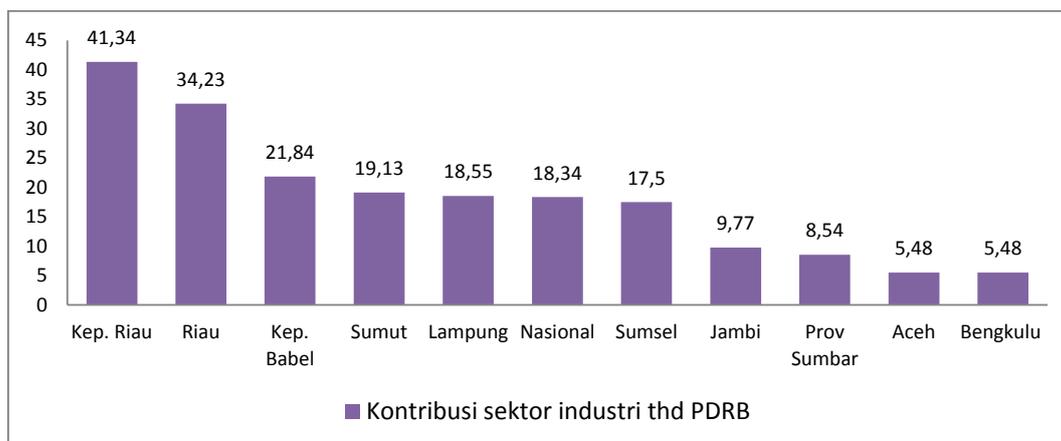
1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Barat tahun 2018-2038.
2. Hilirisasi dan diversifikasi produk industri di Kabupaten/Kota terutama terhadap industri kecil dan menengah.
3. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan *millenial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif.
4. Dicanangkannya Sumatera Barat sebagai destinasi wisata yang akan berdampak pada pengembangan pelaku usaha industri kecil dan menengah.

Perkembangan sektor industri di Sumatera Barat kurang menggembirakan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut antara lain:

1. Keterbatasan kualitas SDM, sarana prasarana, kelembagaan sentra industri kecil dan menengah.
2. Belum optimalnya pengembangan industri berdasarkan potensi daerah.
3. Belum optimalnya akses pasar bagi pelaku industri termasuk akses keluar (ekspor).
4. Keterbatasan modal dalam pengembangan usaha.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat masih lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Nasional dengan selisih kurang 9,8%. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati urutan ke 7. Provinsi dengan kontribusi sektor industri paling tinggi adalah Kepulauan Riau (41,34%) dan terendah berada pada Provinsi Bengkulu (5,48%). Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 58.

Grafik 58 Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB ditargetkan mencapai 9,29% pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan peningkatan 0,75% atau 0,1875% pertahun. Mempertimbangkan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya maksimal untuk dapat mencapai target tersebut.

Upaya yang akan dilakukan untuk pengembangan sektor industri di masa yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah melalui hilirisasi produk industri dan peningkatan pengembangan dan desain produk, peningkatan kompetensi SDM IKM dan Aparatur industri, peningkatan penerapan standarisasi produk industri dan fasilitasi standarisasi dan legalitas produk IKM.
2. Meningkatkan wirausaha industri kecil melalui pelatihan manajemen dan teknis bagi wirausaha industri kecil dan fasilitasi perizinan usaha.
3. Meningkatkan kuantitas produk industri melalui penggunaan teknologi tepat guna dan peningkatan diversifikasi produk industri.
4. Memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada sentra -sentra industri atau kelompok usaha pelaku industri kecil dan menengah.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan ini diuraikan pada 6 sasaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing dapat tercapai melalui pencapaian 6 Sasaran yaitu Sumatera barat sebagai pusat perdagangan, Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah, terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera, terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, meningkatnya pertumbuhan investasi dan meningkatnya peran ekonomi digital. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam perekonomian. Peran tersebut antara lain untuk mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja,

serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Peran sektor perdagangan tersebut saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi.

Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari kontribusi lapangan usaha sektor perdagangan yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan “Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan” sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah yang tangguh dan berdaya saing. Untuk mengukur sasaran tersebut digunakan indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan.

Pengukuran indikator ini didasarkan pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2022 ditargetkan mencapai 1,1%. Penetapan target ini sangat dipengaruhi oleh kondisi covid 19 yang masih tinggi di awal tahun 2022. Pencapaian sasaran “Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan” tergambar pada tabel 3.39.

Tabel 3. 39 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.1

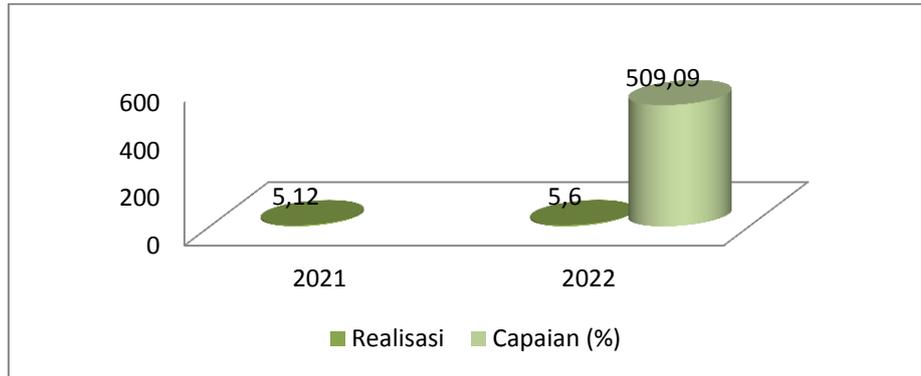


Laju pertumbuhan sektor perdagangan ditargetkan 1,1%, terealisasi 5,60% dengan tingkat capaian 509,09% termasuk kategori keberhasilan “sangat memuaskan”.

Realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.15/02/13/ThXXVI tanggal 6 Februari 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2022.

Perhitungan capaian indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator ini tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Berdasarkan informasi yang tersedia, kontribusi sektor industri tahun 2022 mengalami peningkatan 0,48% dibandingkan dengan tahun 2021. Perbandingan realisasi dan capaian laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 59.

Grafik 59 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Laju pertumbuhan sektor perdagangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata menunjukkan peningkatan kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan dikarenakan tingginya kasus covid 19. Walaupun sejak tahun 2021 pertumbuhan sektor ini mulai stabil, tetapi pencapaian tahun 2022 masih belum melebihi kondisi sebelum covid 19. Perkembangan laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2018-2022 ditampilkan pada grafik 60.

Grafik 60 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan tahun 2018-2022



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Dalam meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2022 antara lain:

1. Adanya sinergitas program dan kegiatan kab/kota dengan Provinsi dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar melalui pembinaan pengelolaan pasar di Sumatera Barat.

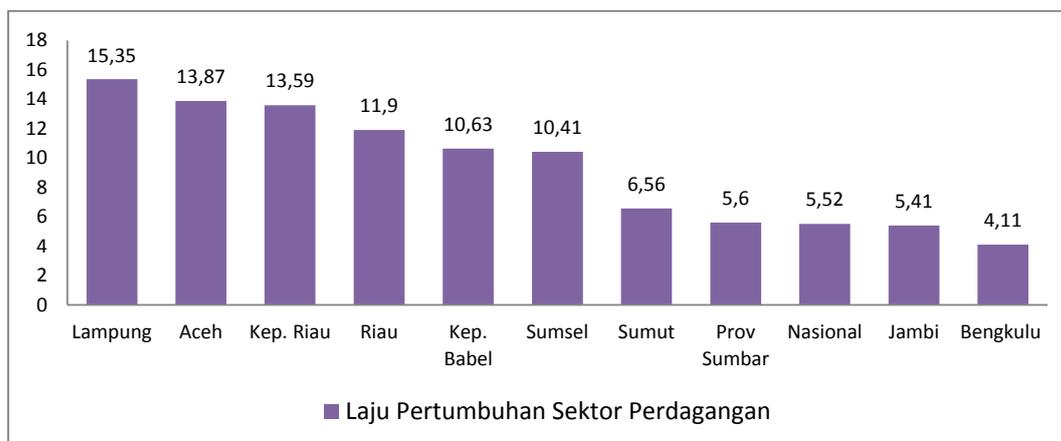
2. Adanya upaya pemerintah dalam menstabilkan harga terutama kebutuhan pokok baik melalui pasar murah/operasi pasar, membuat kebijakan HET untuk sejumlah bahan pokok misalnya minyak goreng, melakukan pemantauan harga bahan pokok di kab/kota.
3. Melaksanakan promosi dan bazar produk IKM lokal.
4. Gencarnya promosi pariwisata serta banyaknya destinasi wisata baru turut mendorong akselerasi sektor perdagangan.
5. Adanya komitmen pemerintah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan konsumen dari kecurangan perdagangan sehingga konsumen Sumatera Barat merasa nyaman dalam aktivitas berbelanja.
6. Adanya pelanggaran aktivitas masyarakat yang terus berlanjut sehingga mendorong kenaikan permintaan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan.

1. Terjadinya kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok seperti cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan telur ayam ras serta terjadinya kenaikan harga BBM.
2. Keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang.
3. Belum optimalnya fasilitasi bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif dalam penguatan perdagangan Sumatera Barat.

Laju pertumbuhan sektor perdagangan Sumatera Barat tahun 2022 tercapai sedikit lebih tinggi dari angka Nasional untuk indikator yang sama. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati urutan ke 8 di atas Provinsi Bengkulu dan Jambi. Laju pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Lampung tertinggi di Pulau Sumatera. Perbandingan laju pertumbuhan sektor perdagangan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik 61.

Grafik 61 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan ditargetkan mencapai 1,02% pada tahun 2026. Kondisi di tahun 2022, laju pertumbuhan sektor perdagangan sudah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyesuaikan kembali target di tahun yang akan datang.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Secara berkelanjutan menjaga sinergitas program dan kegiatan kab/kota dengan Provinsi dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar melalui pembinaan pengelolaan pasar di Sumatera Barat.
2. Menstabilkan harga terutama kebutuhan pokok baik melalui pasar murah/operasi pasar, membuat kebijakan HET untuk sejumlah bahan pokok misalnya minyak goreng, melakukan pemantauan harga bahan pokok di kab/kota.
3. Melaksanakan promosi dan bazar produk IKM lokal.

Untuk mencapai sasaran Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program dengan 10 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp

6.798.774.907,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4.1.1. dapat dilihat pada tabel 3.40.

Tabel 3. 40 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan	10	6.798.774.907	6.087.336.092
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	2	105.931.450	93.562.600
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	310.762.000	307.349.288
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2	340.941.850	332.247.013
4	Program Pengembangan Ekspor	1	754.508.500	399.116.778
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	3	2.930.005.516	2.778.233.247
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	2.356.625.591	2.176.827.166

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 6.798.774.907,- terealisasi sebesar Rp 6.087.336.092,- atau 89,54%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 711.438.815,- (10,46%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Sumatera sebagai pusat perdagangan (509,09%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (89,54%) dengan tingkat efisiensi >100%.



Sasaran 4.1.2

Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah



Sumatera Barat memiliki banyak potensi dalam pengembangan Industri Kecil Menengah. Pertumbuhan industri kecil dan menengah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Untuk kedepannya usaha industri kecil menengah di

Sumatera Barat lebih dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah secara terpadu, komprehensif, intensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian peranan sektor industri akan semakin besar dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan *Padang Industrial Park* (PIP).

Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2018 pada pasal 1 ayat 8 tentang Pemberdayaan Industri, sentra adalah merupakan sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

Berdasarkan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran “Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah” sebagai sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah yang tangguh dan berdaya saing. Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah salah satunya bisa terwujud dengan adanya peningkatan jumlah sentra IKM di Sumatera Barat. Peningkatan sentra ditunjang oleh peningkatan pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat serta peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah. Ada 12 sentra industri yang ada di Sumatera Barat yaitu sentra industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kakao, industri pengolahan makanan, industri pengolahan gambir, industri pengolahan minyak atsiri, industri pengolahan semen, industri pengolahan kulit, industri pengolahan tekstil dan produk tekstil, industri alat dan mesin pertanian, industri maritim, industri kelapa dan industri kelapa sawit.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah sentra industri kecil dan menengah. Pengukuran indikator tersebut berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Berpedoman pada RPJMD 2021-2026, indikator jumlah sentra industri kecil dan menengah yang ditargetkan tahun 2022 adalah 368 sentra industri. Target tahun 2022 ini lebih rendah 162 dibandingkan dengan jumlah sentra industri kecil dan menengah tahun 2021. Penetapan target ini mempertimbangan efek dari covid 2019. Pencapaian sasaran “Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah” tergambar pada tabel 3.41.

Tabel 3. 41 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.2



Jumlah sentra industri kecil dan menengah tahun 2022 ditargetkan 368, terealisasi 289 unit dengan tingkat capaian 78,53% termasuk kategori keberhasilan “**Baik**”.

Realisasi indikator jumlah sentra industri kecil dan menengah berdasarkan pada data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Rincian 289 sentra industri kecil dan menengah tersebar pada 19 Kabupaten/Kota sebagaimana disajikan pada tabel 3.42.

Tabel 3. 42 Rincian 289 Sentra Industri Kecil dan Menengah

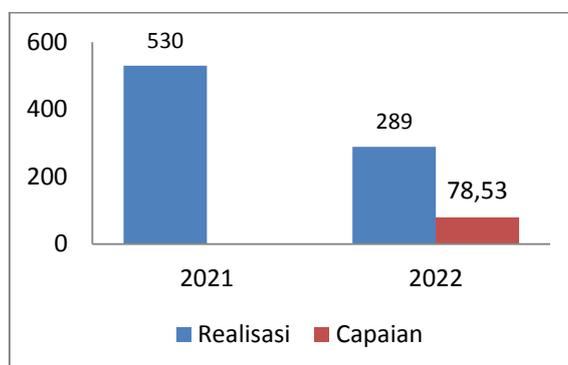
NO.	KABUPATEN / KOTA	UNIT USAHA (UU)	TENAGA KERJA (ORANG)	SENTRA
1	Kabupaten Pesisir Selatan	3.879	11.705	17
2	Kabupaten Solok	972	2.203	15
3	Kabupaten Sijunjung	901	2.836	0
4	Kabupaten Tanah Datar	3.022	7.597	16
5	Kabupaten Padang Pariaman	2.366	6.724	30
6	Kabupaten Agam	4.555	11.509	54
7	Kabupaten 50 Kota	8.090	23.088	19
8	Kabupaten Pasaman	1.526	4.934	8
9	Kabupaten Kep. Mentawai	488	1.255	19
10	Kabupaten Pasaman Barat	1.565	4.589	9
11	Kabupaten Padang	2.211	9.051	3
12	Kabupaten Solok	649	1.450	3
13	Kota Sawahlunto	1.703	2.336	23

NO.	KABUPATEN / KOTA	UNIT USAHA (UU)	TENAGA KERJA (ORANG)	SENTRA
14	Kota Padang Panjang	675	1.503	3
15	Kota Bukittinggi	2.542	8.923	4
16	Kota Payakumbuh	1.928	6.308	4
17	Kota Pariaman	1.752	5.369	21
18	Kota Padang	2.211	9.051	3
19	Kota Solok	649	1.450	3
JUMLAH		40.653	116.441	289

Sumber data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Perhitungan capaian indikator jumlah sentra industri kecil dan menengah menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja jumlah sentra industri kecil dan menengah tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Berdasarkan informasi yang tersedia, jumlah sentra industri kecil dan menengah tahun 2022 mengalami penurunan 241 sentra dibandingkan dengan tahun 2021. Terjadinya penurunan realisasi jumlah sentra di kabupaten/kota disebabkan terdampaknya beberapa sentra akibat terjadinya covid 19 sehingga banyak sentra yang sudah tidak aktif lagi dan dilakukannya pendataan ulang oleh beberapa kab/kota sehingga diperoleh data sentra yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian jumlah sentra industri kecil dan menengah tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 62.

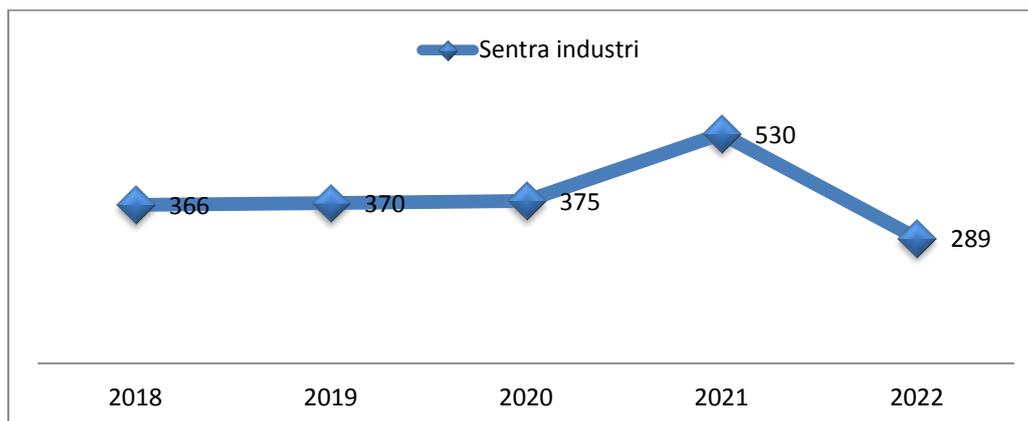
Grafik 62 Perbandingan Capaian dan Realisasi jumlah sentra industri kecil dan menengah 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Jumlah sentra industri kecil dan menengah dari tahun 2018-2022 rata-rata menunjukkan peningkatan kecuali tahun 2022 yang turun secara signifikan. Peningkatan 155 sentra terjadi di tahun 2021 menjadi kondisi tertinggi dalam kurun waktu 2018-2022. Perkembangan jumlah sentra industri kecil dan menengah tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik 63.

Grafik 63 Perkembangan jumlah sentra industri kecil dan menengah



Sumber data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dalam hal menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah, telah diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya penguatan sentra melalui peningkatan sarana prasarana sentra baik melalui dana DAK Kementerian Perindustrian maupun bantuan mesin/peralatan sentra dari APBD.
2. Melakukan pembinaan sentra melalui pelatihan, diversifikasi produk, dan fasilitasi sertifikasi halal, pendaftaran merk, MD, dan SNI.
3. Meningkatnya wirausaha sektor industri yang diharapkan akan mendorong peningkatan jumlah sentra.

Di samping upaya yang telah dilakukan, masih ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Belum semua sentra melegal formalkan usahanya baik melalui SK penetapan sentra maupun melalui pendaftaran perizinan usaha (NIB).
2. Sentra terdampak akibat terjadinya covid 19 sehingga terdapat beberapa sentra yang sudah tidak aktif lagi.

Indikator kinerja jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra) ditargetkan mencapai 413 sentra pada tahun 2026. Kondisi di tahun 2022, menunjukkan pencapaian 69,98% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Dengan mempertimbangkan peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya, target 413 sentra di tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah, kedepannya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya penguatan sentra melalui peningkatan sarana prasarana sentra baik melalui dana DAK Kementerian Perindustrian maupun bantuan mesin/peralatan sentra dari APBDP.
2. Melakukan pembinaan sentra melalui pelatihan, diversifikasi produk dan fasilitasi sertifikasi halal.
3. Meningkatnya wirausaha sektor industri yang diharapkan akan mendorong peningkatan jumlah sentra.
4. Dengan adanya dana aspiratif anggota dewan terhadap sentra (kelompok IKM yang sama minimal 5 unit usaha dalam lokasi yang sama) dan hibah dapat memacu sentra/kelompok IKM untuk melegal formalkan usahanya.

Untuk mencapai sasaran Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 3 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp 11.428.804.825,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4.1.2. dapat dilihat pada tabel 3.43.

Tabel 3. 43 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	3	11.428.804.825	10.882.770.219
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	11.204.907.229	10.664.628.175
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1	147.246.346	143.628.454
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	76.651.250	74.513.590

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 11.428.804.825,- terealisasi sebesar Rp 10.882.770.219,- atau 95,22%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 546.034.606,- (4,78%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran tidak terjadi efisiensi karena capaian indikator kinerja sasaran Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah (78,53%) lebih rendah 16,69% dari realisasi anggaran (95,22%).



Koperasi dan UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian. Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan

dan restoran. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di dalam RPJMD 2021 - 2026 telah menetapkan strategi untuk mewujudkan pelaku koperasi dan UMKM, yaitu melalui: 1) Peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha; 2) Peningkatan akses pembiayaan koperasi dan UMKM; 3) Penguatan kelembagaan pengawasan Koperasi dan UMKM. Melalui strategi ini diharapkan program-program yang dilakukan dapat menyentuh pencapaian terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera.

Ketercapaian terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan ekonomi subsektor koperasi dan persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil. Pengukuran indikator ini berdasarkan pada data dari Badan Pusat Statistika dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM dapat dilihat pada tabel 3.44.

Tabel 3. 44 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,14	5,04	235,51
Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	2,40	1,6	66,67
Rata-rata Capaian			151,09

Rata-rata capaian Sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja adalah 151,09% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”. Evaluasi dan analisa masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi



Laju pertumbuhan ekonomi ekonomi sub sektor koperasi dihitung berdasarkan data PDRB ADHK sektor koperasi. PDRB ADHK sektor koperasi ini dihitung berdasarkan dari volume usaha koperasi. Volume usaha koperasi adalah total nilai pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan yang terdiri dari volume usaha simpan pinjam maupun dari sektor rill. Besaran volume usaha koperasi ini bisa menggambarkan aktivitas ekonomi koperasi. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi} = \frac{\text{PDRB ADHK 2022 sub sektor koperasi} \times 100}{\text{PDRB ADHK sub sektor koperasi 2021}} - 100$$

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi ditargetkan 2,14, terealisasi 5,04 dengan tingkat capaian 235,51% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi yang tercapai 5,04 diperoleh berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi} = \frac{35,69736 \text{ juta} \times 100}{33,98510 \text{ juta}} - 100 = 5,04$$

Keterangan:

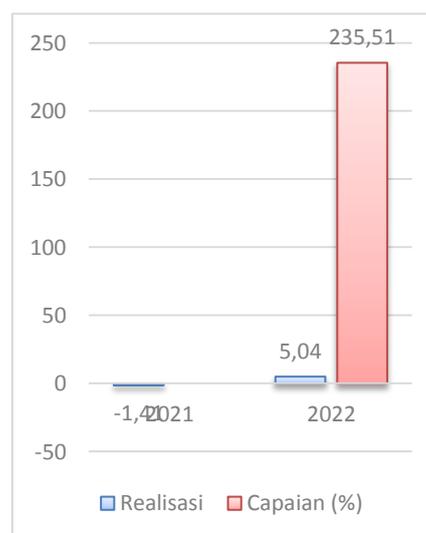
PDRB ADHK 2022 sub sektor koperasi= 35,69736 juta

PDRB ADHK 2021 sub sektor koperasi= 33,98510 juta

Perhitungan capaian laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi di tahun 2022 (235,51%) menunjukkan pencapaian di atas target yang ditetapkan. Capaian indikator tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Berdasarkan data yang tersedia, laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi tercatat mengalami peningkatan 6,45 di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Perbandingan capaian dan realisasi indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 64.

Grafik 64 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi subsektor koperasi terkait dengan volume usaha koperasi, maka upaya yang dilakukan di tahun 2022 untuk mencapai peningkatan volume usaha koperasi antara lain:

1. Pengembangan kapasitas usaha koperasi melalui:
 - a. Fasilitasi kerjasama antara koperasi dengan pihak yang bisa menjadi *offtaker* produk koperasi. Ada 5 koperasi sektor rill yang sudah menjalin kerja sama/kemitraan yaitu: 1) Kopsyah Gambir Anam Koto Mandiri, 2) KUD Durian Tinggi, 3) KUD Tangai Raya, 4) KSU Warga Sejahtera dan 5) Koperasi Tani Atsiri Syariah.
 - b. Pendampingan dan fasilitasi permodalan koperasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan. Pada tahun 2022 sudah ada 3 koperasi yang mendapatkan pinjaman modal melalui LPDB KUMKM dengan total pinjaman Rp. 17.040.000.000,-.
2. Pengawasan dan penilaian kesehatan usaha koperasi usaha simpan pinjam. Pada tahun 2022 sebanyak 76 unit koperasi dilakukan pengawasan.
3. Pelatihan bagi koperasi dalam mengembangkan usaha dan pengawasan usaha koperasi

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi subsektor koperasi antara lain:

1. Ketidakmampuan beberapa koperasi untuk bersaing dengan pihak swasta dikarenakan keterbatasan sarana dan permodalan.
2. Proses konversi beberapa koperasi ke syariah sehingga untuk sementara tidak dapat beroperasi seperti biasanya.
3. Suku bunga pinjaman bank lebih rendah sehingga anggota koperasi lebih tertarik melakukan pinjaman dengan pihak perbankan.

Indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi ditargetkan tercapai 2,33 pada tahun 2026. Kondisi di tahun 2022, sudah tercapai melebihi target di tahun 2026. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, target di tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Agar laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi dapat meningkat, kedepannya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara konsisten memfasilitasi pengembangan kapasitas usaha koperasi melalui fasilitasi kerjasama dan permodalan koperasi.
2. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap koperasi
3. Memberikan bantuan terhadap koperasi sektor rill.

2. *Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil*



Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar utama perekonomian masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Barat. Keberadaan UMKM diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi masyarakat Sumatera Barat yang memiliki jiwa berwirausaha. Aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya.

Berdasarkan Sensus ekonomi tahun 2016, jumlah UMKM di Sumatera Barat sebanyak 593.100 unit dengan rincian Usaha Mikro 531.350 Unit (89,59%) dan Usaha Kecil 53.431 Unit (9,01%) yang mempunyai kontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jumlah UMKM di Sumatera Barat yang mencapai lebih 90% dari total jumlah sektor usaha, menjadikan UMKM sebagai salah satu wadah paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tinggi.

Indikator persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil dihitung dari pendapatan usaha mikro dan kecil tahun n dibandingkan dengan pendapatan tahun (n-1). Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator

persentase peningkatan pada usaha mikro dan kecil pada tahun 2022 ditargetkan tercapai 2,4%.

Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil pada tahun 2022 target 2,4%, terealisasi 1,6% dengan tingkat capaian 66,67% termasuk kategori keberhasilan “cukup”.

Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil 1,6% dihitung berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase peningkatan pada usaha mikro dan kecil} = \frac{49.683.750.530.355 - 48.902.252.466.923,30}{48.902.252.466.923,30} \times 100\% = 1,6\%$$

Pendapatan pada usaha mikro dan kecil sebesar Rp. 49.683.750.530.355 di tahun 2022 merupakan akumulasi dari pendapatan usaha mikro dan kecil di 19 Kabupaten/Kota dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.45.

Tabel 3. 45 Rincian Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil 19 Kabupaten/Kota tahun 2021-2022

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan/Omzet	
		2021	2022
1	Kabupaten Agam	1.852.842.226.622,18	1.855.005.000.000,00
2	Kabupaten Dharmasraya	1.865.936.850.206,34	1.867.625.000.000,00
3	Kab. Kepulauan Mentawai	278.786.821.592,28	272.562.780.500,00
4	Kab. Lima Puluh Kota	-459.017.473,00	350.000.000,00
5	Kab. Padang Pariaman	1.932.977.456.317,49	1.935.000.000.000,00
6	Kab. Pasaman	758.975.244.534,20	760.000.000.000,00
7	Kab. Pasaman Barat	2.011.373.041.004,48	2.017.500.000.000,00
8	Kab. Pesisir Selatan	1.416.590.686.907,99	1.412.335.255.000,00
9	Kab. Sijunjung	1.205.052.599.991,23	1.206.287.700.000,00
10	Kab. Solok	1.906.453.036.292,72	1.925.619.060.000,00
11	Kab. Solok Selatan	505.060.240.676,61	511.850.594.000,00
12	Kab. Tanah Datar	1.097.139.259.812,11	1.100.000.000.000,00
13	Kota Bukittinggi	-10.353.026.152,42	13.545.350.000,00
14	Kota Padang	27.762.014.211.234,10	28.284.100.000.000,00
15	Kota Padang Panjang	-6.916.249.907,80	10.828.200.000,00
16	Kota Pariaman	2.411.864.488.810,35	2.490.081.540.000,00
17	Kota Payakumbuh	3.823.057.575.876,13	3.924.424.760.000,00
18	Kota Sawahlunto	86.794.901.764,30	91.568.104.855,00
19	Kota Solok	5.062.118.814,00	5.067.186.000,00
	Jumlah	48.902.252.466.923,30	49.683.750.530.355,00

Berdasarkan tabel 3.45 diketahui:

1. Rata-rata pendapatan pada usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan di tahun 2022 kecuali Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pendapatan usaha mikro dan kecil di Kota Padang tertinggi dari Kabupaten/Kota yang lain dengan kontribusi 56,93% dari pendapatan usaha mikro dan kecil Sumatera Barat.
3. Pendapatan usaha mikro dan kecil terendah berada di Kabupaten lima puluh kota.

Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil di tahun 2022 (66,67%) menunjukkan pencapaian di bawah target yang telah ditetapkan. Capaian dan realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022 dan informasi untuk indikator ini juga belum tersedia.

Upaya yang dilakukan selama tahun 2022 untuk meningkatkan pendapatan pada usaha mikro dan kecil antara lain:

1. Meningkatkan daya saing produk UMKM melalui:
 - a. pendaftaran merk dan perolehan sertifikasi halal. Pada tahun 2022, 15 UMKM telah mendapatkan pendaftaran merk dan 30 UMKM telah mendapatkan sertifikasi halal.
 - b. Pendampingan oleh konsultan PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam meningkatkan daya saing produk dan inovasi produk.
2. Memfasilitasi UMKM memperoleh permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan.
3. Memfasilitasi advokasi hukum bagi UMKM.
4. Fasilitasi penumbuhan *millenial entrepreneur* melalui mobil klinik KUMKM

5. Meningkatkan kapasitas dan SDM UMKM melalui pelatihan dan sosialisasi.

Hambatan dan kendala yang ditemukan dalam meningkatkan pendapatan pada usaha mikro dan kecil antara lain:

1. Terbatasnya modal UMKM yang berdampak pada pengembangan usaha.
2. Inovasi dari produk UMKM yang rendah sehingga kurang diminati.
3. Terbatasnya akses pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga perbankan.
4. Terbatasnya akses pemasaran dan promosi produk UMKM baik dalam dan luar daerah.

Indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil ditargetkan tercapai 5,2% pada tahun 2026. Mempertimbangkan kondisi 2022 dengan realisasi 1,6%, perlu upaya yang sangat optimal agar target tersebut dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, penetapan target tahunan sampai tahun 2026 akan dilakukan penyesuaian kembali.

Agar pendapatan pada usaha mikro dan kecil dapat meningkat, kedepannya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fasilitasi permodalan UMKM.
2. Mengoptimalkan pendampingan dan pembinaan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi produk yang dihasilkan.
3. Meningkatkan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 7 Program dengan 9 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp 16.635.918.200,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan ukm yang sejahtera. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4.1.3. dapat dilihat pada tabel 3.46.

Tabel 3. 46 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera	9	16.635.918.200	14.473.027.743
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1	41.057.800	37.019.730
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	280.634.950	276.355.794
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1	46.365.000	41.479.250
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2	5.891.964.000	5.751.943.367
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2	4.154.065.450	2.579.379.641
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1	2.276.838.500	2.079.067.936
7	Program Pengembangan UMKM	1	3.944.992.500	3.707.782.025

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **16.635.918.200,-** terealisasi sebesar Rp **14.473.027.743,-** atau 87,00%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 2.162.890.457,- (13,00%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera (151,09%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (87,00%) dengan tingkat efisiensi 64,09%.



Entrepreneurship atau kewirausahaan menjadi tulang punggung terpenting dalam pembangunan suatu negara hal ini dikarenakan kewirausahaan memiliki peran penting terhadap perkembangan perekonomian. Kewirausahaan

memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena

membentuk modal, menghasilkan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup suatu negara dan daerah dan desentralisasi distribusi sumber daya ekonomi dan meningkatkan *Gross National Product* (GNP). Kewirausahaan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak, mendorong inovasi, indikator keunggulan daya saing negara dan indikator kemakmuran negara atau daerah.

Pengembangan kewirausahaan di Sumatera Barat didukung oleh potensi jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2020 sebesar 1,05%. Penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi usia produktif, yaitu 68,08% berada di rentan usia 15 - 64 tahun. Banyaknya jumlah penduduk pada usia produktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan peluang untuk mengembangkan sektor kewirausahaan baru generasi millennial. Keberadaan *Millennial Entrepreneur* tentu menjadi faktor penguat pengembangan kewirausahaan di Sumatera Barat. Di samping itu, tingginya jumlah penduduk wanita di Sumatera Barat setiap tahun merupakan potensi yang sangat besar, khususnya dalam berwirausaha.

Menurut hasil data Sensus Ekonomi Tahun 2016, sebanyak 86,3% kegiatan ekonomi yang ada di Sumatera Barat merupakan UMK, dan sisanya 13,7% merupakan Usaha Menengah Besar (BPS, 2016). Tingkat pengembangan UMKM Sumatera Barat menjadi sangat penting mengingat Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar untuk mencetak *entrepreneur* baru. Pengembangan kewirausahaan UMKM menjadi prioritas utama dalam

pengembangan ekonomi di Sumatera Barat. Hal ini tertuang dalam sasaran kepala daerah yaitu “terciptanya 100 Ribu *Entrepreneur* dari berbagai sektor. Mencetak 100 ribu millennial enterpreneur dan women enterpreneur serta pelaku ekonomi kreatif juga menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Program unggulan tersebut diharapkan akan menjadi pilar penggerak kewirausahaan di Sumatera Barat dengan target kondisi akhir terdapat peningkatan sebanyak 100.070 Wirausaha baru.

Sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja jumlah enterpreneur baru tercipta. Pengukuran enterpreneur didasarkan pada enterpreneur yang telah menerima pendidikan kewirausahaan dan atau sudah memulai usaha. Terdapat tiga kelompok yang akan menjadi sasaran dalam *kewirusahaan Sumatera Barat antara lain*: pencari kerja, wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, jumlah enterpreneur baru tercipta pada tahun 2022 ditargetkan 112.594 orang. Indikator ini baru diukur sebagai indikator kinerja utama Kepala Daerah pada tahun 2022. Pencapaian sasaran terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor dapat dilihat pada tabel 3.47.

Tabel 3. 47 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.4



Jumlah enterpreneur baru tercipta tahun 2022 ditargetkan 112.594, terealisasi 115.149 dengan capaian 102,27% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

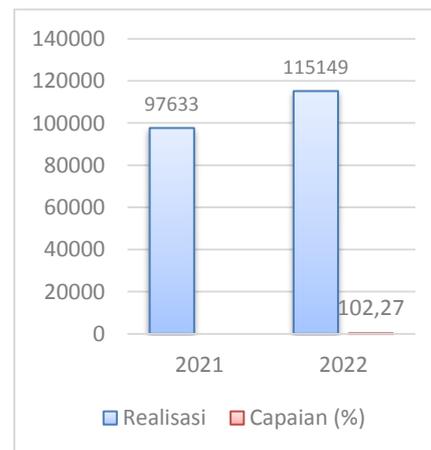
Realisasi indikator ini diukur berdasarkan data wirausaha yang telah mengikuti kegiatan *sumberpreneur* pada tahap pendataan yang berkesempatan mengikuti tahapan pembinaan dan peningkatan usaha dari aplikasi *sumberpreneur* (sistem pencatatan jumlah *entrepreneur* di Sumatera Barat).

Data pada aplikasi tersebut berasal dari 15 OPD penampung program unggulan. OPD tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Sosial.

Perhitungan capaian indikator jumlah *entrepreneur* baru tercipta menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator ini di tahun 2022 (102,27%) menunjukkan pencapaian di atas target yang ditetapkan. Capaian indikator jumlah *entrepreneur* baru tercipta tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Akan tetapi, dari data yang tersedia diketahui terjadi peningkatan jumlah *entrepreneur* baru tercipta sebanyak 17.516 orang di tahun 2022.

Perbandingan capaian dan realisasi indikator jumlah *entrepreneur* baru tercipta tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 65.

Grafik 65 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Jumlah *entrepreneur* baru tercipta 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Jika dilihat kondisi eksisting, dapat diketahui bahwa proporsi jumlah *entrepreneur* (wirausaha) di Sumatera Barat masih didominasi oleh *women entrepreneur* (sebesar 50%) dibandingkan *millennial entrepreneur* (25%) dan pelaku ekonomi kreatif (25%). Agar terciptanya 100.000 *entrepreneur*, telah diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2019 yang membahas tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci terkait tujuan pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil.
2. Pelaksanaan program pembinaan dalam bentuk pelatihan kepada seluruh elemen terkait sektor kewirausahaan sehingga dapat bersama-sama mewujudkan pemerataan pendapatan dan nantinya berujung pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Misalnya pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa/Nagari, Forum komunikasi pelaku usaha Daerah, Fasilitasi merek, halal dan permodalan, serta Akses pembiayaan bagi pelaku UMKM ke lembaga Bank dan Non Bank juga penting untuk dilakukan.
3. Mobil keliling (Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)) untuk melayani pengurusan NIB.
4. Fasilitasi permodalan untuk 540 unit UMKM dan 265 pelaku UMKM yang difasilitasi, baik yang bersumber dari perbankan maupun non perbankan. Dari hasil fasilitasi tersebut, sebanyak Rp11,74 miliar dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersumber dari lembaga perbankan, seperti BNI, BRI, Bank Nagari, Bank Mandiri, dan BSI, telah disalurkan untuk membantu para pelaku usaha dan UMKM di Sumbar.

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan 100.000 enterpreneur antara lain:

1. Masih terbatasnya akses permodalan untuk membuka usaha.
2. Keterbatasan penguasaan teknologi yang dapat menjadi pendukung .
3. Masih terbatasnya masyarakat yang berkeinginan menjadi pengusaha dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan berwirausaha.
4. Masih terbatasnya pengetahuan dari masyarakat yang membuka usaha untuk mengurus NIB.

Jumlah enterpreneur di tahun 2022 yang tercapai 115.149 orang menunjukkan pencapaian 58,24% dari target tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Untuk mencapai target tahun 2026 diperlukan peningkatan sebesar 82.554 orang

atau 20.639 orang pertahun dari realisasi tahun 2022. Dikarenakan terciptanya enterpreneur menjadi program unggulan Pemerintah Daerah, maka upaya maksimal akan konsisten dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai 100.000 enterpreneur, kedepannya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama peningkatan kapasitas UMKM dalam pengembangan kewirausahaan dengan *stakeholder* seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pelaku usaha yang sudah sukses (praktisi), Pelaku usaha besar dan menengah, Pelaku UMKM, Profesional, Akademisi, Asosiasi, Investor, serta Perbankan (lembaga keuangan lain).
2. Menggali potensi sumber daya yang dimiliki oleh Sumatera Barat agar dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM serta meningkatkan perekonomian daerah.
4. Menanamkan jiwa enterpreneur sejak dini kepada siswa di sekolah.
5. Meningkatkan keahlian serta keterampilan pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai sasaran terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 2 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp **6.457.499.965,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4.1.4. dapat dilihat pada tabel 3.48.

Tabel 3. 48 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.4

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Terciptanya 100.000 Entrepreneur Dari Berbagai Sektor	2	6.457.499.965	6.282.929.900
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	6.457.499.965	6.282.929.900

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp 6.457.499.965,-** terealisasi sebesar **Rp 6.282.929.900,-** atau 97,30%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp 174.570.065,-** (2,70%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran terciptanya 100.000 *entrepreneur* dari berbagai sektor (102,27%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (97,30%) dengan tingkat efisiensi 4,97%.



Membangun iklim investasi yang baik pada suatu daerah harus didukung oleh banyak hal. Baik dari segi kebijakan Pemerintah Pusat ataupun Daerah, Sumber Daya Ekonomi, potensi Sumber Daya Alam yang banyak, ketersediaan tenaga kerja serta dukungan sarana dan prasarana yang baik, dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di sebuah daerah. Guna mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah yang merupakan misi keempat RPJMD 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah dengan berperan sebagai ujung tombak yang mampu bertindak lebih kreatif untuk meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan daya saing untuk menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.

Target persentase pertumbuhan investasi tahun 2022 ditetapkan sebesar 6%. Penetapan target berdasarkan target RPJMD dan pengukuran realisasi diperoleh dari data investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nilai investasi berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN). Pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi dapat dilihat pada tabel 3.49.

Tabel 3. 49 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.5



Tahun 2022, persentase pertumbuhan investasi target 6% tumbuh sebesar 0,79% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 13,17%.

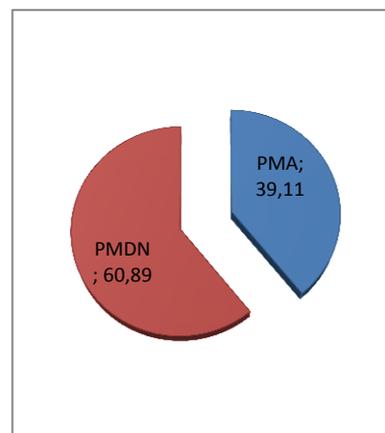
Realisasi pertumbuhan investasi 0,79% diperoleh berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Nilai Investasi Tahun 2022 terdiri dari PMA sebesar US\$141.780.180,00 ribu atau Rp2.034.545.583.000,- (Kurs Rp 14.350/USD) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.3.167.188.710.000,- dengan nilai total investasi sebesar Rp.5.201.734.293.000,-.

Penghitungan pertumbuhan investasi 2022 dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Rp. 5.201.734.293.000} - \text{Rp. 5.161.169.300.000}}{\text{Rp. 5.161.169.300.000}} \times 100 = 0,79 \%$$

Ket : Realisasi Investasi Tahun 2022 (PMA + PMDN) = Rp. 5.201.734.293.000,-
Realisasi Investasi Tahun 2021 = Rp. 5.161.169.300.000,-

Dari total Nilai investasi Sumatera Barat Tahun 2022, PMDN berkontribusi sebesar 60,89%, sedangkan PMA berkontribusi sebesar 39,11%. Peningkatan nilai investasi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 0,79% didukung oleh pertumbuhan PMA sebesar 108,15% (Dalam Rupiah). Namun tidak sejalan dengan realisasi PMDN yang tumbuh negatif sebesar 24,30% dibanding Tahun 2021. Berdasarkan sektor Usaha, Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.50 di bawah ini :



Tabel 3. 50 Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2022 berdasarkan sektor usaha

No	Sektor usaha menurut Perka No.17 Tahun 2015 BKPM RI	Penanaman Modal Asing (PMA)		Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	
		Ribu USD (ribu)	%	Rupiah (juta)	%
I.	SEKTOR PRIMER	27.457,03	19,37	1.152.441,38	36,39
1	Tanaman Pangan, perkebunan & peternakan	11.289,25	7,96	664.618,66	20,99
2	Kehutanan	0	0,00	166397,4	5,25
3	Perikanan	0	0,00	1.165,30	0,04
4	Pertambangan	16.167,78	0,11	320.260,02	10,11
II.	SEKTOR SEKUNDER	99.414,26	70,12	551.214,36	17,40
1	Industri Makanan	61.676,89	43,50	400.366,23	12,64
2	Industri Tekstil	0,00	0,00	25,00	0,00
3	Industri Barang dari kulit dan alas kaki	0,00	0,00	25,00	0,00
4	Industri kayu	0,00	0,00	34,30	0,00
5	Industri Kertas dan Percetakan	0,00	0,00	17.330,89	0,55
6	Industri Kimia dan Farmasi	31.092,70	21,93	23.021,34	0,73
7	Industri Karet dan Plastik	6.509,07	4,59	561,80	0,02
8	Industri Mineral non Logam	135,60	0,10	108.183,90	3,42
9	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	0	0,00	133,80	0,00
10	Industri instrumen kedokteran, Presisi, Optik dan jam	0	0,00	0,00	0,00

No	Sektor usaha menurut Perka No.17 Tahun 2015 BKPM RI	Penanaman Modal Asing (PMA)		Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	
		Ribu USD (ribu)	%	Rupiah (juta)	%
11	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya	0	0,00	1.123,00	0,04
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan peralatan	0	0,00	409,10	0,01
13	Industri lainnya	0	0,00	100,00	0,00
III. SEKTOR TERSIER					
		14.908,89	10,52	1.401.944,92	44,27
1	Listrik, Gas dan Air	6.559,68	4,63	246.662,10	7,79
2	Konstruksi	20,48	0,01	222.310,53	7,02
3	Perdagangan dan reparasi	454,86	0,32	353.210,65	11,15
4	Hotel dan restoran	139,77	0,10	313.339,50	9,89
5	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	6.215,81	4,38	58.485,72	1,85
6	Perumahan, Kawasan industri dan perkantoran	569,36	0,40	77.098,05	2,43
7	Jasa lainnya	948,93	0,67	130.838,37	4,13
IV. UMK					
		0,00	0,00	61.488,05	1,94
TOTAL		141.780,18	100,00	3.167.088,71	100,00

Dari tabel 3.50, diperoleh informasi bahwa:

1. Tiga besar sektor usaha yang mendominasi realisasi investasi PMA Tahun 2022 yaitu industri makanan sebesar USD 61.676,89 ribu (43,50%), sektor industri kimia dan farmasi sebesar USD 31.092,70 ribu (21,93%), dan sektor tanaman pangan dan perkebunan sebesar USD 11.289,25 ribu (7,96%).
2. Tiga besar sektor usaha yang mendominasi realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha Tahun 2022 yaitu sektor tanaman pangan dan perkebunan sebesar Rp 664.618,66 juta (20,98%), sektor industri makanan sebesar Rp 400.366,23 juta (12,64%), dan sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp 353.210,65 (11,15%).

Investasi Sumatera Barat Tahun 2022 berhasil tumbuh positif walaupun melambat pada angka 0,79%, jauh menurun 4,23 poin dibandingkan angka pertumbuhan tahun 2021 (5,02%). Begitupun dengan capaian kinerja, capaian

di tahun 2022 hanya sebesar 13,17%, menurun 70,5% dibanding capaian tahun 2021 (83,67%). Perbandingan realisasi Indikator Kinerja persentase pertumbuhan investasi Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 66.

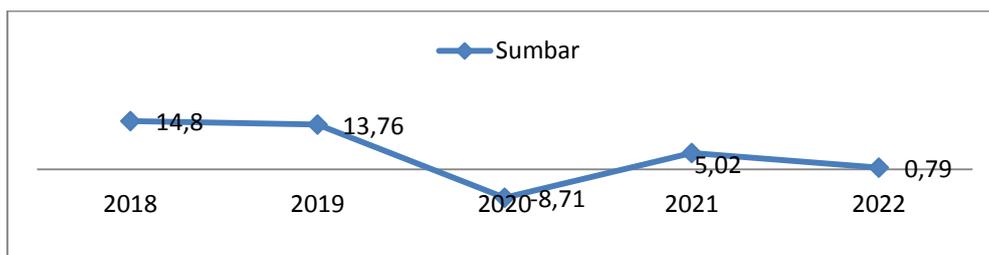
Grafik 66 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator persentase peningkatan investasi di Provinsi 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Pertumbuhan investasi Sumatera Barat dari tahun 2018-2022 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami peningkatan 5,02%. Peningkatan tahun 2021 ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diarahkan pemulihan ekonomi di berbagai sektor. Namun mengalami perlambatan di tahun 2022 menjadi 0,79%, karena beberapa perusahaan besar tidak menambah investasinya di Sumatera Barat, dan program PEN tidak lagi segenyar di tahun 2021. Pertumbuhan investasi Sumatera Barat tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik 67.

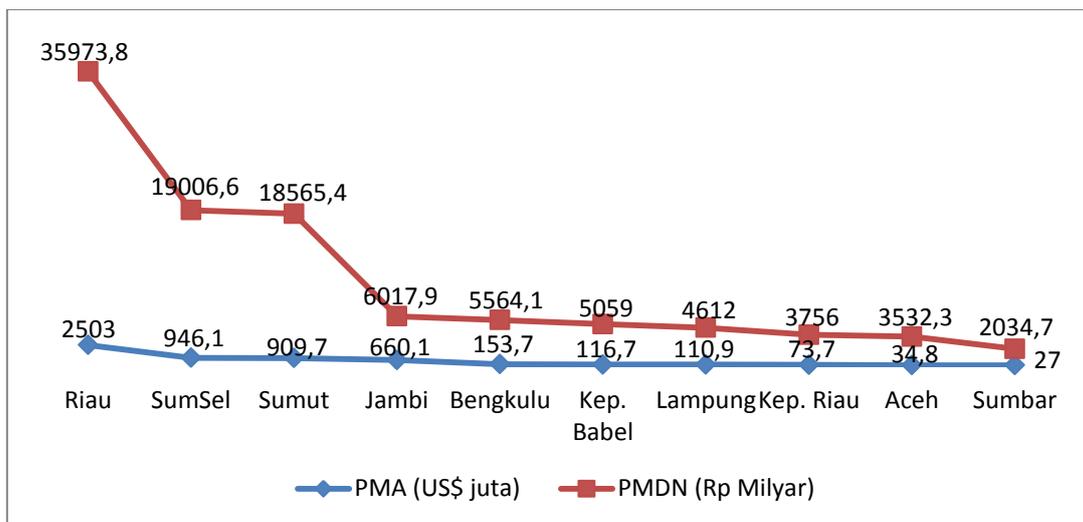
Grafik 67 Pertumbuhan Investasi Sumatera Barat Tahun 2018-2022



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Secara Regional, Realisasi Investasi PMDN Sumatera Barat di tahun 2022 (Triwulan III) berada pada posisi paling bawah (peringkat 10), sedangkan realisasi PMA Tahun 2022 (Tw III) berada pada posisi 3 terbawah (peringkat 7) setelah Bengkulu dan Jambi. Provinsi tertinggi yang memiliki realisasi tertinggi baik itu PMA maupun PMDN dimiliki oleh Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Daftar Realisasi PMDN dan PMA Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik 68.

Grafik 68 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Regional Sumatera Tahun 2022



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tumbuhnya investasi Sumatera Barat didukung oleh banyak faktor dan usaha, diantaranya:

1. Terlaksananya pengawasan/inspeksi langsung ke lapangan ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi rill dan laporan yang diberikan.
2. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi pada perusahaan.
3. Adanya data-data perusahaan dalam penentuan target dan pengawasan serta pembinaan.
4. Terbentuknya PIC yang bertanggung jawab dalam pencapaian dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan per kab/kota.

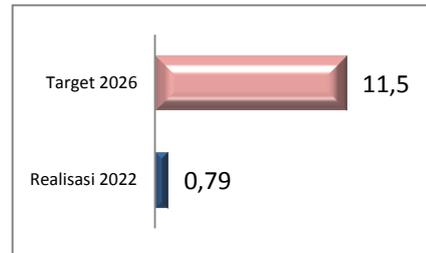
5. Dukungan pemerintah kab/kota untuk memberikan kemudahan dalam perizinan.
6. Tersedianya peluang investasi di Sumatera Barat dalam berbagai sektor.
7. Adanya sistem verifikasi dan buru lapor kegiatan penanaman modal perusahaan (SERBU LKPM).
8. Adanya promosi berkelanjutan dan terintegrasi.
9. Adanya rancangan Peraturan Gubernur tentang Kemudahan Berusaha.
10. Adanya percepatan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dari kab/kota se Sumatera Barat.

Melambatnya pertumbuhan investasi di Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa hambatan, yaitu:

1. Banyaknya perusahaan bidang usaha ketenagalistrikan yang belum merealisasikan investasinya karena belum adanya kesepakatan harga pembelian dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), sedangkan nilai rencana investasinya cukup besar.
2. Beberapa perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga menyebabkan belum maksimalnya perusahaan yang menyampaikan LKPM.
3. Belum *Clear and Cleanny* Tanah lokasi untuk berinvestasi, disebabkan tanah di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat.
4. Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis WEB.
5. Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi.
6. Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

7. Kurangnya sarana dan Prasarana untuk mendukung Penanaman Modal sesuai standar
8. Masih terdapat Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sesuai dengan regulasi yang baru.
9. Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Jika melihat kemungkinan ketercapaian target jangka menengah pada indikator kinerja persentase peningkatan investasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 11,50% (2026) dibandingkan capaian tahun pertama sebesar



0,79% (2022), masih butuh peningkatan 10,71 point lagi. Sangat dibutuhkan usaha yang maksimal untuk pencapaiannya serta koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan pihak terkait.

Berdasarkan hal tersebut, di tahun yang akan datang akan dimaksimalkan upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan dan mengupayakan Tim Teknis yang ada di OPD Teknis agar berada di PTSP.
2. Sosialisasi terkait dengan Regulasi Tanah Ulayat ke Masyarakat.
3. Pengembangan sistem terkait informasi peta potensi dan peluang investasi dan lokasi berbasis Teknologi Informasi.
4. Melakukan Bimbingan kepada perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga menyebabkan belum maksimalnya perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan membuka Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LaKon LKPM).
5. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari untuk Menyusun Produk Hukum dan Aturan Teknis Yang Mengatur Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal.

6. Mendorong Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan revisi RTRW Yang Terbuka terhadap investasi.
7. Mempercepat Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
8. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis WEB lewat pendampingan dalam menggunakan aplikasi serta sosialisasi terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
9. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan pelayanan.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 5 Program dengan 6 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp **3.975.157.931,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4.1.5. dapat dilihat pada tabel 3.51.

Tabel 3. 51 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.5

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	6	3.975.157.931	3.949.861.693
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	728.317.000	726.622.092
2	Program Promosi Penanaman Modal	1	729.123.550	725.359.302
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	1.467.706.650	1.454.273.663
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	996.522.731	990.118.713
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	53.488.000	53.487.923

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **3.975.157.931,-** terealisasi sebesar Rp **3.949.861.693,-** atau 99,36%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 25.296.238,- (0,64%). Jika

membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui tidak terjadi efisiensi dikarenakan capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi (92,47%) lebih rendah 6,87% dari realisasi anggaran (99,34%).



Saat ini, dunia sedang menghadapi era industri 4.0 yang di mana teknologi dapat mengubah seluruh rantai manajemen di setiap cabang industri. Ekonomi global yang semakin maju serta didukung dengan adanya teknologi yang semakin

mutakhir tersebut membuat terciptanya perekonomian digital yang kian berkembang pesat. Segala hal memungkinkan dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dengan perangkat *gadget/smartphone* semuanya telah berubah tidak terkecuali dalam bidang ekonomi sehingga fenomena ini semakin mengukuhkan dunia menuju arah ekonomi digital.

Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan *internet economy, web economy, digital-based economy, new economy knowledge, atau new economy*. Ekonomi digital dapat membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat serta bisnis, dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan “meningkatnya peran ekonomi digital” sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mendukung terwujudnya misi 4 RPJMD tahun 2021-2026. Untuk mengetahui ketercapaian sasaran meningkatnya peran ekonomi digital, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan indikator kinerja kontribusi ekonomi digital. Kontribusi ekonomi digital maksud disini adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh sektor informasi dan komunikasi.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, indikator kontribusi ekonomi digital pada tahun 2022 ditargetkan 6,54. Indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Pencapaian sasaran meningkatnya peran ekonomi digital pada tahun 2022 disajikan pada tabel 3.52.

Tabel 3. 52 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.6



Kontribusi ekonomi digital target 6,54, terealisasi 6,68 dengan tingkat capaian 102,14% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Kontribusi ekonomi digital 6,68 diukur berdasarkan informasi kontribusi sektor informasi dan komunikasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 15/02/13/ThXXVI tanggal 6 Februari 2023 tentang Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi ekonomi digital} = \frac{\text{Rp. 19.051.811,05}}{\text{Rp. 285.378.639,98}} \times 100\% = 6,68$$

Keterangan:

PDRB sektor informasi dan komunikasi= Rp. 19.051.811,05

PDRB Sumatera Barat= Rp. 285.378.639,98

Perhitungan capaian kontribusi tahun 2022. Perbandingan capaian ekonomi digital menggunakan metode dan realisasi indikator kontribusi pengukuran kriteria pertama. Capaian ekonomi digital tahun 2021-2022 indikator ini di tahun 2022 (102,14%) disajikan pada grafik 69. menunjukkan pencapaian di atas target yang ditetapkan. Capaian indikator kontribusi ekonomi digital tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Akan tetapi, dari data yang tersedia diketahui terjadi peningkatan kontribusi ekonomi digital 0,07 poin di

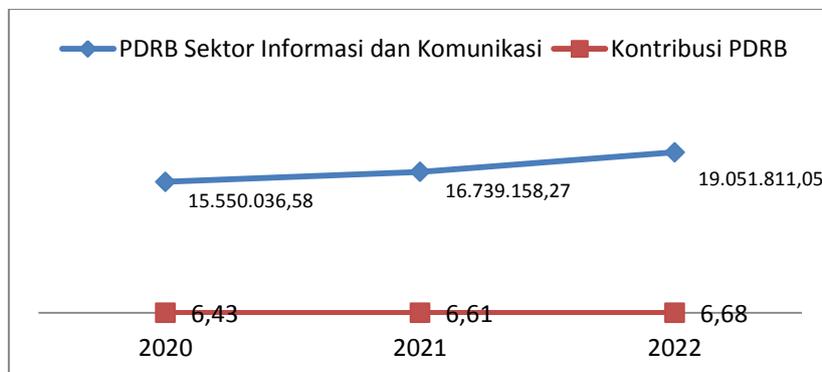
Grafik 69 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator kontribusi ekonomi digital 2021-2022



Sumber data: Data diolah

PDRB Provinsi Sumatera Barat berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha di sektor informasi dan komunikasi terus meningkat dari tahun 2020 ke 2022, dengan penambahan angka pertumbuhan yang signifikan sebesar 3.501.774,47. Hal ini diakibatkan mulai menggeliatnya sektor perekonomian pasca Covid19 yang mengakibatkan banyaknya pelaku UMKM yang menggunakan teknologi Informasi dalam jejaring pemasaran. Perkembangan kontribusi ekonomi digital digambarkan pada grafik 70.

Grafik 70 Perkembangan Kontribusi Ekonomi Digital



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Faktor Pendukung dari kenaikan angka pertahun Kontribusi ekonomi digital ini adalah adanya perubahan mindset dan pola kerja pasca Covid 19, yang umumnya UMKM menggunakan digitalisasi bagi pemasaran dan juga transaksi.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan kegiatan ekonomi yang didasarkan akan teknologi adalah:

1. SDM Pelaku usaha yang masih terbatas terkait teknologi informasi.
2. Kesiapan masyarakat yang berperan sebagai konsumen dalam bertransaksi transaksi nontunai.
3. Belum adanya *startup* daerah yang lebih mengakomodir kebutuhan UMKM Daerah, sehingga *e-commerce* (transaksi jual beli online) belum maksimal dilaksanakan di *startup* daerah

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja kontribusi ekonomi digital ditargetkan mencapai 7,65% pada tahun 2026, dan untuk target tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapainya.

Untuk mendukung peningkatan peran ekonomi digital, kedepannya akan dilaksanakan pelatihan-pelatihan wirausaha digital yang dilaksanakan oleh tiga OPD yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Sumatera Barat

Misi 5**Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata****Tujuan 5.1****Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sektor ini diharapkan terus berkembang sehingga akan mempengaruhi pembangunan ekonomi Sumatera Barat untuk lima tahun mendatang di samping pertanian. Dalam konteks inilah, Pemerintah Sumatera Barat akan membangun industri pariwisata melalui destinasi wisata Sumatera Barat dan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Lima tahun ini, melihat dan merasakan kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenities di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata

Pembangunan pariwisata tidak lepas dari peran serta *stakeholder* terkait, yang terdiri dari: pemerintah, perguruan tinggi, industri, komunitas, media, (disebut dengan *Pentahelix* Pariwisata) dan permodalan (disebut dengan *Hexahelix* Ekonomi Kreatif). Seluruh unsur *Pentahelix* Pariwisata dan *Hexahelix* Ekonomi Kreatif diharapkan dapat bekerjasama dengan baik agar dapat melakukan tindakan konkrit serta kebijakan yang efektif dan komprehensif dalam pengembangan pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun ke depan. Hal ini tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengukuran indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun n didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif tercapai 12,62%. Pencapaian tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tergambar pada tabel 3.53.

Tabel 3. 53 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5.1



Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2022 ditargetkan 12,62%, terealisasi 4,31 dengan tingkat capaian 34,11% termasuk kategori keberhasilan “**kurang baik**”.

Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 4,31 diukur berdasarkan rata-rata dari pencapaian indikator sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat dan indikator sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif} = \frac{1,35 + 7,26}{2} = 4,31$$

Keterangan:

Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman = 1,35

Persentase kontribusi ekraf pada PDRB= 7,26

Perhitungan capaian indikator persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian dan realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan pengabungan dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya tersebut yaitu:

1. Pemasaran dan promosi pariwisata Sumatera Barat melalui media online, media elektronik, media ruang dan media cetak.
2. Melaksanakan berbagai event pariwisata dan event ekonomi kreatif.
3. Menganalisis tahun kunjungan wisata Sumatera Barat tahun 2023 (*visit beautiful west Sumatera 2023*).
4. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman pelaku wisata dan pelaku ekonomi kreatif.
5. Memberikan dukungan/fasilitasi kepada pelaku ekonomi kreatif pada berbagai event pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengembangkan tempat-tempat wisata.
7. Memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual produk ekraf.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih terbatasnya infrastruktur di tempat wisata.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan wisata dan sadar wisata.
3. Kualitas produk ekonomi kreatif yang dihasilkan masih kurang dan harga yang relatif tinggi.
4. Belum banyaknya inovasi produk ekraf yang dihasilkan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor Pariwisata dan Ekonomi kreatif ditargetkan mencapai 17,37% pada tahun 2026. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang tercapai 4,31 maka dibutuhkan kenaikan 13,06% untuk mencapai target tersebut. Mempertimbangkan kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyesuaikan kembali target tahun selanjutnya.

Untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, ke depannya akan diupayakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan menciptakan daya tarik pariwisata.
2. Mengoptimalkan pemasaran dan promosi pariwisata Sumatera Barat.
3. Melaksanakan berbagai event pariwisata dan event untuk memperkenalkan produk ekonomi kreatif.
4. Memberdayakan semua *stakeholder* termasuk Kabupaten/Kota terkait untuk meningkatkan kapasitas, inovasi dan kualitas produk ekraf yang dihasilkan.
5. Mengoptimalkan pemasaran dan promosi produk ekraf Sumatera Barat.

Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat tercapai melalui pencapaian 2 sasaran yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat dan meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 5.1.1

minang wonderful

Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat

Kontribusi sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Barat terhadap ekonomi wilayah di masing-masing Provinsi dapat dilihat melalui PDRB masing-masing melalui sektor-sektor pembentuknya seperti Angkutan, Pergudangan, Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir; Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial namun di Provinsi Sumatera Barat kontribusi pariwisata tersebut hanya dihitung dari sub sektor akomodasi, makanan dan minuman.

Dengan demikian, untuk mengetahui ketercapaian sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat diukur menggunakan indikator persentase kontribusi pariwisata pada PDRB yang dibatasi pada sub sektor akomodasi, makanan dan minuman). Perhitungan indikator ini berdasarkan pada pengukuran yang dilakukan oleh BPS Sumatera Barat.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, persentase kontribusi pariwisata pada PDRB pada tahun 2022 ditargetkan 1,24%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, target tahun 2022 ditargetkan lebih rendah 0,03% dari kondisi tahun 2021. Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.54.

Tabel 3. 54 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.1.1



Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB target 1,24%, terealisasi 1,35% dengan tingkat capaian 108,87% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB sebesar 1,35% dihitung berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui BRS No. 15/02/13/Th XXVI, tanggal 6 Februari 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB} = \frac{\text{Rp. 3,86 Triliun}}{\text{Rp. 285,38 Triliun}} \times 100\% = 1,35\%$$

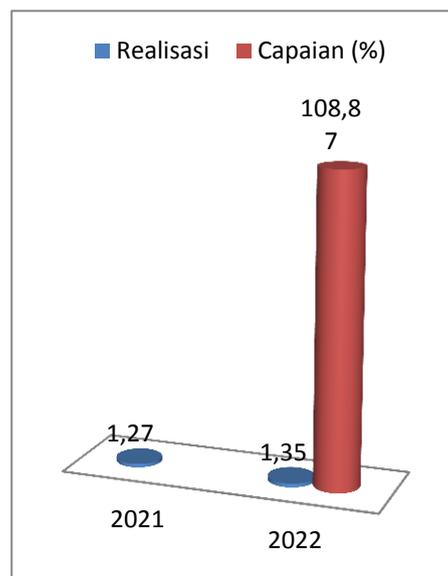
Keterangan:

PDRB sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum= Rp 3,86 Triliun
 PDRB tahun 2022= Rp. 285,38 Triliun

Perhitungan capaian indikator Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian indikator Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB di tahun 2022 108,87 menunjukkan pencapaian melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Akan tetapi, dari data yang tersedia dapat diketahui terjadi peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,08 di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian dan realisasi indikator Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 71.

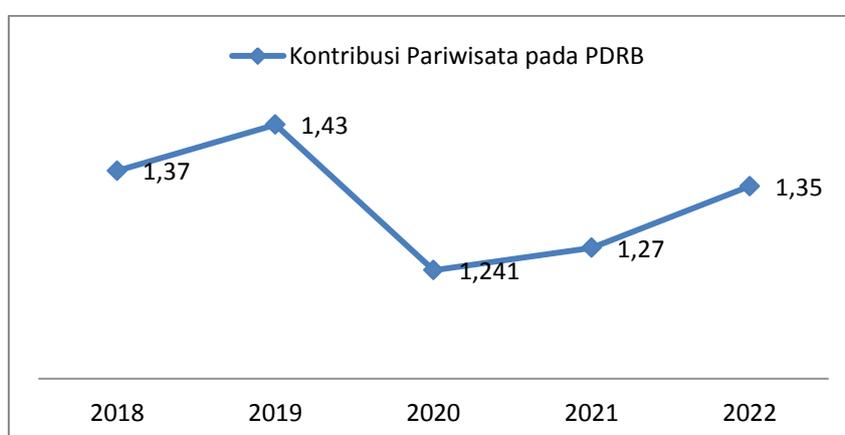
Grafik 71 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Kontribusi pariwisata terhadap PDRB yang dalam hal ini dibatasi pada sub sektor akomodasi, makanan dan minuman menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif yaitu meningkat di tahun 2019, menurun di tahun 2020 dan mulai meningkat kembali di tahun 2021 dan 2022. Kondisi ini seiring dengan perkembangan kasus covid 19. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat terdampak dengan meningkatnya kasus covid 19. Perkembangan kontribusi pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat pada grafik 72.

Grafik 72 Perkembangan Kontribusi Pariwisata pada PDRB



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Peningkatan kontribusi pariwisata ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yaitu:

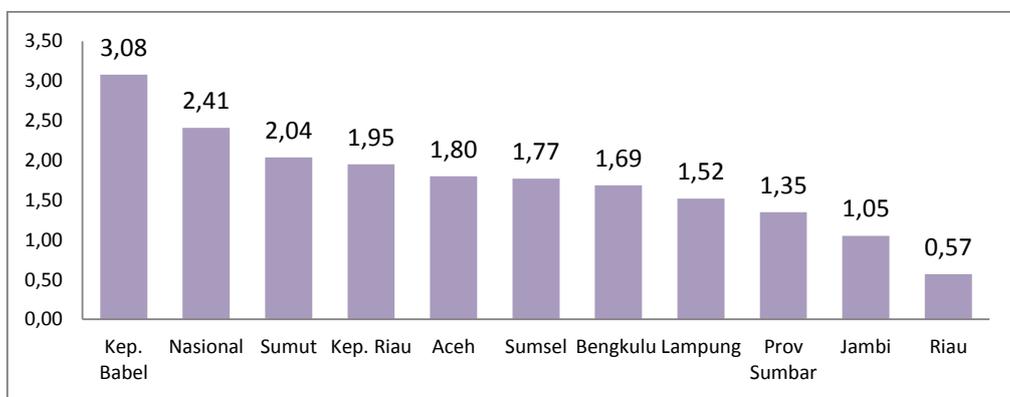
1. Pemasaran dan promosi pariwisata Sumatera Barat melalui media online, media elektronik, media ruang dan media cetak. Konten pariwisata sumbar dapat disaksikan melalui IG: @dispar.sumbar, Fb (Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan website resmi Dinas Pariwisata sumbar.travel dan *dispar.sumbarprov.go.id*.
2. Melaksanakan berbagai event pariwisata untuk mempromosikan Sumatera Barat. Ada 6 event yang dilaksanakan di tahun 2022 yaitu Festival Band Barih Solok, Festival Budaya Pacu Jawi, Bazar Merah Putih dan Pemilhan Uda Uni Duta Wisata Provinsi Sumatera Barat, Festival Alang-Alang di Kota Solok dan Minang *Geopark Cycling* di Kabupaten Agam
3. Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.

4. Menganangkan tahun kunjungan wisata Sumatera Barat tahun 2023 (*visit beautiful west Sumatera 2023*).
5. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman pelaku wisata melalui bimtek dan pendampingan oleh Tim SANAK kepada 6 desa wisata (Desa wisata Apar, Kampung Minang Sumpu, Desa Wisata Sungai Batang, Kampung Budaya Sarugo, Desa Wisata Kubu Gadang dan Desa Wisata Ampiang Parak) dan kelompok sadar wisata.
6. Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengembangkan tempat-tempat wisata

Dalam meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB masih ditemukan kendala dalam hal masih terbatasnya infrastruktur di tempat wisata dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan wisata dan sadar wisata.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat tercatat masih berada di bawah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB secara Nasional dengan selisih lebih rendah 1,06%. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di posisi pertama tertinggi melebihi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB secara Nasional. Sumatera Barat menempati urutan ke 8 di atas Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Perbandingan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 73.

Grafik 73 Perbandingan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ditargetkan mencapai 1.27% pada tahun 2026. Mempertimbangkan kondisi beberapa tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Untuk peningkatan kontribusi sektor pariwisata, ke depannya akan diupayakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan menciptakan daya tarik pariwisata.
2. Secara konsisten mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.
3. Mengoptimalkan pemasaran dan promosi pariwisata Sumatera Barat.
4. Melaksanakan berbagai event pariwisata
5. Meningkatkan sinergisitas dengan stakeholder terkait dalam mempromosikan dan meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 4 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp **16.015.829.641,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 5.1.1. dapat dilihat pada tabel 3.55.

Tabel 3. 55 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat	4	16.015.829.641	14.568.062.627
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3	6.772.604.600	6.263.513.832
2	Program Pemasaran Pariwisata	1	9.243.225.041	8.304.548.795

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 16.015.829.641,- terealisasi sebesar Rp 14.568.062.627,- atau 90,96%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 30.583.892.268,- (9,04%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat (108,87%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (90,96%) dengan tingkat efisiensi 17,91%.



Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi baru yang berfokus pada kreativitas untuk menciptakan sebuah produk atau layanan. Produk-produk ekonomi kreatif biasanya bergantung pada ide, pengetahuan, keterampilan, dan terkadang mata pencaharian tradisional. Industri ekonomi kreatif di

Sumatera Barat memiliki peran meningkatkan perekonomian secara global. Industri kreatif erat hubungannya dengan tingkat kreativitas manusia sebagai sumber daya utama penggerak roda perekonomian.

Untuk mendukung kreatifitas para pelaku ekonomi kreatif, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015, produk-produk ekonomi kreatif diklasifikasikan kedalam 17 sub sektor. Rincian ketujuh belas subsektor ekonomi kreatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi
2. Arsitektur
3. Desain Interior
4. Desain Komunikasi Visual
5. Desain Produk
6. Fashion
7. Film, Animasi & Video
8. Fotografi
9. Kriya
10. Kuliner
11. Musik
12. Penerbitan
13. Pengembang permainan
14. Periklanan
15. Seni Pertunjukan
16. Seni Rupa
17. Televisi dan Radio

Dari 17 sektor ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang pesat di Provinsi Sumatera Barat adalah: 1) Industri makanan dan minuman, 2) Industri tekstil dan pakaian, 3) Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, 4) Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, 5) Industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, 6) Industri kimia, farmasi dan obat tradisional, 7) Industri karet, barang dari karet dan plastik, 8) Industri barang logam komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik dan 9) industri *furniture*.

Oleh karena itu, Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat, yang diukur menggunakan indikator kinerja persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB. Perhitungannya berdasarkan pada data Badan Pusat Statistika dibatasi pada 9 sub sektor yang berkembang pesat di Sumatera Barat.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, persentase kontribusi ekraf pada PDRB pada tahun 2022 ditargetkan 6,02%. Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi ekraf dalam perekonomian Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.56.

Tabel 3. 56 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.1.2



Persentase kontribusi ekraf pada PDRB target 6,02%, terealisasi 7,26% dengan tingkat capaian 120,60% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Persentase kontribusi ekraf pada PDRB 7,26% diperoleh berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dirangkum oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

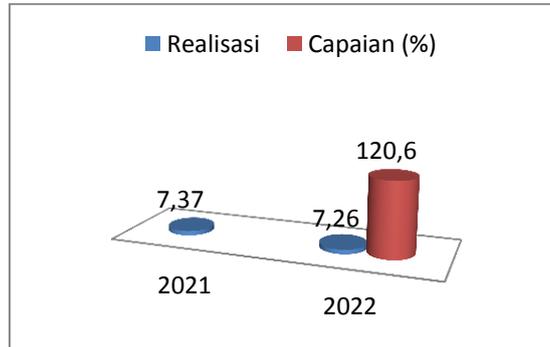
Tabel 3. 57 Rincian Perhitungan Kontribusi Ekraf pada PDRB

No	Lapangan Usaha	Kontribusi tahun 2022
1	Industri Pengolahan	7,26
a	Industri makanan dan minuman	4,22
b	Industri tekstil dan pakaian	1,88
c	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0
d	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	0
e	Industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	0
f	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	0,01
g	Industri karet, barang dari karet dan plastik	1,07
h	Industri barang logam komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	0,07
i	Industri furniture	0,01

Dari sembilan sub sektor yang bertumbuh pesat di Sumatera Barat, industri makanan dan minuman menempati posisi tertinggi dengan kontribusi 4,22% diikuti oleh industri tekstil dan pakaian. 3 sub sektor tidak memiliki kontribusi yaitu 1) Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, 2) Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, 3) Industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman.

Perhitungan capaian indikator Persentase kontribusi ekraf pada PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator Persentase kontribusi ekraf pada PDRB di tahun 2022 (120,6) menunjukkan pencapaian melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Akan tetapi, dari data yang tersedia dapat diketahui terjadi penurunan kontribusi ekraf terhadap PDRB sebesar 0,11 di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan capaian dan realisasi indikator Persentase kontribusi ekraf pada PDRB tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 74.

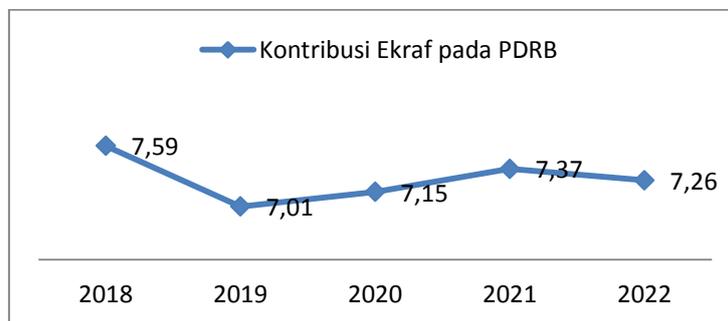
Grafik 74 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Persentase kontribusi ekraf pada PDRB 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Kontribusi ekraf terhadap PDRB yang dalam hal ini dibatasi pada 9 sub sektor industri pengolahan menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif yaitu menurun dari di tahun 2019, dan mulai merangkak naik sampai tahun 2021 dan menurun kembali di tahun 2022. Perkembangan kontribusi ekraf terhadap PDRB digambarkan pada grafik 75.

Grafik 75 Perkembangan Kontribusi Pariwisata pada PDRB



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Peningkatan kontribusi ekraf ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yaitu:

1. Memberikan dukungan/fasilitasi kepada pelaku ekonomi kreatif pada berbagai event pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Melaksanakan workshop untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan dan memasarkan produk ekraf.
3. Mendorong pelaku usaha pariwisata menuju sertifikasi profesi.

4. Melakukan sosialisasi dan memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual produk ekraf.
5. Melaksanakan event-event ekonomi kreatif seperti Minangkabau Fashion Festival 2022, Minang Photo Raun, Sumbar Digital Creatif Festival 222.

Di samping upaya tersebut, pengembangan ekonomi kreatif masih terkendala pada produk ekraf yang dihasilkan. Dimana dari segi kualitas produk masih kurang dan harga yang relatif tinggi. Selain itu belum banyaknya inovasi produk ekraf yang dihasilkan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja kontribusi sektor ekraf terhadap PDRB ditargetkan mencapai 6,26% pada tahun 2026. Mempertimbangkan kondisi beberapa tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Untuk peningkatan kontribusi sektor ekraf, ke depannya akan diupayakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberdayakan semua *stakeholder* termasuk Kabupaten/Kota terkait untuk meningkatkan kapasitas, inovasi dan kualitas produk ekraf yang dihasilkan.
2. Mengoptimalkan pemasaran dan promosi produk ekraf Sumatera Barat.
3. Melaksanakan berbagai event untuk memperkenalkan produk ekonomi kreatif

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 4 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp 18.402.716.100,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 5.1.2. dapat dilihat pada tabel 3.58.

Tabel 3. 58 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat	4	18.402.716.100	17.814.084.891
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2	3.272.229.500	3.087.715.748
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	15.130.486.600	14.726.369.143

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp 18.402.716.100,-** terealisasi sebesar **Rp 17.814.084.891,-** atau 96,80%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 588.631.209,- (3,20%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat (120,60%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,80%) dengan tingkat efisiensi 23,8%.

Misi 6

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan 6.1 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Dan Merata

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek *non-fisik* (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi). Penyediaan infrastruktur tersebut seperti sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah. Pembangunan infrastruktur wajib memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan *green energy* agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah secara efektif, efisien dan berkelanjutan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang terarah, terukur dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sumatera Barat dibagi menjadi enam garis besar yakni pembangunan infrastruktur energi terbarukan, pembangunan infrastruktur bangunan gedung, pembangunan infrastruktur sumberdaya air, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi dan pembangunan infrastruktur perhubungan.

Pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan ini sejalan dengan Misi 6 Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” dengan tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata.

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata digunakan indikator kinerja indeks kinerja infrastruktur. Melalui indikator ini dapat diperoleh informasi terkait pemerataan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Pencapaian indikator ini diukur berdasarkan informasi yang diperoleh dari perangkat daerah terkait.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator indeks kinerja infrastruktur pada tahun 2022 ditargetkan dapat tercapai 0,702. Indikator ini merupakan indikator yang baru diukur oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan akan meningkat capaiannya setiap tahun. Hal ini sejalan dengan peningkatan target dalam 5 tahun di RPJMD tahun 2021-2026. Pencapaian tujuan “*terwujudnya infrastruktur handal dan merata*” tergambar pada tabel 3.59.

Tabel 3. 59 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6.1



Indeks Kinerja Infrastruktur tahun 2022 ditargetkan 0,702, terealisasi 0,654 dengan tingkat capaian 93,16% termasuk kategori keberhasilan “**sangat baik**”.

Indeks kinerja infrastruktur 0,654 diukur berdasarkan rata-rata dari pencapaian 5 sasaran (11 indikator kinerja) yang mendukung pencapaian tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks kinerja infrastruktur} = \frac{7,1977}{11} = 0,654$$

Keterangan:

Rasio konektivitas = 0,662

Kemantapan jalan = 71,40%

Indeks Ketahanan Daerah= 0,64

IKLH = 74,98%

Akses Air Minum = 85,23%

Akses Sanitasi Layak = 69,27%

Persentase bangunan strategis terbangun= 6%

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi = 71,06%

Persentase Volume tampungan sumber-sumber air= 58,73%

Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air = 66,9%

Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW = 86%

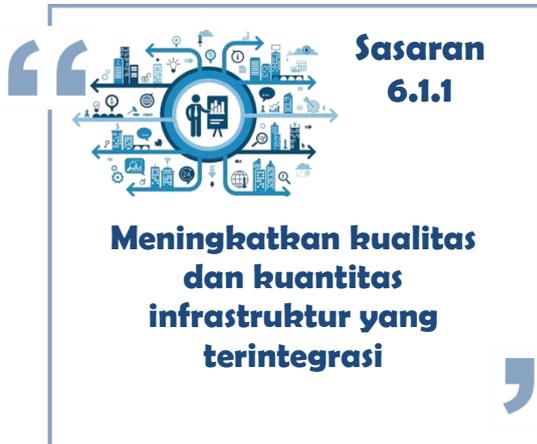
Perhitungan capaian indikator indeks kinerja infrastruktur menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian dan realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan infrastruktur yang handal dan merata merupakan pengabungan dari upaya yang dilakukan untuk mencapai 5 sasaran pendukung. Upaya tersebut secara terinci diuraikan pada masing-masing sasaran. Begitupun dengan hambatan dan upaya di masa yang akan datang juga diuraikan pada masing-masing sasaran pendukung.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja indeks kinerja infrastruktur ditargetkan mencapai 0,805% pada tahun 2026. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang tercapai 0,654 maka dibutuhkan kenaikan 0,151% untuk mencapai target tersebut. Mempertimbangkan kondisi ini dan didukung dengan upaya yang akan dilakukan ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target indeks kinerja infrastruktur 0,805 di tahun 2026.

Tujuan terwujudnya infrastruktur handal dan merata dapat tercapai melalui pencapaian 5 sasaran yaitu 1) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, 2) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, 3) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, 4) meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, 5) meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, fisik ataupun non fisik yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna

memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan “Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi “ sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mencapai tujuan ”Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata”. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu rasio konektivitas dan kemantapan jalan. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi dapat dilihat pada tabel 3.60.

Tabel 3. 60 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Rasio Konektivitas	0,668	0,662	99,10
Kemantapan Jalan	75	71,40	95,20
Rata-rata Capaian			97,15

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi yang diukur dengan menggunakan 2 indikator di atas tercapai dengan rata-rata capaian 97,15%, termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”. Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas



Pada bidang transportasi, yang dimaksud dengan infrastruktur adalah fasilitas transportasi seperti simpul transportasi (Terminal, Bandara, Pelabuhan, Stasiun) serta fasilitas pendukungnya seperti halte, shelter dan dermaga penyeberangan. Sedangkan untuk infrastruktur yang terintegrasi di bidang transportasi dapat diartikan untuk semua simpul-simpul transportasi tersebut dapat saling terhubung.

Rasio Konektivitas dapat diartikan sebagai wilayah yang sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut, serta sudah terhubungnya wilayah, kawasan dan simpul transportasi yang ada di Sumatera Barat. Keterkaitan antara rasio konektivitas dengan infrastruktur terintegrasi yaitu rasio konektivitas yang semakin bagus menunjukkan infrastruktur (simpul transportasi, berupa: terminal, bandara, pelabuhan, stasiun) sudah terintegrasi dengan baik. Integrasi ini menjadi poin utama dalam variabel Rasio Konektivitas. Angkutan yang melayani antar simpul Sumatera Barat yaitu:

- a. Angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)
Adanya bus AKDP yang menghubungkan Terminal Tipe B dengan Terminal Tipe B lainnya di Kab/Kota di Sumatera Barat.
- b. Angkutan ASDP (Angkutan Sungai dan Penyeberangan).
Adanya angkutan penyeberangan yang menghubungkan antar pelabuhan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, rasio konektivitas tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai 0,668. Target rasio konektivitas 0,668 artinya 66,80% wilayah sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut, yang mana untuk Provinsi Sumatera Barat hanya ada dua variabel yaitu angkutan jalan, dan ASDP (angkutan sungai, danau dan penyeberangan). Jika dibandingkan dengan rasio konektivitas tahun 2021, target tahun 2022 ditetapkan lebih rendah 0,002.

Rasio konektivitas tahun 2022 ditargetkan 0,668, terealisasi 0,662 dengan tingkat capaian 99,10% termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”.

Realisasi rasio konektivitas 0,662 artinya sebanyak 0,662 atau 66,24% wilayah sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sesuai Permendagri 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio konektivitas Provinsi} &= (\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan}) \\
 &= (0,732 \times 70) + (0,5 \times 30) \\
 &= 51,24 + 15 \\
 &= 66,24 \text{ atau } 0,662
 \end{aligned}$$

Keterangan:

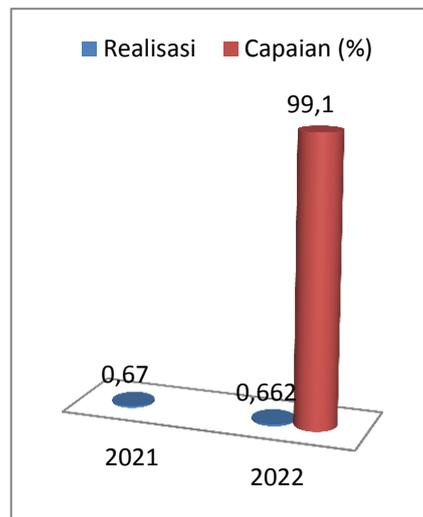
$$\begin{aligned}
 \text{IK 1 (Angkutan Jalan)} &= \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd Provinsi} \times \text{bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada Provinsi tersebut}} \\
 &= \frac{134 \times 1}{183} \\
 &= 0,732
 \end{aligned}$$

$$\text{IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)} = \frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi tsb} \times \text{bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi tersebut}}$$

	=	$\frac{4 \times 0,5}{4}$
	=	0,5
Bobot Trayek	a	Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5 x dalam seminggu), bobot = 1
	b	Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 x dalam seminggu), bobot = 0,8
	c	Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 x dalam seminggu), bobot = 0,5
Bobot angkutan laut dan penyeberangan = 30		
Bobot angkutan jalan = 70		

Perhitungan capaian indikator rasio Perbandingan capaian dan realisasi konektifitas menggunakan metode indikator rasio konektifitas tahun pengukuran kriteria pertama. Capaian 2021-2022 disajikan pada grafik 76. indikator rasio konektifitas di tahun 2022 (99,1%) menunjukkan realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator rasio konektifitas tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Akan tetapi, dari data yang tersedia menunjukkan terjadi penurunan rasio konektifitas 0,008 di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 76 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Rasio Konektifitas 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja terkait rasio konektivitas, upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2022 antara lain:

1. Meningkatkan prasarana perhubungan melalui:
 - a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) serta melakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal.
 - b) Melakukan penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan di jalan Provinsi yaitu:

- 1) Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan di ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus, Kota Padang
 - 2) Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan di ruas Jalan P.056 Simp. Padang Aro - Lubuk Malako Kab. Solok Selatan
 - 3) Pemasangan Rambu-Rambu di Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang
 - 4) Pemasangan Rambu Penunjuk Jurusan dalam mendukung KSPN di Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan.
2. Meningkatkan angkutan yang sesuai standar dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan laik jalan terhadap angkutan yang beroperasi.
 3. Meningkatkan akses transportasi di daerah terpencil dengan melakukan pengawasan dan pembinaan Angkutan Perintis (DAMRI) dan Kapal Perintis di pelabuhan - pelabuhan singgah.
 4. Mengoptimalkan trayek angkutan umum melalui penghitungan kebutuhan armada angkutan umum untuk mengetahui data-data perizinan angkutan umum dan mengetahui angkutan yang melakukan penyimpangan trayek.
 5. Meningkatkan kualitas SDM dalam Pelayanan Jasa Transportasi pada 5 Terminal Tipe B (Terminal Sago Painan Kab Pesisir Selatan, Terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang, Terminal Koto Nan IV Kota Payakumbuh, Terminal Piliang Kab Tanah Datar, dan Terminal Kota Sawahlunto).

Hambatan atau kendala yang ditemui dalam rangka mencapai target rasio konektivitas diantaranya sebagai berikut:

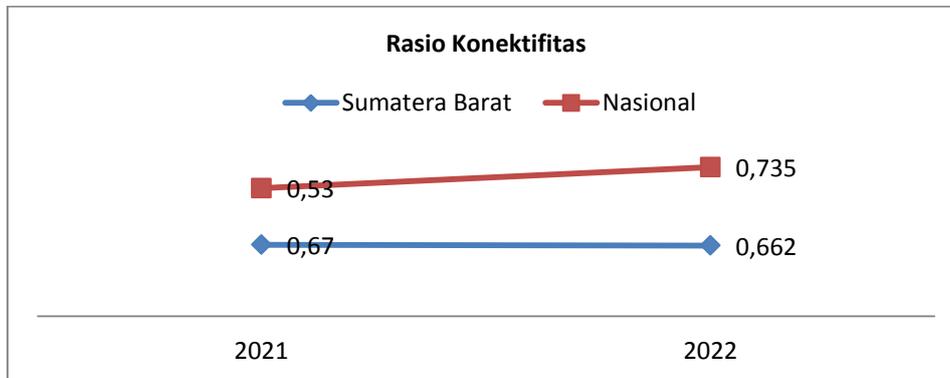
1. Belum optimalnya pelayanan, perizinan, dan pengawasan angkutan umum.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana transportasi yang melayani.
3. Belum memadainya kuantitas, kualitas dan kualifikasi SDM Perhubungan dalam memberikan pelayanan.
4. Adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, sehingga dari data tidak dapat diketahui apakah suatu lintasan

trayek masih dilayani oleh angkutan atau tidak, hal itu mempengaruhi kepada variabel perhitungan rasio konektivitas.

5. Adanya angkutan liar yang beroperasi (travel liar) sehingga menurunkan minat menggunakan angkutan umum.

Pada tahun 2022, rasio konektivitas Sumatera Barat tercatat di bawah rasio konektivitas secara Nasional dengan selisih kurang 0,073. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana, rasio konektivitas Sumatera Barat tercapai di atas rasio konektivitas secara Nasional. Perbandingan rasio konektivitas Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada grafik 77.

Grafik 77 Perbandingan rasio konektivitas Sumatera Barat dengan Nasional



Sumber data: Kementerian Perhubungan dan D. Perhubungan Sumbar

Rasio konektivitas tahun 2022 yang tercapai 0,662 menunjukkan pencapaian 95,25% dari target tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Target tahun terakhir RPJMD adalah 0,695. Untuk mencapai target tahun 2026 diperlukan peningkatan sebesar 0,033 atau 0,0083 pertahun dari indeks konektivitas tahun 2022. Mempertimbangkan perkembangan rasio konektivitas beberapa tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan target rasio konektivitas yang telah ditetapkan tersebut.

Upaya di masa yang akan datang untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah antara lain memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP utilitas jalan dan meningkatkan sinergisitas antara perangkat daerah terkait.

Untuk meningkatkan konektivitas wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 13 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp 4.432.468.582,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatkan konektivitas wilayah yang terintegrasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung peningkatan konektivitas wilayah dapat dilihat pada tabel 3.61.

Tabel 3. 61 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Peningkatan konektivitas wilayah

NO	SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Peningkatan Konektivitas Wilayah	13	4.432.468.582	4.295.280.376
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8	3.718.357.794	3.625.977.944
2	Program Pengelolaan Pelayaran	3	623.939.538	593.566.487
3	Program Pengelolaan Perkeretaapian	2	90.171.250	75.735.945

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 4.432.468.582,- terealisasi sebesar Rp 4.295.280.376,- atau 96,90%. Hal ini menunjukkan dalam peningkatan konektivitas wilayah terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 137.188.206,- (3,10%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja rasio konektivitas (99,10%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,90%) dengan tingkat efisiensi 2,2%.

2. Kemantapan Jalan



Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya. Kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang penghasilannya rendah. Jadi, perputaran barang, jasa, manusia, uang, dan informasi turut menentukan pergerakan harga di pasar-pasar. Dengan kata lain, infrastruktur jalan menetralsisir harga-harga barang dan jasa daerah. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Untuk kondisi kemantapan jalan sendiri akan memberikan pengaruh pada :

- 1) Meningkatnya kecepatan kendaraan sehingga mempengaruhi waktu tempuh rata-rata (waktu perjalanan) menjadi lebih singkat.
- 2) Menurunnya nilai biaya transportasi untuk pengguna jalan, yaitu nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK).
- 3) Meningkatnya pelayanan jalan seperti kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsi dan statusnya diketahui bahwa total panjang jalan Provinsi Sumatera Barat adalah 1525,20 km dengan 58 ruas jalan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan kemantapan jalan dapat mencapai 75%. Artinya 1.143,9 km dari 1525,20 Km jalan Provinsi berada pada kondisi baik dan sedang. Jika melihat kondisi kemantapan jalan tahun sebelumnya (75,034), penetapan target tahun 2022 ini lebih rendah 0,034.

Indikator kemantapan jalan tahun 2022 ditargetkan 75%, terealisasi 71,40% dengan tingkat capaian 95,20% termasuk kategori keberhasilan “**sangat baik**”.

Realisasi indikator kemantapan jalan diperoleh berdasarkan data dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai hasil survei *PKRMS 2022* dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Kemantapan Jalan} = \frac{1.088,94}{1.525,20} \times 100 = 71,40\%$$

Keterangan:

Panjang jalan kondisi baik dan sedang = 1.088,94 km

Panjang jalan keseluruhan= 1525,20 Km

Rincian kondisi jalan kewenangan Provinsi disajikan pada tabel 3.62.

Tabel 3. 62 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Per Ruas Tahun 2022

No	No Ruas	RUAS	Lokasi Kabupaten / Kota	Panjang SK	Panjang Tiap Kondisi								Kemantapan			
					Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
					%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km
1	007	Simancung - Tanjung Ampalu	Kab. Sijunjung	11,080	67%	7,38	27%	3,00	6%	0,70	0%	0,00	93,7%	10,38	6,3%	0,70
2	008	Tanjung Ampalu- Sijunjung	Kab. Sijunjung	20,000	57%	11,30	30%	6,00	13%	2,60	1%	0,10	86,5%	17,30	13,5%	2,70
3	010	Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	Kab. Dharmasraya	29,000	59%	17,01	18%	5,10	20%	5,89	3%	1,00	76,2%	22,11	23,8%	6,89
4	011	Simp. Koto Baru - Simalidu	Kab. Dharmasraya	11,900	66%	7,90	9%	1,10	21%	2,50	3%	0,40	75,6%	9,00	24,4%	2,90
5	012	Simp. Koto Baru - Junction	Kab. Dharmasraya	5,400	72%	3,90	22%	1,20	4%	0,20	2%	0,10	94,4%	5,10	5,6%	0,30
6	018	Inderapura - Muara Sakai	Kab. Pesisir Selatan	7,300	88%	6,40	11%	0,80	1%	0,10	0%	0,00	98,6%	7,20	1,4%	0,10
7	025	Manggopoh - Padang Luar	Kab. Agam	69,430	72%	50,03	5%	3,80	21%	14,90	1%	0,70	77,5%	53,83	22,5%	15,60
8	028	Sicincin - Kurai Taji	Kab. Padang Pariaman	16,440	54%	8,94	18%	2,90	26%	4,30	2%	0,30	72,0%	11,84	28,0%	4,60
9	031	Panti - Simp. Empat	Kab. Pasaman - Kab. Pasaman Barat	74,230	56%	41,43	22%	16,50	17%	12,50	5%	3,80	78,0%	57,93	22,0%	16,30
10	033	Simp. Empat - Sasak	Kab. Pasaman Barat	20,000	87%	17,40	10%	2,00	2%	0,40	1%	0,20	97,0%	19,40	3,0%	0,60
11	034,2	Air Balam - Air Bangis	Kab. Pasaman Barat	12,600	89%	11,20	9%	1,10	2%	0,30	0%	0,00	97,6%	12,30	2,4%	0,30
12	035	Kubu Kerambil - Batu Sangkar	Kab. Tanah Datar	18,500	36%	6,70	35%	6,50	25%	4,70	3%	0,60	71,4%	13,20	28,6%	5,30
13	036	Baso - Batu Sangkar	Kab. Agam - Kab. Tanah Datar	28,790	69%	19,99	14%	3,90	12%	3,40	5%	1,50	83,0%	23,89	17,0%	4,90
14	037	Batu Sangkar (Bukit Gombak)-Guguk Cino	Kab. Tanah Datar	10,400	77%	8,00	1%	0,10	19%	2,00	3%	0,30	77,9%	8,10	22,1%	2,30
15	038	Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga)	Kab. Tanah Datar - Kota Sawahlunto	30,600	73%	22,27	17%	5,23	7%	2,10	3%	1,00	89,9%	27,50	10,1%	3,10
16	039	Guguk Cino - Sitangkai	Kab. Tanah Datar	15,120	81%	12,20	11%	1,72	5%	0,80	3%	0,40	92,1%	13,92	7,9%	1,20
17	040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	Kab. Tanah Datar - Kab.Sijunjung	17,280	60%	10,38	18%	3,10	16%	2,80	6%	1,00	78,0%	13,48	22,0%	3,80
18	044	Bts. Payahkumbuh - Sitangkai	Kota. Payakumbuh - Kab. Tanah Datar	50,610	55%	27,96	30%	15,15	8%	4,20	7%	3,30	85,2%	43,11	14,8%	7,50
19	054	Junction - Abai Siat	Kab. Dharmasraya	12,600	97%	12,20	2%	0,30	1%	0,10	0%	0,00	99,2%	12,50	0,8%	0,10
20	055	Sijunjung - Tanah Badantung	Kab. Sijunjung	4,400	77%	3,40	18%	0,80	5%	0,20	0%	0,00	95,5%	4,20	4,5%	0,20

No	No Ruas	RUAS	Lokasi Kabupaten / Kota	Panjang SK	Panjang Tiap Kondisi								Kemantapan			
					Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
					%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km
21	056,1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	Kab. Solok Selatan	20,000	65%	12,90	26%	5,20	5%	1,00	5%	0,90	90,5%	18,10	9,5%	1,90
22	056,2	Lubuk Malako - Abai Sangir	Kab. Solok Selatan	17,000	47%	8,00	8%	1,40	32%	5,50	12%	2,10	55,3%	9,40	44,7%	7,60
23	056,3	Abai Sangir - Sei. Dareh	Kab. Solok Selatan - Kab. Dharmasraya	74,000	24%	17,90	6%	4,70	1%	1,00	68%	50,40	30,5%	22,60	69,5%	51,40
24	068	Padang Sawah - Kumpulan	Kab. Pasaman Barat - Kab. Pasaman	36,500	66%	24,04	18%	6,57	9%	3,45	7%	2,45	83,8%	30,60	16,2%	5,90
25	069,2	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	Kota Payakumbuh - Kab. 50 Kota	46,850	90%	42,35	2%	1,10	7%	3,35	0%	0,05	92,7%	43,45	7,3%	3,40
26	070	Batu Sangkar - Ombilin	Kab. 50 Kota	18,510	59%	10,90	22%	4,10	13%	2,41	6%	1,10	81,0%	15,00	19,0%	3,51
27	071	Solok - Alahan Panjang	Kota Solok - Kab. Solok	47,800	85%	40,80	10%	4,70	3%	1,40	2%	0,90	95,2%	45,50	4,8%	2,30
28	072	Lubuk Basung - Sei. Limau	Kab. Agam - Kab. Padang Pariaman	30,900	69%	21,30	26%	7,90	5%	1,60	0%	0,10	94,5%	29,20	5,5%	1,70
29	073	Pasar Baru - Alahan Panjang	Kab. Pesisir Selatan - Kab. Solok	49,400	76%	37,30	6%	3,00	5%	2,69	13%	6,41	81,6%	40,30	18,4%	9,10
30	075	Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	Kab. Padang Pariaman - Kota Pariaman	20,500	97%	19,95	3%	0,55	0%	0,00	0%	0,00	100,0%	20,50	0,0%	0,00
31	076	Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	Kab. 50 Kota	73,950	69%	51,22	1%	0,58	4%	2,60	26%	19,55	70,0%	51,80	30,0%	22,15
32	078	Simp. Koto Mambang-Balingka	Kab. Padang Pariaman - Kab. Agam	39,400	95%	37,52	1%	0,28	3%	1,30	1%	0,30	95,9%	37,80	4,1%	1,60
33	079	Simp. Baso - Piladang	Kab. Agam	11,140	31%	3,40	6%	0,70	52%	5,74	12%	1,30	36,8%	4,10	63,2%	7,04
34	080	Matur - Palembang	Kab. Agam	20,700	63%	13,00	19%	3,90	12%	2,50	6%	1,30	81,6%	16,90	18,4%	3,80
35	081	Palembayan - Palupuah - Simpang Patai	Kab. Agam	13,300	82%	10,84	0%	0,06	8%	1,00	11%	1,40	82,0%	10,90	18,0%	2,40
36	082	Alahan Panjang - Kiliran Jao	Kab. Solok - Kab. Sijunjung	72,900	19%	13,50	1%	0,80	0%	0,00	80%	58,60	19,6%	14,30	80,4%	58,60
37	083	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	Kota Padang - Kab. Pesisir Selatan	44,100	98,5%	43,46	1,3%	0,59	0%	0,05	0%	0,00	99,9%	44,05	0,1%	0,05
38	084	Jalan Lingkar Selatan (Payakumbuh)	Kota Payakumbuh	14,170	67%	9,47	12%	1,70	19%	2,70	2%	0,30	78,8%	11,17	21,2%	3,00
39	085	Simp. Padang Karambia -	Kota Payakumbuh	2,050	76%	1,55	15%	0,30	0%	0,00	10%	0,20	90,2%	1,85	9,8%	0,20

No	No Ruas	RUAS	Lokasi Kabupaten / Kota	Panjang SK	Panjang Tiap Kondisi								Kemantapan			
					Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
					%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km
		Tj. Bungo (TPA Regional)														
40	086	Surantiah - Kayu Aro - Langgai	Kab. Pesisir Selatan	27,700	37%	10,30	9%	2,60	6%	1,80	47%	13,00	46,6%	12,90	53,4%	14,80
41	087	Duku - Sicincin	Kab. Padang Pariaman	28,650	10%	2,85	5%	1,57	0%	0,00	85%	24,23	15,4%	4,42	84,6%	24,23
42	088	Padang Koto Gadang - Palembang	Kab. Agam	31,000	78%	24,30	6%	2,00	11%	3,40	4%	1,30	84,8%	26,30	15,2%	4,70
43	089	Jl. Balingka Terowongan Nagari Sianok	Kab. Agam - kab. 50 Kota	9,700	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	9,70	0,0%	0,00	100,0%	9,70
44	090	Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi	Kab. Sijunjung - Kota Sawahlunto	25,000	53%	13,23	3%	0,78	11%	2,70	33%	8,30	56,0%	14,00	44,0%	11,00
45	091	Simp. Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	Kab. Tanah Datar - Kab. Solok	23,000	49%	11,30	20%	4,70	6%	1,30	25%	5,70	69,6%	16,00	30,4%	7,00
46	092	Simp. Ganting - Bts. Tanah Datar - Sumani	Kab. Solok - Kab. Tanah Datar	28,400	94%	26,80	1%	0,40	4%	1,20	0%	0,00	95,8%	27,20	4,2%	1,20
47	093	Singkarak - Aripin - Tanjung - Balit	Kab. Solok	30,000	42%	12,73	39%	11,57	16%	4,80	3%	0,90	81,0%	24,30	19,0%	5,70
48	094	Pintu Angin - Labua Saiyo	Kab. Solok	5,500	91%	5,00	5%	0,30	2%	0,10	2%	0,10	96,4%	5,30	3,6%	0,20
49	095	Rao Rokan - Batas Riau	Kab. Pasaman	33,000	51%	16,80	22%	7,20	19%	6,30	8%	2,70	72,7%	24,00	27,3%	9,00
50	096	Lubuk Sikaping - Talu	Kab. Pasaman Barat - Kab. Pasaman	28,000	64%	18,00	1%	0,20	0%	0,00	35%	9,80	65,0%	18,20	35,0%	9,80
51	097	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	Kab. Pasaman Barat	43,200	38%	16,20	0%	0,20	0%	0,10	62%	26,70	38,0%	16,40	62,0%	26,80
52	098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	Kota Padang	12,000	82%	9,80	18%	2,10	1%	0,10	0%	0,00	99,2%	11,90	0,8%	0,10
53	099	Purus - BIM	Kota Padang	16,000	3%	0,50	0%	0,00	0%	0,00	97%	15,50	3,1%	0,50	96,9%	15,50
54	100	Batu Batembak - Pelabuhan Penasahan	Kab. Pesisir	1,200	100%	1,20	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100,0%	1,20	0,0%	0,00
55	101	Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	Kab. 50 Kota - Kab. Pasaman	47,000	37%	17,27	12%	5,64	12%	5,60	39%	18,50	48,7%	22,90	51,3%	24,10
56	102	Rawang - Talawi	Kab. Solok - Kota Sawah Lunto	6,000	28%	1,68	12%	0,70	9%	0,53	52%	3,10	39,6%	2,38	60,4%	3,63
57	103	Simp. SP II - Kantor Camat	Kab. Mentawai	5,100	43%	2,20	41%	2,10	14%	0,70	2%	0,10	84,3%	4,30	15,7%	0,80

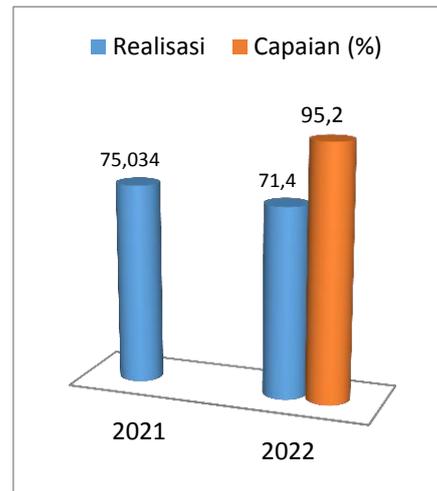
No	No Ruas	RUAS	Lokasi Kabupaten / Kota	Panjang SK	Panjang Tiap Kondisi								Kemantapan			
					Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
					%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km
58	104	Kantor Camat - Berkat	Kab. Mentawai	5,900	38%	2,27	10,7%	0,63	0%	0,00	51%	3,00	49,2%	2,90	50,8%	3,00
JUMLAH				1525,200	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
					60,71%	917,82	11,01%	171,12	8,55%	131,60	19,72%	304,69	71,39%	1088,94	28,61%	436,26

Sumber data : Laporan Akhir Survei PKRMS 2022

Perhitungan capaian indikator kemantapan jalan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian indikator kemantapan jalan di tahun 2022 (95,20%) menunjukkan realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator kemantapan jalan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Akan tetapi, dari data yang tersedia menunjukkan terjadinya penurunan kemantapan jalan 3,634% di tahun 2022 atau sepanjang 64,08 Km.

Perbandingan capaian dan realisasi indikator kemantapan jalan tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 78.

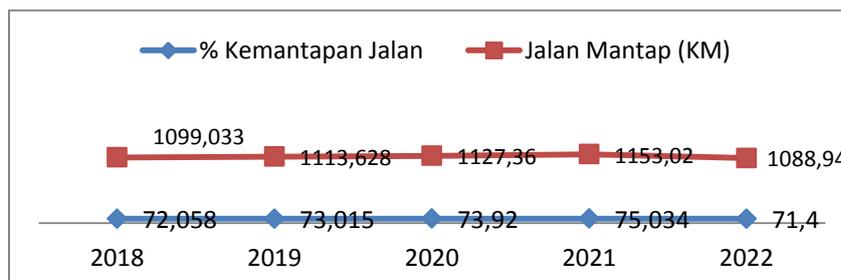
Grafik 78 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Kemantapan Jalan 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Kemantapan jalan Provinsi di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, meningkat dari tahun 2018-2021 dan menurun di tahun 2022. Peningkatan 1,114% di tahun 2021 menjadi peningkatan tertinggi sepanjang tahun 2018-2022. Jika dibandingkan dengan kondisi 2018, kemantapan jalan menurun 0,668% di tahun 2022. Kondisi ini tentunya sejalan dengan panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap tahun 2018-2022. Perkembangan kemantapan jalan tahun 2018-2022 tergambar pada grafik 79.

Grafik 79 Perkembangan Kemantapan Jalan tahun 2018-2022



Sumber data: D. Bina Marga, Cipta Karya

Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kualitas terbaik. Dalam meningkatkan dan menjaga kondisi jalan Provinsi dalam kondisi mantap, pada tahun 2022 telah diupayakan hal-hal sebagai berikut:

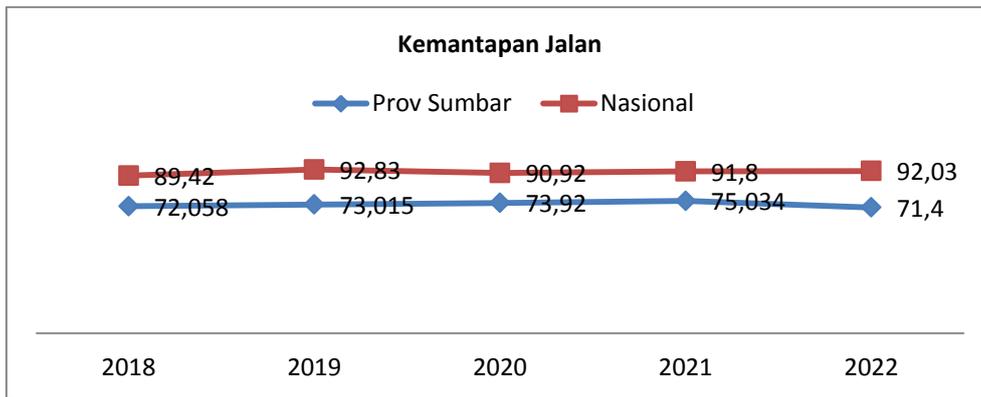
1. Pembangunan jalan sepanjang 4,722 KM pada 8 ruas jalan.
2. Melaksanakan rekonstruksi jalan (penanganan dan pengamanan badan jalan) sepanjang 14,094 KM pada 19 ruas jalan.
3. Peningkatan struktur jalan (panjang jalan yang dibangun + panjang jalan yang direkonstruksi + panjang jalan menuju standar sepanjang 22,233 KM pada 30 ruas jalan.
4. Mempertahankan kemantapan jalan yang sudah ada dengan pemeliharaan jalan. Pemeliharaan yang dilakukan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - pemeliharaan berkala sepanjang 17,471 KM pada 12 ruas jalan.
 - pemeliharaan rutin 1.338,65 KM.
 - rehabilitasi jalan 171,634 KM pada 3 ruang jalan.
5. Mencari sumber pembiayaan lain untuk mendukung pembangunan jalan (APBN).
6. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan bermuatan lebih.
7. Keberadaan UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan yang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi sejak tanggal 15 Maret 2012.
8. Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam serupa banjir/longsor yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
9. Dibentuknya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI yang berkantor di wilayah kerjanya masing-masing sehingga kondisi jalan yang dipelihara semakin lebih baik.
10. Mencari alternatif pengembangan terkoneksi agar ada jalur alternatif untuk mencapai daerah yang terkoneksi, apabila ada terjadi jalan terganggu longsor dan terban).

Berdasarkan hasil survei PKRMS, ditemukan bahwa persentase kemantapan jalan Provinsi pada tahun 2022 sebesar 71,40% lebih rendah dari realisasi tahun 2021 yaitu 75,034% dengan persentase capaian 100,05% untuk tahun 2021. Hal yang menyebabkan terjadinya penurunan jalan Provinsi dalam kondisi mantap akibat adanya bencana alam pada tahun 2022 seperti gempa pasaman, banjir bandang, longsor dan terban yang terjadi di ruas-ruas jalan Provinsi. Selain faktor bencana, berikut ini akan diuraikan faktor penghambat lainnya untuk meningkatkan kemantapan jalan:

1. Untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan 2% dibutuhkan pembangunan/rekonstruksi jalan sepanjang 30 Km, sementara pada tahun 2022 anggaran yang tersedia hanya mampu membangun jalan sepanjang 18.816 Km.
2. Keterbatasan jumlah peralatan (alat berat) untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
3. Kondisi alam yang sangat mempengaruhi karena perbukitan dan jurang.
4. Overload (beban berlebih) dari kendaraan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022), Persentase kemantapan Jalan Nasional lebih tinggi dibanding kemantapan jalan Provinsi. Perbandingan kemantapan jalan Provinsi dengan Nasional dapat dilihat pada grafik 80.

Grafik 80 Perbandingan kemantapan jalan Provinsi dengan Nasional



Sumber data: D. Bina Marga, Cipta Karya

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan indikator kemantapan jalan pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dapat tercapai 82% (1.250,664 Km). Jika melihat realisasi tahun 2022, berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 87,06% dari target tahun 2026. Dibutuhkan kenaikan 10,61% (312,666 Km) atau rata-rata kenaikan sebesar 2,653% pertahun agar target tahun terakhir RPJMD tersebut dapat tercapai. Dengan mempertimbangkan peningkatan tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan lebih berupaya maksimal untuk mencapai target terakhir tahun RPJMD 2021-2026.

Upaya untuk meningkatkan kemantapan jalan mantap di masa yang akan datang antara lain:

1. Tetap memperhatikan kebutuhan dana jalan di wilayah agar tetap bisa mempertahankan umur jalan dalam kondisi mantap.
2. Mengalokasikan dana secara konsisten agar jalan terjaga kondisinya.
3. Harus diadakan peralatan (alat berat) yang memadai.
4. Dibuat peraturan terkait *overload* (beban berlebih) kendaraan dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan (*stakeholder* terkait).

Untuk mewujudkan kemantapan jalan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp **272.058.925.993,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran

meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung indikator kemantapan jalan dapat dilihat pada tabel 3.63.

Tabel 3. 63 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Kemantapan Jalan

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Kemantapan Jalan	1	272.058.925.993	257.011.509.146
1	Program Penyelenggaraan Jalan	1	272.058.925.993	257.011.509.146

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **272.058.925.993,-** terealisasi sebesar Rp **257.011.509.146,-** atau 94,47%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 15.047.416.847,- (5,53%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja kemantapan jalan (99.10%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (94,47%) dengan tingkat efisiensi 4,63%.



Sasaran 6.1.2

Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, 2007). Tahap Pencegahan dan Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan

membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana, pembuatan alarm bencana, membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu dan memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran “**Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana**” sebagai salah satu sasaran yang akan dicapai yang

diukur dengan menggunakan indikator Kinerja “Indeks Ketahanan Daerah”. Pengukuran indeks ketahanan daerah ini mengacu pada 71 indikator yang ditetapkan BNPB sebagaimana diuraikan pada tabel 3.64.

Tabel 3. 64 Indikator untuk Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	Perda kab/kota Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2007 RPJMD, Renstra, Renja
		2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	Perda SOTK Perda OPD Notulen Rapat, PKS (Sekretaris) penanggulangan bencana di kab/kota
		3 Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	SK PRB Notulen Rapat Notulen Rapat ADRT Forum PRB
		4 Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	SOP Draft SOP Pusdalops DIBI (Laporan), Laporan PUSDALOPS (Perkejadian) Foto Informasi Swasta (BUMN)
		5 Peraturan Daerah tentang RPB	Draft RPB Draft Pergub Perda APBDP 2016 - 2020 Notulen Rapat Pembahasan KRB, Undangan Rapat
		6 Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	Perda RTRW Perda RTRW Perda RTRW UU Tataruang no 26 tahun 2007 dan perda RTRW NO. 13 tahun 2012, PP 21 tahun 2021
		7 BPBD	Perda No.9 tahun 2009 SOTK BPBD Sumbar Data Pegawai, Aset dan Anggaran (DPA)
		8 Forum PRB	SK Tanggap Darurat SK Forum PRB SK Forum PRB ADRT, Struktur Organisasi Forum PRB
		9 Komitmen DPRD terhadap PRB	DPA terkait Forum PRB Risalah Rapat DPRD Komisi IV DPA, Matriks Renja

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
			Rapat Kerja Mitra Komisi IV (Risalah) Usulan POKIR (Daftar POKIR)
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	10 Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Laporan Kejadian Bencana Peta Rawan Bencana Draft Dokumen PRB Dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana)
		11 Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Laporan Kejadian Bencana, KRB (Kajian Risiko Bencana) Peta Kajian Risiko Bencana (KRB) Draft RPB, KRB Draft RPB
		12 Peta Kapasitas dan kajiannya	Dokumen KRB, Laporan Kejadian Bencana Peta Kajian Risiko Bencana Draft RPB dan KRB RPB dan KRB
		13 Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Draft RPB Undangan Pembahasan, Rapat Kegiatan Laporan Draft Pergub RPB Renja OPD
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	14 Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	Screenshot , Foto, Baliho, SOP EWS Buku DIBI Draft/Dokumen RPB Dokumen KRB, RPB
		15 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	Undangan KSB Seluruh Kab/Kota, (Daftar hadir) Daftar hadir, Foro Dokumentasi Foto Dokumentasi (COVID-19), SCB Foto Dokumentasi (SCB)
		16 Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha	Perka Perka Perka Dokumentasi (Apel Siaga)
		17 Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	SOP Dokumentasi SOP Daftar Laporan
		18 Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	Laporan DIBI/Pusdalops Laporan Foro Pelatihan Laporan LKPj

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	Sertifikat pelatihan TRC Dokumentasi Kesiapsiagaan Gladi Sertifikat TOT
		20 Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	Dokumentasi Kesiapsiagaan Gladi Dokumentasi Kesiapsiagaan MOU Kab/Kota MOU Kab/Kota
		21 Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	
		22 Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	BPBD Provinsi Sumbar
		23 Penyimpanan/pegudang Logistik PB	Foto gudang logistik SK Gudang logistik BPBD Sumbar SK Gudang logistik BPBD Sumbar
		24 Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	BPBD Provinsi Sumbar Perka Manajemen Gudang dan Perka No. 13 th 2008 SK Gudang logistik BPBD Sumbar SK Gudang logistik BPBD Sumbar
		25 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	BPBD Provinsi Sumbar
		26 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	Dinas Pangan Renkon RPB Dokumen Renkon
		27 Penataan ruang berbasis PRB	
		28 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	SOTK Prov. Sumbar SIMTARU
		29 Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	Surat Edaran Gubernur dan Nota kesepakatan
		30 RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	Dokumentasi Dokumen HOSDIP Dokumen HOSDIP
		31 Desa Tangguh Bencana	Sertifikat SPAB Dokumentasi Destana Dokumentasi Destana
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	32 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	SE Gub (Bio Pori) SE Gub (Bio Pori), Dokumentasi (DLH)
		33 Perlindungan daerah tangkapan air	Peraturan No. 17 tahun 2019 Dokumentasi (Embung dan Pengendalian Banjir)
		34 Restorasi sungai	Peraturan No. 17 tahun 2019, Perda tentang RPPLH

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
			SUMBAR
			Dokumentasi
			Dokumentasi
			Dokumentasi dan Luasan Lahan
		35 Penguatan lereng	Permen PU no 4 tahun 2015 (Satuan Wilayah Sungai)
			Dokumentasi Sebelum dan Sesudah
			Dokumentasi (Sebelum Penguatan dan Setelah)
			Dokumentasi (Sebelum dan Sesudah)
		36 Penegakan hukum	
		37 Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	Dokumentasi Komunitas Peduli Sungai, aksi susur sungai
			Kegiatan OP (Pergub SOTK) DPA
			Dokumentasi Kegiatan
		38 Pemantauan berkala hulu sungai	Renja
			Perda DAS
			Forum DAS
		39 Penerapan Bangunan Tahan Gempa bumi	Perda no 6 tahun 2011
		40 Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	Dokumentasi DKP dan PSDA (Sea Wall)
			UU no 17 tahun 2019
		41 Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	DPA Dinas PU dan PSDA
			UU no 17 tahun 2019
			Dokumentasi Kegiatan
		42 Restorasi lahan gambut	
		43 Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Pembuatan hutan rakyat pada lahan kritis (DPA/Renja)
			Permen P.105-2018 P.2. Tentang tatacara pelaksanaan kegiatan pendukung pembinaan RHL
			DPA Dinas Kehutanan
			Berita Acara pemeriksaan RHL
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	44 Rencana Gempabumi Kontijensi	Dokumen Renkon
			Lembar pengesahan
			Dokumen Renkon
			Dokumen Renkon
		45 Rencana Kontijensi Tsunami	DPA Tahun 2018
			Dokumentasi kegiatan
			Daftar nama peserta simulasi
		46 Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	DPA
			Dokumentasi simulasi pelatihan
			Daftar nama masyarakat

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
			yang ikut simulasi (Dokumentasi)
47	Rencana Tsunami	Evakuasi Bencana	Peta Rencana Evakuasi dan TES Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan
48	Rencana kontijensi banjir		Dokumen Renkon Banjir SOP Tanggap Darurat Laporan Simulasi
49	Sistem peringatan dini bencana banjir		DPA 2016
50	Rencana kontijensi tanah longsor		
51	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor		
52	Rencana Kontijensi karkahut		
53	Sistem peringatan dini bencana karlahut		
54	Rencana kontijensi gunungapi	erupsi	Dokumen renkon gunung api Dokumen renkon gunung api Dokumen renkon gunung api
55	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi		Dokumentasi EWS Dokumentasi simulasi uji coba Dokumentasi simulasi uji coba
56	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi		rambu-rambu evakuasi Dokumentasi simulasi uji coba Dokumentasi simulasi uji coba
57	Rencana kontijensi kekeringan		
58	Sistem peringatan dini bencana kekeringan		
59	Rencana kontijensi banjir bandang		
60	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang		
61	Penentuan Status Darurat	Tanggap Darurat	Pergub 86 tahun 2012 Pergub 86 tahun 2012
62	Penerapan operasi darurat	sistem komando	Perka SKPDB Perka SKPDB Laporan simulasi
63	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana		SOP Tanggap Darurat SOP Tanggap Darurat
64	Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban		Sertifikat pelatihan Perka SKPDB
65	Perbaikan Darurat		SOP Tanggap Darurat Pergub 86 tahun 2012 Pergub 86 tahun 2012 Dokumentasi masa tanggap

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai	
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	66	Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	darurat SKPDB
		67	Penghentian status Tanggap Darurat	SKPDB
		68	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	
		69	Pemulihan infrastruktur penting	
		70	Perbaikan rumah penduduk	Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
		71	Pemulihan masyarakat	Penghidupan Dokumentasi Kegiatan (Foto)

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah ditargetkan tercapai 0,62. Penetapan target ini didasarkan pada hasil Penilaian Mandiri dalam penentuan baseline pada RPJMD. Pencapaian sasaran “meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana” tergambar pada tabel 3.65.

Tabel 3. 65 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.2



Indeks ketahanan daerah tahun 2022 target 0,62, terealisasi 0,64 dengan tingkat capaian 103,23% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Realisasi 0,64 diukur berdasarkan data pemenuhan 71 indikator yang ditetapkan BNPB yang dibagi lagi menjadi 7 prioritas yang masing-masing prioritas memiliki kriteria penilaian berbeda. Total dari penilaian tujuh prioritas inilah yang akan menjadi nilai dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Rincian perhitungan indeks ketahanan daerah dapat dilihat pada tabel 3.66.

Tabel 3. 66 Tabel Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,98	0,64	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,84		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,64		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,67		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,40		

Perhitungan capaian indikator indeks ketahanan daerah menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator indeks ketahanan daerah di tahun 2022 (103,23%) menunjukkan realisasi melebihi target yang ditetapkan. Capaian dan realisasi indikator indeks ketahanan daerah tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022.

Dalam hal meningkatkan indeks ketahanan daerah, pada tahun 2022 telah diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah infrastruktur (peralatan dan sistem peringatan dini bencana) yang siap dan berfungsi. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 26 unit alat peringatan dini tsunami/Indonesia *Tsunami Early Warning System* (InaTEWS) yang berfungsi dengan baik dan sistem peringatan dini pergerakan tanah dan alat ukur ketinggian air.
2. Memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
3. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan.

4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur BPBD dan kapasitas relawan dalam penanggulangan bencana baik pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.
6. Mendampingi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kabupaten/Kota, saat ini telah terbentuk 18 FPRB pada 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan 1 (satu) daerah yaitu Kabupaten Sijunjung dalam proses pembentukan FPRB.
7. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang berada di tingkat nagari.
8. Melakukan koordinasi dengan *Non Governmental Organization* (NGO) terkait Nagari Tangguh Bencana.
9. Menambah pemasangan rambu-rambu untuk memudahkan evakuasi apabila terjadi bencana.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan indeks ketahanan daerah antara lain:

1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sangat diperlukan tenaga teknis dan pegawai yang kompeten yang memahami tugas dan fungsinya.
2. Perlunya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
3. Luasnya cakupan wilayah kerja dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.
4. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana yang masih belum memadai.
5. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana dan pengalihan

anggaran untuk penanganan covid-19 yang berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana.

6. Keterbatasan SDM relawan penanggulangan bencana.
7. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan beberapa TRC Kabupaten/Kota yang sudah dibentuk belum melaksanakan fungsinya secara optimal serta belum melaporkan ke BPBD Provinsi Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan indeks ketahanan daerah pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dapat tercapai 0,66%. Jika melihat realisasi tahun 2022, berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 96,97% dari target tahun 2026. Dibutuhkan kenaikan 0,2% atau rata-rata kenaikan sebesar 0,05% pertahun agar target tahun terakhir RPJMD tersebut dapat tercapai. Dengan mempertimbangkan peningkatan tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target terakhir tahun RPJMD 2021-2026.

Upaya yang akan dilakukan selanjutnya dalam meningkatkan indeks ketahanan daerah antara lain:

1. Peningkatan kesiapsiagaan aparatur dan relawan dalam menghadapi bencana yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kepada BPBD, Kabupaten/Kota, masyarakat dan OPD yang terkait dengan penanggulangan bencana pada setiap tahapan.
2. Menambah peralatan kesiapsiagaan bencana dan melakukan pemeliharaan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendukung/penunjang penanggulangan bencana.
3. Melaksanakan pemutakhiran dokumen rencana kontigensi dalam menghadapi suatu jenis kejadian bencana dengan melakukan pengujian/simulasi sehingga dapat dilakukan perbaikan jika masih ditemui kelemahan dalam proses simulasi tersebut.
4. Membangun sistem informasi relawan dan data logistik sesuai dengan kualifikasinya sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi dan

penanganan apabila terjadi bencana.

5. Membentuk dan melegalisasi TRC pada Kabupaten/Kota yang belum ada TRCnya.
6. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 5 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp **9.484.787.843,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 6.1.2. dapat dilihat pada tabel 3.67.

Tabel 3. 67 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	5	9.484.787.843	8.925.411.103
1	Program Penanggulangan Bencana	4	8.339.881.537	7.813.761.987
2	Program Penanganan Bencana	1	1.144.906.306	1.111.649.116

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **9.484.787.843,-** terealisasi sebesar Rp **8.925.411.103,-** atau 94,10%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 559.376.740,- (5,90%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana (103,23%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (94,10%) dengan tingkat efisiensi 9,13%.



Sasaran 6.1.3

Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas



Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mengakomodir kebijakan nasional untuk menjamin pembangunan berwawasan lingkungan.

Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup adalah keniscayaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kelangsungan makhluk hidup yang membutuhkan unsur-unsur penting dari lingkungan hidup itu sendiri, seperti air, udara dan mineral.

Mengakomodir kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 menetapkan sasaran **Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas** guna mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah yang digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sumatera Barat merupakan cerminan dan gambaran kondisi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat yang terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi.

Pada akhir tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperbaharui metode perhitungan IKLH dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan IKLH

berdasarkan peraturan ini berbeda dengan perhitungan IKLH pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan terjadi pada pembobotan masing-masing komponen IKLH dan penambahan penilaian komponen IKAL yang menjadi bagian dalam perhitungan IKLH mulai tahun 2021. Selain itu perhitungan IKLH Tahun 2021 juga sudah menggunakan aplikasi IKLH pada tautan <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/dashboard> yang difasilitasi atau di bawah koordinasi dari masing-masing Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) masing-masing wilayah dimana untuk Provinsi Sumatera Barat difasilitasi oleh P3E Sumatera.

Sebagaimana ditetapkan pada Permen LHK No. 27 Tahun 2021, komponen yang digunakan dalam perhitungan IKLH Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut dengan formula yang digunakan dalam perhitungan rumus IKLH adalah sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$$

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Edaran Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, memberikan arahan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia mengenai target IKLH Tahun 2021-2024. Pada SE tersebut telah ditetapkan target IKLH tahun 2021 hingga 2024. Sedangkan pada RPJMD Sumatera Barat sudah harus ditetapkan hingga tahun 2026. Sehingga terjadi perbedaan dalam penetapan target IKLH RPJMD dimana target sudah harus ditetapkan hingga tahun 2026. Perbedaan target IKLH ini telah disampaikan dan didiskusikan bersama Pusat Pengendalian Ekoregion (P3E) Sumatera KLHK pada saat pembahasan target IKLH untuk region Sumatera. Hasil diskusi yang berkembang bahwa P3E Sumatera bisa mengakomodir usulan penentuan target IKLH untuk Provinsi Sumatera Barat yang berbeda dengan target Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pencapaian sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dapat dilihat pada tabel 3.68.

Tabel 3. 68 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.3.



IKLH tahun 2022 target 77,43, terealisasi 74,98 dengan tingkat capaian 96,84% termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”.

Realisasi IKLH diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0,340 \times 55,64) + (0,428 \times 90,65) + (0,133 \times 64,01) + (0,099 \times 88,32) \\
 &= 74,98
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Indeks Kualitas Air (IKA): 55,64

Indeks Kualitas Udara (IKU): 90,65

Indeks Kualitas Lahan (IKL): 64,01

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL): 88,32

Dengan perolehan IKLH sebesar 74,98, maka IKLH Sumatera Barat termasuk dalam kategori “Baik”. Hal ini di atur dalam PermenLHK No 27 Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.69.

Tabel 3. 69 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing komponen pengukur IKLH:

1. Indeks Kualitas Air

Untuk mendapatkan nilai IKA, terlebih dahulu harus dihitung nilai Indeks Pencemaran Air (IPA). Penentuan nilai capaian IPA didasarkan atas hasil

pengukuran kualitas air sungai. Cara perhitungannya dengan penentuan *benchmark*, minimum, rerata dan dilakukan perhitungan statistik dengan rumus sebagai berikut:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan:

- L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)
- C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
- IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)
- IP_j : $(C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j}...)$
- (C_i/L_{ij}) Maksimum : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}
- (C_i/L_{ij}) Rata-rata : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

Tabel 3. 70 Kategori dan Angka Rentang IPA

No	Angka Rentang	Kategori
1	$0 \leq PI_j \leq 1,0$	baik (memenuhi baku mutu)
2	$1,0 \leq PI_j \leq 5,0$	cemar ringan
3	$5,0 \leq PI_j \leq 10$	cemar sedang
4	$PI_j \geq 10$	cemar berat

Sumber: Permen LHK No. 27 Tahun 2021

Tabel 3. 71 Kategori Indeks Kualitas Air

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Untuk mengetahui status mutu dan IKA, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mengolah data pemantauan terhadap lima sungai dan dua danau yang dilakukan pada dua periode selama setahun untuk sungai dan satu periode untuk pemantauan danau. Adapun lima sungai yang dipantau tahun 2022 yaitu Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Sinamar. Pemantauan terhadap kualitas air danau dilakukan terhadap Danau Maninjau dan Danau Singkarak. Hasil pemantauan dapat dilihat pada tabel 3.72.

Tabel 3. 72 Jumlah Titik, Nilai Indeks per Mutu dan IKA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Memenuhi	Jumlah Titik			Nilai Indeks per Mutu			IKA	
	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang		Berat
307	371	76	8	28,20	24,34	2,99	0,10	55,64

Indek Kualitas Air (IKA) Provinsi Sumatera Barat senilai 55,64 masuk kategori sedang, dan berada di peringkat 15 dari 34 Provinsi se-Indonesia.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara dihitung dengan mengambil parameter pencemar udara ambien NO₂ dan SO₂ sebagai komponen perhitungannya. Perbandingan yang diambil dalam perhitungan merujuk kepada baku mutu udara ambien di Uni Eropa (*EU Directives*) yang memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nilai rata-rata tahunan dari NO₂ dan SO₂ akan dibandingkan dengan *EU Directives* dan dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

dengan:

I_{eu} = rata-rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU).
 Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO₂ = 40 µg/m³, SO₂ = 20 µg/m³.
 Baku mutu udara ambien Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, pengukuran 24 jam untuk NO₂ = 65 µg/m³, SO₂ = 75 µg/m³.

Nilai IKU diperoleh berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* di 19 kabupaten/kota yang masing-masingnya diwakili oleh 4 (empat) lokasi dengan karakteristik aktivitas dominan berupa: (1) padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat), (2) kawasan industri (bukan industrinya), (3) pemukiman padat penduduk, dan (4) perkantoran. Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, maka pelaksanaan pemantauan udara ambien metode *passive sampler* dilakukan 2 (dua) tahap

yang mewakili kondisi setahun yaitu semester I dan semester II dengan lokasi yang sama, dimana untuk setiap pemantauan dibutuhkan waktu minimal selama 14 (empat belas) hari.

Selain pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler*, khusus untuk Kota Padang dilakukan pemantauan kualitas udara ambien metode otomatis kontinu dengan alat berupa satu unit *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang memberikan data dengan interval 30 menit setiap harinya. Kebutuhan data minimal dari pemantauan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 adalah sebanyak 65% data harian setahun (238 hari pemantauan). Data kualitas udara ambien metode AQMS di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat tersedia untuk 1 (satu) tahun penuh (100% data harian). Adapun sumber data pemantauan yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 73 Sumber Data Pemantauan Kualitas Udara Ambien untuk Perhitungan IKU Tahun 2022

No	Data Pemantauan			
	Yang Melakukan Pemantauan	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
1	Pusat	80	148	148
2	P3E	0	0	0
3	Provinsi	0	0	0
4	Kabupaten/Kota	16	8	1
	Total	96	156	149

Sumber : Aplikasi IKLH KLHK 2022

Dari pengolahan data tersebut diperoleh hasil IKU Provinsi Sumatera Barat 90,65, dengan kategori sangat baik dan berada di peringkat 16 dari 34 Provinsi.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Pada tahun 2021 dimunculkan nomenklatur Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana sebelumnya adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKL ini adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang merupakan fungsi dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

(IKEG). IKEG adalah nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Untuk dapat menghitung IKL, maka harus ditentukan terlebih dahulu nilai IKTL dan IKEG.

IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang yang dihitung dari vegetasi hutan dan non hutan. Mulai tahun 2021, KLHK telah melakukan penyesuaian perhitungan tutupan lahan.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} \times DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{543}$$

Keterangan

LTL: Luas Tutupan Lahan

LW: Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

DKK: Dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut

$$\begin{aligned} DKK &= \text{EW dampak kanal} + w \text{ dampak terbakar} \\ &= \sum W_{kl} + W_{kb} + W_{bl} + W_{bb} \end{aligned}$$

Keterangan:

DKK: Luas Tutupan Lahan

W_{kl} : Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya kanal pada fungsi lindung Ekosistem Gambut

W_{kb} : Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya kanal pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut

W_{bl} : Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi lindung Ekosistem Gambut

W_{bb} : Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut

Bagi wilayah yang memiliki lahan gambut ditambahkan komponen Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut (DKK) sebagai faktor pengurang sehingga menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Dalam menentukan Luas Tutupan Lahan (LTH), maka 4 (empat) data utama yang dibutuhkan:

1. Data Tutupan Hutan.

Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas pada kelas Tutupan Lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.

2. Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu.

Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas Tutupan Lahan berupa semak/belukar dan semak/belukar rawa pada: a) kawasan hutan; dan b) sempadan tubuh air (sungai, danau/waduk, pantai) dan berada pada kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) yang berada di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain).

3. Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.

a. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan luas hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau lainnya yang berupa pepohonan.

b. Luas dari tutupan RTH (ruang terbuka hijau) yang diperhitungkan adalah wilayah RTH (ruang terbuka hijau) yang tidak berada pada data tutupan hutan, semak/belukar dan semak/belukar rawa sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas.

4. Data rehabilitasi hutan dan lahan

a. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas rehabilitasi hutan dan lahan.

b. Luas dari rehabilitasi hutan dan lahan yang diperhitungkan adalah yang berada pada areal penggunaan lain.

Untuk menghitung IKEG, digunakan rumus berikut:

$$\text{IKEG} = w_1 \cdot \text{KNL} + w_2 \cdot \text{BKR} + w_3 \cdot \text{TL} + w_4 \cdot \text{TMAT} + w_5 \cdot \text{EPK}$$

Keterangan:

KNL	: Luas terdampak Kanal
BKR	: Luas areal bekas kebakaran
TL	: Luas Tutupan Lahan

TMAT : Luas sebaran tinggi muka air tanah
 EPK : Luas tereksposnya sedimen pirit dan/atau kwarsa
 w1-w5 : bobot

Sejak tahun 2021, KLHK telah menyiapkan sebuah sistem entri data berbasis citra satelit, dalam hal ini *google earth* untuk perhitungan IKL. Data yang harus dientrikan oleh masing-masing operator kabupaten/kota adalah nama komponen tutupan, luasan, dan koordinat geografis melalui aplikasi IKLH. Melalui sistem ini, data komponen tutupan lahan yang diinput oleh masing-masing operator kabupaten/kota, akan diverifikasi oleh operator di tingkat Provinsi dan operator di tingkat pusat/KLHK. Setelah operator di tingkat Provinsi dan pusat melakukan verifikasi data dari kabupaten/kota, maka proses penghitungan IKL sebagai salah satu sub komponen dalam penghitungan IKLH dan penghitungan IKLH itu sendiri akan berjalan secara otomatis.

Dari pengolahan data data citra satelit *Landsat* dan data pendukung yang disampaikan oleh kabupaten/kota untuk Provinsi Sumatera Barat pada menu Indeks Kualitas Lahan diperoleh data sebagaimana pada aplikasi IKLH yaitu:

Tabel 3. 74 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lahan pada Aplikasi IKLH

No	Provinsi	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Sumatera Barat	0,48	66,27	0,0245155205	0.45214662983228	64,01

Sumber: Aplikasi IKLH KLHK, 2022.

Nilai IKL Provinsi Sumatera Barat sebesar 64,01 termasuk ke dalam kategori sedang dan menempati peringkat 12 dari 34 Provinsi se-Indonesia.

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Pemantauan kualitas air laut secara nasional telah dimulai semenjak tahun 2019, namun belum menjadi bagian perhitungan dalam IKLH pada tahun tersebut. Mulai tahun 2020, hasil pemantauan kualitas air laut mulai dihitung dan diformulasikan ke dalam Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Berdasarkan Permen LHK No. 27 Tahun 2021, IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari

beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Perhitungan IKAL menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (*National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI*), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci:

Tabel 3. 75 Daftar parameter kunci untuk perhitungan IKAL

No	Parameter	Sumber	Alasan Penentuan Parameter
1	Padatan Tersuspensi	Berbagai Sumber	Berkaitan dengan proses fotosintesis dan estetika perairan
2	Oksigen Terlarut (DO)	Domestik dan Industri	Terkait pencemaran organik, potensi bahaya bagi biota
3	Minyak dan Lemak		
4	Amonia Total (N-NH3)	Domestik dan Pertanian	Bersifat Toksik Potensi Eutrofikasi
5	Orto-Fosfat (PO4-P)		

Sumber: Permen LHK No. 27 Tahun 2021.

Perhitungan IKAL dengan rumus sebagai berikut:

$$WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$

dimana,

Q_i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i ;

W_i = bobot parameter kualitas air ke i ;

n = jumlah parameter kualitas air.

Perhitungan Q_i tiap parameter bergantung pada nilai hasil analisisnya.

Tabel 3. 76 Besaran bobot tiap parameter (W_i)

No	Parameter	W_i
1	TSS	0,223837849269234
2	DO	0,196387027260743
3	Minyak dan Lemak	0,205162776063457
4	Amonia Total	0,192041900850097
5	Orto-fosfat	0,182570446556469

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Tabel 3. 77 Kategori Indeks Kualitas Air Laut

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Untuk mendapatkan nilai IKAL dibutuhkan data-data pemantauan kualitas air laut yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Sumatera Barat dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut. Semua data tersebut dirangkum dalam IKAL Sumatera Barat.

KLHK melakukan pemantauan kualitas air laut di 6 kabupaten/kota (Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Kab. Pesisir Selatan) dengan sebaran 22 titik pantau.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan pada 7 Kabupaten/Kota (Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Kep. Mentawai) dengan sebaran 21 titik pantau. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, pemantauan dilakukan oleh Kab. Agam dan Kota Padang sebanyak tiga titik per kabupaten/kota. Hanya saja hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kab. Agam dan Kota Padang tidak diinputkan ke dalam aplikasi IKLH karena tidak menjadi kewajiban dalam penilaian/perhitungan IKLH oleh kabupaten/kota.

Tabel 3. 78 Sumber Data Pemantauan Kualitas Air untuk Perhitungan IKAL Tahun 2022

No	Data Pemantauan			
	Yang Melakukan Pemantauan	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
1	Pusat	22	23	22
2	P3E	0	0	0
3	Provinsi	21	17	0
4	Kabupaten/Kota	4	0	0
	Total	47	40	22

Sumber : Aplikasi IKLH KLHK 2022

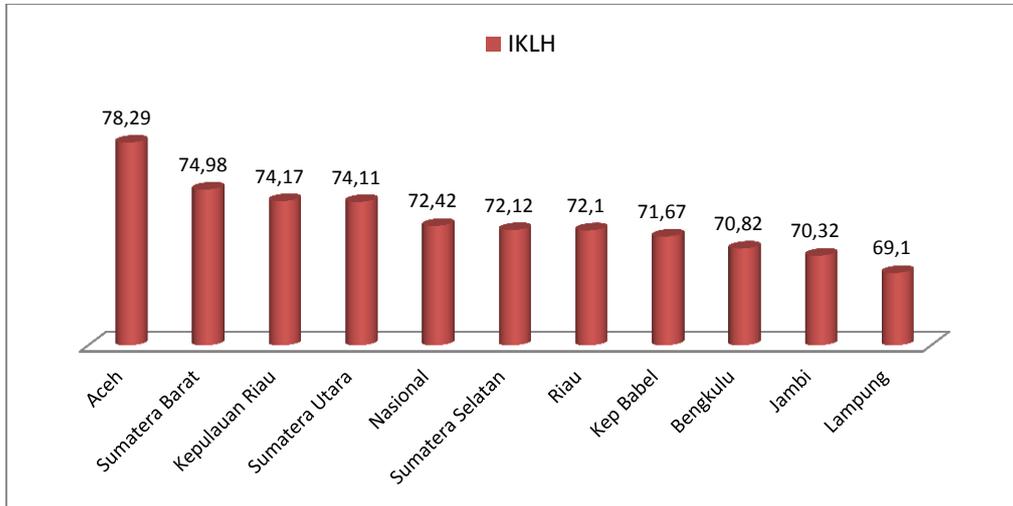
Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai IKAL Provinsi Sumatera Barat sebesar 88,32 dengan kategori Baik dan berada di peringkat 7 dari 34 Provinsi.

Berhubung pada tahun 2022 ini formula dan hasil perhitungan IKLH sudah berubah cukup signifikan (akibat dari diterbitkannya Permen LHK No. 27 Tahun 2021) dengan nilai realisasi IKLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang dilaporkan sebelumnya, maka pada perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) yang dilaporkan di dalam Laporan Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tidak lagi dapat dilakukan (karena sudah tidak setara). Namun demikian, perbandingan realisasi IKLH 2022 dengan tahun 2021 tetap dapat dilakukan dengan menggunakan realisasi/perhitungan nilai IKLH tahun 2021 berdasarkan metode perhitungan baru sebagaimana diatur di dalam Permen LHK No. 27 Tahun 2021. Dengan kata lain, perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2021 dapat dilakukan, dengan catatan bahwa kondisi tahun 2021 yang menjadi lawan perbandingan adalah hasil perhitungan menggunakan formula baru yang sepenuhnya sudah mengacu kepada Permen LHK No. 27 Tahun 2021, yang terdapat di dalam aplikasi IKLH KLHK tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa angka-angka realisasi IKLH dan/atau komponen penyusunnya yang ada di dalam aplikasi tersebut akan berbeda dengan angka realisasi tahun 2021 yang pernah dilaporkan sebelumnya pada dokumen laporan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

IKLH Sumatera Barat tahun 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH di tingkat Nasional dengan selisih lebih 2,56 poin. Informasi yang didapatkan sementara, nilai IKLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menempati peringkat ke 12 dari 34 Provinsi se Indonesia. Dari keseluruhan Provinsi di Pulau Sumatera, nilai IKLH Provinsi Sumatera Barat sebesar 74,98 adalah tertinggi kedua setelah Nanggroe Aceh Darussalam dengan nilai IKLH 78,29, dan diikuti Provinsi Kepulauan Riau pada peringkat ketiga dengan IKLH sebesar 74,17. Adapun 3 Provinsi terbawah adalah Provinsi Bengkulu dengan IKLH senilai 70,82, Provinsi Jambi dengan nilai 70,32 dan yang paling rendah nilai IKLH-nya pada ekoregion Sumatera adalah Provinsi Lampung sebesar 69,1. Dari 10 Provinsi tersebut, 9 Provinsi di antaranya mempunyai nilai IKLH tahun 2022 pada kategori baik dan hanya 1 Provinsi, yaitu Provinsi Lampung

yang nilai IKLH tahun 2022-nya masuk kategori sedang. Perbandingan IKLH Provinsi dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik 81.

Grafik 81 Perbandingan IKLH Provinsi dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas antara lain:

1. Menjaga kualitas air dengan melakukan tindakan preventif untuk meminimalisir dampak limbah cair yang berasal dari pemilik usaha melalui:
 - a. Pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan limbah cair.
 - b. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK.
 - c. Memberikan rekomendasi untuk pemberian sanksi administratif kepada instansi lingkungan hidup terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemkab/kota dan telah terbukti bahwa limbah cair yang dibuang melalui outlet melebihi baku mutu dari hasil penanganan pengaduan.
 - d. Berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Kesehatan untuk meminimalisir

pencemaran di sungai yang berasal dari aktivitas pertanian dan aktivitas domestik di sungai (Buang Air Besar/BAB, limbah domestik, sampah).

2. Menjaga kualitas udara melalui:
 - a. optimalnya berbagai program revegetasi oleh instansi teknis secara terpadu.
 - b. meningkatnya kepedulian masyarakat untuk menanam tanaman baik pada halaman rumah maupun pada area terbuka lainnya.
 - c. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sumber emisi dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
 - d. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat taman kota, Ruang Terbuka Hijau, Taman Kehati dan arboretum dengan tanaman yang dapat menyerap NO_2 dan SO_2 .
 - e. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) yang merupakan program nasional.
 - f. Pembinaan terhadap OPD kabupaten/kota oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab dalam melakukan uji emisi.
3. Menjaga kualitas lahan melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang merupakan kewenangan dari KLHK untuk wilayah Kawasan Hutan dan Dinas Kehutanan Provinsi untuk Areal Penggunaan Lain (APL).

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas antara lain:

1. Keterbatasan kewenangan pemerintah Provinsi dalam hal pemantauan kualitas sumber air hanya terhadap sungai-sungai sungai lintas

kabupaten/kota, sementara di sisi lain kondisi kualitas air juga dipengaruhi oleh anak-anak sungai yang berada dalam satu wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dimaksud dalam pemantauan dan pengendalian pencemarannya.

2. Belum adanya kegiatan di kabupaten/kota yang secara langsung dapat memperbaiki kualitas air sungai sehingga dapat meningkatkan IKA di kabupaten/kota.
3. Sulitnya merubah perilaku masyarakat yang tidak menjaga lingkungan seperti membuang sampah di sungai, tidak buang air besar di sungai, penambangan illegal dan pembakaran sampah
4. Belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat sebelum dibuang ke sungai.
5. Belum ada regulasi untuk pembatasan kendaraan bermotor yang boleh beroperasi.
6. Penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan belum berjalan optimal masih sebatas sanksi administratif dengan mempertimbangkan kepentingan investasi
7. Alih fungsi lahan yang cepat merupakan faktor dominan dalam penurunan IKL. Alih fungsi lahan sejalan dengan kebutuhan untuk perumahan, perladangan dan pertanian serta pemanfaatan hasil hutan
8. Deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan IKLH pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dapat tercapai 79,25%. Jika melihat realisasi tahun 2022, berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 94,61% dari target tahun 2026. Dibutuhkan kenaikan 4,27% atau rata-rata kenaikan sebesar 1,068% pertahun agar target tahun terakhir RPJMD tersebut dapat tercapai. Untuk mencapai target terakhir tahun RPJMD 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan lebih berupaya secara maksimal untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas

Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas di masa yang akan datang, akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Secara konsisten meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas.
2. Melakukan upaya sinergisitas dalam mengelola sumber pencemar, peningkatan tutupan lahan, normalisasi sungai dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL) maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Sumatera) sesuai dengan kewenangan.
3. Ikut serta melakukan upaya penertiban kegiatan penambangan illegal di sungai dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
4. Melakukan upaya preventif untuk pencemaran yang berasal dari pemilik usaha dan/atau kegiatan
5. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan secara intensif dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
6. Melakukan pengerukan dan pengangkutan sedimen sampah plastik secara periodik serta pemulihan terhadap *catchment area* (daerah tangkapan air) dalam bentuk peningkatan tutupan vegetasi.
7. Melakukan inventarisasi lahan akses terbuka dan edukasi ke pemerintah nagari dimana aktivitas penambangan dan lokasi lahan akses terbuka berada untuk melakukan upaya pencegahan kerusakan lahan dan mendorong para pemilik lahan untuk melakukan perbaikan/pemulihan kerusakan lahan secara mandiri;
8. Membuat *pilot project*/percontohan pemulihan lahan akses terbuka di Nagari Limo Koto Kabupaten Sijunjung.
9. Memfasilitasi dan mengarahkan dana CSR untuk digunakan melakukan penanaman pada lokasi lahan akses terbuka yang telah dipulihkan oleh

KLHK di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

10. Konsisten melakukan upaya pencegahan perubahan/alih fungsi lahan, perubahan perilaku pembukaan lahan dengan vegetasi kayu untuk pertanian dan upaya rehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 11 Program dengan 12 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp **13.261.908.285,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 6.1.3. dapat dilihat pada tabel 3.79.

Tabel 3. 79 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	12	13.261.908.285	12.928.197.502
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2	160.900.300	160.135.139
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	1.665.376.800	1.585.690.770
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1	421.872.000	420.970.800
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1	2.263.876.600	2.145.528.996
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lintasi Lingkungan dan Lintasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	129.597.900	129.072.300
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH	1	40.005.000	39.370.100

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	1.921.532.000	1.902.334.906
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	88.666.000	87.999.600
9	Program Pengelolaan Persampahan	1	6.087.721.685	6.045.056.936
10	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1	145.000.000	144.508.150
11	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1	337.360.000	267.529.805

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **13.261.908.285,-** terealisasi sebesar Rp **12.928.197.502,-** atau 97,48%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 333.710.783,- (2,52%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui tidak terjadi efisiensi karena capaian indikator kinerja sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas (96,82%) lebih rendah 0,66% dari realisasi anggaran (97,48%).



Fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan terlihat dari penetapan sasaran “meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian” pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Pencapaian sasaran ini akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sumatera Barat. Infrastruktur pelayanan dasar antara lain meliputi air bersih, sanitasi, rasio elektrifikasi. Infrastruktur ini menjadi kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk masyarakatnya. Selain infrastruktur pelayanan dasar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga akan melaksanakan pembangunan infrastruktur terkait pertanian dan bangunan strategis.

Sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian diukur oleh enam indikator kinerja. Indikator tersebut diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Organisasi Perangkat Daerah terkait infrastruktur. Pencapaian sasaran ini tergambar pada tabel 3.80.

Tabel 3. 80 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.4

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Akses Air Minum (%)	82	85,23	103,94
Akses Sanitasi Layak (%)	82	69,27	84,48
Persentase Bangunan Strategis Terbangun	40,22	6	15
Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,36	71,06	100,99
Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	53,78	58,73	109,20
Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	66,51	66,90	100,59
Rata-rata Capaian			85,69

Rata-rata capaian 6 indikator kinerja yang mengukur sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian tercapai 85,69% termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Penjelasan masing-masing sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian sebagai berikut:

1. *Akses Air Minum*



Akses Air Minum



Target

Realisasi

Capaian

Akses air minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access National*. Dalam hal akses air minum, kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas pada penanganan SPAM regional. Perhitungan indikator akses air minum tahun 2022 diperoleh berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, akses air minum tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai angka 82%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2021), persentase cakupan air minum tercapai 82,26% atau lebih tinggi 0,26% (data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang). Penetapan target ini juga mempertimbangkan jumlah rumah tangga yang mengalami peningkatan.

Pada tahun 2022, akses air minum ditargetkan 82%, terealisasi 85,23% dengan tingkat capaian 103,94% termasuk kategori keberhasilan “**memuaskan**”.

Realisasi indikator akses air minum diperoleh berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik. Formula perhitungan realisasi indikator akses air minum adalah sebagai berikut:

$$\text{Akses Air Minum} = \frac{1.140.199 \text{ rumah}}{1.337.791 \text{ rumah}} \times 100\% = 85,23\%$$

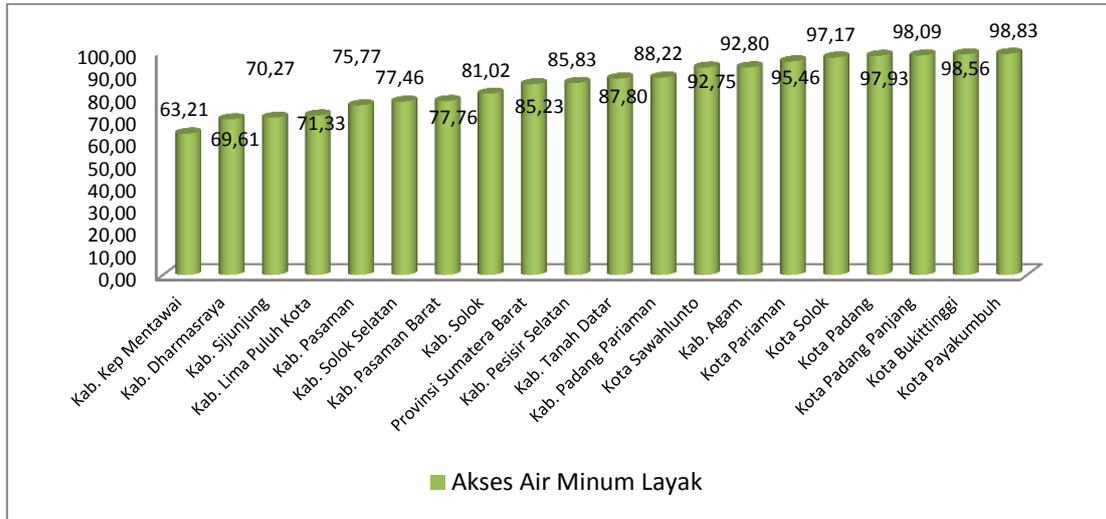
Keterangan:

Jumlah akses air minum 19 Kab/Kota= 1.140.199 rumah

Total jumlah rumah penduduk (rumah)= 1.337.791 rumah

Sebaran akses air minum pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada range 63,21 - 98,83. Tercatat 11 Kabupaten/Kota yang telah mencapai akses air minum melebihi rata-rata akses air minum Provinsi. Kota Payakumbuh mencapai akses air minum tertinggi (98,83%) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan akses air minum terendah 63,21%. Gambaran akses air minum berdasarkan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2022 disajikan pada grafik 82.

Grafik 82 Akses terhadap air minum layak menurut Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber data: Susenas BPS

Perhitungan capaian indikator akses air minum menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Dari segi capaian, akses air minum tahun 2021-2022 tercapai >100%. Artinya, pencapaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Berbeda dengan tahun 2021, perhitungan akses air minum tahun 2022 didasarkan pada data yang dikeluarkan oleh BPS. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya baik berdasarkan data dari Dinas BMCKTR maupun berdasarkan data BPS, akses masyarakat yang menggunakan air minum layak sama-sama meningkat di tahun 2022. Perbandingan realisasi dan capaian akses air minum tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 83.

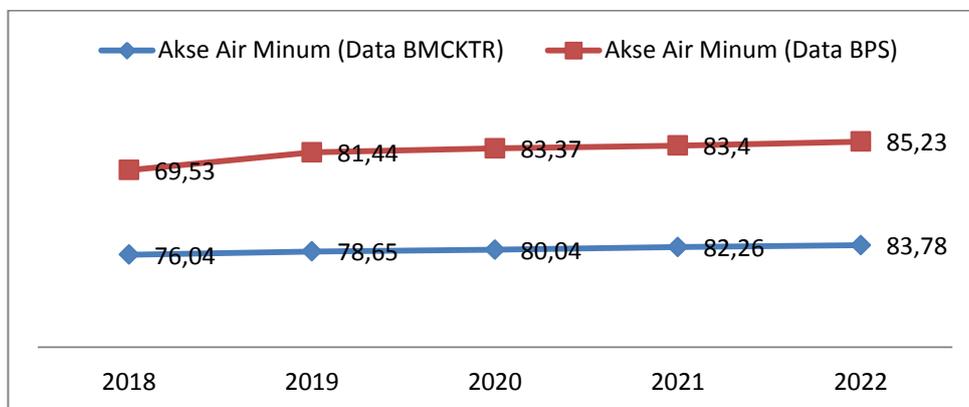
Grafik 83 Perbandingan Capaian dan Realisasi Akses Air Minum 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022), akses air minum masyarakat terus mengalami peningkatan dengan jumlah yang berfluktuatif. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, masyarakat yang memiliki akses air minum aman di tahun 2022 meningkat 7,74%. Kenaikan akses air minum tertinggi terjadi di tahun 2019 (2,61%). Akses masyarakat terhadap air minum dari tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 9,82% dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 2,46%. Gambaran akses air minum dari tahun 2018-2022 berdasarkan data dari Dinas BMCKTR dan data BPS tergambar pada grafik 84.

Grafik 84 Akses Air Minum tahun 2018-2022



Sumber data: D. BMCKTR dan Susenas BPS

Pencapaian akses air minum Sumatera Barat yang terus mengalami peningkatan ini merupakan hasil dari dukungan berbagai pihak antara lain Kabupaten/Kota, PDAM, Non PDAM dan PAMSIMAS. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan akses air minum adalah:

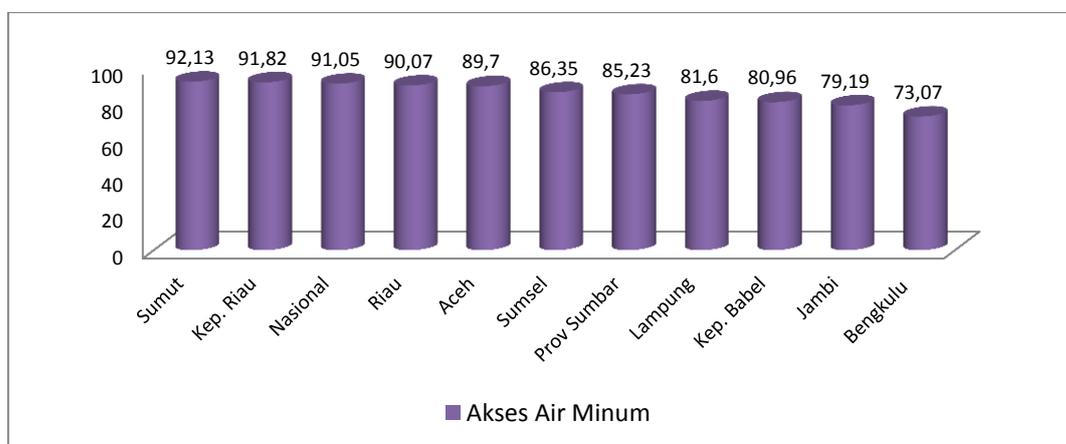
1. Melaksanakan pembinaan dan monitoring ke Kabupaten/Kota terkait penyusunan program dan perencanaan (*readiness criteria*) untuk peningkatan akses air minum.
2. Merekomendasikan kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penganggaran terhadap akses air minum skala kecil (PAMSIMAS)
3. Secara konsisten berkoordinasi dengan BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) dan Kabupaten/Kota terkait akses air minum.

Dalam hal peningkatan akses air minum, merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan yang terbatas pada kegiatan SPAM regional. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan akses air minum. Selain itu beberapa hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan akses air minum antara lain:

1. Peningkatan akses air minum sangat terkait dengan anggaran yang tersedia, akan tetapi anggaran yang tersedia pada Kabupaten/Kota untuk peningkatan akses air minum belum optimal.
2. Adanya keterbatasan ketersediaan sumber air baku di Kabupaten/Kota.
3. Pada beberapa Kabupaten/Kota masih terkendala pembebasan lahan.
4. Beberapa desa lokasinya tidak terjangkau oleh pelayanan PDAM.

Secara nasional, akses air minum Sumatera Barat berada di urutan ke 24 dari 34 Provinsi se Indonesia. Jika dibandingkan dengan rata-rata akses air minum se Indonesia, akses air minum Sumatera Barat lebih rendah 5,82%. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, akses air minum Sumatera Barat berada di urutan ke 6 setelah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan. Gambaran Akses Air Minum Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 85.

Grafik 85 Perbandingan Akses Air Minum Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data: Susenas BPS

Akses masyarakat terhadap air minum aman di tahun terakhir RPJMD 2021-2026 ditargetkan dapat mencapai kondisi 90%. Realisasi di tahun 2022 menunjukkan pencapaian 94,7% dari target tahun terakhir RPJMD. Dibutuhkan kenaikan 4,77% atau 1,19% pertahun untuk merealisasikan target tahun 2026. Mempertimbangkan kenaikan beberapa tahun sebelumnya dan fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota dalam memenuhi infrastruktur masyarakat, target akses air minum tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Dalam meningkatkan akses air minum kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya untuk:

1. Konsisten mendorong pemerintah Kabupaten/kota dalam meningkatkan maupun pengembangan dalam pelayanan air minum untuk masyarakat yang belum terlayani.
2. Mendorong Kabupaten/Kota yang mempunyai keterbatasan sumber air baku untuk melakukan MOU dalam pengelolaan air minum regional yang nantinya dapat melayani ketersediaan air curah untuk Kabupaten/Kota.

2. *Akses Sanitasi Layak*



Sama halnya dengan indikator akses air minum, indikator akses sanitasi layak juga menjadi indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access National*. Akses sanitasi layak menargetkan agar rumah tangga memiliki akses sanitasi layak, yang dalam hal ini dilihat dari akses jamban yang sehat. Perhitungan indikator akses sanitasi layak diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, akses sanitasi layak tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai angka 82%. Jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya (tahun 2021), akses sanitasi layak tercapai 82,05% atau lebih tinggi 0,05% (data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang). Dengan mempertimbangkan peningkatan rumah tangga yang jumlahnya berfluktuatif, target ini berarti minimal 82% rumah tangga yang ada sudah memiliki akses sanitasi layak.

Pada tahun 2022, akses sanitasi layak ditargetkan 82%, terealisasi 69,27% dengan tingkat capaian 84,48% termasuk kategori keberhasilan “Baik”.

Realisasi indikator akses sanitasi layak diperoleh berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik. Formula perhitungan realisasi indikator akses sanitasi layak adalah sebagai berikut:

$$\text{Akses Sanitasi Layak} = \frac{926.687 \text{ rumah}}{1.337.791 \text{ rumah}} \times 100\% = 69,27\%$$

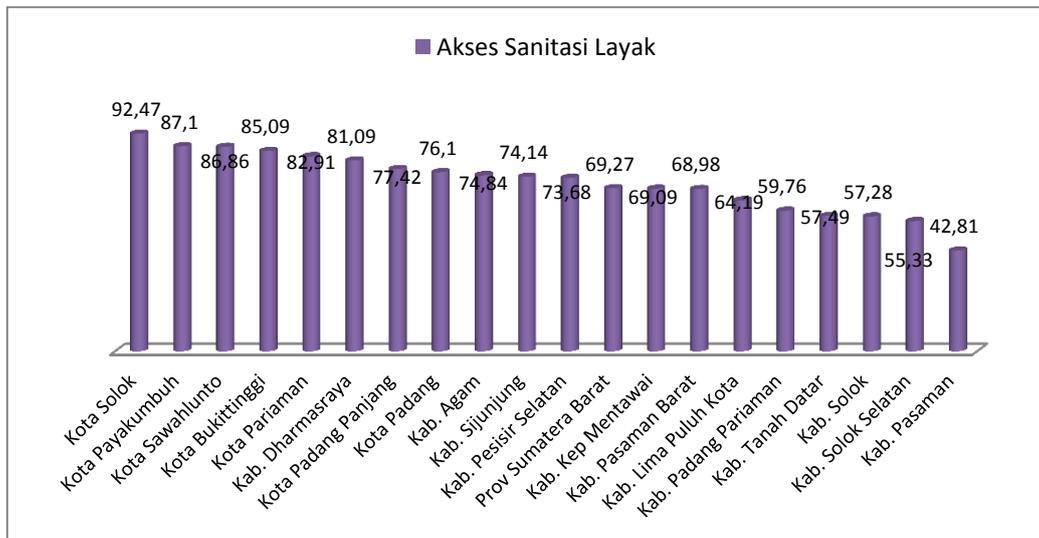
Keterangan:

Jumlah akses sanitasi 19 Kab/Kota= 926.687 rumah

Total jumlah rumah penduduk (rumah)=1.337.791 rumah

Akses sanitasi layak Provinsi Sumatera Barat diperoleh berdasarkan data akses sanitasi layak dari 19 Kabupaten/Kota. Dari 19 Kabupaten/Kota, 11 Kabupaten/Kota mempunyai akses sanitasi layak melebihi rata-rata akses sanitasi layak Provinsi Sumatera Barat. Akses sanitasi layak tertinggi berada di Kota Solok (92,47%) dan terendah di Kabupaten Pasaman (42,81%). Akses sanitasi layak Provinsi Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 disajikan pada grafik 86.

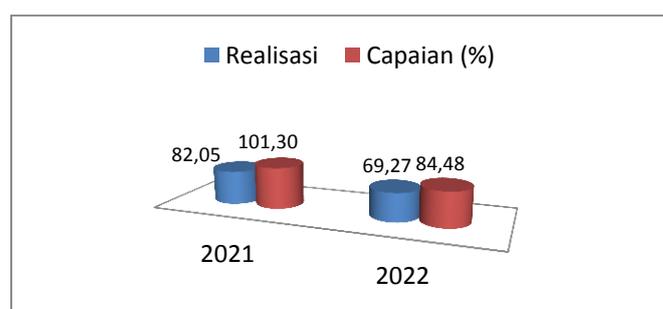
Grafik 86 Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber data: Susenas BPS

Perhitungan capaian indikator akses sanitasi layak menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Realisasi indikator akses sanitasi layak masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari capaian tahun 2022 yang tercapai < 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, akses sanitasi layak 2022 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan perbedaan sumber data pengukuran dimana perhitungan tahun 2022 didasarkan pada data yang dikeluarkan oleh BPS. Walaupun demikian, untuk sumber data yang sama baik berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang maupun berdasarkan data BPS, akses masyarakat yang menggunakan sanitasi layak sama-sama meningkat di tahun 2022. Perbandingan realisasi dan capaian akses sanitasi layak tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 87.

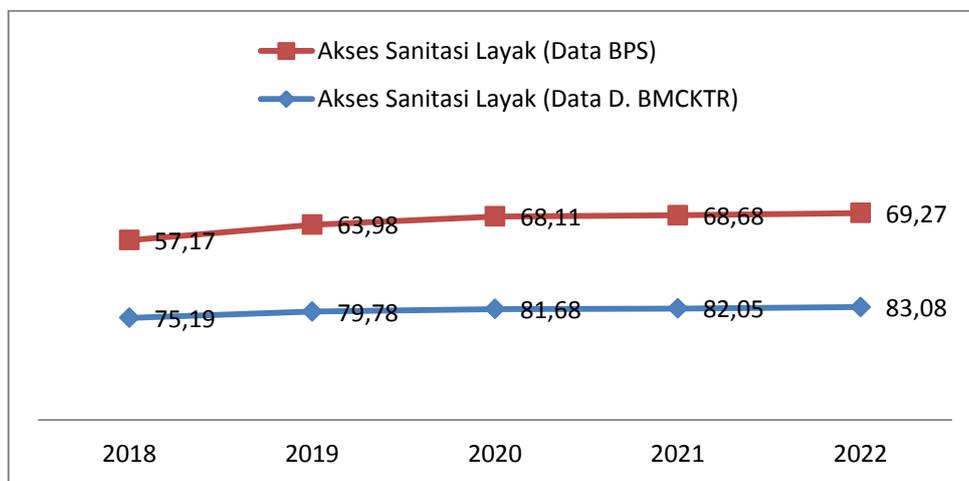
Grafik 87 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator akses sanitasi layak 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Baik menurut data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang maupun dari data BPS akses sanitasi layak dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Menurut data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang peningkatan akses sanitasi layak tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 4,59%. Dalam kurun 5 tahun terakhir (2018-2022), akses sanitasi layak mengalami pertumbuhan sebesar 10,19% dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 2,55%. Gambaran akses sanitasi layak menurut data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan BPS telah digambarkan pada grafik 88.

Grafik 88 Akses Sanitasi Layak tahun 2018-2022



Sumber data: D. BMCKTR dan BPS Sumbar

Sama halnya dengan akses air minum, pencapaian akses sanitasi layak sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan komitmen kabupaten/kota untuk meningkatkan akses sanitasi layak pada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Pembinaan dalam penyusunan dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota) oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi
2. Melakukan advokasi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lainnya.
3. Pendampingan kepada Kabupaten/Kota melalui kegiatan Percepatan Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP).

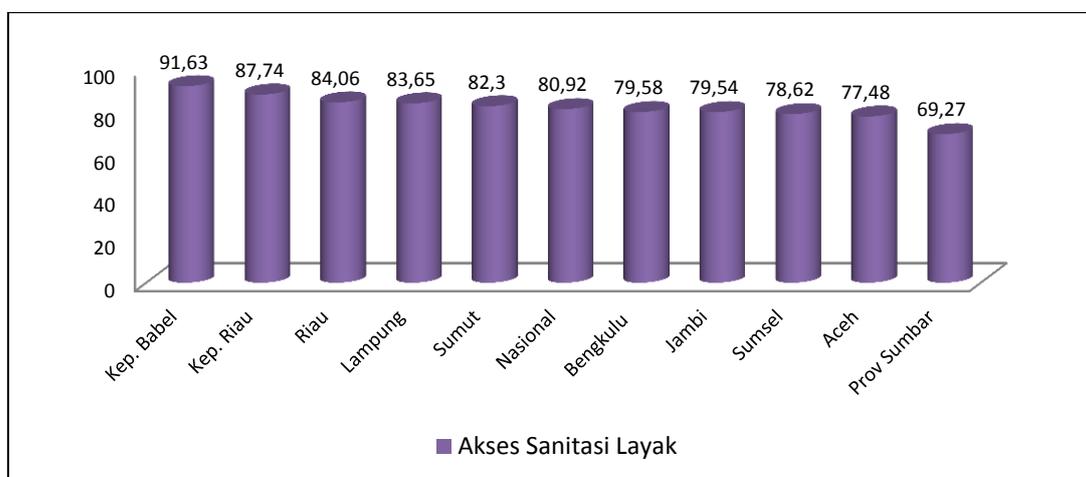
4. Koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
5. Dukungan akses pembiayaan melalui kemitraan dengan pihak yang relevan (lembaga kredit, koperasi, CSR, Baznas dan lain-lain).

Hambatan dan kendala yang dihadapi untuk pencapaian akses sanitasi layak antara lain:

1. Belum maksimalnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk program sanitasi yang terlihat dari rasio anggaran kabupaten/kota untuk program sanitasi masih kecil.
2. Pembiayaan APBN lebih kepada operasional, pemeliharaan, optimalisasi dan rehab IPLT *existing*

Secara nasional dari 34 Provinsi se Indonesia, akses sanitasi layak Sumatera Barat berada di urutan ke 2 terendah setelah Provinsi Papua. Jika dibandingkan dengan rata-rata akses sanitasi layak se Indonesia, akses sanitasi layak Sumatera Barat lebih rendah 11,65%. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, akses sanitasi layak Sumatera Barat berada di urutan yang paling rendah yaitu posisi ke 10. Gambaran Akses sanitasi layak Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 89.

Grafik 89 Perbandingan Akses Sanitasi Layak Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data: Susenas BPS

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dapat mencapai kondisi 90%. Dengan realisasi di tahun 2022 yang telah mencapai angka 69,27%, dibutuhkan kenaikan 20,73% atau 5,18% pertahun untuk merealisasikan target tahun 2026. Mempertimbangkan kenaikan beberapa tahun sebelumnya, target akses sanitasi layak mulai tahun 2023 dan seterusnya akan dikaji kembali penetapannya. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota akan selalu memaksimalkan upaya dalam memenuhi infrastruktur masyarakat khususnya infratraktur layanan dasar.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senantiasa meningkatkan koordinasi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk lebih memperhatikan peningkatan akses sanitasi layak kepada masyarakat.

3. *Persentase Bangunan Strategis Terbangun*



Bangunan strategis merupakan bangunan yang berada pada kawasan, tempat, lokasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa serta merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan ada 18 bangunan strategis yaitu:

No	Bangunan Gedung	No	Bangunan Gedung
1	Gedung Budaya (Lanjutan)	10	Shelter SDN 12 Ulakan Tapakis
2	Gedung Perkimtan	11	Shelter MTS Darul Hikmah
3	Limbah B3	12	Shelter Maligi
4	Gedung MUI	13	Shelter Tanjung Mutiara
5	Gedung Inspektorat	14	TTIC Pasaman Barat
6	Gedung PPIPTEK	15	Main Stadium (Lanjutan)
7	Shelter Sasak	16	Amphitheater Puncak Paku
8	Shelter SLBN 2 Padang	17	Amphitheater Pagaruyung
9	Shelter Sikabalu	18	Shelter Linggarjati

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, bangunan strategis yang terbangun tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai angka 40,22%. Indikator ini baru ditetapkan menjadi salah satu ukuran pencapaian kinerja Pemerintah Daerah mulai tahun 2022.

Pada tahun 2022, persentase bangunan strategis terbangun ditargetkan 40,22%, terealisasi 6% dengan tingkat capaian 15% termasuk kategori keberhasilan “kurang baik”. Formula perhitungan realisasi indikator persentase bangunan strategis terbangun adalah sebagai berikut:

$$\text{persentase bangunan strategis terbangun} = \frac{1}{18} \times 100\% = 6\%$$

Keterangan

Jumlah bangunan strategis yang terbangun di tahun 2022= 1 bangunan

Total jumlah bangunan strategis= 18 bangunan

Realisasi indikator persentase bangunan strategis terbangun berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang. Selama tahun 2022 telah dilakukan pembangunan terhadap 3 bangunan strategis yaitu Gedung Budaya, Shelter Maligi dan Shelter Linggarjati. Dari 3 bangunan tersebut baru 1 yang selesai terbangun yaitu Shelter Linggarjati.

Perhitungan capaian indikator persentase bangunan strategis terbangun menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator persentase bangunan strategis terbangun sebesar 15%, menunjukkan Indikator ini masih belum mencapai target yang direncanakan. Realisasi dan capaian indikator ini tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022.

Pembangunan bangunan strategis sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan bangunan strategis adalah menyiapkan dokumen perencanaan bangunan gedung (DED, Dokling, dan FS) dan menyediakan lokasi lahan untuk pembangunan gedung strategis tersebut.

Banyak kendala yang dihadapi untuk membangun bangunan strategis. Kendala tersebut antara lain:

1. Untuk menyelesaikan pembangunan 18 bangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar, sementara kemampuan fiskal pemerintah Provinsi masih kurang.
2. Masih adanya kegiatan/pekerjaan yang dianggarkan kurang sesuai dengan rencana penganggaran Penyelesaian Bangunan Strategis.
3. Tertundanya proses pengadaan sehingga pekerjaan dimulai mendekati akhir tahun.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan persentase bangunan strategis terbangun pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dapat terpenuhi 100%. Artinya, di tahun 2026 ditargetkan 18 Gedung Strategis Provinsi Sumatera Barat telah selesai dibangun. Sementara itu, sampai dengan tahun 2022 yang baru selesai dibangun baru 1 gedung (15%). Mempertimbangkan kondisi tersebut dengan kondisi sumber daya yang terbatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyesuaikan kembali target tahun 2023-2026.

Untuk tahun yang akan datang, dalam membangun bangunan strategis akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengusulan pola-pola pendanaan lainnya sehingga penganggaran bangun gedung dalam 1 kali penganggaran bukan dengan cara bertahap.
2. Mempercepat proses pengadaan Pekerjaan (proses lelang) agar pekerjaan tidak terkontrak mendekati akhir tahun.
3. Menyesuaikan alokasi pendanaan dengan rencana penyelesaian Bangunan Gedung.

4. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015, Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 65 Daerah Irigasi dengan Luas Total areal pertanian 65.007 Ha. Sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2016-2021 luas daerah irigasi fungsional telah mencapai 46.759,48 Ha (76,54%). Mulai tahun 2021, persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi diukur berdasarkan indikator kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Indikator ini menggambarkan tentang kinerja sistem irigasi terhadap suatu daerah.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (indeks kinerja sistem irigasi) ditargetkan akan tercapai 70,36%. Target ini lebih rendah 0,26% dibandingkan realisasi tahun 2021 tetapi masih tergolong kinerja baik.

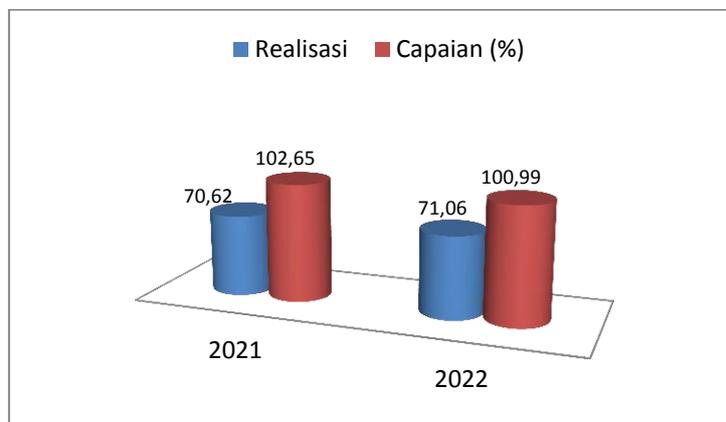
Pada tahun 2022, persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (indeks kinerja sistem irigasi) ditargetkan 70,36%, terealisasi 71,06% dengan tingkat capaian 100,99% termasuk kategori keberhasilan “**memuaskan**”. Rincian perhitungan indikator kinerja ini diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Prasarana Fisik	45	33,47	33,85
2	Produktivitas tanaman	15	9,62	9,62
3	Sarana Penunjang	10	6,68	6,68
4	Organisasi Personalia	15	11,58	11,58
5	Dokumentasi	5	4,24	4,24
6	Perkumpulan Petani Pemakai Air/IP3A/GP3A	10	5,03	5,09
	Jumlah	100	70,62	71,06

Dari 6 komponen yang digunakan untuk mengukur indeks kinerja sistem irigasi, 2 komponen menunjukkan peningkatan di tahun 2022 dan 4 komponen lainnya tetap. Peningkatan ini berasal dari peningkatan prasarana fisik dan peningkatan perkumpulan petani pemakai air/IP3A. Sesuai dengan batasan nilai, Indeks Kinerja Sistem Irigasi 71,06 termasuk kategori “kinerja baik”.

Perhitungan capaian indikator persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (indeks kinerja sistem irigasi) menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Baik tahun 2022 maupun tahun sebelumnya, capaian indikator ini tercapai >100%. Artinya, pencapaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Indeks kinerja sistem irigasi tahun 2022 ini menunjukkan peningkatan 0,44 dari indeks kinerja sistem irigasi tahun 2021. Perbandingan realisasi dan capaian akses sanitasi layak tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 90.

Grafik 90 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Dalam pemenuhan air irigasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah melakukan upaya berikut ini:

1. Melaksanakan rehabilitasi terhadap saluran irigasi sepanjang 10.939,75 meter serta melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan pada Daerah Irigasi (65 Daerah Irigasi). Rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki bangunan utama irigasi/bendung, saluran pembawa (saluran primer dan saluran sekunder), bangunan pada saluran pembawa (pintu air), dan pelaksanaan



operasi serta pemeliharaan daerah irigasi yang dilaksanakan oleh UPTD. Rincian rehabilitasi dan perbaikan terhadap saluran irigasi diuraikan pada tabel 3.81.

Tabel 3. 81 Rincian Rehabilitasi Dan Perbaikan Terhadap Saluran Irigasi

No	Nomenklatur>Nama DI	Luas D.I sesuai Permen 14/15 (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)						Jumlah
			Prasarana Fisik	Produktivitas (Padi)	Sarana Penujang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	P3A/GP3A/IP3A	
1	D.I Bandar Gadang	1.525	35,72	13,00	6,00	11,00	4,25	3,54	73,51
2	D.I Bintungan	1.017	40,66	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	78,75
3	D.I Muaro Danau	1.371	31,72	10,00	6,00	11,00	4,25	1,81	64,78
4	D.I Paneh Gadang	1.007	35,86	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	73,95
5	D.I Bandar Sapan Kayu Manang	1.160	38,52	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	76,61
6	D.I Bandar Pamujan	190	25,56	14,88	7,65	11,28	4,25	6,21	69,83
7	D.I Bandar Panjang Selayo	128	33,51	13,00	7,38	10,93	4,25	6,01	75,08
8	D.I Bandar Lembang	750	39,88	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	77,97
9	D.I Bandar Halim	657	40,95	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	79,04
10	D.I Pompa VII	98	29,37	13,00	6,00	11,00	4,25	1,81	65,43
11	D.I Sungai Samek	1.158	32,44	7,00	7,90	12,36	4,25	8,51	72,46
12	D.I Amping Parak	2.363	44,06	7,00	7,85	12,06	4,25	7,78	83,00
13	D.I Batang Bayang	1.362	35,32	10,32	6,00	11,00	4,25	8,36	75,26
14	D.I Batang Surantih	1.864	36,04	9,18	8,46	11,00	4,25	7,82	76,75
15	D.I Koto Kandis	2.357	32,29	10,29	8,43	12,60	4,25	8,30	76,17
16	D.I Koto Salapan	1.998	36,81	11,56	8,50	12,75	4,25	8,30	82,17
17	D.I Lubuak Sariak	1.300	36,39	7,00	6,00	11,00	4,25	8,20	72,84
18	D.I Lubuak Kubang	1.896	20,00	7,00	6,00	11,00	4,25	6,01	54,26
19	D.I Malepang	1.813	33,25	7,00	7,10	11,00	4,25	8,30	70,90
20	D.I Talang Kemuning Jaya	1.930	29,53	7,00	6,00	11,00	4,25	8,27	66,05
21	D.I Pekonina	1.250	33,37	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	65,46
22	D.I Bandar Sawah Padang	1.000	36,83	7,00	6,00	11,00	4,25	1,81	66,89
23	D.I Batang Suliti	1.450	39,92	9,65	6,00	11,00	4,25	3,84	74,66
24	D.I Batang Bangko	1.603	36,10	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	68,19
25	D.I Bandar Sungai Aro	2.739	36,15	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	68,24

No	Nomenklatur>Nama DI	Luas D.I sesuai Permen 14/15 (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)						Jumlah
			Prasarana Fisik	Produktivitas (Padi)	Sarana Penujang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	P3A/GP3A/IP3A	
26	D.I Lubuk Gobing	1.250	29,33	7,00	8,75	12,50	4,25	4,41	66,24
27	D.I Kapar Ampu	2.250	39,35	7,00	8,50	12,60	4,25	7,48	79,18
28	D.I Rimbo Tampurung	1.200	35,23	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	67,32
29	D.I Bt. Partupangan	1.200	26,41	7,09	8,70	12,65	4,25	3,01	62,11
30	D.I Batang Tingkarang	2.326	37,79	7,00	8,50	12,60	4,25	7,99	78,13
31	D.I Baramban III Lurah	1.164	34,62	10,94	6,00	11,00	4,25	3,84	70,64
32	D.I Bdr. Kubu Banda	675	39,22	9,22	6,00	11,00	4,25	3,54	73,23
33	D.I Bdr. Garegeh	98	27,53	10,61	7,65	11,77	4,25	7,01	68,81
34	D.I Bdr. Pulai	66	23,11	18,82	7,80	11,00	4,25	6,21	71,18
35	D.I Bdr. Rakik	97	35,25	7,00	6,40	11,00	4,25	3,54	67,44
36	D.I Bdr. Batu Hampa	100	34,25	7,00	6,40	11,00	4,25	3,54	66,44
37	D.I Bdr. Durian	200	36,19	8,10	6,40	11,00	4,25	3,54	69,48
38	D.I Batang Sianok	1.285	39,83	7,00	6,40	13,30	4,25	6,11	76,89
39	D.I Batang Gumarang	1.778	35,69	7,00	6,00	12,30	4,25	3,54	68,78
40	D.I Bandar Sangkir Geragahan	1.031	33,64	7,00	6,00	11,60	4,25	5,01	67,50
41	D.I Bandar Batang Dareh	1.128	39,22	7,00	6,00	12,60	4,25	3,54	72,61
42	D.I Batang Lampasi	2.180	48,48	7,91	8,28	12,57	4,25	8,06	89,55
43	D.I Batang Tabik	1.007	33,22	9,61	8,50	12,75	4,25	7,48	75,81
44	D.I Batang Agam	633	33,48	8,83	8,50	12,60	4,25	7,63	75,29
45	D.I Sei. Dareh	617	31,83	6,00	8,50	12,75	4,25	6,41	69,74
46	D.I Batang Talawi	200	35,17	11,81	6,93	10,63	4,25	8,21	77,00
47	D.I Gunung Nago	2.087	35,56	9,85	6,00	12,30	4,25	4,51	72,46
48	D.I Koto Tuo	1.004	35,00	9,02	6,00	12,30	4,25	3,54	70,10
49	D.I Sicaung	1.285	39,41	6,00	6,00	12,30	4,25	3,54	71,50
50	D.I Ladang Laweh	1.140	34,99	9,54	6,00	12,30	4,25	3,54	70,62
51	D.I Sawah Aru	172	24,11	13,76	7,42	11,62	3,88	6,21	67,00
52	D.I Gadang Sini Air	54	30,34	7,00	6,00	12,30	4,25	3,54	63,43
53	D.I Bandar Ipuh	70	30,07	7,00	6,00	11,30	4,25	3,54	62,16
56	D.I Bdr. Sibaragung	600	30,28	7,00	6,00	11,00	4,25	6,01	64,54

No	Nomenklatur>Nama DI	Luas D.I sesuai Permen 14/15 (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)						Jumlah
			Prasarana Fisik	Produktivitas (Padi)	Sarana Penujang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	P3A/GP3A/IP3A	
57	D.I Bandar Galo Gandang	1.112	32,81	7,00	6,00	12,30	4,25	5,01	67,37
58	D.I Bdr. Gadang Darek	138	28,12	8,41	6,00	11,00	4,25	3,54	61,32
59	D.I Bdr. Rupik	42	31,74	12,21	6,00	11,00	4,25	3,54	68,75
60	D.I Bdr. Jambu	33	28,71	12,00	6,00	11,00	4,25	3,54	65,50
61	D.I Bdr. Sigando	56	32,96	12,00	6,00	11,00	4,25	3,54	69,75
62	D.I Bdr. Muka Air	56	33,60	12,00	6,00	11,00	4,25	3,54	70,39
63	D.I Bdr. Bulaan Dalam	140	22,55	12,00	7,18	11,02	4,25	6,21	63,21
64	D.I Bdr. Gadang II Paninjauan	352	28,61	12,00	6,00	11,00	4,25	6,21	68,07
65	D.I Batang Parika	339	32,02	12,00	6,00	11,00	4,25	3,54	68,81
		65.007,00	33,85	9,62	6,68	11,58	4,24	5,09	71,06

Sumber data: DPSDA dan BK

2. Adanya revitalisasi kelembagaan P3A/GP3A agar semakin banyak P3A ikut terlibat dan berperan dalam perencanaan tata tanam dan pengalokasian air ke sawah serta dalam kegiatan operasi jaringan irigasi.

Hambatan dan kendala yang ditemukan dalam pemenuhan air irigasi antara lain:

1. Minimalnya peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Belum terbentuknya kelembagaan P3A/GP3A pada beberapa Daerah Irigasi.
3. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan daerah irigasi yang sangat terkait dengan keterbatasan penganggaran.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan kebutuhan air irigasi pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dapat terpenuhi 76,60%. Artinya, realisasi di tahun 2022 telah tercapai 92,77% dari target tahun 2026. Dibutuhkan kenaikan 5,54% atau rata-rata kenaikan sebesar 1,385% pertahun agar target tahun terakhir RPJMD tersebut dapat tercapai. Dikarenakan air irigasi ini sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian maka di tahun yang akan datang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengoptimalkan upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk pemenuhan air irigasi ke depannya, akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
2. Melakukan advokasi dan fasilitasi kepada masyarakat untuk membentuk kelembagaan P3A/GP3A yang berbadan hukum.
3. Peningkatan intensitas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

5. Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air



Persentase volume tampungan sumber-sumber air



Bangunan tampungan sumber-sumber air diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan air yang semakin meningkat di masa yang akan datang. Volume potensi tampungan diperoleh dari kajian-kajian teknis yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan sumber daya air (mata air, anak sungai dan lain-lain) yang terdapat pada suatu wilayah. Sama halnya dengan periode sebelumnya, total volume potensi tampungan sumber-sumber air yang akan dicapai untuk tahun 2021-2026 adalah sebesar 587.467 m³.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, persentase volume tampungan sumber-sumber air tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai angka 53,78%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2021), persentase volume tampungan sumber-sumber air tercapai 58,50% atau lebih tinggi 4,72%.

Pada tahun 2022, persentase volume tampungan sumber-sumber air ditargetkan 53,78%, terealisasi 58,73% dengan tingkat capaian 109,20% termasuk kategori keberhasilan “**memuaskan**”.

Realisasi indikator kinerja persentase volume tampungan sumber-sumber air diperoleh berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Bina Konstruksi dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase volume tampungan sumber-sumber air} = \frac{345.016 \text{ m}^3}{587.467 \text{ m}^3} \times 100\% = 58,73\%$$

Keterangan

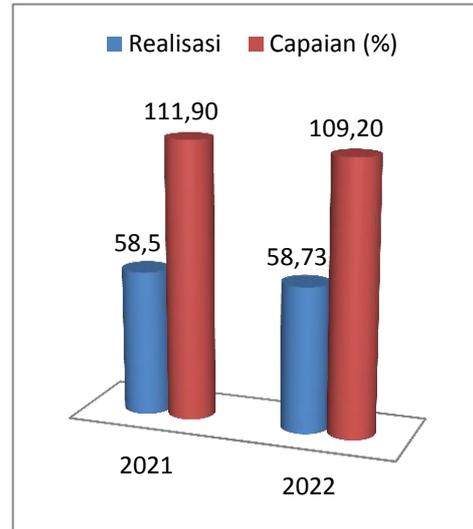
Volume tampungan sumber-sumber air (m³)= 345.016

Volume potensi tampungan sumber-sumber air (m³)= 587.467

Perhitungan capaian indikator persentase volume tampungan sumber-sumber air menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Baik tahun 2022 maupun tahun sebelumnya, capaian indikator ini tercapai >100%. Artinya, pencapaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Volume tampungan sumber-sumber air tahun 2022 mengalami kenaikan 0,23% atau secara absolut naik 1.372,50 m³ dibandingkan tahun 2021 (343.643 m³). Perbandingan realisasi dan capaian persentase volume tampungan sumber-sumber air tahun 2021 dan 2022

digambarkan pada grafik 91.

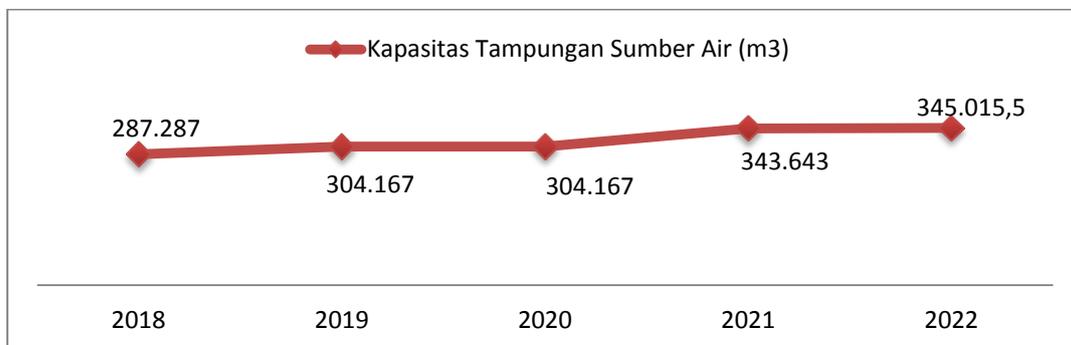
Grafik 91 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Kapasitas tampungan sumber air dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan yang berfluktuatif. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2021 (39.476 m³) dan terendah di tahun 2022 (1.373 m³). Pertumbuhan selama 5 tahun terakhir adalah 19,25% dengan rata-rata 4,81 pertahun. Perkembangan kapasitas tampungan sumber air digambarkan pada grafik 92.

Grafik 92 Perkembangan kapasitas tampungan sumber air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022



Sumber data: DSDA dan BK

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan persentase volume tampungan sumber-sumber air pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dapat tercapai 59,78% (351.187,77 m³). Jika melihat realisasi tahun 2022, berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 98,24% dari target tahun 2026. Dibutuhkan kenaikan 1,05% (6.171,77 m³) atau rata-rata kenaikan sebesar 0,263% pertahun agar target tahun terakhir RPJMD tersebut dapat tercapai. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut dengan upaya yang optimal.

Dalam peningkatan volume tampungan sumber-sumber air, di tahun 2022 telah dibangun embung nagari Pakandangan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk kedepannya, koordinasi dengan stakholder terkait dalam peningkatan volume tampungan sumber-sumber air akan secara konsisten dilakukan.

6. *Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air*



Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air



Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan Wilayah Sungai, total luas kawasan terdampak daya rusak air yang akan ditangani periode 2021-2026 adalah 3.130 Ha. Total luas kawasan terdampak tersebut didapatkan dari kajian-kajian teknis yang telah dilakukan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yaitu WS Silaut-Tarusan dan WS Masang-Pasaman.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai angka 66,51% atau ditetapkan meningkat 0,85% dibandingkan persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2021 65,66%.

Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air ditargetkan 66,51%, realisasi 66,90% dengan tingkat capaian 100,59% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air} = \frac{2.093,95 \text{ ha}}{3.130 \text{ ha}} \times 100\% = 66,90\%$$

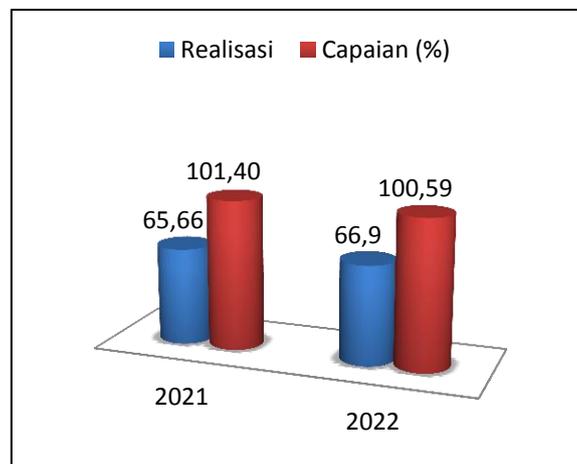
Keterangan

Luas kawasan teramankan = 2.093,95 ha

Luas kawasan terdampak= 3.130 ha

Perhitungan capaian indikator persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Baik tahun 2022 maupun tahun sebelumnya, capaian indikator ini tercapai >100%. Artinya, pencapaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2022 mengalami kenaikan 1,24% atau secara absolut naik 38,94 ha dibandingkan tahun 2021 (2.055,01 ha). Perbandingan realisasi dan capaian persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 93.

Grafik 93 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dari tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2019 (129 ha) dan terendah di tahun 2022 (13 ha). Pertumbuhan selama 5 tahun terakhir adalah 11,58% dengan rata-rata 2,89 pertahun.

Perkembangan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air digambarkan pada grafik 94.

Grafik 94 Perkembangan luas kawasan yang teramankan dari daya rusak air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022



Sumber data: DSDA dan BK

Dalam peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun Bangunan perkuatan tebing sebanyak 45 unit dengan panjang bangunan perkuatan tebing terbangun sepanjang 3.646,20 meter.
2. Membangun Seawall dan bangunan pengaman pantai air Sasak Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 354 meter.
3. Membangun Check Dam Batang Malana Kabupaten Tanah Datar sepanjang 12 meter.
4. Rehabilitasi Bangunan perkuatan tebing Batang Surantih Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang 75 meter.

Hambatan dan kendala yang ditemui dalam peningkatan kawasan yang terlindungi dari daya rusak air adalah faktor cuaca ekstrem yang tidak bisa ditebak dan kinerja penyedia jasa yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan persentase Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dapat tercapai 73,55% (2.302,12 ha). Jika melihat realisasi tahun 2022, berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 90,96% dari target tahun

2026. Dibutuhkan kenaikan 6,65% (208,17 ha) atau rata-rata kenaikan sebesar 1,663% pertahun agar target tahun terakhir RPJMD tersebut dapat tercapai. Dengan mempertimbangkan peningkatan tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target terakhir tahun RPJMD 2021-2026.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara konsisten melakukan:

- a. koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan *stakeholder* terkait dalam rangka mendukung peningkatan kawasan yang terlindungi daya rusak air dan
- b. percepatan pelaksanaan pengerjaan infrastruktur terkait perlindungan kawasan dari daya rusak air.

Untuk mencapai sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 11 Program dengan 18 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp **197.906.282.731,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 6.1.4. dapat dilihat pada tabel 3.82.

Tabel 3. 82 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.4

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	18	197.906.282.731	185.309.329.387
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	1.660.337.809	1.563.785.467
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	718.855.760	705.275.800

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	357.743.700	352.714.189
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1	2.447.874.640	2.389.150.200
5	Program Penataan Bangunan Gedung	1	46.996.074.573	44.099.506.427
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	1.604.917.554	1.490.937.966
7	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	3	5.740.285.559	5.421.802.038
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2	122.722.788.846	114.766.490.011
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3	3.351.198.000	3.282.712.084
10	Program Pengembangan Perumahan	2	1.330.066.900	1.266.579.426
11	Program Kawasan Permukiman	2	10.976.139.390	9.970.375.779

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 197.906.282.731,- terealisasi sebesar Rp 185.309.329.387,- atau 93,63%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 12.596.953.344,- (6,37%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui tidak terjadi efisiensi dikarenakan capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian (85,70%) lebih rendah 7,93% dari realisasi anggaran (93,63%).



Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang sangat perlu dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat. Arah kebijakan dan strategi

pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Untuk kondisi sekarang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang menyusun Ranperda revisi RTRW.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi. Pengukuran indikator ini didasarkan pada data/informasi yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan indikator kinerja persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi dapat mencapai angka 86% atau naik 2% dibandingkan dengan kondisi tahun 2021. Pencapaian sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan tergambar pada tabel 3.83.

Tabel 3. 83 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.5



Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi tahun 2022 target 86, terealisasi 86 dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”.

Realisasi indikator ini diukur berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi}}{\text{program}} = \frac{21,5 \text{ program}}{25 \text{ program}} \times 100\% = 86\%$$

Keterangan

Program dalam RPJMD yang sesuai dengan RTRW = 21,5 program

Jumlah program RTRW= 25 program

Untuk program yang tingkat kesesuaiannya 0,5 berarti program RPJMD tersebut baru memenuhi sub program RTRW yang menunjang tercapainya program RTRW. Rincian Program RPJMD yang sesuai dengan RTRW disajikan pada tabel 3.84.

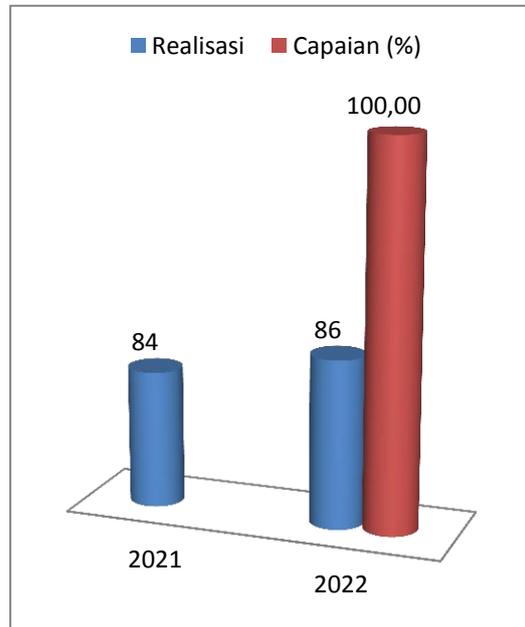
Tabel 3. 84 Program RPJMD yang sesuai dengan RTRW

No	Program RTRW Provinsi 2012-2023	Program RPJMD	Kesesuaian Program	OPD Penanggung Jawab	Jumlah Program RPJMD yang Sesuai dengan RTRW
I	Program Perwujudan Pengembangan Struktur Ruang				8
A	Program Perwujudan Pusat Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat				5
1	Pemantapan Fungsi Kota PKN	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Sesuai	Dinas Perhubungan	1
2	Pemantapan Fungsi Kota PKW	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
3	Pengembangan dan Penataan PKN	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
4	Pengembangan PKW dan PKWp	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Sesuai	Dinas Kesehatan	1
5	Pengembangan PKL	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
6	Penyusunan Renstra				
B	Program Perwujudan Sistem Prasarana				3
1	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
2	Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Sesuai	Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air	1
3	Prasarana Perumahan dan Permukiman	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
II	Program Perwujudan Pola Ruang				13,5
A	Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung				3,5
1	Pengembangan Kawasan Hutan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Sesuai	Dinas Kehutanan	1
2	Pemantapan Kawasan Lindung	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Sesuai	Dinas Kehutanan	1
3	Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Lindung				0,5
4	Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Sarana	Sesuai	BPBD	1

No	Program RTRW Provinsi 2012-2023	Program RPJMD	Kesesuaian Program	OPD Penanggung Jawab	Jumlah Program RPJMD yang Sesuai dengan RTRW
	Alam	dan Prasarana Kebencanaan			
B	Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya				8
1	Pengembangan kawasan permukiman Pengembangan kawasan permukiman perdesaan Pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Pengembangan perumahan	Sesuai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1
2	Pengembangan Kawasan Pertanian	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian	Sesuai	Dinas Pertanian	1
3	Pengembangan Perkebunan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan	Sesuai	Dinas Perkebunan	1
4	Pengembangan Kawasan Pternakan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pternakan	Sesuai	Dinas Peternakan	1
5	Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Sesuai	Dinas Kelautan dan Perikanan	1
6	Program Pengembangan Kawasan Pertambangan	Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Sesuai	Dinas ESDM	1
7	Program Pengembangan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Sesuai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
8	Program Pengembangan Pariwisata	Program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata	Sesuai	Dinas Pariwisata	1
9	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya				
10	Penyusunan SPM				
C	Program Perwujudan Kawasan Strategis				2
1	Penyusunan RTR Kawasan Strategis	Perencanaan penataan ruang	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
2	Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1

Perhitungan capaian indikator Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Realisasi indikator ini tahun 2022 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian 100%. Capaian tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Perbandingan realisasi dan capaian persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi tahun 2021 dan 2022 digambarkan pada grafik 95.

Grafik 95 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Dalam penataan ruang berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Upaya tersebut antara lain:

1. Penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana rinci tata ruang Kabupaten/Kota.
2. Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan peran masyarakat terhadap penataan ruang.
3. Terlaksananya aplikasi SIMTARU sebagai media online penyebarluasan informasi penataan ruang dan laporan pengaduan masyarakat terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Barat.
4. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan penataan ruang yang baik antara lain:

1. Proses penyusunan Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terkendala dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta tahapan proses yang dilalui melibatkan banyak kementerian/sector dan membutuhkan kesepakatan dari masing-masing sector yang mengakibatkan penyelesaian perda membutuhkan waktu yang lama.
2. Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap penataan ruang, mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Barat.
3. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dapat tercapai 90%. Jika melihat realisasi tahun 2022, berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 95,56% dari target tahun 2026. Dibutuhkan kenaikan 4% atau rata-rata kenaikan sebesar 1% pertahun agar target tahun terakhir RPJMD tersebut dapat tercapai. Dengan mempertimbangkan peningkatan tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target terakhir tahun RPJMD 2021-2026.

Untuk mewujudkan penataan ruang yang baik di masa yang akan datang, upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.
2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
3. Pengoptimalan Sistem Informasi Penataan Ruang.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Provinsi.

5. Pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Untuk mencapai sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program dengan 9 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp 3.838.907.276,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 6.1.5. dapat dilihat pada tabel 3.85.

Tabel 3. 85 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.5

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan	9	3.838.907.276	3.138.779.941
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	150.000.000	135.092.441
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	213.000.000	159.103.400
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1	92.000.000	88.937.547
4	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1	65.000.000	61.535.300
5	Program Penetapan Tanah Ulayat	1	50.000.000	48.932.000
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4	3.268.907.276	2.645.179.253

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 3.838.907.276,- terealisasi sebesar Rp 3.138.779.941,- atau 81,76%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 700.127.335,- (18,24%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (81,76%) dengan tingkat efisiensi 18,24%



Misi 7

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas



Tujuan 7.1

Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani

Salah satu faktor yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menata ulang birokrasi perlu dilakukan perubahan besar dan mendasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan yang disebut juga dengan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah tindakan untuk memperbaiki efisiensi, efektifitas, profesionalisme birokrasi sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang diikuti dengan perbaikan akuntabilitas kinerja. Birokrasi diharapkan memiliki pola pikir dan budaya kerja yang produktif, efisien dan efektif. Untuk mencapai harapan tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dengan visi Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, salah satu Misi pemerintah daerah adalah “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional”, dengan tujuan Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Pencapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi diukur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Permenpan No 26 Tahun 2020, ada 7 kategori tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 3.86.

Tabel 3. 86 Kategori tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Predikat	Interpretasi
1	AA	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran reformasi birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mempromosikan perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas pada tingkat instansi dan belum berjalan merata di seluruh unit kerja.
6	C	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Sumber data: Permenpan No 26 Tahun 2020

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan mempertimbangan indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan dapat mencapai Indeks Reformasi Birokrasi 69. Jika dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB pada bulan April 2022, target ini meningkat 0,11 poin. Pencapaian tujuan “terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani dapat dilihat pada tabel 3.87.

Tabel 3. 87 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7.1



Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 ditargetkan 69, terealisasi 69,78 dengan tingkat capaian 101,87% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 sebesar 69,78 diperoleh berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Desember 2022, Nomor:B/745/RB.06/2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022. Indeks Reformasi Birokrasi bernilai 69,78 termasuk kategori B (Cukup Baik). Predikat B menunjukkan penerapan Reformasi Birokrasi di Provinsi Sumatera Barat bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Rincian hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.88.

Tabel 3. 88 Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No	Komponen Penilaian	Bobot	2022
A	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20,00	13,54
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,88
3	Reform	30,00	17,43
Total Komponen Pengungkit		60,00	37,85
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,44
2	Kualitas Layanan Publik	10,00	9,10
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,07
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,32
Total Komponen Hasil		40,00	31,93
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	69,78

Sumber data: KemenPAN dan RB

Berdasarkan tabel 3.88 diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Penilaian Indeks RB Provinsi Sumatera Barat meliputi penilaian terhadap 2 komponen yaitu komponen pengungkit dan Komponen hasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi reformasi birokrasi pada komponen pengungkit, adalah teknik “*criteria referrenced test*” dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan evaluasi komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Keuangan. Kriteria evaluasi tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Laporan Reformasi Birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim evaluator.
3. Komponen pengungkit memperoleh nilai 37,85 yang bersumber dari nilai sub komponen pemenuhan, hasil antara area perubahan dan *reform*. Pada sub komponen pemenuhan yang dinilai adalah pemenuhan dari 8 area perubahan (manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik). Hasil antara merupakan penilaian dari kementerian dan lembaga lainnya yang mempengaruhi reformasi birokrasi. Penilaian hasil antara dapat dilihat pada tabel 3.89.

Tabel 3. 89 Rincian Hasil Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Merit System	0-400	332 (sangat baik)	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Profesionalitas ASN	0-100	50,22	Badan Kepegawaian Negara
3.	Implementasi SPBE	0-5	3,18	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	73,70	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,84	Kementerian PANRB
6.	Maturitas SPIP	0-5	3	BPKP
7.	Kapabilitas APIP	0-5	3	BPKP
8.	Kepatuhan terhadap standar layanan publik	0-100	82,60	Ombudsman RI
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	69,64	Arsip Nasional Republik Indonesia
10	Rekomendasi Hukum	0-100	54,35	Kementerian Hukum dan HAM

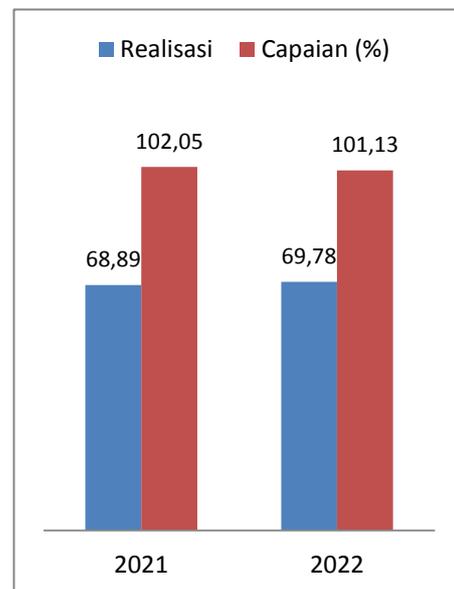
Sumber data: KemenPAN dan RB

4. Untuk komponen hasil diperoleh nilai 31,93 yang berasal dari penilaian 4 sub komponen hasil. Perolehan nilai komponen hasil berkontribusi 45,76% terhadap Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022.

Implementasi Reformasi Birokrasi pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan. Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Kota Padang menjadi satu satunya yang berpredikat BB (Baik), 7 Kabupaten/Kota berpredikat B (Cukup Baik), 10 Kabupaten/Kota berpredikat CC (Cukup) dan 1 Kabupaten berpredikat C (Buruk) yaitu Kabupaten Solok Selatan. Ada 4 Kabupaten/Kota yang naik menjadi CC di tahun 2022 yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Sijunjung dan 2 Kabupaten/Kota naik ke predikat B yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Perhitungan capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021-2022 dengan nilai >100% menunjukkan realisasi tercapai di atas target yang ditetapkan. Secara absolut, Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Barat mengalami peningkatan 0,89 poin di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) untuk indikator yang sama. Perbandingan capaian dan realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 96.

Grafik 96 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi 2021-2022

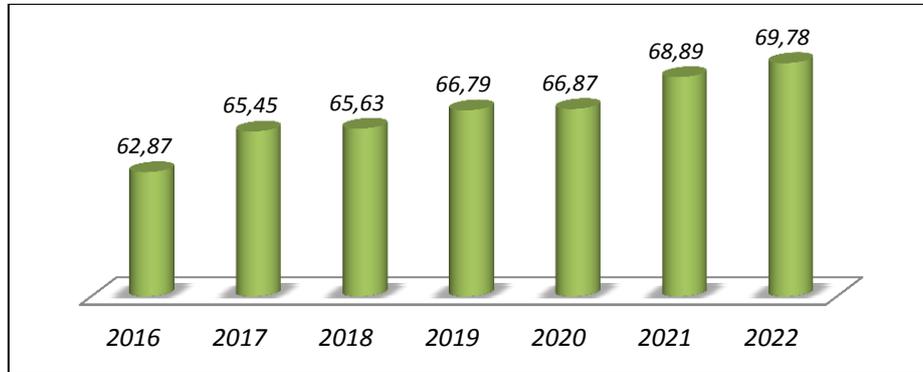


Sumber data: Data diolah

Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2016-2022 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi kenaikan 6,91 di tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan indeks reformasi Birokrasi per tahun dalam kurun waktu 7 tahun terakhir adalah 1,76. Pertumbuhan tertinggi yaitu

4,10% terjadi di tahun 2017. Gambaran perkembangan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 digambarkan pada grafik 97.

Grafik 97 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021



Sumber data: Kementerian PAN dan RB (2017-2021)

Kenaikan tingkat capaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya komitmen aparatur untuk mewujudkan pemerintah yg bersih dan akuntabel semakin meningkat. Upaya yang dilakukan di tahun 2022 untuk peningkatan penerapan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Adanya Road Map Reformasi Birokrasi periode ketiga tahun 2022-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 27 tahun 2022, Road Map Reformasi Birokrasi periode ini lebih implementatif dibandingkan dengan Road Map periode sebelumnya.
2. Peningkatan area pengungkit reformasi birokrasi melalui:
 - a. Peningkatan pemahaman aparatur tentang implementasi Reformasi Birokrasi.
 - b. Peningkatan pemahaman ASN tentang Budaya Kerja Aparatur BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dengan melakukan *Launching Core Value* ASN BerAKHLAK dengan *employer branding* “Bangga Melayani Bangsa”.
 - c. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara kontiniu.

- 
- d. Menata kelembagaan melalui penyederhanaan birokrasi.
 - e. Peningkatan implementasi SPBE dan penguatan Implementasi SAKIP.
 - f. Meningkatkan kualitas pengawasan dan mengupayakan layanan publik yang prima.
3. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tentang implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk tindak lanjut terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/6559/SJ tentang percepatan implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Kelemahan/kendala yang dihadapi dalam Penerapan Reformasi Birokrasi di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah pusat yang dinamis terkait implementasi Reformasi Birokrasi di daerah menyebabkan kinerja penerapan reformasi birokrasi menjadi terhambat.
- b. Budaya kerja ASN BerAKHLAK yang diharapkan dapat merubah *mindset* masih sulit diimplementasikan. Hal ini dikarenakan sikap ASN yang masih ingin dilayani bukan sebaliknya.
- c. Belum optimalnya penerapan manajemen kinerja, sehingga masih rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran.

Secara Nasional, berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB di tahun 2022, dari 34 Provinsi sebanyak 5 Provinsi memperoleh predikat A, 2 Provinsi berpredikat BB, 23 Provinsi berpredikat B dan 4 Provinsi berpredikat CC. Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam 23 Provinsi yang memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi berpredikat B. Adapun Provinsi yang memperoleh Predikat A yaitu: 1). Provinsi Jawa Barat, 2). Provinsi Jawa Tengah, 3). Provinsi DI. Yogyakarta, 4). Provinsi Jawa Timur dan 5) Kalimantan Barat. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali

memperoleh predikat BB. Sementara itu dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera tercatat 9 Provinsi Berpredikat B dan 1 Provinsi berpredikat CC.

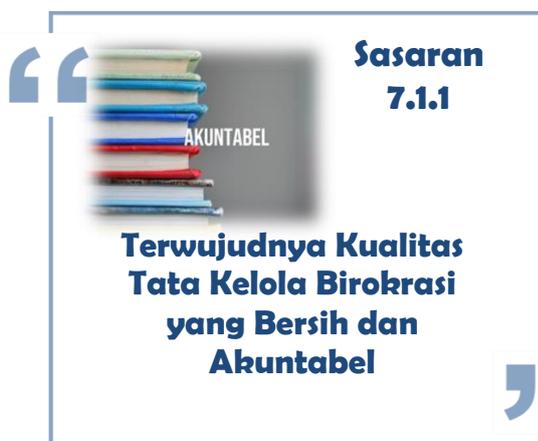
Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), Indeks reformasi birokrasi ditargetkan dapat tercapai 71,87 (predikat BB). Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 yang tercapai 69,78 menunjukkan pencapaian 97,09% dari target tahun terakhir RPJMD 2021-2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Untuk percepatan penerapan Reformasi Birokrasi selanjutnya akan dilakukan beberapa upaya berikut:

- a. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Reformasi tahun 2022.
- b. Implementasi Reformasi Birokrasi tematik sesuai dengan arahan Kementerian PAN dan RB.
- c. Peningkatan pemahaman kelompok kerja RB pemerintah daerah dan kelompok kerja Unit terkait implementasi Reformasi Birokrasi
- d. Percepatan implementasi reformasi birokrasi tingkat unit, dengan membangun rencana kerja atau rencana aksi implementasi road map RB
- e. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam peningkatan Reformasi Birokrasi.

Program dan kegiatan penunjang pencapaian tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani tersebar pada program kegiatan pendukung sasaran yang akan diuraikan selanjutnya.

Tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani dapat tercapai melalui pencapaian 3 sasaran yaitu 1) terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2) Meningkatnya kapasitas birokrasi dan 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran 7.1.1

Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Birokrasi yang bersih dan akuntabel menjadi salah satu kondisi yang harus diwujudkan agar Pemerintah memiliki tata kelola yang baik (*good governance*). Birokrasi yang bersih ditandai dengan adanya kejujuran, keadilan, kewajaran, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional. Yang diinginkan oleh *stakeholders*, pengelolaan birokrasi tidak hanya sekedar bersih dan akuntabel tetapi juga harus berkualitas.

Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan “terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel” sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Sasaran tersebut diukur menggunakan 4 indikator yaitu tingkat keberhasilan dalam penilaian SAKIP, Nilai EPPD, opini laporan keuangan serta sebesar apa kontribusi PAD dalam pendapatan daerah. Pencapaian sasaran “terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel diuraikan pada tabel 3.90.

Tabel 3. 90 Capaian Indikator Sasaran 7.1.1

Indikator				Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Evaluasi SAKIP				78	77,77	99,71
Nilai EPPD				3,0010	3,0155	100,48
Opini Laporan Keuangan				WTP	WTP	100
Kontribusi	PAD	terhadap	Pendapatan	37,84	46,50	122,89
Daerah						
Rata-rata Capaian						105,77

Rata-rata capaian 4 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih

dan akuntabel tercapai 105,77% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”. Evaluasi dan analisis masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi SAKIP



Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani, dapat diwujudkan jika Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan dengan benar. SAKIP merupakan pintu masuk untuk menuju birokrasi yang efektif dan efisien, karena hasil akhir dari penerapan SAKIP adalah efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Implementasi SAKIP pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dinilai berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun.

Merujuk pada PermenPAN No 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN dan RB pada Bulan April 2022, Nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai nilai 78 atau lebih tinggi 0,48 poin dibandingkan dengan tahun 2021.

Nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 ditargetkan 78, terealisasi 77,77 dengan capaian 99,71% termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”.

Nilai evaluasi SAKIP 77,77 diukur berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/815/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022. Nilai Evaluasi SAKIP yang tercapai 77,77 atau termasuk predikat BB (sangat baik) menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat baik pada 2/3 unit kerja baik pada unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.91.

Tabel 3. 91 Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2022

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,12
2	Pengukuran Kinerja	30	21,21
3	Pelaporan Kinerja	15	12,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,89
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,77
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Evaluasi SAKIP tahun 2022 mulai berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berbeda dengan evaluasi tahun sebelumnya yang menjadikan 5 komponen sebagai dasar penilaian, evaluasi di tahun 2022 mendasarkan pada 4 komponen penilaian sebagaimana diuraikan pada tabel 3.91.

Nilai evaluasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi oleh nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Semakin banyak Perangkat Daerah yang

memperoleh Nilai Evaluasi SAKIP A dan BB (Memuaskan dan Sangat Baik) akan berdampak pada Nilai Evaluasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah. Untuk Perangkat Daerah, evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 terhadap 51 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan 8 Perangkat Daerah bernilai “A”, 31 Perangkat Daerah bernilai BB dan 12 Perangkat Daerah bernilai B.

Terhadap Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi mempunyai peran melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota khususnya untuk Kabupaten/Kota yang masih bernilai CC. Nilai evaluasi SAKIP pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat juga mengalami kenaikan nilai walaupun secara predikat masing-masing Kabupaten/Kota sama dengan tahun sebelumnya. Dari 19 Kabupaten/Kota sebanyak 3 Kabupaten/Kota memperoleh nilai BB (15,79%), 15 Kabupaten/Kota memperoleh nilai B dan 1 Kabupaten/Kota masih bernilai CC yaitu Kabupaten Solok Selatan. Gambaran nilai evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat diuraikan pada tabel 3.92.

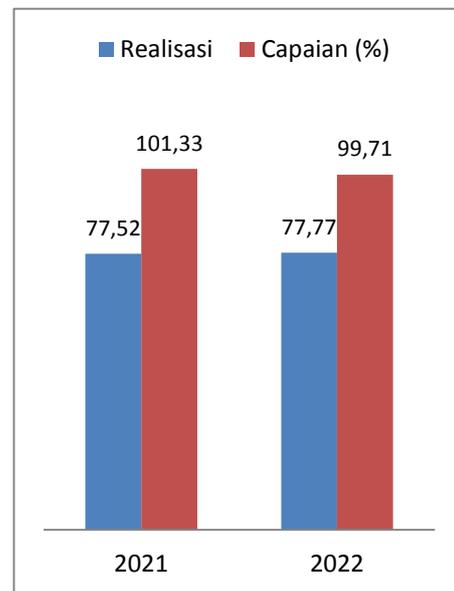
Tabel 3. 92 Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Predikat Nilai
1	Kota Payakumbuh	BB
2	Kota Padang	BB
3	Kota Bukittinggi	BB
4	Kota Padang Panjang	B
5	Kota Sawahlunto	B
6	Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
7	Kabupaten Dharmasraya	B
8	Kabupaten Solok	B
9	Kabupaten Pesisir Selatan	B
10	Kabupaten Tanah Datar	B
11	Kabupaten Agam	B
12	Kota Solok	B
13	Kabupaten Padang Pariaman	B
14	Kabupaten Pasaman	B
15	Kabupaten Sijunjung	B
16	Kabupaten Pasaman Barat	B
17	Kabupaten Solok Selatan	CC
18	Kabupaten Limapuluh Kota	B
19	Kota Pariaman	B

Sumber data: Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2022

Perhitungan capaian indikator Nilai evaluasi SAKIP menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 99,71% menunjukkan realisasi tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Berbeda dengan capaian tahun sebelumnya yang tercapai >100%, capaian tahun 2022 lebih rendah 1,62%. Secara absolut, Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2022 lebih tinggi 0,25 poin dibandingkan dengan tahun 2021. Perbandingan capaian dan realisasi indikator Nilai evaluasi SAKIP tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 98.

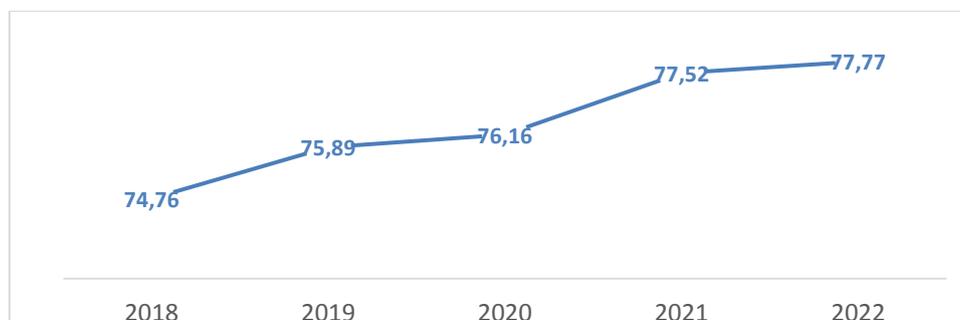
Grafik 98 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Walaupun secara Predikat, masih sama dengan 7 tahun sebelumnya yaitu predikat BB (Sangat Baik), tetapi secara absolut nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, perolehan nilai di tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebesar 3,01. Perkembangan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tergambar dari Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik 99.

Grafik 99 Perkembangan nilai evaluasi SAKIP tahun 2018-2022



Sumber data: Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB 2018-2022

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2022 untuk penguatan implementasi SAKIP antara lain:

1. Pernyataan bersama mewujudkan Sumbar Akuntabel
 - a. Komitmen selama ini menjadi salah satu pemicu dari kenaikan nilai SAKIP yg tidak signifikan. Tetapi, pada tanggal 5 Juli 2022 Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pencahangan “SUMBAR AKUNTABEL”, sebagai bentuk memacu kembali semangat dari semua Pimpinan Perangkat Daerah untuk bersama-sama berkinerja dan meningkatkan akuntabilitas kerjanya. Acara ini dihadiri oleh Bapak Erwan Agus deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan Kementerian PAN dan RB.
 - b. Komitmen peningkatan kinerja ditindaklanjuti dengan evaluasi kinerja pimpinan OPD oleh Kepala Daerah setiap Bulan, dan diikuti Laporan Kinerja pejabat administrator ke pimpinan OPD setiap Bulan.
 - c. Membangun komitmen mengefisiensi anggaran untuk tahun 2023. Untuk belaja tahun 2023, pemerintah sudah mengefisiensi anggaran sebanyak Rp.161.947.120.525,- melalui rasionalisasi anggaran. Hasil efisiensi diarahkan untuk: 1) Tambahan penghasilan pegawai yang tujuannya mengurangi belanja pegawai yg tidak jelas, sehingga aparatur lebih fokus untuk bekerja, 2) Untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan 3). Peningkatan produktifitas melalui sektor strategis yang dituangkan dalam program unggulan.
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja secara teknis dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menggunakan kerangka berfikir logis (*logical framework*) yang tergambar dalam diagram pohon kinerja agar tujuan, sasaran serta indikator kinerja berkualitas dan tepat. Pohon Kinerja tersebut dikembangkan sampai kondisi program/sub kegiatan.
 - b. Membangun keselarasan kinerja perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD dimana tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kepala

OPD juga sudah dirumuskan mengacu pada pohon kinerja Pemerintah Daerah

- c. Pembinaan SAKIP perangkat daerah melalui bimtek, sosialisasi, peningkatan kemampuan SDM pengelola SAKIP melalui pendampingan.
 - d. Secara konsisten melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap seluruh dokumen SAKIP perangkat daerah dan melakukan monitoring perkembangan kinerja perangkat daerah.
 - e. Pengembangan aplikasi *e-sakip* sesuai dengan kebutuhan akuntabilitas kinerja.
3. Pembinaan dan Pendampingan untuk penguatan SAKIP Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022 pendampingan khusus dilakukan untuk Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman.

Terlepas dari upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menemukan hambatan/kendala sebagai berikut dalam meningkatkan implementasi SAKIP:

- a. Masih belum meratanya komitmen dan pemahaman pimpinan Perangkat Daerah dalam mengawal penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- b. Masih belum optimalnya penerapan SAKIP ke level individu.
- c. Benturan kebijakan yang berdampak pada kurang optimalnya penerapan SAKIP.
- d. Masih belum meratanya pemahaman evaluator internal dalam melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Hasil evaluasi SAKIP terhadap 34 Provinsi se Indonesia menunjukkan 1 Provinsi berpredikat “AA”, 5 Provinsi Berpredikat “A”, 10 Provinsi berpredikat BB dan 18 Provinsi berpredikat “B”. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 Provinsi yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat BB. Predikat AA diperoleh oleh Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi dengan Predikat A yaitu: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi

dengan predikat BB yaitu: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kep. Babel, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi tengah, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), Nilai evaluasi SAKIP ditargetkan dapat tercapai 80,01 (predikat A). Nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 yang tercapai 77,77 menunjukkan pencapaian 97,20% dari target tahun terakhir RPJMD 2021-2026. Agar target tahun 2026 dapat dicapai, perlu peningkatan nilai 2,24 atau rata-rata peningkatan pertahun 0,56. Upaya yang maksimal akan dilakukan untuk merealisasikan target 80,01 di tahun 2026.

Untuk perbaikan dan peningkatan nilai evaluasi SAKIP, kedepannya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB
2. Mendorong Kepala Perangkat Daerah untuk mengawal pelaksanaan SAKIP dan secara berkala melaksanakan evaluasi internal pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
3. Pendampingan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap dokumen SAKIP yang disusun oleh Perangkat Daerah.
4. Memaksimalkan penggunaan aplikasi *esakip* dalam memantau kinerja Perangkat Daerah.
5. Secara konsisten meningkatkan pemahaman ASN terkait implementasi SAKIP yang baik.

2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)



Nilai EPPD



Target

Realisasi

Capaian

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab 1, Pasal 1(4) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam peraturan yang sama pada BAB V pasal 24 (1) dijelaskan EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. EPPD akan menilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud

sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan.

EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD. Strategi penilaian EPPD, dilakukan untuk (1) EPPD Provinsi dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) EPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi berdasarkan penugasan dari Gubernur. Nilai EPPD Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penetapan target nilai EPPD di tahun 2022 sebesar 3,0010 berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026.

Nilai EPPD tahun 2022 ditargetkan 3,0010, terealisasi 3,0155 dengan tingkat capaian 100,48 termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Realisasi indikator nilai EPPD diukur berdasarkan hasil EPPD tahun 2018 yang dirilis tahun 2019. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2020 sampai dengan Laporan ini disusun, Kementerian Dalam Negeri belum merilis hasil penilaian terhadap LPPD tahun 2019, 2020, dan 2021. Walaupun seharusnya berdasarkan aturan yang dijelaskan sebelumnya, LPPD dinilai setiap tahun.

Dikarenakan data yang digunakan adalah data nilai EPPD tahun 2019, maka data ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitupun dengan nilai EPPD secara Nasional.

Walaupun Kementerian terkait belum merilis informasi terkait nilai EPPD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap menjalankan kewajiban untuk menyusun LPPD. Upaya yang dilakukan di tahun 2022 untuk meningkatkan kualitas LPPD yang akan berdampak pada nilai EPPD Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Sumatera Barat

2. Langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh setiap OPD
3. Melakukan *self assesment* terhadap dokumen LPPD Sumatera Barat
4. Seluruh OPD telah mengakomodasi IKK LPPD ke dalam dokumen perencanaan
5. Komitmen kepala OPD dalam peningkatan nilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing OPD
6. Mengawal pencapaian Indikator Kinerja Kunci dengan memastikan dukungan anggaran terhadap pencapaiannya.
7. Memberikan pendampingan agar Perangkat Daerah terkait memahami IKK yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain upaya di atas, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan nilai EPPD adalah:

1. Masih adanya keterlambatan penyampaian data atau dokumen dari OPD.
2. Masih adanya dokumen/ bukti pendukung IKK LPPD dari sebagian OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum tersedia.
3. Ada beberapa IKK yang telah dianggarkan namun terkena dampak di rasionalisasi anggaran.
4. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap IKK LPPD yang disebabkan belum optimalnya regenerasi pegawai (SDM).

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), Nilai EPPD ditargetkan dapat tercapai 3,0050. Nilai EPPD berdasarkan data terakhir rilis 3,0010 menunjukkan pencapaian 99,87% dari target tahun terakhir RPJMD 2021-2026. Agar target tahun 2026 dapat dicapai, perlu peningkatan nilai 0,004 atau rata-rata peningkatan pertahun 0,001. Upaya yang maksimal akan dilakukan untuk merealisasikan target 3,0050 di Tahun 2026.

Untuk merealisasikan target yang ditetapkan di tahun yang akan datang, Pemerintah Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Secara konsisten berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mengawal ketersediaan anggaran pendukung pencapaian IKK dan mempercepat pengumpulan data pendukung yang valid dan berkualitas
 2. Secara konsisten memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam memahami IKK yang harus dicapai.
3. *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan*



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur kedudukan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bentuk pemeriksaan yang dilakukan meliputi *pertama* Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. *Kedua* Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dan *ketiga* Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan, BPK memberikan Opini. Pemberian opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan lingkup Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Opini BPK diberikan secara bertingkat yang dikenal dengan istilah opini WTP, WDP, Opini Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat. Maksud dari masing-masing tingkatan tersebut sebagai berikut:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, Pemerintah Sumatera Barat menargetkan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD tahun 2021. Hal ini dikarenakan Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Capaian opini WTP bagi Pemerintah Daerah sebagai bukti perwujudan keberhasilan atas tata kelola keuangan yang baik. Capaian opini WTP merupakan salah satu kriteria yang menunjukkan kinerja keuangan sebagai penentu kelayakan daerah dalam menerima dana insentif daerah.

Opini Laporan Keuangan tahun 2022 ditargetkan WTP, terealisasi WTP dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”.

Realisasi indikator ini didasarkan kepada surat Badan Pemeriksa keuangan perwakilan Provinsi Sumatera barat, nomor 81/S-HP/XVIII.PDG/05/2022, perihal “Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang menginformasikan bahwa Provinsi Sumatera Barat berhasil mempertahankan opini WTP. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memperoleh Opini WTP dari tahun 2013. Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh opini tersebut 10 tahun berturut-turut.

Terhadap LKPD Kabupaten/Kota tahun 2021, BPK memberikan Opini WTP kepada 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sementara 1 Kabupaten lagi memperoleh Opini WDP. Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perolehan opini Kabupaten/Kota tahun 2020 dan 2021, dan 2022 ini mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan untuk LKPD 2019, semua Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Perhitungan capaian indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dikarenakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil mempertahankan Opini WTP maka capaian indikator kinerja ini tahun 2021-2022 sama-sama tercapai 100%. Opini WTP di tahun 2022 merupakan opini WTP ke 10 tahun yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Perolehan Opini WTP tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah dan semua OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap LKPD tahun 2021. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Menjaga validnya data/angka dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu angka realisasi pendapatan, angka realisasi belanja dan angka realisasi pembiayaan melalui
 - a. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah setiap bulannya antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (selaku Bendahara Umum Daerah) dengan Badan Pendapatan Daerah.
 - b. Rekonsiliasi atas pemungutan perhitungan pihak ketiga pada belanja pegawai dengan BPJS Kesehatan dan PT Taspen.
 - c. Rekonsiliasi Posisi Kas Daerah dengan Bank Pemegang Kas Daerah PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari).
 - d. Rekonsiliasi Dana Perimbangan DAK Non Fisik dengan Kementerian Keuangan RI.
 - e. Rekonsiliasi Pendapatan Pajak setiap bulanNya antara bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan 51 OPD, (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran).
 - f. Melakukan asistensi dan fasilitasi kepada OPD terkait penyusunan Laporan Keuangan.
2. Menjaga validnya data/angka dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang meyangkut angka aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan hutang yang dilakukan melalui upaya sebagai berikut
 - a. Rekonsiliasi data antara Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan BMD pada BPKAD dengan OPD (untuk aset tetap).
 - b. Rekonsiliasi data Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dengan OPD dan Biro Perekonomian.
 - c. Membantu OPD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis kepada bendahara, PPK, dan sekretaris seluruh OPD
3. Melaksanakan *update* aplikasi SIPD sebagai aplikasi utama dan sistem informasi keuangan pemerintah daerah (SIPKD) sebagai aplikasi pendukung

untuk memudahkan OPD menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca, serta melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh operator aplikasi pada masing-masing OPD

4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara berkala dengan bekerjasama dengan Inspektorat Daerah untuk mengawasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh OPD yaitu PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun oleh OPD dan pemerintah daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah melalui review yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah baik semesteran, laporan keuangan OPD maupun laporan keuangan pemerintah daerah
5. Menyusun rencana aksi penyelesaian masalah aset yang dilaksanakan di bawah koordinasi BPKAD untuk meyelesaikan permasalahan aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan para stakeholder terkait
6. Melakukan pendampingan secara terus menerus melalui grup whatsapp untuk masalah-masaalah terkait penggunaan aplikasi baik SIPD maupun SIPKD dimana permasalahan yang dialami oleh OPD akan segera diupayakan penyelesaian dan tindak lanjut.

Faktor penghambat dalam mempertahankan opini BPK

1. Peraturan perundang-undangan, sistem dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh OPD
2. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah
3. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan belum disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman implementasinya.

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), opini laporan keuangan ditargetkan tetap dapat mempertahankan opini WTP. Dikarenakan opini WTP merupakan opini tertinggi terhadap Laporan Keuangan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap berupaya mempertahankan opini tersebut.

Oleh karena itu, upaya yang akan dilakukan di masa yang akan datang adalah:

1. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
2. Melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
3. Memperkuat dukungan aplikasi terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan kesalahan pada setiap tahapan dapat diminimalkan.
4. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal.
5. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam surat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP dapat dipertahankan untuk masa mendatang.
6. Melakukan pendampingan secara terus menerus kepada OPD terkait masalah yang ditemui dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah, mengingat aplikasi belum sepenuhnya optimal untuk dilaksanakan sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait hal tersebut.

4. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada bab 1 dijelaskan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam peraturan dan Bab yg sama juga dijelaskan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pengertian dari masing-masing perolehan PAD dijelaskan dalam undang-undang tersebut sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut *Retribusi* adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan

Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya;

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Keempatnya akan bersinergi sehingga akan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian di sebuah daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga memiliki pengaruhnya tersendiri baik bagi pengeluaran pemerintah maupun penduduk.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah merupakan ratio perbandingan pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Untuk tahun 2022, target Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah 37,84 %. Target tahun 2022 tercatat lebih rendah 0,21% dibandingkan kondisi tahun sebelumnya untuk indikator yang sama.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan 37,84%, terealisasi 46,50% dengan tingkat capaian 122,88% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

<i>Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah</i>	=	$\frac{\text{Rp.2.848.908.837.833,11}}{\text{Rp 6.126.945.092.288,11}}$	x100%	46,50%
--	---	---	-------	---------------

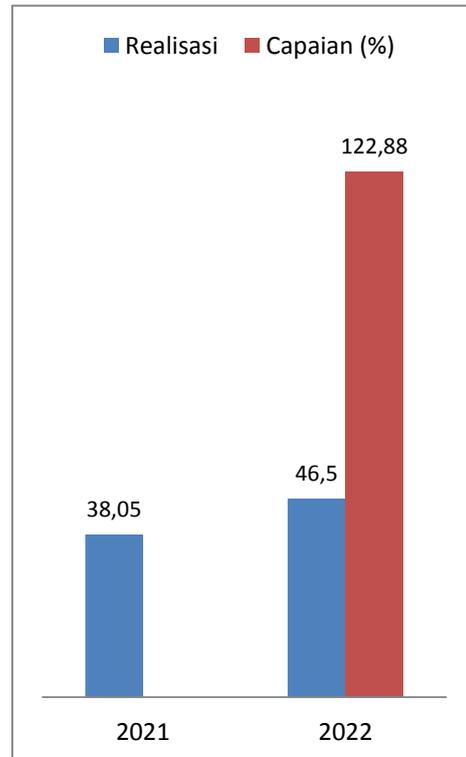
Keterangan:

Pendapatan Asli Daerah: Rp. 2.848.908.837.833,11

Pendapatan: Rp 6.126.945.092.288,11

Perhitungan capaian indikator kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator kinerja kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tercapai melebihi target yang ditetapkan (122,88%). Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah mulai tahun 2022. Akan tetapi, berdasarkan data yang tersedia dapat diketahui bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan di tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi yaitu 8,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan capaian dan realisasi indikator kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2021-2022 disajikan pada grafik 100.

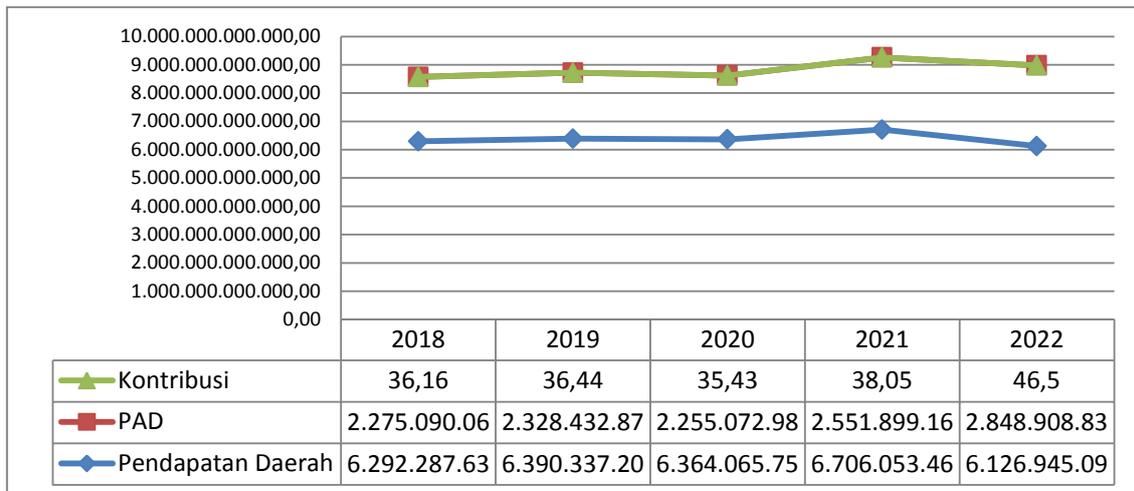
Grafik 100 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Tahun 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dari tahun 2018-2022 menunjukkan kondisi yang berfluktuatif yang rata-rata menunjukkan kenaikan kecuali di tahun 2019 yang menunjukkan penurunan. Pertumbuhan sebesar 22,21 di tahun 2022 merupakan pertumbuhan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sementara itu, peningkatan PAD tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 13,16%. Perkembangan kontribusi PAD tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik 101.

Grafik 101 Perkembangan Kontribusi PAD tahun 2018-2022



Sumber data: *Bapenda Sumbar*

Peningkatan kontribusi PAD tersebut, tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang telah dilakukan di tahun 2022 antara lain:

1. Adanya kebijakan pajak seperti Peraturan Gubernur tentang pemutihan Pajak, Pergub 5 untung dan Sosialisasi Pajak.
2. Adanya inovasi pelayanan pajak yang lebih efektif dan efisien melalui aplikasi.
3. Penyediaan sarana prasana untuk pelayanan publik.

Di samping upaya yang dilakukan, dalam meningkatkan kontribusi PAD juga ditemukan berbagai hambatan/kendala antara lain:

- a. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah.
- b. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.
- c. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.
- d. Kualitas SDM aparatur yang belum mendukung
- e. Rendahnya inovasi birokrat untuk meningkatkan PAD.
- f. Pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya.

- 
- g. Masih adanya anggapan bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan.
 - h. Belum efektifnya pengawasan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Termasuk pengawasan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2026 ditargetkan akan tercapai 41%. Jika mempertimbangkan kenaikan kontribusi PAD yang berfluktuatif dalam rentang -1,01 sampai 8,45% target tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Upaya untuk mengoptimalkan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa yang akan datang adalah:

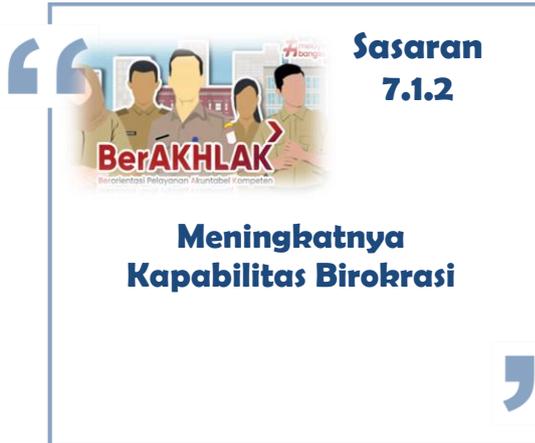
1. Menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru.
2. Menyempurnakan perda yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta membuat perda baru untuk menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru.
3. Menyediakan pelayanan yang ditempatkan di Mall dan dibuka pada hari libur.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 12 Program dengan 35 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp 4.318.935.519.715-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 7.1.1. dapat dilihat pada tabel 3.93.

Tabel 3. 93 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	35	4.318.935.519.715	4.112.350.381.050
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1.230.603.146.189	1.212.548.319.203
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1.692.880.050	1.611.959.641
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	8.553.898.286	7.640.691.545
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2	4.623.043.609	4.481.294.436
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2	1.173.377.372	1.154.951.929
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	1.836.496.583	1.831.300.118
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	4.049.235.444	3.999.295.647
8	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3	2.123.976.265	2.091.906.279
9	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	2	2.203.583.000	2.178.550.060
10	Program Penataan Organisasi	2	2.860.439.918	2.803.467.976
11	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	2.957.072.758	2.923.078.759
12	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	8	3.057.258.370.241	2.869.085.565.457

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 4.318.935.519.715,- terealisasi sebesar Rp 4.112.350.381.050,- atau 95,19%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 207.585.138.665,- (4,81%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel (105,77%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (95,19%) dengan tingkat efisiensi 10,58%.



Birokrasi yang bersih ditandai dengan adanya kejujuran, keadilan, kewajaran, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* dengan memperhatikan pemanfaatan sumber

daya yang ada secara efisien dan profesional.

Kapabel menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mampu, cakap, pandai, dan sanggup. Birokrasi yang kapabel adalah birokrasi yang memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan cakap dalam melaksanakan tugas. Meningkatkan kapabilitas birokrasi menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dan Indeks SPBE. Pencapaian sasaran “Meningkatnya kapabilitas Birokrasi” diuraikan pada tabel 3.94.

Tabel 3. 94 Capaian Indikator Sasaran 7.1.2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks SPBE	3,2	3,18	99,38
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	74	49,31	69,45
Rata-rata Capaian			84,42

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja yang mengukur sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi 84,42% termasuk kategori keberhasilan “baik”. Penjelasan masing-masing indikator kinerja pengukur sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks SPBE



Untuk mendukung birokrasi efektif dan efisien juga diperlukan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur. Hal ini dapat terwujud dengan menerapkan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Penerapan SPBE merupakan salah satu pengungkit keberhasilan penerapan reformasi birokrasi, yang termasuk dalam area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah dalam menerapkan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Indeks SPBE. Indeks SPBE juga dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja utama Pemerintah daerah dalam mewujudkan keberhasilan dan kapabilitas birokrasi.

Untuk tahun 2022, Indeks *e-government*/SPBE dalam RPJMD 2021-2026 ditargetkan 3,20 (skala indeks 0-5) dengan predikat baik (2,6-<3,5). Target tahun 2022 ditetapkan meningkat 0,51 dibandingkan Indeks SPBE tahun 2021.

Indeks SPBE tahun 2022 ditargetkan 3,20, terealisasi 3,18 dengan tingkat capaian 99,38% termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”.

Realisasi indeks SPBE yang tercapai 3,18 diukur berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang diikuti Laporan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hasil pemantauan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Januari 2023.

Indeks SPBE 3,18 termasuk dalam predikat SPBE “Baik” dengan rincian penilaian disajikan pada tabel 3.95

Tabel 3. 95 Rincian Penilaian Indeks SPBE

No	Nama Indeks	Nilai
	SPBE	3,18
1	Domain Kebijakan SPBE	2,80
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,80
2	Domain Tata Kelola SPBE	3,00
	Perencanaan Strategis SPBE	2,25
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,50
3	Penyelenggara SPBE	3,50
	Domain Manajemen SPBE	1,82
	Penerapan Manajemen SPBE	2,13
4	Audit TIK	1,00
	Domain Layanan SPBE	3,87
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90
	Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	3,83

Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2022.

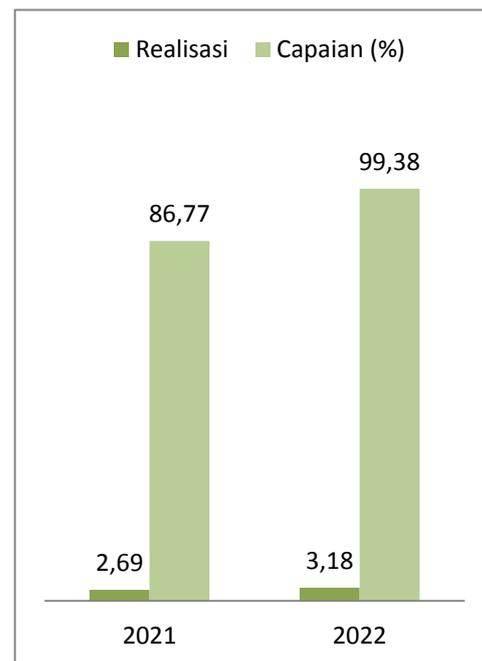
Untuk Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, 11 Kabupaten/Kota memperoleh predikat SPBE Baik, sementara 7 Kab/kota dengan predikat cukup. Rincian indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.96.

Tabel 3. 96 Rincian Indeks SPBE Kabupaten/Kota tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS RB	
1	Kab Agam	2,38	Cukup
2	Kab Pasaman	1,91	Cukup
3	Kab Limapuluh Kota	3,29	Baik
4	Kab Solok	3,12	Baik
5	Kab.Padang Pariaman	2,60	Baik
6	Kab pesisir Selatan	3,48	Baik
7	Pemerintah Kab Tanah Datar	3,21	Baik
8	Pemerintah Kab.sijunjung	2,18	Cukup
9	Ka. Solok selatan	2,26	Cukup
10	Kab Dharmasraya	2,41	Cukup
11	Kab Pasaman Barat	2,36	cukup
12	Kota Bukittinggi	2,46	Cukup
13	Kota Padang Panjang	2,81	Baik
14	Kota Sawahlunto	2,84	Baik
15	Kota Solok	2,71	Baik
17	Kota Padang	3,01	Baik
18	Kota payakumbuh	3,02	Baik
19	Kota Pariaman	2,64	Baik

Capaian indikator indeks SPBE diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian sebesar 99,38% menunjukkan realisasi tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian indikator ini di tahun 2022 lebih tinggi 12,61%. Sejalan dengan kenaikan capaian, realisasi indeks SPBE tahun 2022 lebih tinggi 0,49 dari indeks SPBE tahun sebelumnya (tahun 2021). Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks SPBE tahun 2021-2022 digambarkan pada grafik 102.

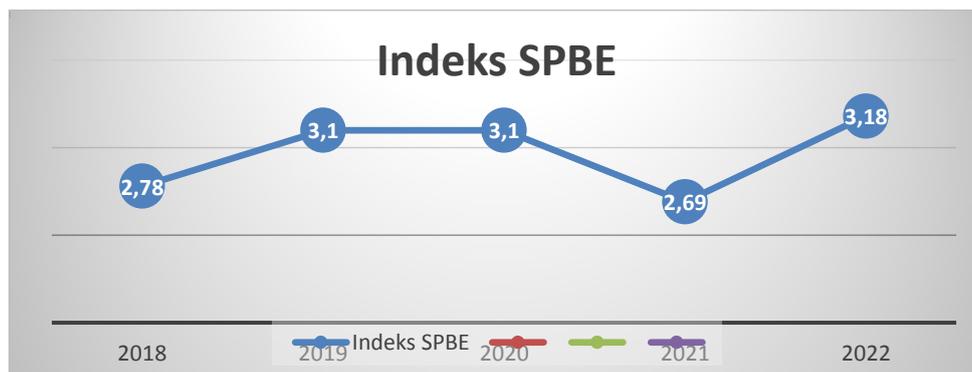
Grafik 102 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks SPBE Tahun 2021-2022



Sumber data: Data diolah

Indeks SPBE Sumatera Barat dari tahun 2018-2022 menunjukkan kondisi yang berfluktuatif, meningkat di tahun 2019 dan 2022 dan menurun di tahun 2021. Penurunan indeks SPBE dipengaruhi oleh adanya perubahan metode penilaian dimana tahun 2021 sesuai Peraturan MenPAN RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdapat penambahan domain dan indikator baru yang diukur atau dievaluasi sebanyak 1 domain baru dari yang semula 3 domain bertambah menjadi 4 domain serta 12 indikator baru yang semula hanya 35 indikator bertambah menjadi 47 indikator. Penambahan jumlah domain dan indikator baru di atas berpotensi terjadinya stagnasi (tetap atau bertahan) pada indeks SPBE yang sudah dicapai pada tahun 2020 yaitu 3,1 atau bahkan terdepresiasi (berkurang dari capaian sebelumnya). Jika dibandingkan dengan indeks SPBE tahun 2018 yang tercapai 2,78, indeks SPBE tahun 2022 menunjukkan peningkatan 0,4. Peningkatan 0,49 di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, menjadi peningkatan tertinggi dalam periode 2018-2022. Indeks SPBE tahun 2022 ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mampu mengatasi penambahan domain penilaian SPBE. Perkembangan indeks SPBE Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 103.

Grafik 103 Indeks SPBE Sumatera Barat tahun 2018-2022



Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2018-2022

Dalam meningkatkan penerapan SPBE, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah mengupayakan untuk:

1. Melakukan perbaikan pada aspek domain manajemen SPBE yang masih memiliki nilai kurang.

2. Melakukan optimalisasi pada aspek Penerapan Manajemen SPBE dengan membangun Portal Satu Data Sumatera Barat, menerbitkan Pergub Satu Data Sumatera Barat, dan membangun Sistem Informasi untuk Manajemen Aset TIK.
3. Membuat sistem penghubung layanan instansi pemerintahan.
4. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dalam rangka meningkatkan nilai indeks SPBE dari aspek Audit TIK.
5. Koordinasi dengan OPD untuk membuat regulasi terkait dengan kebijakan layanan SPBE.
6. Pembentukan tim koordinasi SPBE Provinsi Sumatera Barat dan penguatan lembaga teknis penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pelaksanaan kegiatan dan penerapan atau implementasinya.
7. Implementasi Rencana Induk (*Master Plan*) SPBE yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta revisi perubahannya.

Hambatan dalam menerapkan SPBE antara lain:

1. Belum adanya sistem penghubung layanan instansi pemerintah.
2. Masih kurangnya pemahaman OPD dan pengelola manajemen SPBE tentang Domain dan Indikator pada evaluasi SPBE, sehingga kesulitan dalam mengumpulkan bukti dukung untuk evaluasi.
3. Kurangnya SDM yang bersertifikasi dalam pengelolaan SPBE seperti untuk audit TIK.
4. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan pengelola *E-Government* (SPBE) dalam hal pengaturan dalam bentuk kebijakan, aturan, dan regulasi, serta kurangnya perencanaan strategis jangka panjang.
5. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Beberapa aplikasi belum terintegrasi.

Rata-rata indeks SPBE 26 Provinsi yang dinilai di tahun 2022 adalah 2,67. Jika dibandingkan dengan rata-rata indeks SPBE tersebut, Indeks SPBE Sumatera Barat tercatat lebih tinggi 0,51. Dari 26 Provinsi yang dinilai, Provinsi DKI Jakarta memperoleh indeks SPBE dengan predikat sangat baik (3,67), 11 Provinsi termasuk Provinsi Sumatera Barat dengan predikat Baik dan 14 Provinsi dengan predikat Cukup.

RPJMD periode 2021-2026 menargetkan indeks SPBE pada tahun 2026 nilainya 3,60. Realisasi tahun 2022 yang tercapai 3,18 menunjukkan capaian 88,33% dari target tahun 2026. Untuk mencapai target 3,6 dibutuhkan peningkatan indeks SPBE 0,42 dari realisasi tahun 2022. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis target 3,60 dapat tercapai di tahun 2026.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerapan SPBE di masa yang akan datang:

1. Memaksimalkan aspek Audit TIK.
2. Melakukan ISO 27001 untuk menghasilkan Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada ruang server dan perangkat infrastruktur lainnya.
3. Membuat regulasi untuk pelaksanaan audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi SPBE Daerah bersama Tim Koordinasi SPBE yang sudah dibentuk.
5. Meningkatkan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas *bandwith*.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM tenaga ahli IT/pengelola/ penyelenggara *e-government* termasuk dalam hal sertifikasi Audit TIK.
8. Meningkatkan jumlah aplikasi yang terintegrasi.
9. Menyusun arsitektur SPBE
10. Membuat regulasi terkait SPBE

2. Indeks Profesionalitas ASN



Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan agar Aparatur Sipil Negara profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Profesional dapat didefinisikan sebagai kualitas, sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki suatu profesi untuk dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. Tingkat Profesionalitas ASN dapat diukur melalui Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dilakukan dengan mempedomani Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan indikator kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 ditargetkan 74. Penetapan target tahun 2022 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026. Target ini ditetapkan lebih tinggi 24,69 dibandingkan dengan IP ASN tahun 2021.

IP ASN tahun 2022 ditargetkan 74, terealisasi 49,31 dengan tingkat capaian 66,64% termasuk kategori keberhasilan “cukup”.

Realisasi IP ASN 49,31 merupakan realisasi IP ASN tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara per 5 Januari 2022 (kondisi pegawai yang dinilai 17.459 orang). Penggunaan realisasi tahun 2021 dikarenakan sampai laporan ini disusun, Badan Kepegawaian Nasional masih belum merilis IP ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia. Rincian perhitungan IP ASN dapat dilihat pada tabel 3.97.

Tabel 3. 97 Perhitungan IP ASN tahun 2021

No	Indikator Pengukuran	Data yang digunakan	Bobot (%)	Nilai
1	Kualifikasi	Data pendidikan formal terakhir	25	14,18
2	Kompetensi	Riwayat pengembangan kompetensi	40	11,25
3	Kinerja	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP)	30	18,89
4	Kedisiplinan	Data/informasi hukuman disiplin	5	5
TOTAL			100	49,31

Berdasarkan kategori nilai, IP ASN Provinsi Sumatera Barat sebesar 49,31 berada pada kategori sangat rendah (<60). Indeks Profesionalitas ASN 49,31 menunjukkan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori tidak profesional.

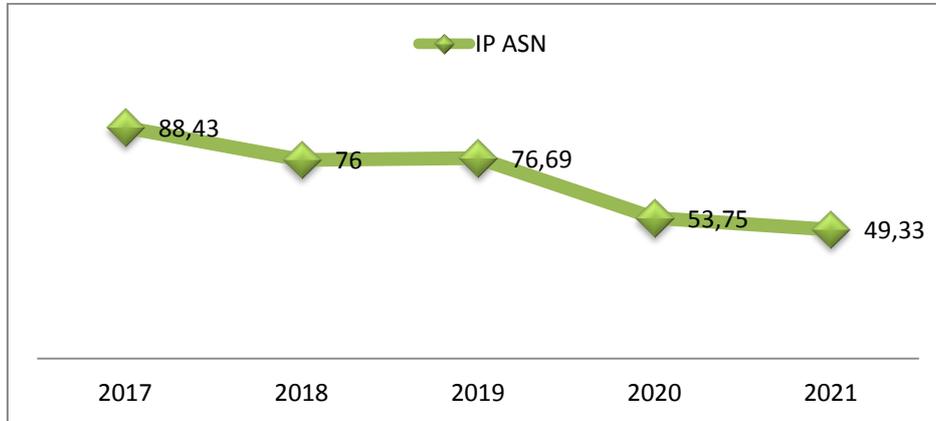
Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
≤60	Sangat Rendah

Capaian indikator kinerja IP ASN Provinsi Sumatera Barat sebesar 66,64% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*. Dengan capaian sebesar 69,45% berarti realisasi IP ASN tahun 2021 masih jauh di bawah target yang direncanakan. Realisasi IP ASN tahun 2021-2022 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan data yang digunakan masih data realisasi yang sama.

IP ASN Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021) terus mengalami penurunan. Secara teknis, hal ini disebabkan antara lain oleh adanya perubahan metode penilaian untuk mengukur IP ASN dan jumlah ASN yang dijadikan sampel penilaian IP ASN tersebut. Sejak tahun 2020, penilaian IP ASN sudah dilakukan untuk semua ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya IP ASN ini menjadi tanda bahwa pengelolaan ASN selama ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Perkembangan IP ASN Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 disajikan pada grafik 104.

Grafik 104 IP ASN Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021



Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN 2017-2021

Indeks Profesional ASN tidak ditentukan oleh banyaknya ASN yang berpartisipasi dalam pengukuran, tetapi ditentukan oleh kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin individu ASN itu sendiri. Untuk mewujudkan ASN yang profesional, ada beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan IP ASN sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 2020-2024 dengan memperhatikan penghitungan dalam bentuk analisis jabatan.
2. Tersedianya inventarisasi data kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN untuk melakukan pengukuran profesionalitas ASN.
3. Untuk mewujudkan pegawai berbasis kompetensi, sudah ada standar kompetensi jabatan eselon 2 pejabat Administrator dan pejabat pengawas.
4. Kinerja Aparatur sudah menjadi dasar pembayaran TPP
5. Kinerja Badan Kepegawaian Daerah selaku pengelola ASN mendapat pengakuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) hal ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan BKN Award atas penggunaan CAT untuk seleksi penerimaan pegawai.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN antara lain:

1. Masih rendahnya kepedulian ASN dalam meningkatkan kompetensi dengan mengikuti Diklat berbasis peningkatan kompetensi .
2. Rendahnya kesadaran ASN mengupdate data kompetensi kepegawaian yang diikutinya yang berdampak belum maksimalnya pendataan ASN yang telah mengikuti bimtek/pelatihan.
3. Adanya perubahan kebijakan terkait pemberian tugas belajar ASN yaitu SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS merupakan pedoman pemberian tugas belajar bagi daerah.
4. Belum tercapainya hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN terutama pada indikator kualifikasi dan kompetensi (sudah mengikuti Diklat PIM)

Dikarenakan belum ada publikasi dari Badan Kepegawaian Nasional terkait IP ASN, maka IP ASN Sumatera Barat belum dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatera.

IP ASN pada tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026 ditargetkan tercapai 82. Untuk mencapai target tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan upaya yang maksimal dikarenakan pencapaian sampai tahun 2021 baru 60,13% dari target 2026.

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

1. Mengusulkan penyempurnaan instrumen pengukuran IP ASN dengan BKN
2. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pendataan ASN yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan.
4. Menyusun jenis-jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan OPD dan sesuai dokumen Analisis Jabatan yang disusun.

5. Mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan baru dan pelaksanaan pelatihan secara *e-learning* sebagai inovasi di bidang pendidikan dan pelatihan.
6. Mengoptimalkan penggunaan absensi online dan perhitungan kinerja ASN menggunakan aplikasi e-kinerja.
7. Mendorong seluruh OPD agar merencanakan dan menganggarkan kebutuhan diklat dan mewajibkan masing-masing ASN mengikuti Diklat/Bimtek minimal 20 JPL per tahun.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 11 Program dengan 26 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp **59.784.710.037,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 7.1.2. dapat dilihat pada tabel 3.98.

Tabel 3. 98 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	26	59.784.710.037	57.610.770.930
1	Program Kepegawaian Daerah	3	15.949.026.156	15.670.022.226
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	5.268.259.991	5.097.807.439
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	13.212.081.038	12.503.780.535
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2	12.949.577.192	12.685.913.454
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	686.800.027	679.727.205
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2	691.880.000	676.430.615
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2	2.044.495.332	1.561.174.010
8	Program Perekonomian dan Pembangunan	3	2.102.020.404	2.043.016.789
9	Program Pengelolaan Arsip	3	497.036.778	491.402.205
10	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	3	58.194.000	56.744.959

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
11	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	6.325.339.119	6.144.751.493

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **59.784.710.037,-** terealisasi sebesar Rp **57.610.770.930,-** atau 96,36%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 2.173.939.107,- (3,64%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran tidak terjadi efesiensi dikarenakan capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi (84,42%) lebih rendah 11,94% dari realisasi anggaran (96,36%).



Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bab I pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, **meningkatnya kualitas pelayanan publik** ditetapkan sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintah Dengan Aparatur Yang Melayani”. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan”. Indeks persepsi kualitas layanan publik menunjukkan sejauh mana persepsi masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan yang diukur dengan melihat rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik yang melaksanakan survei pada tahun n.

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik langsung, disebut Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jumlah unit Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat ada 75 unit UKPP yang berada dalam naungan 25 Organisasi Perangkat Daerah.

Indeks persepsi kualitas pelayanan publik pada tahun 2022 ditargetkan tercapai 85. Penetapan target indikator indeks persepsi kualitas pelayanan publik berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik disajikan pada tabel 3.99.

Tabel 3. 99 Capaian Indikator Sasaran 7.1.3



Indeks persepsi kualitas pelayanan publik target 85, terealisasi 90,02 dengan capaian 105,91% termasuk kategori keberhasilan “memuaskan”.

Realisasi indeks persepsi kualitas pelayanan publik yang tercapai 90,02 diukur berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik yang dikumpulkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2022, jumlah penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebanyak 13 unit penyelenggara pelayanan publik. Unit

Penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.100.

Tabel 3. 100 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah

NO	NAMA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	SKOR	PREDIKAT
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94,17	Sangat Baik
2	Badan Kepegawaian Daerah	90,22	Sangat baik
3	Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	90,47	Sangat baik
4	RSUD. Dr. Mohammad Natsir Solok	92,57	Sangat baik
5	RSUD Pariaman	88,58	Sangat baik
6	Rsud Achmad Muchtar Bukittinggi	93,49	Sangat baik
7	UPTD Balai Kesehatan Indra Mata	90,06	Sangat baik
8	Rumah Sakit Paru Lubuk Alung	93,64	Sangat baik
9	RSJ. Prof.Dr. HB. Sa'anin Padang	91,98	Sangat baik
10	Dinas Parawisata	89,67	Sangat baik
11	Dinas Koperasi dan UKM	91,40	Sangat baik
12	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	82,14	Baik
13	Samsat Padang	87,22	Baik
14	Samsat Payakumbuh	93,56	Sangat Baik
15	Samsat Painan	85,62	Baik
16	Samsat Bukittinggi	85,55	Baik
Rata- rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat(Indeks persepsi kualitas layanan publik)		90,02	SANGAT BAIK

Sumber data: Biro Organisasi Setda Prov Sumbar

Berdasarkan rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat tersebut, predikat pelayanan publik tergolong “Sangat Baik”. Predikat survei kepuasan masyarakat sesuai Permenpan dan RB nomor 14 tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.101.

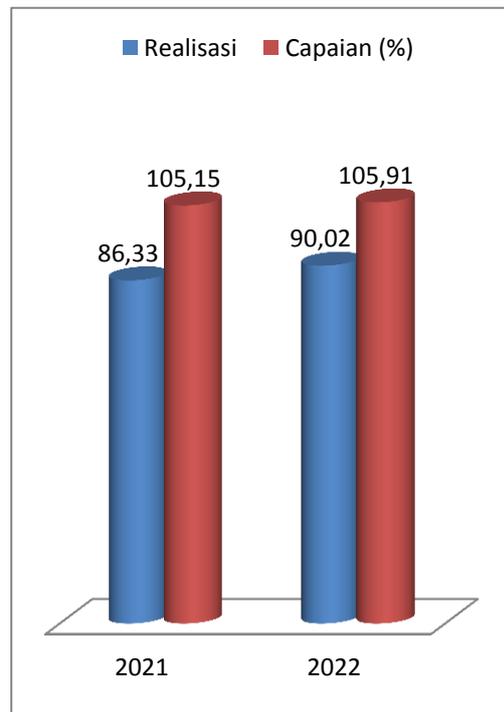
Tabel 3. 101 Predikat survei kepuasan Masyarakat

Nilai	Nilai Internal Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 - 88,30	B	Baik
4	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Sumber Permenpan No 14/2017

Capaian indikator indeks persepsi kualitas pelayanan publik tahun 2022 diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian 105,91%, merupakan capaian yang memuaskan dan di atas target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, capaian indeks persepsi kualitas layanan publik mengalami kenaikan 0,76% di tahun 2022. Sejalan dengan peningkatan capaian, indeks persepsi kualitas pelayanan tahun 2022 juga tercatat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021-2022 dapat dilihat grafik 105.

Grafik 105 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks persepsi kualitas pelayanan publik tahun 2021-2022

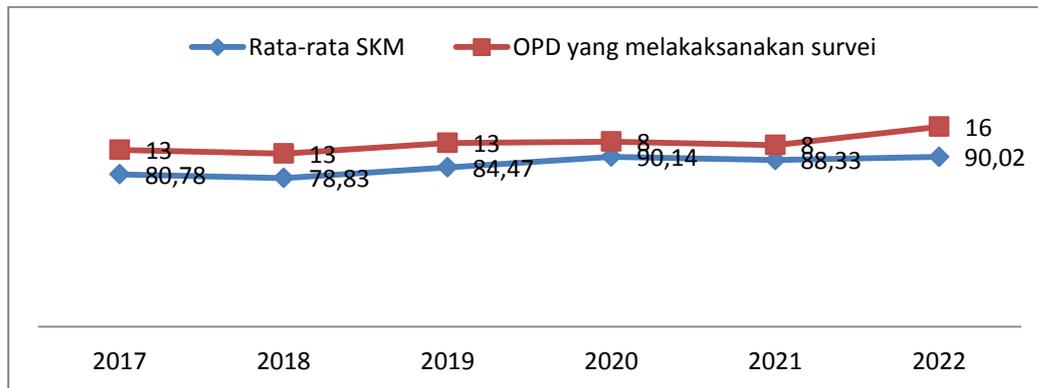


Sumber data: data diolah

Pencapaian indeks persepsi layanan publik yg sangat tinggi belum memberikan kepuasan kepada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik yg melakukan survei kepuasan masyarakat masih rendah yaitu 16 penyelenggara pelayanan publik atau 21,33% dari 75 penyelenggara pelayanan publik. Kondisi ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah kedepannya.

Gambaran indeks persepsi layanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik dalam dalam kurun waktu 6 tahun, menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Rata-rata berada pada interval Baik dan Sangat Baik. Sementara jumlah OPD yang melaksanakan SKM bervariasi setiap tahun dan tertinggi terjadi di tahun 2022. Perkembangan rata-rata survei dan UKPP yang melaksanakan survei dari tahun 2017-2022 disajikan pada grafik 106.

Grafik 106 Perkembangan rata-rata SKM dan OPD yang melaksanakan survei tahun 2017-2022



Sumber data: Biro Organisasi Setda Prov Sumbar

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan hal-hal berikut ini:

1. Secara Kontiniu meningkatkan kualitas SDM Penyelenggaraan pelayanan Publik
2. Meningkatkan evaluasi kepada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik untuk mengetahui hambatan/kendala dalam memberikan pelayanan.
3. Meningkatkan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan standar pelayanan publik, atau melakukan reuiu ulang terhadap standar prosedur pelayanan yang dibuat.
4. Mendorong agar unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan inovasi Pelayanan Publik (baik inovasi baru ataupun replika).
5. Mengoptimalkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui lapor sp4n (kanal 1708).

Faktor penghambat sulitnya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah:

1. Keterbatasan sumber daya baik sumber keuangan, aparatur, sarana prasarana dan lainnya.
2. Rendahnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik dalam memahami dan mengaplikasikan regulasi pelayanan publik.

3. Belum terbangunnya kolaborasi antara penyelenggara pelayanan publik, sehingga pelayanan publik satu pintu belum dapat diwujudkan.
4. Belum semua Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan maksimal.

Hambatan yang ditemui ke depannya akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui perangkat daerah yang menjadi *leading* sektor akan terus berupaya mempertahankan kualitas pelayanan publik minimal “Baik”.

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), Indeks persepsi kualitas pelayanan ditargetkan dapat tercapai 89 (predikat sangat baik). Dikarenakan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah minimal baik maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Upaya yang dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Memaksimalkan penyelesaian pengaduan yang masuk ke aplikasi SP4N LAPOR.
2. Memaksimalkan koordinasi dan pembinaan kepada unit kerja pelayanan publik.
3. Memperkuat peran Dinas komunikasi Informasi dan teknologi dalam membangun Inovasi pelayanan berbasis informasi dan teknologi .
4. Meningkatkan dan mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Nomor 70 dan 62 tahun 2016.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program dengan 18 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp **88.473.836.826,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Rincian

anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 7.1.3. dapat dilihat pada tabel 3.102.

Tabel 3. 102 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	18	88.473.836.826	82.969.250.802
1	Program Pelayanan Penghubung	1	4.273.558.498	4.143.153.051
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	7	82.417.761.172	77.057.179.992
3	Program Pendaftaran Penduduk	3	708.695.201	704.788.820
4	Program Pencatatan Sipil	3	399.116.928	394.550.925
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3	548.070.787	543.997.674
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	126.634.240	125.580.340

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **88.473.836.826,-** terealisasi sebesar Rp **82.969.250.802,-** atau 93,78%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 5.504.586.024,- (6,22%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik (105,91%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (93,78%) dengan tingkat efisiensi 12,13%.

3.4. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian 7 tujuan dengan 26 Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 6.639.308.547.776,- dengan penjelasan sebagai berikut:

1. APBDP-P tahun 2022 sebesar Rp. 6.639.308.547.776,- digunakan untuk mendukung pelaksanaan 160 Program dengan 327 Kegiatan. Dari APBDP-P tahun 2022 tersebut sebesar 46,05% (Rp. 3.057.258.370.241,-) mendukung pelaksanaan program terkait manajerial Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pelaksanaan Misi 7 Pemerintah Daerah (Sasaran 1).
2. Keterkaitan antara Anggaran dengan Sasaran diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 103 Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 26 sasaran tahun 2022

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	296.370.559.091	272.339.019.121	91,89
B	Menurunnya Prevalensi Stunting	149.200.136.562	143.998.981.119	96,51
C	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	683.393.351.406	675.797.474.679	98,89
D	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	16.955.585.876	16.675.377.133	98,35
E	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	82.543.358.825	78.198.545.760	94,74
F	Meningkatnya Budaya Literasi	1.019.023.350	998.911.770	98,03
G	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.057.966.986	6.811.244.765	96,50
H	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	293.981.711.347	258.964.731.860	88,09

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
I	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	22.757.232.046	21.352.626.990	93,83
J	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	37.137.573.430	32.862.627.876	88,49
K	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan	6.798.774.907	6.087.336.092	89,54
L	Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	11.428.804.825	10.882.770.219	95,22
M	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera	16.635.918.200	14.473.027.743	87,00
N	Terciptanya 100.000 Enterpreneur Dari Berbagai Sektor	6.457.499.965	6.282.929.900	97,30
O	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	3.975.157.931	3.949.861.693	99,36
P	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat	16.015.829.641	14.568.062.627	90,96
Q	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat	18.402.716.100	17.814.084.891	96,80
R	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	276.491.394.575	261.306.789.522	94,51
S	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	9.484.787.843	8.925.411.103	94,10
T	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	13.261.908.285	12.928.197.502	97,48
U	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	197.906.282.731	185.309.329.387	93,63
V	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	3.838.907.276	3.138.779.941	81,76
W	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	4.319.935.519.715	4.112.350.381.050	95,19
X	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	59.784.710.037	57.610.770.930	96,36
Y	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	88.473.836.826	82.969.250.802	93,78
		6.639.308.547.776	6.306.596.524.475	94,99

3. Berdasarkan tabel diketahui anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2022 berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. **6.639.308.547.776,-** terealisasi sebesar Rp. **6.306.596.524.475,-** atau **94,99%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 332.712.023.301,- (5,01%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 (112,82%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (**94,99%**) dengan tingkat efisiensi sebesar 17,83%.



BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan informasi akuntabilitas kinerja yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengevaluasi dan menganalisa pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja tujuan dan 46 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2022.
2. Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran tersebut pada tahun 2022, diperoleh rata-rata capaian sebesar 112,82% termasuk berhasil dengan kategori “memuaskan”, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3 tujuan dan 16 sasaran (57,58%) tercapai dengan kategori “memuaskan” dengan capaian (>100%);
 - b. 3 tujuan dan 6 sasaran tercapai dengan kategori sangat baik (> 85-100%);
 - c. 2 sasaran tercapai dengan kategori “baik” (>75 -85%);
 - d. 1 sasaran tercapai dengan kategori cukup dan
 - e. 1 tujuan dan 1 sasaran tercapai dengan kategori “kurang baik” yaitu sasaran “meningkatnya pertumbuhan investasi” menjadi sasaran dengan capaian terendah yaitu sebesar 13,17%.
3. Salah satu indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” yaitu Harapan lama sekolah pencapaiannya tahun 2022 telah mencapai target tahun terakhir RPJMD yaitu 14,1.
4. Dari 54 indikator kinerja yang mengukur tujuan dan sasaran ada 3 indikator yang realisasinya menggunakan realisasi tahun sebelumnya

(tahun 2021) yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Ketahanan Sosial Budaya dan Indeks Profesionalitas ASN.

4.2. Langkah Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang

Penguatan implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan selalu melakukan perbaikan secara terus menerus dalam memperbaiki implementasi SAKIP baik di level Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah. Perolehan Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan predikat BB sejak tahun 2015 menggambarkan masih banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kedepannya. Langkah-langkah peningkatan kinerja di masa yang akan datang yaitu:

1. Memaksimalkan peran pimpinan dalam mengawal implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah yang dipimpin.
2. Membangun *crosscutting* dan kolaborasi kinerja antar perangkat daerah agar sasaran dapat tercapai dengan maksimal.
3. Dalam menetapkan target indikator kinerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mempertimbangkan dan mempedomani realisasi indikator kinerja tahun sebelumnya.
4. Secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan monitoring terhadap implemmentasi SAKIP pada perangkat daerah.
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target yang sudah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
6. Mengawal anggaran program kegiatan agar efektif dan sesuai dengan sasaran yang akan dilaksanakan.
7. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi sakip pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



**HASIL PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN
VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN					
I MISI I					
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing					
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,74	73,26	100,71
	1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.1 Angka harapan hidup	69,8	69,9	100,14
	1.2 Menurunnya Prevalensi Stunting	1.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	18,44	25,2	63,34
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah	9,18	9,18	100,00
		1.3.2 Harapan lama sekolah	14,05	14,1	100,36
	1.4 Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke atas	49,7	50,23	101,07
II MISI 2					
Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara'					
1	Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,1	52,71	89,19
	1.1 Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,8	58,13	92,56
	1.2 Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	14,14	108,77

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN
1.3	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.3.1 Indeks Pembangunan	59,30	56,12	94,64
		1.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,11	94,34	100,24
		1.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,12	65,12	110,15
		1.3.4 Indeks Perlindungan Anak	65,85	61,98	94,12
III	MISI 3				
	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan				
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	1.1.1 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	5	6,53	130,60
1.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	100,99	110,37	109,29
		1.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani	103,47	108,85	105,20
		1.1.3 Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	47,175000	50,465580	106,98
		1.1.4 Pendapatan Nelayan	40,795000	41,661646	102,12
		1.1.5 Pendapan Peternak	47,872000	49,678125	103,77
		1.1.6 Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	5,00	9,94	198,80
1.2	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	79,13	79,45	100,40
1.3	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5,00	11,16	223,20
IV	MISI 4				
	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital				
1	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,25	16,5	101,54
		1.2 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,75	8,54	97,60
1.1	Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	-1,1	5,6	509,09
1.2	Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	368	289	78,53

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN
	1.3 Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera	1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,14	5,04	235,51
		1.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	2,40	1,60	66,67
	1.4 Terciptanya 100.000 Entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	112.594	115.149	102,27
	1.5 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase peningkatan Investasi di Provinsi	6,00	0,79	13,17
	1.6 Meningkatnya peran ekonomi	Kontribusi ekonomi digital	6,54	6,68	102,14
V	MISI 5				
	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata				
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12,62	4,31	34,11
	1.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Perekonomian Sumatera Barat	1.1.1 Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,24	1,35	108,87
	1.2 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	6,02	7,26	120,60
VI	MISI 6				
	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan				
1	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	1.1 Indeks Kinerja Infrastruktur	0,702	0,654	93,16
	1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1.1.1 Rasio Konektifitas	0,668	0,662	99,10
		1.1.2 Kemantapan Jalan	75,00	71,40	95,20
	1.2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0,64	103,23
	1.3 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,43	74,98	96,84

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN
1.4	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	1.1.1 Akses Air Minum	82,00	85,23	103,94
		1.1.2 Akses Sanitasi Layak	82,00	69,27	84,48
		1.1.3 Persentase Bangunan Strategis Terbangun	40,22	6	15
		1.1.4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi	70,36	71,06	100,99
		1.1.5 Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	53,78	58,73	109,20
		1.1.6 Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari Daya Rusak Air	66,51	66,9	100,59
		1.5	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	86,00
VII	MISI 7				
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas				
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	69	69,78	101,87
	1.1 Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	78	77,77	99,71
		1.1.2 Nilai EPPD	3,0010	3,0155	100,48
		1.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00
		1.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	37,84	46,50	122,89
	1.2 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1.1.1 Indeks SPBE	3,20	3,18	99,38
		1.1.2 Indeks Profesionalitas ASN	74,00	49,31	66,64
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	85,00	90,02	105,91
Rata-rata Capaian 7 tujuan dan 26 Sasaran					112,82





GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 2022

 **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MAHYELDI



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN				
I MISI I				
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing				
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,74	Lintas Perangkat Daerah
1.1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.1 Angka harapan hidup	69,8	D. Kesehatan, RSUD
1.2	Menurunnya Prevalensi Stunting	1.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	18,44	D. Kesehatan, RSUD
1.3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah 1.3.2 Harapan lama sekolah	9,18 14,05	D. Pendidikan D. Pendidikan
1.4	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke atas	49,7	D. Pendidikan D. Nakertrans
II MISI 2				
Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah				
1	Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,1	OPD terkait 8 Area
1.1	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,8	B. Kesbangpol, Satpol PP
1.2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	D. Kearsipan dan Perpustakaan
1.3	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga 1.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 1.3.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	59,30 94,11 59,12 65,85	D. P3AP2KB D. P3AP2KB D. P3AP2KB D. P3AP2KB

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
III	MISI 3			
	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan			
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	1.1.1 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	5	Lintas Perangkat Daerah Lingkup Pertanian
1.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP) 1.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) 1.1.3 Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta) 1.1.4 Pendapatan Nelayan 1.1.5 Pendapan Peternak 1.1.6 Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	100,99 103,47 47.175 40.795 47.872 5,00	Lintas Perangkat Daerah Lingkup Pertanian D. Kelautan dan Perikanan D. Peternakan dan Keswan D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.2	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	79,13	D. Pangan
1.3	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5,00	D. Kehutanan
IV	MISI 4			
	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital			
1	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 1.2 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	16,25 8,75	D. Perindustrian dan Perdagangan
1.1	Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1,1	D. Perindustrian dan Perdagangan
1.2	Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	368	D. Perindustrian dan Perdagangan
1.3	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera	1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi 1.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	2,14 2,40	D. Koperasi dan UKM D. Koperasi dan UKM
1.4	Terciptanya 100.000 Enterpreneur dari berbagai sektor	Jumlah enterpreneur baru tercipta	112.594	Lintas OPD
1.5	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase peningkatan Investasi di Provinsi	6,00	D. Penanaman Modal dan PTSP
1.6	Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	6,54	Lintas OPD

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
V	MISI 5			
	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan			
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12,62	D. Pariwisata
1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Perekonomian Sumatera Barat	1.1.1 Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,24	D. Pariwisata
1.2	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	6,02	D. Pariwisata
VI	MISI 6			
	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
1	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	1.1 Indeks Kinerja Infrastruktur	0,702	Lintas OPD
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1.1.1 Rasio Konektifitas	0,668	D. Perhubungan
		1.1.2 Kemantapan Jalan	75,00	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang
1.2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,62	B. Penanggulangan Bencana Daerah
1.3	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,43	D. Lingkungan hidup
1.4	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	1.1.1 Akses Air Minum	82,00	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang
		1.1.2 Akses Sanitasi Layak	82,00	
		1.1.3 Persentase Bangunan Strategis Terbangun	40,22	
		1.1.4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi	70,36	D. Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		1.1.5 Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	53,78	
		1.1.6 Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari Daya Rusak Air	66,51	
1.5	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	86,00	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
VII	MISI 7			
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas			
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	69	Biro Organisasi
1.1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (77,00)	Biro Organisasi
		1.1.2 Nilai EPPD	3,0010	Biro Pemerintahan
		1.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	B. Pengelolaan Keuangan
		1.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	37,84	B. Pendapatan Daerah
1.2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1.1.1 Indeks SPBE	3,20	D. Komunikasi Informatika dan Statistik
		1.1.2 Indeks Profesionalitas ASN	74,00	B. Kepegawaian Daerah
1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	85,00	Biro Organisasi

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	296.370.559.091	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	228.906.745.690	D. Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.161.202.550	
3	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	89.283.850	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.343.135.933	
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	34.634.507.880	D. Pemuda & Olahraga
6	Program Rehabilitasi Sosial	27.235.683.188	D. Sosial
B	Menurunnya Prevalensi Stunting	149.200.136.562	
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	139.681.995.113	D. Perkimtan
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	9.518.141.449	D. Pemberdayaan
C	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	683.393.351.406	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	680.595.978.296	D. Pendidikan
2	Program Pengembangan Kurikulum	331.702.960	
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	915.670.150	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.550.000.000	D. Pemuda & Olahraga
D	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	16.955.585.876	
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	8.333.156.061	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	232.276.490	
3	Program Hubungan Industrial	416.843.300	
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	722.691.600	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN	
5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	137.394.000	D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	174.162.175		
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	150.288.900		
8	Program Penataan Desa	24.482.000		
9	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.222.528.753		
10	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.541.762.597		
E	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	82.543.358.825		
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	977.000.000	B. Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya	6.534.139.200		
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	540.000.000		
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	905.000.000	Satpol PP	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.225.749.900		
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.130.066.627		
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	125.000.000		
8	Program Pengembangan Kebudayaan	9.177.650.475		D. Kebudayaan
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.685.868.656		
10	Program Pembinaan Sejarah	444.595.770	Sekretariat Daerah D. Sosial	
11	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	135.000.000		
12	Program Pengelolaan Permuseuman	2.135.093.390		
13	Program Kesejahteraan Rakyat	33.228.717.798		
14	Program Pemberdayaan Sosial	7.880.310.059		
15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.300.886.500		
16	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	118.280.450		
F	Meningkatnya Budaya Literasi	1.019.023.350		
1	Program Pembinaan Perpustakaan	940.373.650	D. Perpustakaan dan Kearsipan	
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	78.649.700		
G	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.057.966.986		
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	273.460.000	D. Pemberdayaan Perempuan	
2	Program Pengendalian Penduduk	143.638.000		
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	143.318.650		
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	290.770.000		
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3.283.412.611		
6	Program Perlindungan Perempuan	322.573.850		
7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	128.899.300		
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	281.141.150		
9	Program Perlindungan Khusus Anak	2.190.753.425		
H	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	293.981.711.347		
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	150.455.613.899	D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	56.813.585.563		
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.276.676.300	D. Peternakan dan Kesehatan Hewan	
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	638.515.100		

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
5	Program Penyuluhan Pertanian	12.422.688.953	
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	4.927.066.241	
7	Program Perizinan Usaha Pertanian		
8	Program Penyuluhan Pertanian		
9	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.018.151.350	D. Kelautan dan Perikanan
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	42.206.525.926	
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.581.201.055	
12	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.427.218.450	
13	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	6.214.468.510	
I	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	22.757.232.046	
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9.868.172.636	D. Pangan
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.000.172.715	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	8.888.886.695	
J	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	37.137.573.430	
1	Program Pengelolaan Hutan	23.252.624.460	D. Kehutanan
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	225.402.500	
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	13.109.546.470	
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	550.000.000	
K	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan	6.798.774.907	
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	105.931.450	D. Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	310.762.000	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	340.941.850	
4	Program Pengembangan Ekspor	754.508.500	
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2.930.005.516	
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.356.625.591	
L	Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	11.428.804.825	
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	11.204.907.229	D. Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	147.246.346	
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	76.651.250	
M	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera	16.635.918.200	
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	41.057.800	D. Koperasi dan UMKM
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	280.634.950	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	46.365.000	
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	5.891.964.000	
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	4.154.065.450	
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.276.838.500	
7	Program Pengembangan UMKM	3.944.992.500	
N	Terciptanya 100.000 Entrepreneur Dari Berbagai Sektor	6.457.499.965	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.457.499.965	D. Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
O	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	3.975.157.931	
	1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	728.317.000	D. Penanaman Modal dan PTSP
	2 Program Promosi Penanaman Modal	729.123.550	
	3 Program Pelayanan Penanaman Modal	1.467.706.650	
	4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	996.522.731	
	5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	53.488.000	
P	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat	16.015.829.641	
	1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.772.604.600	D. Pariwisata
	2 Program Pemasaran Pariwisata	9.243.225.041	
Q	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat	18.402.716.100	
	1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3.272.229.500	D. Pariwisata
	2 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15.130.486.600	
R	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	276.491.394.575	
	1 Program Penyelenggaraan Jalan	272.058.925.993	D. Bina Marga, Cipta Karya & Tata Ruang
	2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.718.357.794	D. Perhubungan
	3 Program Pengelolaan Pelayaran	623.939.538	
	4 Program Pengelolaan Perkeretaapian	90.171.250	
S	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	9.484.787.843	
	1 Program Penanggulangan Bencana	8.339.881.537	B. Penanggulangan
	2 Program Penanganan Bencana	1.144.906.306	D. Sosial
T	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	13.261.908.285	
	1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	160.900.300	D. Lingkungan Hidup
	2 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.665.376.800	
	3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	421.872.000	
	4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.263.876.600	
	5 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	129.597.900	
	6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh	40.005.000	
	7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.921.532.000	
	8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	88.666.000	
	9 Program Pengelolaan Persampahan	6.087.721.685	
	10 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	145.000.000	
	11 Program Pengelolaan Energi Terbarukan	337.360.000	D. Energi Sumber Daya Mineral
U	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	201.745.190.007	
	1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.660.337.809	D. BMCKTR
	2 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	718.855.760	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	357.743.700	D. BMCKTR
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.447.874.640	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	46.996.074.573	
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.604.917.554	
7	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	5.740.285.559	D. Energi Sumber Daya Mineral
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	122.722.788.846	D. Sumber Daya Air & Bina Kontruksi
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.351.198.000	
10	Program Pengembangan Perumahan	1.330.066.900	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan
11	Program Kawasan Permukiman	10.976.139.390	
12	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	150.000.000	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	213.000.000	
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	92.000.000	
15	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	65.000.000	
16	Program Penetapan Tanah Ulayat	50.000.000	
17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.268.907.276	D. BMCKTR
W	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	4.319.935.519.715	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.230.603.146.189	B. Pengelolaan Keuangan
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.692.880.050	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.553.898.286	B. Pendapatan Daerah
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.623.043.609	Inspektorat Daerah
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.173.377.372	
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.836.496.583	B. Pembangunan Daerah
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.049.235.444	
8	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.123.976.265	Sekretariat Daerah
9	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	2.203.583.000	
10	Program Penataan Organisasi	2.860.439.918	
11	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.957.072.758	
12	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	3.057.258.370.241	
X	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	59.784.710.037	
1	Program Kepegawaian Daerah	15.949.026.156	B. Kepegawaian Daerah
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.268.259.991	B. Pengembangan SDM
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	13.212.081.038	D. Komunikasi, Informatika
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.949.577.192	
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	686.800.027	
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	691.880.000	
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.044.495.332	Sekretariat Daerah
8	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.102.020.404	
9	Program Pengelolaan Arsip	497.036.778	D. Perpustakaan dan
10	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	58.194.000	
11	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.325.339.119	B. Penelitian dan

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Y	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	88.473.836.826	
1	Program Pelayanan Penghubung	4.273.558.498	Badan Penghubung
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	82.417.761.172	Sekretariat DPRD
3	Program Pendaftaran Penduduk	708.695.201	Dinas Kependudukan dan
4	Program Pencatatan Sipil	399.116.928	Catatan Sipil
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	548.070.787	
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	126.634.240	
TOTAL		6.639.308.547.776	


GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI